REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

I.	Nomor dan tanggal permohonan	:	C00201600823, 08 Maret 2016
II.	Pencipta		
	Nama	:	**DR. HADRI MULYA, S.E., M.Si.**
	Alamat	:	Komplek Kodam Jaya Blok G/10 Rt.002 Rw.002 Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
III.	Pemegang Hak Cipta		
	Nama	:	**DR. HADRI MULYA, S.E., M.Si.**
	Alamat	:	Komplek Kodam Jaya Blok G/10 Rt.002 Rw.002 Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
IV.	Jenis Ciptaan	:	Buku
V.	Judul Ciptaan	:	**METODE PENELITIAN KUALITATIF AKUNTANSI HARTA ERA SULTAN SYARIF KASIM KERAJAAN SIAK SRI INDERAPURA RIAU (1908-1946)**
VI.	Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	31 Oktober 2014, di Jakarta
VII.	Jangka waktu perlindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
VIII.	Nomor pencatatan	:	078621

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

HKI. 2-01-000007971

METODE PENELITIAN KUALITATIF

Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908-1946)

Hadri Mulya
Eko Ganis Sukoharsono
Ali Djamhuri
Zaki Baridwan

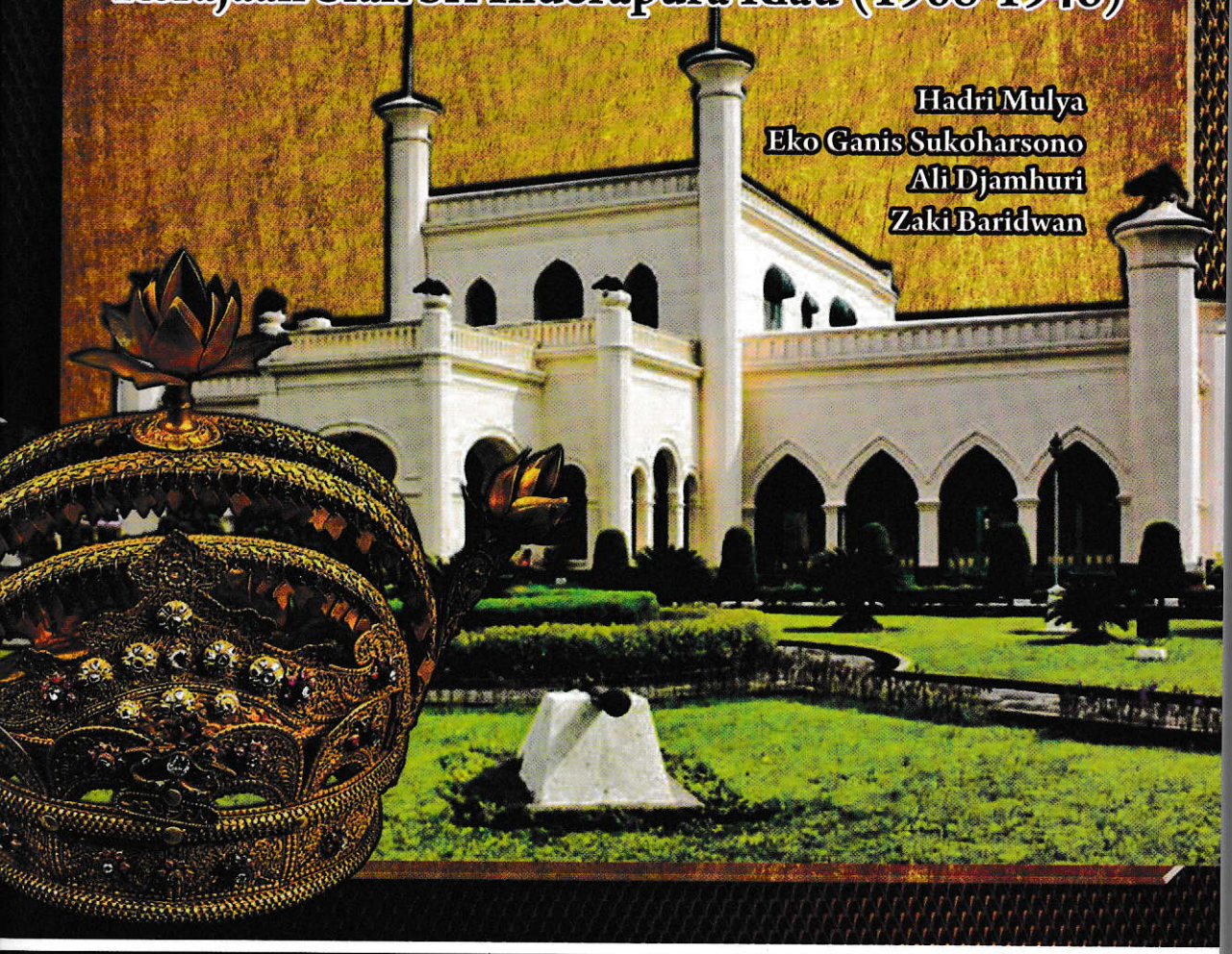

Mitra Wacana Media
Penerbit

METODE PENELITIAN KUALITATIF

Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908 - 1946)

Hadri Mulya
Eko Ganis Sukoharsono
Ali Djamhuri
Zaki Baridwan

Mitra Wacana Media
PENERBIT

METODE PENELITIAN KUALITATIF
Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim
Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908 - 1946)

Hadri Mulya
Eko Ganis Sukoharsono
Ali Djamhuri
Zaki Baridwan

Mitra Wacana Media
PENERBIT

Edisi Asli
Hak Cipta © 2016, Penerbit Mitra Wacana Media
Telp. : (021) 824-31931
Faks. : (021) 824-31931
Website : http//www.mitrawacanamedia.com
E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Mulya, Hadri
Sukoharsono, Eko Ganis
Djamhuri, Ali
Baridwan, Zaki

Metode Penelitian Kualitatif/
Hadri Mulya, Eko Ganis Sukoharsono, Ali Djamhuri, Zaki Baridwan

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016
1 jil., 17 x 24 cm, 251 hal.

ISBN: 979-602-318-148-3

1. Manajemen
I. Judul

2. Metode Penelitian Kualitatif
I. Hadri Mulya, Eko Ganis Sukoharsono, Ali Djamhuri, Zaki Baridwan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menerbitkan sebuah buku yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908-1946). Rasa syukur yang mendalam kami ungkapkan kehadirat Allah SWT, karena sudah menjadi rencana awal bahwa penulisan buku ini diharapkan dapat dipublikasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Melayu Riau. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu sumbangan penulis kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Melayu Riau sebagai sebuah cermin untuk para generasi muda dan generasi selanjutnya tentang nilai-nilai masa lalu yang harus terus dijaga kelangsungannya.

Penulisan buku ini berawal dari sebuah ide untuk mengangkat nilai-nilai ilmu pengetahuan yang berasal dari negeri sendiri (*local wisdom*). Disadari bahwa terlalu banyak kandungan nilai-nilai ilmu pengetahuan masa lalu tersia-sia oleh karena masyarakat sendiri khususnya masyarakat berilmu yang mengabaikan kandungan nilai-nilai tersebut. Bentuk pengabaian tersebut terbukti dari masih sedikitnya para ilmuan lokal yang mau dan merealisasikan penelitiannya pada explorasi nilai-nilai berbagai ilmu pengetahuan yang sebenarnya ada, terkecuali terbatas hanya pada ilmu pengetahuan tertentu saja. Ilmu pengetahuan tertentu dimaksud adalah hanya pada tataran sejarah budaya seperti sejarah peperangan, budaya penyelenggaraan perkawinan, budaya penyelenggaraan sunatan, tata cara peringatan hari besar Islam dan budaya lainnya yang berkembang di masyarakat masa lalu. Padahal nilai-nilai ilmu

Isi buku ini disajikan dalam 10 bab yang setiap judul bab disajikan dalam kemasan bahasa bebas dengan atmosfir ke Melayuan. Berikut diuraikan secara singkat tentang muatan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab 1 Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian dengan menguraikan berbagai perspektif teori. Akhir dari bab I ditutup dengan penjelasan tentang fokus kajian penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian.

Bab 2 Menjelaskan tentang kerangka metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian. metode penelitian sejarah, metode penelitian yang digunakan, cara pengumpulan data, metode analisis, penjelasan tentang situs penelitian dan informan penelitian.

Bab 3 Menguraikan tentang kepustakaan yang berkaitan dengan teori penelitian sejarah, elemen sejarah, dan filsafat sejarah. Rangkaian pembahasan ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan antara teori dan praktek sistem kerajaan di Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Bab 4 Menyajikan tentang histori Kerajaan Siak Sri Inderapura yang penyajiannya diawali dari bagaimana perburuan harta kerajaan masa lalu. Pembahasan sub bahasan tersebut untuk melihat benang merah asal muasal Kerajaan Siak Sri Inderapura, sehingga dapat memberikan gambaran tentang konsep harta.

Bab 5 Menyajikan bahasan tentang identifikasi peralihan harta antar Sultan Siak Sri Inderapura. Pada bab ini, telah ditemukan konsep harta yang dijalankan oleh sultan-sultan Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Bab 6 Diberi judul menelisik cikal bakal perlakuan akuntansi era Sultan Syarif Kasim II. Pada bab ini telah teridentifikasi awal dari kegiatan akuntansi era Sultan Syarif Kasim II.

Bab 7 Diberi judul integritas hak dan kewjiban serta pertanggungjawaban Sultan Syarif Kasim II. Bab ini merupakan bab yang sangat menarik karena menjelaskan bagaimana integritas seorang Raja Siak yang sangat berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya.

Bab 8 Diberi judul mengungkap episteme akuntansi yang berisi penyajian tentang sistem akuntansi harta, peralihan dari Sultan Syarif Hasyim ke Sultan Syarif Kasim II.

Bab 9 Merupakan analisis interpretasi penulis mengenai nilai akuntansi era Sultan Syarif Kasim. Disadari bahwa untuk mendapatkan dokumentasi praktek yang terkait dengan akuntansi tidaklah mudah. Oleh sebab itu, disamping ada sedikit dokumen yang dapat menjelaskan praktek akuntansi, juga ditekankan pada pembahasan tentang nilai-nilai dari tindakan dan pemikiran sultan syarif kasim yang sangat syarat dengan akuntansi.

Bab 10 Yang diberi judul "penutup" merupakan bab terakhir dari buku ini yang menyajikan kesimpulan tentang pandangan Sultan Syarif Kasim terhadap harta, konsep pengukuran harta, kebijakan penggunaan harta, bangunan sistem akuntansi dalam Pemerintahan, Pengendalian Internal, Standar Pengelolaan Harta, Struktur Pemerintahan, Regulasi Pengelolaan Harta, Integritas Hak dan Kewajiban Serta Pertanggungjawabannya, Awal Munculnya Konsep Harta, dan Cara Perburuan Harta Sebelum Era Sultan Syarif Kasim. Selanjutnya bab ini menyajikan bahasan tentang Implikasi Hasil Penelitian secara Teoritik dan Praktis. Penyajian diakhir dengan sub bab pengakuan atas Keterbatasan Penelitian.

Mitra Wacana Media
Penerbit

ISBN 978-602-318-148-3
9 786023 181483

METODE PENELITIAN KUALITATIF

Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908-1946)

Hadri Mulya
Eko Ganis Sukoharsono
Ali Djamhuri
Zaki Baridwan

Mitra Wacana Media

METODE PENELITIAN KUALITATIF

Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908 - 1946)

Hadri Mulya
Eko Ganis Sukoharsono
Ali Djamhuri
Zaki Baridwan

Mitra Wacana Media
PENERBIT

METODE PENELITIAN KUALITATIF
Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim
Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908 - 1946)

Hadri Mulya
Eko Ganis Sukoharsono
Ali Djamhuri
Zaki Baridwan

Mitra Wacana Media
PENERBIT

Edisi Asli
Hak Cipta © 2016, Penerbit Mitra Wacana Media
Telp. : (021) 824-31931
Faks. : (021) 824-31931
Website : http//www.mitrawacanamedia.com
E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Mulya, Hadri
Sukoharsono, Eko Ganis
Djamhuri, Ali
Baridwan, Zaki

Metode Penelitian Kualitatif/
Hadri Mulya, Eko Ganis Sukoharsono, Ali Djamhuri, Zaki Baridwan

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016
1 jil., 17 x 24 cm, 251 hal.

ISBN: 979-602-318-148-3

1. Manajemen
I. Judul

2. Metode Penelitian Kualitatif
I. Hadri Mulya, Eko Ganis Sukoharsono, Ali Djamhuri, Zaki Baridwan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menerbitkan sebuah buku yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908-1946). Rasa syukur yang mendalam kami ungkapkan kehadirat Allah SWT, karena sudah menjadi rencana awal bahwa penulisan buku ini diharapkan dapat dipublikasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Melayu Riau. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu sumbangan penulis kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Melayu Riau sebagai sebuah cermin untuk para generasi muda dan generasi selanjutnya tentang nilai-nilai masa lalu yang harus terus dijaga kelangsungannya.

Penulisan buku ini berawal dari sebuah ide untuk mengangkat nilai-nilai ilmu pengetahuan yang berasal dari negeri sendiri (*local wisdom*). Disadari bahwa terlalu banyak kandungan nilai-nilai ilmu pengetahuan masa lalu tersia-sia oleh karena masyarakat sendiri khususnya masyarakat berilmu yang mengabaikan kandungan nilai-nilai tersebut. Bentuk pengabaian tersebut terbukti dari masih sedikitnya para ilmuan lokal yang mau dan merealisasikan penelitiannya pada explorasi nilai-nilai berbagai ilmu pengetahuan yang sebenarnya ada, terkecuali terbatas hanya pada ilmu pengetahuan tertentu saja. Ilmu pengetahuan tertentu dimaksud adalah hanya pada tataran sejarah budaya seperti sejarah peperangan, budaya penyelenggaraan perkawinan, budaya penyelenggaraan sunatan, tata cara peringatan hari besar Islam dan budaya lainnya yang berkembang di masyarakat masa lalu. Padahal nilai-nilai ilmu

pengetahuan lainnya diyakini ada seperti bidang kedokteran, kefarmasian, teknologi, hukum, ekonomi dan ilmu pengetahuan lainnya termasuk akuntansi.

Logika yang digunakan untuk memperkuat keyakinan adanya nilai-nilai ilmu pengetahuan tersebut sebenarnya sangat sederhana. Adanya nilai-nilai ilmu kedokteran mudah di yakini karena tidak ada manusia masa lalu yang musnah karena tidak bisa sembuh dari penyakit. Nilai-niai kefarmasian mudah diyakini karena banyak masyarakat masa lalu sembuh berobat meskipun tingkat ketersediaan obat-obatan dari sisi jumlah dan variasinya masih sangat terbatas. Nilai-nilai teknologi diyakini ada karena selalu saja muncul sebuah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat masa lalu dalam memenuhi kebutuhannya. Nilai-nilai hukum diyakini ada karena tidak ada masyarakat masa lalu yang dapat berbuat seenaknya sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nilai-nilai ekonomi diyakini ada karena sejak adanya manusia, tidak ada yang bisa bertahan hidup tanpa usaha dan terakhir nilai-nilai ilmu akuntansi diyakini ada karena saat ini masih terdapat banyak harta yang bernilai tinggi dari masyarakat masa lalu. Adanya kenyataan ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan episteme ilmu pengetahuan. Episteme ilmu pengetahuan adalah pengetahuan-pengetahuan yang muncul pada suatu masa untuk memecahkan berbagai masalah pada masa itu. Setiap masa ada saja ilmunya dan setiap ilmu pengetahuan memiliki masanya. Masalahnya sekarang adalah adakah kita mau menggali ilmu pengetahuan dari episteme masa lalu dari masyarakat kita sendiri?. Buku yang berasal dari hasil penelitian ini paling tidak sudah menjawab pertanyaan tersebut.

Buku ini terdiri dari pokok bahasan yang meliputi muara kajian dengan menapak pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan bahasan tentang Strategi Berlayar Temukan Makna yang berisi tentang metodologi penelitian. Pada bagian selanjutnya dibahas tentang Berlayar Menyusuri Pelabuhan Pustaka Dan Dermaga Teori sebagai landasan yang menjelaskan tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab selanjutnya merupakan bab hasil proses penelusuran sumber yang menyajikan tentang Kerajaan Sebelum Siak Sri Inderapura.

Pembahasan tentang Identifikasi Peralihan Harta Antar Sultan Siak Sri Inderapura disajikan pada bahasan selanjutnya sampai kepada Menelisik cikal-bakal perlakuan akuntansi era Sultan Syarif Kasim II dalam bab terpisah. Bagian berikutnya merupakan bahasan hasil interpretif tentang Integritas Hak dan Kewajiban Serta Pertanggungjawaban Sultan Syarif Kasim II dan pembahasan tentang Episteme Akuntansi yang merupakan bagian hasil konstruksi akuntansi. Bahasan selanjutnya dipertajam dengan mengungkapkan Nilai-Nilai Akuntansi Era Sultan Syarif Kasim dan diakhiri dengan penutup pada bab sepuluh.

Penulis sangat menyadari bahwa kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi tanpa disadari masih dirasakan banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar buku ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2016

Penulis

B.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii
BAB 1 MUARA KAJIAN DENGAN MENAPAK PENDAHULUAN 1
1.1. Interaksi Manusia Sebagai Muara Ilmu Sosial 1
1.2. Layar Terkembang Pemikiran Akuntansi 2
1.3. Gelombang Harapan, Kecaman dan Pergeseran Paradigma Akuntansi 5
1.4. Pengertian Akuntansi Harta Dalam Konteks Penelitian 7
1.5. Kajian Akuntansi Dengan Perspektif Sejarah 9
1.6. Aroma Akuntansi Pendorong Hasrat Penelitian 11
1.7. Fokus Kajian Penelitian 13
1.8. Perumusan Masalah 14
1.9. Tujuan Penelitian 14
1.10. Kontribusi Penelitian 15

BAB 2 STRATEGI BERLAYAR TEMUKAN MAKNA 17
2.1. Menapak Pendahuluan 17
2.2. Sebuah Kajian Ilmu Masa Lalu 19
2.3. Metode Penelitian 20

2.4. Mengkonstruksi Akuntansi Harta Dengan Perspektif Sejarah ... 25
2.5. Menangkap Data Penelitian 29
2.6. Metode Analisis 32
2.7. Situs Penelitian 36
2.8. Informan Penelitian 39
2.9. Keabsahan Data 41

BAB 3 BERLAYAR MENYUSURI PELABUHAN PUSTAKA DAN DERMAGA TEORI 43
3.1. Sekapur Sirih Penelitian Akuntansi Masa Lampau 43
3.2. Elemen Sejarah 44
3.3. Filsafat Sejarah 45
3.4. Sistem Kerajaan 47
3.5. Kewajiban dan Hak Raja 48
3.6. Kerajaan Siak Sri Inderapura di Tengah Kekuatan Asing 50
3.7. Pengertian Harta Dalam Perspektif Akuntansi 51
3.8. Sifat Harta Dalam Perspektif Akuntansi 52
3.9. Pengukuran Harta Menurut Akuntansi 53
3.10. Penilaian Harta 55
3.11. Akuntabilitas Pengungkapan Harta 56
3.12. Selayang Pandang Tentang Harta Dalam Perspektif Islam 58
3.13. Selayang Pandang Sumber Mengalirnya Harta Kerajaan Siak 60
3.14. Sejarah Akuntansi Harta 62
3.15. Kesepakatan Raja Dan Rakyat Mengenai Harta 64
3.16. Akuntansi Harta Dalam Perspektif Multi Paradigma 65
3.17. Kesimpulan 66

BAB 4 MENYUSURI CARA PERBURUAN HARTA KERAJAAN SEBELUM SIAK SRI INDERAPURA 69
4.1. Merangkai Perburuan Harta Pendahuluan 69
4.2. Raja Asyhar-Aya Sebagai Nenek Moyang Pendiri Kerajaan Siak 70
4.3. Raja Sang Nila Utama Pendiri Negeri Singapura 72
4.4. Perdebatan Sejarah Tentang Raja Melaka 74
4.5. Asal Muasal Kerajaan Siak Sri Inderapura Yang Terdekat 76
4.6. Tempat Raja Kecil di Besarkan 78

4.7. Kembali Ke Johor 79
4.8. Kesimpulan 81

BAB 5 IDENTIFIKASI PERALIHAN HARTA ANTAR SULTAN SIAK SRI INDERAPURA 83
5.1. Merintis Harta Pendahuluan 83
5.2. Perkembangan Harta Masa "Sultan Abdul Jalil Rakhmad Syah (1723 M – 1746 M)" 84
5.3. Perkembangan Harta Masa "Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah (1746 – 1765 M)". 87
5.4. Perkembangan Harta Masa "Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Syah (1765 -1766 M)". 88
5.5. Perkembangan Harta Masa "Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1766 – 1780 M)". 89
5.6. Perkembangan Harta Masa "Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah (1780 – 1782 M)". 92
5.7. Perkembangan Harta Masa "Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah (1782–1784 M)" 93
5.8. Perkembangan Harta Masa "Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifudin Baalawi (1784 – 1810 M)" 93
5.9. Perkembangan Harta Masa "Sultan Assyaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin (1810 – 1815 M)" 95
5.10. Perkembangan Harta Masa "Sultan Assyaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin (1815 – 1864 M) 95
5.11. Perkembangan Harta Masa "Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (1864 – 1889M) 97
5.12. Perkembangan Harta Masa "Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin (1889 – 1908 M) 99
5.13. Perkembangan Harta Masa "Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (1815 – 1946 M) 101
5.14. Kesimpulan 103

BAB 6 MENELISIK CIKAL-BAKAL PERLAKUAN AKUNTANSI ERA SULTAN SYARIF KASIM II 105
6.1. Awal Kesultanan Syarif Kasim II 105
6.2. Masa Pendidikan 106

6.3. Konsekuensi Pengangkatan Sultan Syarif Kasim 108
6.4. Sikap Sultan Syarif Kasim Menghadapi Situasi Saat Memimpin . 111
6.5. Memimpin Dengan Agama dan Pendidikan 114
6.6. Memimpin Dalam Kekangan Jepang 115
6.7. Aktivitas Ekonomi Sultan Syarif Kasim 116
6.8. Rapat Keuangan Bermuara Dari Pengembangan Pendidikan 119
6. 9. Rencana Tahunan, Rapat Keuangan Dan Akuntansi 120
6.10. Kesimpulan 121

BAB 7 INTEGRITAS HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN SULTAN SYARIF KASIM II 125
7.1. Awal Mengalirnya Kepercayaan 125
7.2. Kepribadian Sang Raja 126
7.3. Harta Kerajaan/Sultan 129
7.4. Kewajiban Terhadap Rakyat Kerajaan 133
7.5. Kewajiban Terhadap Rakyat Indonesia 135
7.6. Pertanggungjawaban "Mahkota Raja" 136
7.7. Pertanggungjawaban "Istana Asserayatul Hasyimiah" 138
7.8. Pertanggungjawaban "Lembaga Pendidikan" 139
7.9. Pertanggungjawaban "Benda Peninggalan" 144
7.10. Pertanggungjawaban "Kepercayaan" 149
7.11. Pertanggungjawaban "Kekuasaan" 151
7.12. Pertanggungjawaban "Pengetahuan" 152
7.13. Pertanggungjawaban "Kesaktian" 153
7.14. Kesimpulan 154

BAB 8 MENGUNGKAP EPISTEME AKUNTANSI 157
8.1. Menapak Langkah Pendahuluan 157
8.2. Sistem Akuntansi Harta 158
8.3. Sultan Syarif Kasim II 166
8.4. Kesimpulan 182

BAB 9 NILAI-NILAI AKUNTANSI ERA SULTAN SYARIF KASIM 185
9.1. Penyederhanaan Elemen Sistem Pemerintahan Sultan 185
9.2. Pengendalian Internal Dalam Sistem Pemerintahan 187
9.3. Regulasi atas Akuntansi Pengelolaan Tanah Kerajaan Siak 188

9.4. Bentuk Pertanggungjawaban Sultan 191
9.5. Akuntansi Perolehan Harta 193
9.6. Surat Wakaf Sebagai Standar Perlakuan Akuntansi Harta 194
9.7. Kesimpulan 195

BAB 10 PENUTUP 197
10.1. Kesimpulan 197
10.2. Implikasi Hasil Penelitian 203
10.3. Keterbatasan Penelitian 204

DAFTAR PUSTAKA 205
DAFTAR ISTILAH 219
LAMPIRAN 221
TENTANG PENULIS 235

BAB 1

MUARA KAJIAN DENGAN MENAPAK PENDAHULUAN

1.1. INTERAKSI MANUSIA SEBAGAI MUARA ILMU SOSIAL

Sejarah sosial bermuara dari adanya saling interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dalam sebuah komunitas masyarakat. Interaksi ini terbentuk sebagai wujud dari sifat manusia sebagai mahkluk sosial. Interaksi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan tentang hakekat sosial yang berkaitan dengan sifat unik kehidupan sehari-hari. Hakekat sosial manusia dilihat dari asal (pencipta), sifat (manusia itu sendiri) dan tempatnya di alam (sifat alam semesta), telah menjadi salah satu pilar dari semua skema kehidupan, ideologi dan keyakinan beragama (Ansari, 1997, Maksum, 2011). Dorongan interaksi antar individu-individu dalam suatu komunitas yang terbentuk sejak lahir, menghasilkan berbagai macam bentuk praktik sosial dan budaya. Oleh karena itu manusia akan menunjukkan berbagai potensinya jika berada dalam suatu komunitas masyarakat.

Fenomena sosial yang berasal dari hasil interaksi antar sesama individu, kelompok dan masyarakat dalam suatu komunitas dapat melahirkan ragam Ilmu sosial dalam berbagai konteksnya, sehingga muncul berbagai macam literatur yang terkait dengan ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan kemasan yang berisi teori-teori berupa sistem pernyataan umum atau proposisi tentang fenomena (Appelrouth dan Adles, 2007). Kemasan teori didasarkan pada argumentasi logis atau koheren dari sebuah kenyataan lapangan (Deegan, 2004). Ilmu sosial yang dilahirkan dari berbagai kajian sosial mengalami suatu perjalanan panjang, karena sebagian besar para ahli ilmu sosial

khususnya sejarah berpendapat bahwa munculnya sebuah teori sosial saat ini, selalu memiliki keterkaitan dengan pemikiran masa lampau.

Sumber kajian sosial masa lampau dapat ditelusuri dengan berbagai penyelidikan seperti penyelidikan sejarah, antropologi dan arkeologi. Salah satu penyelidikan arkeologi yang memiliki hubungan dengan akuntansi, berkaitan dengan penyelidikan tentang kekayaan. Penyelidikan arkeologi menunjukkan bahwa pencarian kekayaan dan praktik yang terkait dengan akuntansi untuk kekayaan telah menjadi bagian integral dari sejarah manusia dari periode yang paling awal manusia mengenal pencatatan (Baker, 2004). Berbagai informasi tentang awal pencatatan terungkap dalam catatan akuntansi yang tertulis pada tablet tanah liat Mesopotamia, atau tercermin dalam arsip seperti Kode Hammurabi, atau memberikan kesaksian perjalanan Alkitab tentang kehidupan Abraham. Informasi ini diperoleh melalui Investigasi kepurbakalaan yang bertujuan untuk mencari bukti fisik dan penafsirannya yang dapat membantu dalam memahami secara lebih baik tentang aktivitas manusia dalam budaya sebelumnya.

Dinamika pemikiran ilmu sosial berkembang begitu luasnya dan tidak terbatas pada beberapa aspek saja, karena munculnya fenomena sosial dapat berasal dari mana saja dan dalam bentuk apa saja. Banyak literatur dari berbagai disiplin seperti sosiologi, antropologi, atau psikologi, yang lebih memberikan informasi kepada pembacanya tentang berbagai pendekatan dan tren teoritis daripada memperlihatkan kesatuan pengertian antar mereka (Alasuutari, 2004). Muara ilmu sosial berawal dari interaksi yang terjadi di antara masyarakat dengan berbagai macam bentuknya yang sangat beragam. Salah satu bagian dari ilmu sosial yang mengalami perkembangan intelektual dari waktu ke waktu adalah ilmu akuntansi. Perkembangan ilmu akuntansi dapat dilihat dari berbagai perubahan pengertiannya dari waktu ke waktu.

1.2. LAYAR TERKEMBANG PEMIKIRAN AKUNTANSI

Nama Friar Luca Pacioli dikenal sebagai pahlawan akuntansi karena bukunya yang berjudul *Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita* yang ditulis pada tahun 1494 (Richardson, 2008). Buku ini merupakan buku matematika yang berisi bab tentang pembukuan *double entry* atau tata buku berpasangan sebagai ilustrasi aplikasi praktis matematika. Tata buku berpasangan ini dikembangkan dari persamaan aljabar yang selanjutnya dikenal dengan persamaan akuntansi. Berkaitan dengan *double-entry system*, Yamey (1964) mengatakan bahwa Sombart harus bertanggung jawab besar atas tesis yang dikenal secara luas dengan menyatakan bahwa akuntansi baik secara sistematik atau ilmiah yang diidentifikasi dengan *double-entry system*, memainkan peran penting dalam menyebarkan, mengaktifkan, merangsang atau mengutamakan *the rationalistic pursuit of unlimited profit* yang menjadi elemen dasar semangat kapitalis.

AC Littleton sebagaimana disitir Alexander (2002) menjelaskan terdapat 7 kunci utama mengapa pembukuan *double entry* dikembangkan di Italia pada abad ke-14, yaitu *Private property, Capital, Commerce, Credit, Writing, Money, dan Arithmetic.* Perkembangan akuntansi selanjutnya mengarah kepada pendefinisian akuntansi seperti yang dilakukan oleh AICPA. The *Committee On Terminology Of The AICPA* (1953) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

> *"Accounting is the art of recording, classifying, dan summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions dan events which are, in part at least, of a financial character, dan interpreting the results thereof".*

Definisi akuntansi tersebut menyatakan bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang serta menyajikan penginterpretasian hasil proses tersebut. Definisi oleh AICPA sesuai dengan kebutuhan saat itu yakni sebuah pertanggungjawaban hendaklah disajikan dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan unsur-unsur keindahan dari sisi bentuk penyajian, penggolongan dan menginterpretasikannya. Pengertian akuntansi yang ada pada perkembangan berikutnya mengalami perubahan yang lebih luas yakni merujuk kepada suatu ilmu pengetahuan. Grady (1965) mendefinifisian akuntansi sebagai berikut:

> *"Accounting is a body of knowledge and function concerned with systematic originating, authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting, dan supplying of dependable dan significant information covering transactions dan even which are, in part at least, of a financial character, required for the management and operation of an antity and for reports that have to be submitted thereon to meet fiduciary dan other responsibilities".*

Berdasarkan definisi akuntansi yang dikemukakan oleh Grady, Suwardjono (2006) memberikan pendapatnya dan menjelaskan bahwa akuntansi didefinisikan sebagai pengetahuan karena wilayah materi dan kegiatannya cukup luas dan dalam, serta telah membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk literatur akuntansi. Definisi akuntansi oleh Grady menegaskan keberadaan akuntansi sebagai sebuah ilmu pengetahuan pada saat itu. Penegasan ini tentu saja muncul sebagai tuntutan budaya saat itu tentang akuntansi. Setelah Grady mengemukakan definisi akuntansi melalui *Accounting Research Study No. 7*, selanjutnya berkembang pengertian baru yang dikemukakan oleh American Accounting Association (AAA). *American Accounting Association* memandang akuntansi secara lebih luas yakni sebagai alat komunikasi. Pengembangan definisi akuntansi oleh *American Accounting Association* (1977) terlihat dari definisi sebagai berikut: *the process of identifying,*

measuring, and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information. Tekanan definisi akuntansi terletak pada pengkomunikasian hasil pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh pengguna informasi tersebut. Definisi ini membuktikan bahwa budaya masyarakat pengguna akuntansi saat itu sudah menjadikan akuntansi sebagai alat untuk mengomunikasikan substansi dari apa yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut kepada para pemakai.

Definisi akuntansi oleh *American Accounting Association* (1977) merupakan pengertian terbaik akuntansi dari beberapa pengertian yang ada, karena fokus akuntansi adalah pada pengambilan keputusan (Anthony dan Reece, 1989). Perkembangan definisi akuntansi pada tahun selanjutnya terus berubah seperti yang dikemukakan oleh *Accounting Principles Board* (APB), yaitu salah satu badan yang bertugas untuk pengembangan akuntansi. Accounting Principles Board (APB) lebih menekankan pengertian akuntansi dari sisi konsep sistem. Definisi yang dikemukakan oleh APB (1970) sebagai berikut:

> "Akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan mengenai kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang ada".

Bagian akhir dari perubahan pengertian akuntansi yang dapat dikemukakan di sini terkait dengan akuntansi sebagai sebuah seni. Bierman (1987) mendefinisikan akuntansi secara gamblang sebagai seni pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan. Pengertian-pengertian akuntansi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, lembaga atau badan yang terkait langsung dengan pengembangan akuntansi telah berproses sesuai dengan kondisi budaya masyarakat pada saat definisi itu muncul. Proses budaya ini akan terus berlanjut dan turut memengaruhi perkembangan pengertian-pengertian akuntansi selanjutnya hingga saat ini. Akuntansi mengalami perkembangan arti sebagai akibat dari berbagai sudut pandang yang muncul, sehingga menghasilkan suatu pandangan yang sesuai dengan kondisi budaya saat itu. Hal ini telah diakui oleh Grady (1965) yang membahas masing-masing pengertian akuntansi sebelum merumuskan pengertian akuntansi yang telah disebutkan sebelumnya.

Ilmu akuntansi berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan dan budaya masyarakat itu sendiri. Chua (1986) mengatakan bahwa Pengetahuan akuntansi dihasilkan oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan tentang masyarakat serta untuk kepentingan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pendapat ini didukung oleh pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa Akuntansi merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat (Grojer dan Stark, 1977). Aktivitas ekonomi sebagai produk dari nilai-nilai sosial menjadi tempat

berkembangnya akuntansi, sehingga dalam setiap perubahan ekonomi, maka akuntansi mesti mengikut untuk berubah (Suojanen, 1954). Lingkungan tempat berkembangnya akuntansi berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri, baik lingkungan sosial, budaya dan terutama lingkungan ekonomi. Perubahan pengertian akuntansi menegaskan bahwa akuntansi sebenarnya budaya karena terkait dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat.

Berkembangnya pemikiran akuntansi berdampak pada akuntan sebagai pemilik pengetahuan tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai artikel yang memperdebatkan peran atau fungsi akuntan pada tahun 70-an (Bimberg dan Gandhi, 1976). Umumnya peran dan fungsi akuntansi dalam organisasi dan masyarakat, disimpulkan dari berbagai penelitian akuntansi (Burchell. *et al*, 1980). Hopwood (1978) dalam editorialnya menyatakan bahwa dalam banyak Negara, gerakan organisasi buruh telah memulai upaya untuk mengartikulasi permintaannya untuk mengembangkan praktik-praktik akuntansi dan regulasi.

Perkembangan perubahan pengertian akuntansi dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa akuntansi dapat didefinisikan secara fleksibel sesuai dengan perkembangan social budaya yang terjadi. Setiap masa berhak mendefinisikan akuntansi menurut perkembangan yang ada pada masa itu. Perkembangan ini terus akan terjadi di masa yang akan datang, mewakili dinamika masing-masing. Diskursus tentang akuntansi saat ini membuka banyak pemikiran yang menekankan pada harapan yang besar terhadap peran akuntansi. Di samping adanya harapan yang besar terhadap peran akuntansi, kecaman yang muncul tidak kalah banyaknya, sehingga berdampak pada terjadinya pergeseran paradigma dalam pemikiran akuntansi.

1.3. GELOMBANG HARAPAN, KECAMAN DAN PERGESERAN PARADIGMA AKUNTANSI

Harapan terhadap akuntansi sebagai instrumen untuk menghasilkan sebuah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan sangat tinggi. Kecendrungan ini terjadi Sebagai akibat adanya *economic consequences* yang dimaknai sebagai dampak dari laporan akuntansi terhadap prilaku pengambilan keputusan dalam bisnis, pemerintahan, perserikatan, para investigator dan kreditur (Zeff, 1987). Akuntansi diharapkan dapat menjembatani kepentingan berbagai pihak, terutama dari pihak external. *American Accounting Association* (AAA) mengharapkan akuntansi sebagai *instrument* penghasil laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan harta, dapat digunakan untuk kepentingan memprediksi guna mengurangi ketidakpastian (Dewhirst, 1972).

Akuntansi yang memproduksi laporan keuangan diharapkan dapat digunakan untuk berbagai pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis maupun nonbisnis

pada masa yang akan datang. Pemikiran akuntansi terakhir ini mengalami pemaknaan yang sangat luas. Akuntansi sebagai bagian dari ilmu sosial, bukan hanya berperan pada organisasi dalam lingkup yang terbatas, namun dapat pada lingkup yang lebih luas yakni masyarakat (Flamholtz,1980, Burchell *et. al*, 1980). Peran akuntansi dalam perkembangannya tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat perhitungan teknis saja, seperti yang dinyatakan oleh Sukuharsono dan Qudsi (2008), namun berkaitan dengan berbagai fenomena sosial lainnya, terutama berkaitan dengan sebuah pertanggungjawaban. Jensen (1983) seperti diungkap dalam Djamhuri (2011) meyakini bahwa akuntansi merupakan bagian integral dari suatu organisasi, maka dengan perkembangan yang begitu pesat dalam teori organisasi, sangat tidak tepat jika para akuntan membiarkan begitu saja perkembangan teori organisasi tersebut.

Perkembangan epistemologi akuntansi mengalami berbagai macam kritikan, meskipun memiliki banyak harapan. Bentuk kritikan mulai dari tudingan ketiadaan teori tunggal, sehingga belum memiliki definisi akuntansi yang berterima umum, sampai kepada kecaman mengenai peran akuntansi. Watt dan Zimmerman (1979) mengatakan bahwa teori akuntansi tunggal yang diterima umum sebenarnya belum ada. Hahn (2007) mengutip pernyataan *the committee on concepts dan standards for external financial* (AAA) yang mengatakan bahwa profesi akuntansi tidak mempunyai teori dasar yang berterima umum, meskipun AAA sendiri telah membuat definisi akuntansi. Miller dan Napier (1993) dalam tulisannya yang berjudul *genealogies of calculation* mengatakan tidak ada intisari dari akuntansi, dan tidak ada invarian objek terhadap apa yang dinamakan dengan "akuntansi" dapat dilekatkan. akuntansi memang berubah baik isi dan bentuk dari waktu ke waktu, namun perubahan itu tidaklah signifikan.

Komentar yang dikemukakan Miller dan Napier lebih pesimis dalam memandang perkembangan akuntansi. Namun demikian komentar ini hanya melihat dari sisi perubahan esensi akuntansi itu sendiri. Komentar yang lebih sinis dikemukakan oleh penulis lainnya dengan mengaitkan akuntansi sebagai alat untuk mengimperialis suatu Negara. Gray dan Bebbington (1997) mengkritisi akuntansi sebagai alat imperialisme barat terhadap Negara berkembang. Pendapat ini didukung oleh Alawattage dan Wickramasinghe (2008) yang menulis tentang hegemoni akuntansi. Meskipun terdapat kritikan terhadap akuntansi, semantik *Halo Effect* mungkin dapat membantu menjelaskan resistensi terhadap akuntansi seperti akuntansi sosial dan akuntansi sumber daya manusia (Flamholtz dan Cook, 1978). Perkembangan akuntansi tidak terbatas pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya saja, melainkan juga dari aspek semantik dan linguistik yang akan memengaruhi prilaku para *user* (Belkaoui, 1978).

Berbagai kritikan dan kecaman terhadap akuntansi, justru memberikan kontribusi bagi pengembangan paradigma akuntansi. Berbagai macam paradigma dapat digunakan untuk mendalami akuntansi sebagai bagian dari ilmu sosial. Burrell

dan Morgan (1994) mengemukakan empat paradigma yang dapat digunakan dalam menganalisis tentang teori sosial yang sangat luas yakni fungsionalis, interpretif, radikal humanis dan radikal strukturalis. Oleh sebab itu, akuntansi mengalami lonjakan pergeseran pandangan dari positivisme (keuangan) ke pandangan sosial yang lebih luas termasuk fenomena politik seperti yang dinyatakan Cooper dan Tinker (1994). Terlepas dari paradigma yang digunakan, substansi akuntansi dari aspek sosial selalu berujung dengan sebuah pertanggungjawaban.

Diskusi tentang peran akuntansi dalam organisasi dan kemasyarakatan secara luas telah cukup lama dibicarakan seperti terungkap dalam diskusi yang dihadiri oleh berbagai mahasiswa dari Amerika, Eropa dan Australia pada tahun 1979 di Los Angeles Amerika Serikat (Hopwood, 1980). Diskusi difokuskan pada pembicaraan mengenai aspek terkini (saat itu) dari "*state-of-the-art of accounting research dan thought.* Indikasi peran akuntansi semakin luas di tengah-tengah masyarakat akademisi dapat dilihat dari berbagai artikel yang telah dipublikasikan seperti akuntansi disabel (Bishop dan Boden, 2008), akuntansi yang mengkaitkan antara kebebasan beragama dengan auditing (Karim, 1990).

Wacana pemikiran akuntansi lainnya muncul dari sisi penempatan tenaga kerja akuntan seperti yang ditulis oleh James (2008) dan dari sisi akuntansi sosial bagi suku Maori yang ditulis oleh Hooper dan Kearins (2008). Bahkan akuntansi dapat berperan dalam bentuk kehidupan yang lebih luas seperti menyangkut dengan aktivitas agama. Tulisan-tulisan akuntansi yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan agama di antaranya dapat dilihat dari tulisan Lehman (2004), Askary dan Jackling (2004), Tinker (2004) serta Dey (2004) yang menguraikan keterkaitan akuntansi dalam agama. Peran akuntansi dengan lingkungan ekologi, Maunders (1991) menyatakan bahwa akuntansi dapat berperan secara positif dan negative dalam mempertanggung jawabkan dampak lingkungan akibat sebuah industri.

1.4. PENGERTIAN AKUNTANSI HARTA DALAM KONTEKS PENELITIAN

Penjelasan tentang perkembangan pemikiran akuntansi seperti yang dikemukakan oleh Hopwood (1987), Bierman (1987), Chua (1986), Grojer dan Stark (1977), *American Accounting Association* (1977), APB (1970), Grady (1965), dan Suojanen (1954) telah banyak memberikan inspirasi tentang keberadaan akuntansi. Harapan terhadap akuntansi seperti yang telah ditulis oleh Zeff (1987), Flamholtz (1980), Burchell *et. al* (1980), Cooper dan Tinker (1994) dapat memberikan angin segar terhadap kebutuhan akuntansi saat sekarang dan masa mendatang, meskipun terdapat kecaman keras terhadap peran akuntansi seperti yang diungkapkan oleh Watt dan Zimmerman (1979), Miller dan Napier (1993), Gray dan Bebbington (1997) serta oleh Alawattage dan Wickramasinghe (2008).

Perkembangan pergeseran ruang lingkup wilayah penggunaan ilmu akuntansi dalam berbagai bidang seperti ditulis oleh Bishop dan Boden (2008), Karim (1990), James (2008), Hooper dan Kearins (2008), Lehman (2004), Askary dan Jackling (2004), Tinker (2004) serta Dey (2004) menjelaskan bahwa akuntansi tidak hanya berperan khusus pada bidang ekonomi saja, namun pada bidang sosial dan kemasyarakatan lainnya. Akuntansi bukanlah monopoli ekonomi yang berkaitan dengan catat mencatat saja, tetapi berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang menghasilkan kebijakan, pengetahuan dan praktik pengelolaan di bidang sosial dan kemasyarakatan yang lebih luas.

Berkembangnya pemikiran, harapan dan ruang lingkup peranan akuntansi, didorong oleh berkembangnya paradigma seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga memberikan ruang yang luas untuk mendefinisikan akuntansi sesuai dengan tujuannya. Akuntansi harta dalam penelitian ini diartikan sebagai pemikiran-pemikiran yang menghasilkan berbagai kebijakan, tindakan atau kegiatan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan pengelolaan harta serta pertanggungjawabannya. Pemikiran yang menghasilkan kebijakan tersebut terjadi dalam kerangka aktivitas atau kegiatan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan lainnya yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan.

Akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan pertanggungjawaban suatu kegiatan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan lainnya. Definisi akuntansi ini sesuai dengan tujuan untuk mengakomodasi pemikiran-pemikiran dan pengetahuan akuntansi pada masa lampau, khususnya pada Kerajaan Siak Sri Inderapura era Sultan Syarif Kasim II yang ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Definisi akuntansi ini, mengindikasikan bahwa di mana ada aktivitas ekonomi, sosial dan kemasyarakatan lainnya, maka terdapat pula macam-macam pemikiran yang menghasilkan tindakan-tindakan bersentuhan dengan akuntansi untuk menyajikan sebuah pertanggungjawaban termasuk akuntansi harta bagaimanapun bentuknya.

Akuntansi ditinjau dari sisi keberadaannya, maka pengetahuan ini selalu ada di mana aktivitas ekonomi, sosial dan kemasyarakatan lainnya ada. Namun dari sisi fungsinya, maka akuntansi berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan kemasyarakatan lainnya yang terdapat dalam masyarakat, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan harta. Akuntansi di samping sebagai cara menyajikan pertanggungjawaban berbagai aktivitas ekonomi, berfungsi sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta pada suatu organisasi masyarakat, pemerintahan, termasuk kerajaan pada masanya.

1.5. KAJIAN AKUNTANSI DENGAN PERSPEKTIF SEJARAH

Meneliti tentang akuntansi di masa lalu tidak hanya di maksudkan untuk memastikan bahwa telah terjadi suatu praktik akuntansi tertentu pada masa itu, namun memiliki peran yang lebih luas sebagai sarana dalam mengetahui bagaimana peristiwa atau praktik-praktik akuntansi pada saat itu memiliki makna bagi organisasi dan masyarakat pada saat sekarang dan prospeknya di masa yang akan datang. Young dan Mouck (1996) mengatakan bahwa sejarah berperan dalam memberikan berbagai masukan kepada Badan Penyusun Standar dalam merumuskan standar akuntansi. Fleischman dan Tyson (1997) menyatakan banyak penulis saat ini mempercayai telah terjadinya peningkatan secara signifikan terhadap pengetahuan akuntansi melalui label *critical, new accounting history*, atau *postmodernist*. Penulisan sejarah akuntansi telah memberikan motivasi yang berbeda dalam hal fokus, ketertarikan dan dimensi waktu yang berbeda pula (Carnegie dan Napier, 1996).

Bentuk kegiatan akuntansi yang terjadi di suatu pemerintahan dengan sistem kerajaan pada masa lalu, akan dipengaruhi oleh berbagai kondisi lingkungannya yang terjadi saat itu. Kondisi lingkungan yang terjadi pada saat itu akan ikut memengaruhi bagaimana perkembangan akuntansi di pemerintahan tersebut. Hal inilah yang akan menyebabkan bentuk kegiatan dari suatu pemerintahan kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya tidak akan sama, karena kondisi lingkungan yang berbeda. Carmona (2005) dalam penelitiannya menyimpulkan adanya perbedaan pola penelitian sejarah di Italia, Perancis, Spanyol, dan Portugis. Sejarah akuntansi di Inggris sangat diperlukan dalam mengkaji tentang bagaimana bentuk dan jenis perlakuan akuntansi yang ada di Negara tersebut. Chartfield (1977) dalam Boyns (1997) mengatakan bahwa terdapat lebih dari 100 perlakuan akuntansi di Inggris dan Seluruh perlakuan akuntansi tersebut telah diterbitkan pada tahun 1800 di Inggris.

Penelitian akuntansi dari perspektif sejarah ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik-praktik akuntansi pada saat itu dan dijadikan sebagai bahan refleksi bagi pengembangan akuntansi saat ini dan masa yang akan datang. Indonesia yang terbentuk dari penyatuan banyak kerajaan yang ada di nusantara sebelum tahun 1945, memiliki banyak potensi peninggalan yang dapat digali. Namun potensi tersebut belum banyak yang menggalinya dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan terkecuali bidang sejarah dan budaya masa lalu. Kajian perkembangan akuntansi di Indonesia dari perspektif sejarah masih sangat sedikit yang tertarik menelitinya, apalagi kajian tentang akuntansi harta di bekas Kerajaan Siak Sri Inderapura. Kajian ilmu pengetahuan tentang sejarah di Riau lebih banyak membatasi kajian dalam bidang sejarah yang terkait dengan sejarah peperangan (Mahyudin, 1986), sejarah peninggalan (Yunus, 2003, Ujas, 1992) silsilah raja-raja (Effendy,1972, Yusuf, 1992, 1993), dan seni kebudayaan Melayu (Jamil 2005, 2008, Nurhamidahwati, 1994, 1998, Tarigan, 1997).

Berdasarkan peran yang dijalankan Kerajaan Siak, sebenarnya masih terdapat banyak potensi ilmu pengetahuan yang sangat bernilai tinggi untuk dieksplorasi secara ilmiah. Konstruksi akuntansi harta yang dilakukan di Kerajaan Siak, dapat dijadikan sebagai bahan ilmu pegetahuan sehingga memperoleh suatu temuan baru sebagai dasar dalam pemaknaan atas pengembangan akuntansi. Hopwood (1987) mengatakan bahwa sistem-sistem akuntansi mengalami perubahan secara terus-menerus, meskipun relatif sedikit yang diketahui tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan, bagaimana terjadinya proses perubahan dan konsekuensi-konsekuensi organisasinya. Lebih lanjut Hopwood dalam penelitiannya menemukan banyaknya keragaman faktor-faktor yang terlibat dalam perubahan akuntansi, konstitutif serta peran reflektif akuntansi dan cara-cara dalam perubahan akuntansi yang dapat berganti untuk perubahan organisasi selanjutnya. Akuntansi bukanlah fenomena statis, melainkan sangat dinamis dan berubah secara terus-menerus.

Perubahan akuntansi dalam setiap waktu, telah dikenal sebagai pengetahuan yang menerima berbagai keragaman tujuan yang berbeda-beda (Hopwood, 1987). Kerajaan Siak dengan berbagai corak sistem yang ada, tentu saja dilayani oleh akuntansi sesuai dengan kebutuhannya. Kerajaan Siak Sri Inderapura yang merupakan salah satu kerajaan besar di Riau diyakini memiliki andil dalam membentuk perkembangan perlakuan akuntansi khususnya akuntansi harta di masa lampau. Akuntansi harta yang ada di Kerajaan Siak Sri Inderapura tentunya memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Oleh sebab itu, pengkajian akuntansi dengan perspektif sejarah dirasakan sangat perlu dilakukan untuk menambah kasanah ilmu akuntansi itu sendiri.

Interaksi kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan berbagai suku bangsa saat itu, memberikan warna tersendiri dari sisi ilmu pengetahuan. Indonesia yang merupakan bagian dari Negara-negara Asia atau Negara timur, awalnya dipengaruhi oleh praktik-praktik akuntansi dari Negara China, India dan Arab, karena adanya hubungan perdagangan yang dapat diketahui dari berbagai catatan sejarah. Perkembangan selanjutnya terjadi dengan kedatangan VOC Belanda dan menjajah sekian lama, sehingga perlakuan akuntansi yang terjadi di Indonesia mengikuti sistem Kolonial Belanda yang merupakan bagian dari Negara Barat. Walaupun tanda awal kemunculan akuntansi di Indonesia merupakan implementasi dari sistem akuntansi Kolonial Belanda (Sukoharsono dan Gaffikin, 1993), namun latar belakang sejarah, kultur dan pengetahuan Sultan yang memerintah berperan dalam suatu perkembangan sejarah terhadap perlakuan akuntansinya.

1.6. AROMA AKUNTANSI PENDORONG HASRAT PENELITIAN

Aroma akuntansi dalam sebuah masyarakat yang terbentuk dalam sistem kerajaan seperti Kerajaan Siak patut diduga ada, terutama yang berkaitan dengan akuntansi harta. Akuntansi sebagai bagian dari instrumen sosial, dapat hadir di manapun dan dalam situasi apa pun serta berperan sesuai dengan keberuntukannya dalam organisasi pada setiap masa. Dugaan ini terindikasikan dari adanya peninggalan harta kerajaan yang sampai saat ini masih terinventarisir dengan rapi. Berbagai peninggalan harta benda kerajaan mulai dari istana kerajaan, naskah-naskah dan benda lainnya tersebar di beberapa tempat seperti di Museum Nasional Jakarta, Museum Daerah di Pekanbaru Riau dan di Istana peninggalan Kerajaan Siak Inderapura Riau seperti terlampir di bagian akhir tulisan. Dugaan ini didukung oleh Otley Dan Berry (1980) yang menegaskan pendapatnya bahwa akuntansi dapat hadir bersama-sama dengan teori organisasi kuno sekalipun serta berbagai konsep sederhana di sebuah organisasi. Kehadiran akuntansi bersamaan dengan teori organisasi kuno menurut Otley dan Berry (1980) mengandung makna keberadaan akuntansi muncul dalam setiap masa atau sejarah.

Menurut Foucault seperti dikutip (Parchiano, 2007) bahwa setiap masa (*epoch*) sejarah mempunyai "sistem pemikiran yang menentukan bagaimana pengetahuan dapat dipraktikan pada masa tersebut. Sistem pemikiran tersebut oleh Foucault seperti dikutip (Parchiano, 2007) disebut dengan *episteme*. Dijelaskan bahwa *episteme* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan bagi munculnya pengetahuan-pengetahuan dan teori-teori dalam suatu masa tertentu. Penyataan ini mengandung makna bahwa munculnya sebuah ilmu pengetahuan dapat terjadi di setiap waktu dan perisiwa. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Emory dan Donald (1995) yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan dapat berasal dari pendapat yang belum diuji sampai dengan pendapat yang dihasilkan dari sebuah pemikiran sistematis yang tinggi, tanpa menyebutkan kurun waktu atau *epoche*. Ini artinya bahwa sumber pengetahuan dapat muncul setiap saat. Namun, masalahnya ada yang mau mengkonstruksi suatu peristiwa atau pengetahuan tersebut untuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan atau tidak.

Stewart (1992) mengakui bahwa hal yang paling menarik dari karya Focault terhadap sejarah dan teori akuntansi adalah dalam hal pandangan konsep yang telah diberikannya, khususnya sebagai sebuah tanggapan atas penjelasan ilmuwan akuntansi. Foucault telah memberikan sebuah kerangka teori atas masalah dan pertanyaan-pertanyaan akuntansi dan melepaskan diri dari gambaran yang terbatas dalam pengembangan sebuah teori. Akuntansi bukanlah berasal hanya dari proses kapitalisme atau industrialisasi saja. Akuntansi bukan pula hanya berasal dari kiprah para pemilik modal dan organ struktur organisasi. Akuntansi sesungguhnya muncul dari fungsi

akuntansi itu sendiri dalam berbagai konteks yang berasal dari sebuah fenomena yang kompleks, sebagai produk dari pengaruh berbagai macam interaksi (Stewart, 1992). Konsep *episteme* dalam *epoch* membuka jalan dalam menganalisis adanya suatu *episteme* akuntansi dalam sistem kerajaan di masa lalu. Beberapa peneliti sebelumnya telah menggunakan pandangan-pandangan Foucoult dalam pengembangan sejarah akuntansi seperti Tyson (1993), Hoskin (1994).

Sisa-sisa kerajaan yang masih terjaga sampai saat ini dan pemikiran beberapa ahli atau filsuf tentang keberadaan akuntansi mendorong hasrat yang kuat untuk melakukan penelitian akuntansi dengan mengkonstruksi akuntansi di masa lalu. Fokus pada kajian akuntansi khususnya akuntansi harta, memiliki banyak nilai-nilai yang dapat diungkapkan dari sebuah peradaban atau kebudayaan masyarakat kerajaan pada saat itu. Berbagai bentuk catatan akuntansi pengelolaan harta yang mungkin masih ada, serta kandungan yang terkait dengannya, nilai-nilai perlakuan yang dijalankan, regulasi kerajaan tentang pemanfaatan harta, serta regulasi yang menyangkut dengan kepemilikan harta kerajaan dan pemaknaan yang digunakan pada saat itu, tentu bisa menjadi inspirasi yang sangat berharga, di tengah upaya meningkatkan makna akuntansi yang ada saat ini. Perkembangan ekonomi yang dicapai oleh Kerajaan Siak Sri Inderapura terutama di bidang perdagangan, dapat mengantarkan peneliti pada sebuah pertanyaan yang didasarkan pada pemaknaan peristiwa.

Peristiwa penting yang sangat menarik dalam studi ini adalah adanya konsolidasi ekonomi yang membawa kemajuan ekonomi bagi rakyat Kerajaan Siak Sri Inderapura meskipun di bawah tekanan Pemerintah Kolonial. Kemajuan ekonomi yang dicapai dan berdampak pada perkembangan harta kerajaan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Raja yang berkuasa pada saat itu. Jika ditinjau dari peristiwa ekonomi yang berdampak pada peningkatan jumlah harta, maka tidak dapat diabaikan begitu saja tentang peran akuntansi di dalamnya, khususnya akuntansi pertanggungjawaban harta. Akuntansi ikut mendorong perkembangan ekonomi dan pengelolaan harta suatu bangsa, termasuk kerajaan dengan berbagai bentuknya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa Sejarah akuntansi sebagian besar dipahami sebagai sebuah refleksi dari evolusi dalam pengembangan ekonomi dan industri (Sukoharsono, 2008).

Fokus peran akuntansi ditujukan pada praktik akuntansi harta yang dilakukan oleh kerajaan, karena sentral aktivitas ekonomi ada pada kerajaan. Dalam struktur sosial feodalistik, Raja, keluarganya, dan para bangsawan lainnya, para elite birokrasi dan pengusaha daerah kesemuanya berkedudukan sebagai tuan dan rakyat sebagai abdi (Kartodirdjo, 1987). Lewat saluran feodal dengan mempergunakan ikatan desa dan tradisional, berbagai jasa dapat dikerahkan. Tidak dapat disangsikan bahwa aliran jasa dan hasil bumi keatas, jauh lebih besar dari pada aliran jasa dari atas kebawah. Dengan demikian, rakyat menghasilkan produk, dan raja beserta lingkungannya memperdagangkan. Namun pertanyaannya apakah Sultan Syarif Kasim II

memperlakukan praktik-praktik seperti yang disebutkan di atas, khususnya dalam hal akuntansi pengelolaan harta?. Bagaimana pandangan Sultan atas pertanggungjawaban harta dan hal-hal yang bersifat diskursif lainnya?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan didalami melalui kajian arkeologi terhadap manuskrip berupa dokumen dan artefak yang bersentuhan dengan akuntansi harta di era Sultan Syarif Kasim.

Hal inilah yang melatarbelakangi perlu dilakukan upaya pengkajian akuntansi harta di masa lampau, agar dapat memberikan suatu pemaknaan yang jelas atas pemikiran tentang akuntansi itu sendiri yang nantinya dapat berguna sebagai referensi perkembangan penelitian akuntansi di masa mendatang. Kekawatiran Sterling (1987) yang mengatakan bahwa para praktisi atau profesional dan pengajar akuntansi kesulitan untuk melihat adanya hubungan antara penelitian lapangan dengan aktual pendidikan dan praktik profesional, diharapkan tidak menjadi kendala dalam memahami urgensi penelitian ini.

1.7. FOKUS KAJIAN PENELITIAN

Penelitian ini berawal dari adanya suatu keyakinan yang didukung dari beberapa referensi seperti yang diindikasikan dalam latar belakang bahwa setiap kerajaan memiliki suatu sistem administrasi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian (Sugiyono, 2010). Fokus kajian penelitian dan/atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Aziz, 2005). Berdasarkan pada konteks ini dan melalui kajian manusrib serta konfirmasi, maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengungkap pandangan Sultan Syarif Kasim terhadap harta serta bagaimana implikasinya terhadap kebijakan akuntansi yang dijalankan selama menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Inderapura?.
2. Mengungkap bangunan sistem akuntansi yang dibentuknya dalam menjalankan roda Pemerintahan Kerajaan Siak baik dari sisi model pertanggungjawaban yang dijalankannya, maupun dari sisi pengendalian internal yang dibangunnya.

Mengungkap pengelolaan harta era Kerajaan Siak dan sebelumnya, dikaji dari sisi regulasi pengelolaan harta era Sultan Syarif Kasim, sumber dan penggunaan harta era Sultan Syarif Kasim, awal munculnya konsep harta era Kerajaan Siak Sri Inderapura, perkembangan harta masing-masing era Sultan Siak Sri Inderapura, dan cara perburuan harta sebelum era Kerajaan Siak Sri Inderapura.

1.8. PERUMUSAN MASALAH

Sultan Syarif Kasim sebagai raja sangat menentukan pola kehidupan sosial yang berlaku dalam wilayah kerajaannya. Sistem masyarakat kerajaan sangat berorientasi kepada apa yang diperbuat dan dikatakan oleh sultan yang berkuasa. Dengan demikian, maju tidaknya suatu kerajaan, sangat bergantung pada latarbelakang sosok Rajanya seperti latar belakang pemahaman agama yang baik, pemahaman hukum Islam dan tata Negara yang baik, serta pembentukan karakter sejak dini. Raja sebagai symbol kejujuran, amanah, keterbukaan, dan keadilan dalam pengelolaan harta. Namun demikian, Sultan Syarif Kasim berinteraksi dengan orang besar kerajaan yakni datuk dan para kepala suku serta rakyatnya dalam menjalankan pemerintahannya. Rakyat kerajaan pada hakekatnya hanya mengikut saja pada apa yang dikatakan atau apa yang diperintahkan raja, apalagi pada seorang raja yang menjadi panutan rakyatnya.

Berdasarkan uraian yang digambarkan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Sultan Syarif Kasim terhadap harta dan kebijakan akuntansi yang dijalankannya selama menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Inderapura?.
2. Bagaimana bangunan sistem akuntansi yang dibentuknya dalam menjalankan roda Pemerintahan Kerajaan Siak baik dari sisi model pertanggungjawaban yang dijalankannya, maupun dari sisi pengendalian internal yang dibangunnya.
3. Bagaimana pengelolaan harta era Kerajaan Siak dan sebelumnya, dikaji dari sisi regulasi pengelolaan harta era Sultan Syarif Kasim?. Bagaimana pula dengan sumber dan penggunaan harta era Sultan Syarif Kasim?. Kapan awal munculnya konsep harta era Kerajaan Siak Sri Inderapura?. Bagaimana perkembangan harta masing-masing era Sultan Siak Sri Inderapura, dan bagaimana cara perburuan harta sebelum era Kerajaan Siak Sri Inderapura.

1.9. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini didasarkan pada upaya untuk memperoleh suatu pemikiran akuntansi pada era Sultan Syarif Kasim II. Konstruksi merupakan karakteristik utama penelitian kualitatif di mana peneliti mengkonstruksi realita interaksi dengan dunia sosialnya (Merriam dan Associates, 2002). Konstruksi di sini bukanlah merupakan domain kritis saja, melainkan pada interpretif yang dilakukan terhadap banyaknya retakan (*rupture*) pengetahuan yang berasal dari arkeologi dokumen. Oleh karena itu, proses terciptanya sebuah penemuan atau pembentukan satu metode tidaklah sama dan tidak bisa digambarkan dengan satu cara pada setiap level (Foucault, 2012). Berdasarkan argument inilah, terdapat banyak temuan analisis dalam proses penelitian yang dapat diungkapkan.

Berdasarkan fokus kajian penelitian di atas, disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran tentang nilai-nilai yang dianut Sultan Syarif Kasim terhadap harta serta gambaran implikasinya terhadap kebijakan akuntansi yang dijalankan selama menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Inderapura?.
2. Menggambarkan bangunan sistem akuntansi yang dibentuknya dalam menjalankan roda Pemerintahan Kerajaan Siak baik dari sisi model pertanggungjawaban yang dijalankannya, maupun dari sisi pengendalian internal yang dibangunnya.
4. Menggambarkan pengelolaan harta era Kerajaan Siak dan sebelumnya, memperoleh gambaran tentang regulasi pengelolaan harta era Sultan Syarif Kasim, memperoleh gambaran tentang sumber dan penggunaan harta era Sultan Syarif Kasim, memperoleh gambaran tentang kapan awal munculnya konsep harta era Kerajaan Siak Sri Inderapura, memperoleh gambaran tentang perkembangan harta masing-masing era Sultan Siak Sri Inderapura, dan gambaran tentang cara perburuan harta sebelum era Kerajaan Siak Sri Inderapura.

1.10. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian akuntansi yang menggunakan perspektif sejarah dalam pengkajiannya. Hasil penelitian akuntansi dengan kajian sejarah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu pengetahuan. Kontribusi spesifik dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang akuntansi harta, khususnya tentang peran nilai-nilai yang dianut pelaku utama sistem yang berkontribusi dalam membangun sistem pengendalian internal dalam pengelolaan harta. Pandangan seseorang sangat berkontribusi pada cara seseorang dalam mengelola harta, termasuk dalam menjalankan akuntansi harta sehingga Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah otonom yang saat ini mungkin diperlukan.
2. Hasil akhir penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan pragmatis dalam perlakuan akuntansi harta dari sisi struktur elemen sistem dan dari sisi model sistem pertanggungjawabannya. Bentuk struktur elemen sistem sangat kondisional dan model bentuk pertanggungjawaban pengelolaan harta tidak harus dalam siklus yang terdiri dari input, proses, output, namun dapat bentuknya dalam siklus lain.
3. Terakhir hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada upaya mengangkat khasanah pemikiran, nilai-nilai dan sebagai bagian dari torehan sejarah Kerajaan Siak Sri Inderapura dari perspektif akuntansi untuk catatan di masa yang akan datang.

2

M
di
ak
lal
be
sel
sel
Pe
pe
sej
dat
Pe
akl

inf
ber
pra
aku
yan

BAB 2

STRATEGI BERLAYAR TEMUKAN MAKNA

2.1. MENAPAK PENDAHULUAN

Memahami kreasi sosial masa lalu, selalu saja tampil sebagai pemotivasi utama di balik dilakukannya penelitian akuntansi dengan perspektif sejarah sampai dengan akhir-akhir ini. Saat ini, paling tidak terdapat dua alasan utama mengapa memahami masa lalu itu penting. *Pertama*, karena berkaitan dengan intelektualitas dan *kedua*, karena berkaitan dengan manfaatnya (Napier, 1989). Terkait dengan intelektualitas, dimaknai sebagai upaya untuk mengakumudir kepentingan sejarah itu sendiri, yakni berperan sebagai pencerahan bagi pemikiran, praktik dan pengembangan akuntansi itu sendiri. Pengidentifikasian faktor dalam lingkungan sejarah itu sendiri, dapat mengindus perubahan dan menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi. Peran intelektualitas sejarah dapat menginspirasi pemikiran akuntansi saat sekarang dan masa yang akan datang serta kreasi praktik-praktik penyelesaian masalah akuntansi yang muncul. Peran yang menghasilkan inspirasi pemikiran dan praktik-praktik akuntansi, pada akhirnya menghasilkan pengembangan akuntansi itu sendiri.

Terkait dengan manfaat, dimaknai sebagai cahaya sejarah yang memberikan informasi tentang konsep-konsep original, praktik-praktik yang dilakukan dan berbagai bentuk lembaga yang digunakan saat itu, sebagai pengetahuan bagi solusi praktik-praktik akuntansi saat sekarang (Napier, 1989). Banyak manfaat kajian sejarah akuntansi yang telah dilakukan dan terus dilakukan, apalagi di era informasi global yang sedang melanda dunia saat ini. Oleh sebab itu, perlu adanya data-data dari masa

lampau yang harus diketahui oleh generasi sekarang, sehingga benang merah masa lampau dengan sekarang tidak terputus (Perpustakaan Nasional RI, 1996). Namun harus diakui bahwa mempelajari perlakuan-perlakuan akuntansi dari sisi pemikiran, lebih mudah dibandingkan dengan menguji, memahami dan mendapatkan dokumen asli, apalagi menyangkut dengan dokumen catatan akuntansi ratusan tahun lalu.

Memahami akuntansi dengan perspektif sejarah secara lebih lengkap, dalam pengkajiannya haruslah meliputi penggunaan berbagai pendekatan yang pluralistik karena sejarah merupakan fundamen yang tidak dapat dibangun atas satu pendekatan saja untuk memahami akuntansi secara utuh. Pendekatan pluralistik tersebut dapat terkait dengan pendekatan keilmuan dan dapat terkait dengan penggunaan triangulasi dalam memperoleh data untuk dianalisis. Kajian akuntansi dengan perspektif sejarah dalam konteks ini tidak menganggap bahwa praktik-praktik dan isu-isu akuntansi yang ada saat ini memiliki keterkaitan dengan masa lalu. Pandangan komprehensif tentang masa lalu dapat mewarnai formulasi pertanyaan penelitian, penggunaan metodologi penelitian yang tepat dan penginterpretasian hasil-hasilnya (Walker, 2004).

Pendekatan yang paling mungkin digunakan dalam pengkajian akuntansi dengan perspektif sejarah adalah pendekatan antropologi dengan objek budaya yang sedang berlangsung, arkeologi dengan objek budaya masa lalu dengan mengkaji benda-benda peninggalan, dan akuntansi dengan objek pemikiran, praktik atau perlakuan terhadap sebuah kebijakan di masa lalu. Pendekatan utama yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah arkeologi, karena objek budaya situs penelitiannya terjadi pada masa lalu. Kehidupan sosial budaya situs penelitian sudah tidak ditemukan lagi, kecuali hanya berupa peninggalan-peninggalan baik berupa manuskrib maupun artefak yang masih ada serta beberapa informan yang dapat dikonfirmasi. Kajian akuntansi fokus pada pengungkapan pemikiran-pemikiran atau perlakuan akuntansi yang ada pada masa itu.

Kajian sejarah akuntansi dalam perkembangannya telah menempuh perjalanan panjang yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan secara hati-hati terhadap sejarah masa lalu tanpa suatu penghargaan apa pun. Namun, kelihatannya penelitian akhir-akhir ini khususnya perspektif sejarah seolah-olah hanya ditujukan untuk mendapatkan sebuah peran pemikiran yang sempit dalam konteks disiplin ilmu yang lebih luas (Miller dan Richard, 1991). Perdebatan mengenai perlu tidaknya mengkaji masa lalu, berkualitas atau tidaknya sebuah penelitian masa lalu dan bahkan soal penggunaan metodologi kualitatif ataupun kuantitatif, menjadi kontroversi yang justru dapat menambah kualitas atas objek yang diperdebatkan.

2.2. SEBUAH KAJIAN ILMU MASA LALU

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap situasi masa lalu yang terjadi dalam suatu kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki banyak nilai sejarah yang menjadi bagian dari latarbelakang wajah negeri saat ini. Setiap mengkaji sejarah masa lalu, dapat meninggalkan kesan yang mendalam bagi kasanah ilmu pengetahuan, apalagi jika dikaji dengan sebuah penelitian. Semakin dikaji dalam sebuah penelitian, maka akan semakin terasa bahwa masa lalu adalah guru bagi masa sekarang dan masa yang akan datang. Semua aspek bidang keilmuan masa lalu harus dikaji dengan rasa cinta, seakan-akan merasakan bahwa kita mengalami pada masa lalu tersebut. Salah satu kajian ilmu masa lalu yang diharapkan dapat dijadikan sebagai cermin bagi ilmu pengetahuan saat ini adalah ilmu akuntansi.

Pengkajian akuntansi dengan perspektif sejarah akan bernilai apabila dilakukan dengan metodologi yang umum dilakukan dalam pengungkapan sejarah. Terdapat banyak metode sejarah yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Metode tersebut di antaranya dapat dilakukan dengan membandingkan evaluasi antara pemikiran konservatif dengan kritikal sejarah (Tinker dan M. Neimark, 1988). Kajian sejarah merupakan kajian literatur yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil evaluasi sebuah metode konservatif dengan kritik sejarah. Metode sejarah dapat dilakukan dengan cara menganalisis secara literatur seperti yang dilakukan oleh Mills (1989) dalam mengungkapkan sejarah kata dan disiplin ilmu akuntansi. Analisis sejarah hanya dilakukan dengan mengeksplorasi sejarah hubungan kata dan disiplin ilmu akuntansinya, serta mengusulkan kerangka konseptual dan sumber yang tepat bagi analisis sejarah.

Napier (1989) mengutip pernyataan *The American Accounting Association's committee on accounting history* yang mengatakan bahwa sejarah akuntansi sebagai studi tentang evolusi dalam pemikiran akuntansi, praktik dan lingkungan, sebagai respon atas perubahan kebutuhan dalam bidang sosial dan lingkungan. Peran sejarah dalam pengembangan akuntansi dari waktu ke waktu tidak saja dilakukan dengan menggunakan metode verbal, namun dilakukan secara *oral history* (Collins dan Bloom, 1991). Oral history dapat digunakan untuk mempelajari terjadinya evolusi standar akuntansi dan sangat bermanfaat dalam pengembangan latar belakang diskusi tentang pengembangan dan pengaplikasian standar akuntansi. *Single Audit Act of 1984* yang diundangkan dengan menggunakan pendekatan "Single Audit" untuk pemeriksaan akuntansi bagi bantuan keuangan federal terhadap pemerintah dan pemerintah daerah, dihasilkan melalui proses evolusi hampir 20 tahun (Brown dan Burnaby, 1988). Pernyataan telah terjadinya evolusi standar akuntansi menyimpulkan bahwa konsep atau teori akuntansi yang ada sekarang tidak lepas dari pengaruh konsep

atau teori akuntansi pada masa lalu melalui proses evolusi, meskipun dalam konteks penelitian ini tidak menggunakan pemikiran tersebut.

Secara historis, akuntansi telah mengalami suatu proses perubahan pemikiran yang cukup panjang atau berevolusi. Hal ini terjadi dalam konteks praktiknya, sehingga berdampak pada perubahan lingkungannya. Tentu saja perubahan pemikiran dan praktik tersebut disebabkan oleh adanya tuntutan perubahaan kebutuhan akuntansi itu sendiri. Oleh sebab itu, Miller & Richad (1991) mengatakan bahwa kurang dari satu dekade belakangan, sejarah akuntansi telah menempati posisi yang signifikan dalam disiplin ilmu akuntansi. Cakupan akuntansi yang bersifat teknis tentu saja sangat sulit untuk dikaji, apalagi menyangkut dengan catatan akuntansi masa lalu seperti telah diungkapkan sebelumnya. Menyadari hal ini, maka akuntansi masa lalu hanya dikaji dalam kajian untuk mengkonstruksi pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan, serta makna tersirat di balik itu semua yang dapat ditemukan. Perspektif sejarah mengkaji substansi akuntansi yang terkait dengan pandangan atau sikap, bangunan sistem pengendalian, struktur pemerintahan, regulasi yang menyangkut dengan pengelolaan harta, serta memaknai nilai-nilai akuntansi harta yang ada di balik yang tersurat. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian masa lalu, maka secara metodologi dalam pengkajiannya menggunakan interdisiplin ilmu, sehingga kajian analisisnya lebih lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Bangunan penelitian sejarah yang terkait dengan akuntansi, memiliki makna "apa yang telah dilakukan serta apa yang masih harus dilakukan".

Setidaknya terdapat 3 ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian ini yakni ilmu sejarah karena menyangkut dengan kajian *apipeni* masa lalu, arkeologi yang mengkaji manuskrib dan artefak serta ilmu akuntansi karena penelitian akuntansi. Ketiga ilmu pengetahuan tersebut, merupakan bagian dari ilmu sosial. Berdasarkan sifat kajian ini, maka disusunlah suatu metodologi yang digunakan untuk menggapai tujuan dari penelitian ini dalam sebuah strategi pelaksanaan penelitian. Strategi pelaksanaan penelitian dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, dan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga diperoleh sebuah strategi yang paling cocok. Sebagai rincian dari strategi pelaksanaan penelitian, bab ini menyajikannya secara berurutan, terkait dengan variabel atau poin-poin langkah yang digunakan.

2.3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh dan menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif dalam kerangka paradigma yang dikemukakan oleh Burrell dan Morgan. Burrell dan Morgan (1979) membagi dimensi pengetahuan kedalam obyektif -subyektif dan stabilitas-radikalitas yang merepresentasikan

perspektif atau paradigma kedalam *functionalism, interpretive, radical humanist, dan radical structuralist.* Keempat paradigma ini pertegas kembali oleh Ardalan (2000) yang menjelaskan bahwa dalam kajian akademis, perlu diperkenalkan suatu asumsi yang disebut dengan *paradigm* atau *world views*. Posisi peneliti dalam paradigma tersebut adalah pada ranah interpretif.

Riset-riset akuntansi saat ini telah banyak menggunakan berbagai paradigma tersebut dalam pengembangan akuntansi. Dalam penelitian ini, juga menggunakan salah satu paradigma tersebut dalam pengkajian. Adapun paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif yang bersifat exploratif dan merupakan bagian dari ranah konstruksi. Paradigma interpretif yang dalam banyak hal juga disebut sebagai paradigma konstruktif, menekankan bahwa penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memahami realita dunia apa adanya (Ludigdo, 2005). Paradigma interpretif apabila dilihat dari asal-muasalnya telah ada sejak dahulu kala dan berkaitan dengan *hermeneutic* yang diperkenalkan pertama kali oleh JC Dannhauer di pertengahan abad ke 17 (Mautner, 1997). Dia menyatakan bahwa teori interpretif sangat dibutuhkan untuk 3 hal yakni interpretif kitab injil, interpretif teks hukum (undang-undang, contoh teladan, perlakuan dll) dan interpretif literatur-literatur zaman purbakala.

Metode penelitian kualitatif-interpretif digunakan dalam penelitian ini sebagai rangkaian dari konstruksi akuntansi harta di Kerajaan Siak. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penyelidikan lapangan tentang kebenaran lapangan itu sendiri. Kebenaran lapangan hanya dapat diperoleh dengan baik, sangat tergantung pada peneliti sendiri. Instrument utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Kompleksitas, interkoneksi kelompok-kelompok tema, konsep-konsep dan asumsi-asumsi, selalu melingkungi sebuah penelitian kualitatif (Denzin dan Lincoln, 2005). Sebuah penelitian kualitatif selalu berupaya menunjukkan disiplin, hasil lapangan dan bahan-bahannya secara apa adanya, sesuai dengan karakteristik lapangan atau sifat penelitian tersebut. Oleh sebab itu, metode penelitian kualitatif menyajikan banyak alternatif jenis penelitian yang dapat digunakan sesuai dengan sifat penelitian.

Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan sesuai dengan karakteristik lapangan adalah jenis penelitian etnografi generasi 2. Marzali dalam suatu pengantarnya untuk buku metode Etnografi Spradley (1997) menguraikan secara sistematis dan sangat runtut mengenai perkembangan etnografi. Perkembangan etnografi diuraikan secara sistematis mulai dari etnografi generasi 1 sampai dengan etnografi ala Spradley. Intisari yang dapat diringkas dari uraiannya, disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1: Perkembangan Generasi Penelitian Etnografi

Etno Gen 1	Etno Gen 2	Etno Gen Moderen	Etno Gen Baru	Etno Gen Ala Spradly
Tulis dari sumber yang ada saja	Tulis dari sumber yang ada.	Tulis dari sumber yang ada.	Tulis dari sumber yang ada.	memahami masyarakat di mana sipeneliti berada dan masyarakat multikultural dunia lainnya.
Tidak ada kunjungan ke situs dan informan	Kunjungi situs dan informan yang tau tentang masa lalu.	Masuk menjadi bagian kehidupan masyarakat yg diteliti.	Explor apa yang ada dalam pikiran masyarakat.	
Kesimpulan oleh peneliti	Kesimpulan oleh peneliti	Kesimpulan oleh peneliti	kesimpulan oleh masyarakat tsb.	Kesimpulan dari masyarakat sendiri
Tokohnya: Tylor Frazer Morgan	Tokohnya: River Boas	Tokohnya: Radclifffe Malinowski	Tokohnya: Conclin, Frake & tyler	Tokohnya: spradley
Sources oriented	informan oriented	The way of life oriented	Live oriented	Self oriented
Historical research	Historical research	cognitif research	Cognitif research	Self research

Sumber: Dikembangkan dari Spradley (1997).

Setiap generasi etnografi yang ditampilkan dalam table 2.1 dapat dipakai untuk mendapatkan data penelitian. Namun, jenis etnografi mana yang harus digunakan sangat bergantung kepada karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian ini merupakan penelitian masa lalu, yakni mengkaji kehidupan sosial masyarakat yang sudah tidak dapat ditemukan lagi, namun masih ada masyarakat yang mengalami dan sangat mengetahui kondisi masa lalu tersebut. Oleh sebab itu, jenis penelitian yang paling tepat untuk digunakan adalah jenis Etnografi Generasi 2, yang mengeksplorasi berbagai literatur yang terkait dan mengkonfirmasikannya kepada informan yang memiliki pengetahuan masa lalu. Konfirmasi informan adalah bagian ciri utama penelitian etnografi generasi 2.

Kegiatan penelitian ini ditujukan untuk melakukan konstruksi akuntansi harta yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pendeskripsian, konfirmasi, dan penginterpretasian data berupa manuskrip, arsip, atau dokumen dan artefak dalam sebuah sistem kerajaan di masa lampau. Penelitian ini berusaha mengkonstruksi realitas pemikiran dan tindakan akuntansi harta dan berusaha memahami maknanya, sehingga terkonsentrasi pada proses, peristiwa dan otentisitas. Sampai saat ini, dapat dikatakan bahwa belum banyak tulisan-tulisan dari hasil penelitian akuntansi yang dilakukan dalam sistem kerajaan di masa lampau. Sistem kerajaan di masa lampau

umumnya memiliki ciri-ciri tertutup karena waktu (telah berlalu) dan terisolasikan oleh sistem kerajaan. Kondisi-kondisi seperti inilah yang turut melatarbelakangi mengapa metode kualitatif yang harus digunakan. Dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti bersifat explisit dalam situasi yang terbatas dan melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit (Somantri, 2005).

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian ilmiah yang secara umum terdiri dari aktivitas penyelidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, menggunakan prosedur standar yang sistematis untuk menjawab pertanyaan, mengumpulkan bukti, menghasilkan temuan yang tidak ditentukan sebelumnya dan menghasilkan temuan yang berlaku melampaui batas-batas langsung dari penelitian (Mack *et, al.* 2005). Oleh sebab itu, penelitian kualitatif bisa saja memakan waktu lebih lama, membutuhkan kejelasan tujuan selama tahap desain, dan tidak dapat dianalisis dengan menjalankan program komputer. Metode dan strategi analisis Penelitian kualitatif tidak berhubungan dengan teknologi tinggi masyarakat yang mungkin menggunakan cara-cara teknik kuantitatif (Berg, 2001). Namun, dalam penelitian kualitatif bukan tidak menggunakan alat teknologi sama sekali. Saat ini dimungkinkan untuk menggunakan alat teknologi tinggi seperti alat perekam yang mampu mengkonversi suara kedalam tulisan.

Baru-baru ini muncul ide yang mengatakan bahwa pengungkapan potensi kontekstual, interpretif, dan penemuan kritis dalam sejarah akuntansi dan manajemen dapat sangat bernilai dengan menggunakan *Photo Elicitation* terutama terkait dengan manuskrib berupa arsip. Potensi pembahasan kembali sejarah yang tersembunyi secara signifikan dipertinggi dengan menggunakan perolehan gambar (*Photo Elicitation)* yang menawarkan kekuatan tidak saja melalui visual yang dicetuskan oleh ingatan, namun melalui negosiasi dan konstruksi imajinasi gambar itu sendiri (Parker, 2009). Persepktif sejarah dalam penelitian akuntansi di samping mengalami perkembangan dalam hal metode, mengalami perkembangan dalam hal peran.

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan metode kuantitatif. Perbedaan terutama terdapat dalam hal cakupan dan jenis data serta masalah pengujian data. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang diuji, untuk mendapatkan data yang *valid* dan *reliable* (Ghozali, 2005). Berbeda dengan penelitian kualitatif, di mana datalah yang diuji. Dalam penelitian ini, data dan hasil penelitian dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan hasil dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada situs penelitian. Oleh sebab itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini baik berupa manuskrip, arsip dan dokumen lainnya serta artefak yang ditemukan harus dikonfirmasi dengan para informan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi.

Secara umum, dalam ilmu sosial dikenal dua jenis metode penelitian yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua alternatif metode penelitian yang memiliki perbedaan dalam hal kegunaannya.

Metode penelitian kualitatif sangat efektif khususnya dalam penelitian-penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai, pendapat, prilaku, dan konteks sosial lainnya dari populasi tertentu (Mack, *et. al*, 2005). Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuannya untuk menyajikan uraian tekstual yang kompleks, yakni bagaimana mengungkap pengalaman orang sesuai dengan isu penelitian. Mack et. al (2005) dalam bukunya yang berjudul metode kualitatif mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif menyajikan informasi tentang manusia di balik isu, yakni yang sering bertentangan dengan prilaku, kepercayaan, pendapat, emosional, yang berkaitan dengan individual.

Memperbandingkan metode penelitian dengan tujuan untuk melihat karakteristik atau ciri-ciri dalam metodologi penelitian, menjadi sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Metode penelitian kualitatif memang memiliki perbedaan ciri-ciri dalam berbagai hal dengan penelitian kuantitatif. Pernyataan yang terkenal dalam penelitian kuantitatif yakni Teori model struktur *Hypothetico Deductive* (H-D). Teori model struktur *Hypothetico Deductive* (H-D) tidak hanya menggambarkan struktur teori, tetapi menyediakan jawaban untuk pertanyaan dari status dan fungsi dari teori sebaik mungkin (Caldwell, 1994). Chapman dan Ahrens (2006) mengatakan bahwa dengan metodologi kualitatif, membawa suatu pemahaman bahwa hasil penelitian adalah penelitian itu sendiri, tidak hanya sekedar bagian dari dunia empiris, tetapi dipertajam oleh teori yang menarik dari sipeneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif dan kuantitatif terbagi kedalam banyak metode dan keduanya dapat saling mengisi pada bidangnya masing-masing. Kegiatan-kegiatan yang dihimpun dari kedua metode tersebut di antaranya kegiatan mengumpulkan, menganalisis dokumen, menghitung statistik, melakukan wawancara dengan praktisi atau informan dan mungkin bahkan melakukan pengamatan di tempat objek yang diteliti. Hal yang membedakan penelitian kualitatif dengan kuantitatif adalah cara peneliti mengetahui lapangan.

Ciri-ciri intrinsik yang melekat pada metode penelitian kuantitatif melekat pada sifat penelitian kuantitatif itu sendiri. Sebaliknya, ciri-ciri yang melekat pada metode kualitatif merupakan ciri yang melekat pada sifat penelitian kualitatif itu sendiri. Mengenal berbagai ciri kedua metode penelitian tersebut secara luas, menyebabkan seorang peneliti dapat mengerti peta dari metode yang harus digunakannya, sesuai dengan apa yang ingin ditelitinya. Dengan demikian, sebenarnya apakah seorang peneliti harus menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif sangat ditentukan oleh bentuk, sifat dan karakteristik dari penelitian yang dilakukan. Jadi pemilihan metode, bukanlah masalah suka atau tidak suka dengan suatu metode, bukan masalah kualitas dan bukan berkualitas, melainkan didasarkan pada kebutuhannya.

Saat peneliti ingin mengkonstruksi bagaimana pemikiran akuntansi atau berbagai tindakan yang ada pada suatu kerajaan di masa lalu, maka digunakanlah metode kualitatif dan sangat tidak pas kalau memaksakannya dengan menggunakan metode kuantitatif. Namun, saat seorang peneliti ingin melihat pengaruh pelaksanaan

pencatatan akuntansi terhadap motivasi berusaha pada para pelaku usaha kecil, tidak pas jika penelitian kualitatif yang digunakan, sehingga seharusnya digunakan metode survei yang merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Jadi, sesugguhnya, apakah harus menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif sangat ditentukan oleh kebutuhannya, bukan ingin menggunakannya dengan alasan lebih berkualitas, lebih mudah, dan lebih bergengsi serta alasan yang tidak rasional lainnya.

2.4. MENGKONSTRUKSI AKUNTANSI HARTA DENGAN PERSPEKTIF SEJARAH

Penelitian ini merupakan penelitian akuntansi yang menggunakan perspektif sejarah untuk mengkonstruksi bagaimana pemikiran-pemikiran dan tindakan akuntansi harta diberlakukan oleh sebuah bekas kerajaan yang ada di Riau. Substansi dalam setiap *Explanatory history,* mengharuskan peneliti untuk tertarik khususnya pada penyebab-penyebab peristiwa. Dengan demikian, pertanyaan mengapa sesuatu terjadi, dikonstruksi dengan suatu cara khusus dan merupakan konsentrasi utama peneliti. Konsentrasi tersebutlah yang membimbing pada satu pilihan episode, signifikansi lingkungan tertentu untuk membuat kesimpulan dalam rangka membangun sebuah konsep (Thomas, 2003). Membangun sebuah konsep memaksa peneliti untuk bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis (Miles dan Huberman, 1992)

Kajian tentang kerajaan yang pernah ada di Riau telah banyak ditulis oleh para sejarawan Riau dan masyarakat yang berminat untuk mengeksplornya dari sisi sejarah sosial dan kebudayaan. Penelitian yang berkaitan dengan kebudayaan di antaranya dilakukan oleh Dewi dkk (1999), Nurhamidahwati dkk (1998, 1995), Malik (2012), Nurhabsyah (2005), Jamil (2005), Tarigan (1997) dan lainnya. Namun, kajian dengan menggunakan perspektif akuntansi menurut pengetahuan yang ada belum pernah dilakukan oleh para peneliti yang tertarik dengan bekas kerajaan di Riau, sehingga menjadi bagian dari keunikan penelitian ini. Berbagai pemikiran dan praktik akuntansi harta secara spesifik mungkin tidak disadari oleh anggota Kerajaan Siak Sri Inderapura di Riau saat itu, namun secara pemikiran, tindakan dan praktik, mereka mungkin telah melakukannya sehingga sebagian besar dari penelitian ini adalah mengkaji akuntansi harta yang pernah dipraktikkan dalam bentuk pemikiran atau tindakan dengan berbagai pemaknaanya.

Kondisi penelitian ini dapat dianalogikan seperti pedagang cabe di pasar, para pedagang mengetahui persis bahwa jika persediaan cabe di pasaran sedikit dan pembeli banyak, maka harga cabe akan melambung tinggi dan sebaliknya jika cabe banyak tersedia di pasar dan pembeli tetap seperti semula, maka harga cabe akan turun. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pengalaman yang mereka miliki sebenarnya

bagian dari teori *demand* dan *supply*. Inilah keunikan kedua dari penelitian ini yakni berupaya mengkonstruksi praktik dan nilai-nilai akuntansi harta dengan berbagai pemaknaannya yang pernah dilakukan di salah satu kerajaan di Riau.

Kerajaan Siak Sri Inderapura yang berada di Riau, merupakan kerajaan yang pernah ada di masa lampau dengan fokus periode 1908 – 1946. Oleh karena penelitian ini merupakan bagian dari penelitian sejarah, maka proses penelitian dilakukan dengan menghimpun dan mendeskribsikan semua informasi. Hasil deskribsi selanjutnya dikonfirmasi kepada informan yang masih hidup dan terlibat langsung, serta dari informan yang memperoleh warisan pengetahuan yang cukup tentang Kerajaan Siak di masa lampau. Data yang dikumpulkan dan dideskribsikan berdasarkan pada dokumen-dokumen literatur yang tersedia, manuskrip, artefak dan berkas-berkas yang dapat ditafsir untuk menjelaskan pemaknaan di masa lampau. Monumen-monumen baik yang ada di Jakarta, Pekanbaru, maupun benda-benda yang ada di Istana Siak menjadi tempat tujuan utama untuk mendapatkan sumber sejarah. Metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini di maksudkan untuk mengkaji kondisi lingkungan akuntansi harta, konteks sosial-kultural dengan menganalisis faktor-faktor kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang diteliti.

Proses analisis penelitian menggunakan alat-alat yang memenuhi syarat untuk mempermudah analisis, sehingga sesuai dengan objek yang diteliti. Namun, dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah-istilah khusus dalam ilmu sejarah, karena dalam ilmu sejarah tidak tersedia perbendaharaan istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep-konsep khusus (Kartodirdjo, 1995). Langkah-langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah adalah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang dipakai dalam analisis itu.

Tradisi penulisan sejarah sangat terikat pada paham bahwa setiap kejadian historis bersifat unik artinya khusus dan hanya sekali itu terjadi dan tidak akan berulang lagi. Pusat perhatian sejarah adalah detail mengenai apa, siapa, kapan, dan sebaliknya tidak diperhatikan bentuk, pola, kecendrungan, atau segi umum lainnya seperti keteraturan, hukum-hukum sama sekali tidak di indahkan. Perhatian yang terbatas pada soal-soal khusus dan unik dalam sejarah menegaskan sifat idiografi pada sejarah. Tujuan penggambaran gejala sejarah adalah memberikan makna, sedang penjelasan tentang sebab-sebab (*causal explanation*) dalam sejarah *narrative* dilakukan secara implisit di dalam deskripsinya (Kartodirdjo, 1993). Dengan demikian, tidak terasa adanya kebutuhan teori atau alat-alat analitis lainnya. Hal itu baru dirasakan apabila secara explisit dilakukan analisis terhadap berbagai unsur dan faktor penyebab yang melatarbelakangi gejala sejarah.

Penggarapan sejarah sudah mengundang penggunaan metodologi dan teori, apabila dilakukan analisis terhadap berbagai unsur dan faktor penyebab yang melatarbelakangi gejala sejarah (Kartodirdjo, 1993). Metodologi sebagai ilmu tentang metode, tidak dapat dipelajari tanpa mengangkat masalah kerangka teoritis dan konseptual. Pendekatan metodologi hanya dapat dioperasionalkan dengan bantuan seperangkat konsep dan teori. Kebutuhan terhadap suatu metodologi semakin terasa apabila diperhatikan bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan beserta berbagai perspektif yang inheren dalam berbagai bidangnya, setiap gejala sejarah tampak sebagai kompleksitas yang mencakup berbagai aspek atau memiliki berbagai dimensi. Agar penggarapan gejala itu mampu menganalisis atau mengextrapolasikan (mengeluarkan) berbagai fakta, unsur dan dimensinya, maka sangat diperlukan alat-alat analisis.

Implikasi metodologi sebagai cara untuk menganalisis gejala historis, menyebabkan penggambaran secara naratif dirasakan tidak memadai serta tidak memuaskan di satu pihak, sedangkan di pihak lain analisis yang dilakukan menurut kerangka referensi tertentu menjadi tuntutan yang wajar. Di sini metodologi dalam studi sejarah menuntut penyesuaian agar dapat meningkatkan efektifitasnya. Penyesuaian itu dapat terwujud sebagai perbaikan kerangka konseptual dan teoritis sebagai alat analisis. Kartodirdjo (1993) menjelaskan bahwa Terdapat beberapa pendekatan dalam melakukan analisis penelitian sejarah di antaranya pendekatan sosiologi, antropologi, politikologi dan lain sebagainya.

Apakah dalam sebuah penelitian harus menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi dan politikologi atau kombinasi dari ketiganya, sangat bergantung kepada kebutuhan di lapangan. Jika dengan pendekatan sosial dirasakan cukup memenuhi informasi yang dibutuhkan, maka pendekatan lainnya tidak digunakan untuk menghindari *redundancy* informasi. Namun sebaliknya apabila di lapangan menghendaki pendekatan lainnya, maka pendekatan tersebut harus digunakan sebagai cara untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan sejarah, arkeologi dan akuntansi. Hasil dari penggunaan pendekatan tersebut, disajikan mulai dari bab empat sampai dengan bab terakhir. Penyajian masing-masing bab merupakan bagan dari hasil proses analisis kajian akuntansi, yang diakhiri dengan suatu sintesis akuntansi harta dari perspektif sejarah.

Pendekatan sejarah mengkaji dari sisi sosial atas peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan pemikiran atau tindakan era Sultan Syarif Kasim yang berkaitan dengan akuntansi harta. Sejarah dalam hal ini merujuk pada pengetahuan sejarah dalam arti subjektifitas, karena hasil dari pengkajian yang didasari pada interpretif peneliti. Kartodirjo (1993) menjelaskan bahwa disebut dengan subjektif karena sejarah memuat unsur-unsur subjektifitas dari pengarang atau penulis. Pengetahuan dan gambaran sejarah merupakan hasil dari konstruksi peneliti sendiri, sehingga gaya bahasanya, sifatnya, struktur pemikirannya serta pandangannya sangat dipengaruhi

oleh peneliti. Sejarah dalam arti subjektif juga merupakan hasil dari sebuah konstruksi, yakni bangunan yang disusun penulis sebagai sebuah pengetahuan sejarah (Kartodirjo, 1993). Konstruksi akuntansi harta dalam penelitian ini di maksudkan untuk membangun atau menyusun bangunan dari pemikiran-pemikiran yang muncul dalam era Sultan Syarif Kasim. Oleh karena objek yang dikonstruksi adalah era tahun 1908-1946, maka proses konstruksi yang digunakan harus menggunakan konstruksi sejarah. Secara skematis, proses konstruksi akuntansi harta mulai dari sejarah dalam arti objektif (berdasarkan sumber-sumber yang terkait), sampai dengan sejarah dalam arti subjektif (hasil interpretasi peneliti) digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1: Proses Konstruksi Akuntansi Harta Dengan Perpektif Sejarah

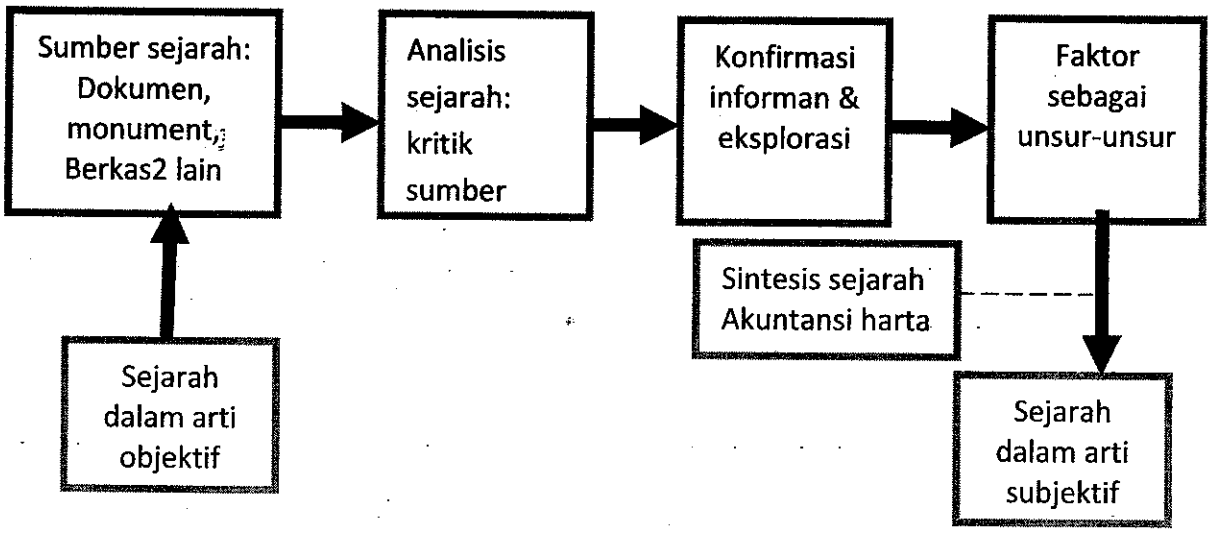

Sumber: Dikembangkan dari Kartodirdjo (1993).

Peristiwa masa lalu umumnya meninggalkan bekas yang dapat dijadikan sebagai "saksi" atau bukti bahwa kejadian itu sungguh-sungguh ada seperti surat wakaf sebagai bukti tentang kepemilikan dan pengelolaan harta Kerajaan Siak Sri Inderapura. Umumnya bekas yang paling banyak digunakan sebagai saksi oleh para peneliti yang menggunakan perspektif sejarah ialah dokumen yang memuat catatan tentang berbagai tindakan, pendapat pikiran, pernyataan dan lain sebagainya. Setelah itu, semua dokumen saksi dianalisis dengan mengkritisi substansi isi sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah substansinya dapat diperoleh, baru diteliti isinya, apakah pernyataan, fakta-fakta dan ceritanya dapat dipercaya, melalui konfirmasi kepada informan. Semua hasil analisis yang telah dikonfirmasi disintesiskan, sehingga menghasilkan sejarah dalam arti subjektif.

2.5. MENANGKAP DATA PENELITIAN

Data penelitian menempatkan peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena digunakan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian (research questions). Data penelitian digunakan untuk menentukan apakah sebuah penelitian sudah dapat dihentikan atau tidak. Oleh sebab itu, peneliti harus dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan data baik dari sisi substansi data itu sendiri, maupun dari sisi proses pengumpulan datanya. Creswell (2007) memvisualisasikan bagaimana melakukan rangkaian kegiatan proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Meskipun proses ini belum menjadi sebuah metode yang dapat digunakan oleh berbagai keadaan, namun dalam konteks penelitian ini dipandang sangat cocok. Alasan mengapa proses pengumpulan data Creswell digunakan dapat dijelaskan mulai dari kotak penentuan lokasi situs atau individu.

Lokasi situs penelitian sudah sangat diketahui peneliti sejak lama dan peneliti dilahirkan serta dibesarkan di wilayah kekuasaan

Siak Sri Inderapura yakni Pekanbaru dan Bagan Siapi-api. Namun demikian, individu informan, kecuali Hasan Masri belum diketahui peneliti sebelumnya. Hal inilah salah satu yang dikontrol oleh proses pengumpulan data Creswell, sehingga penentuan di mana lokasi individu informan harus dicari oleh peneliti. Alasan kedua mengapa menggunakan metode pengumpulan data Creswell adalah mengontrol peneliti untuk segera memperoleh akses dan segera membuat laporan. Tahap memperoleh akses harus dilakukan peneliti karena situs penelitian saat ini sudah menjadi miliki Pemerintah Daerah. Peneliti telah membuat laporan tentang rencana penelitian kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau, dalam hal ini Kantor Kesbang yang berada di Gubernuran, serta instansi lainnya seperti disajikan pada laporan Manuskrip, untuk mendapatkan ijin penelitian.

Langkah memperoleh akses merupakan langkah paling krusial dalam penelitian ini karena sebagai penentu bisa tidaknya peneliti akses secara leluasa ke situs penelitian. Ijin yang diperoleh peneliti, sangat membantu peneliti untuk mendapatkan individu sebagai informan penelitian. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa, informan dengan senang hati menerima peneliti apabila sudah mengantongi ijin penelitian dari instansi yang berwenang. Langkah berikutnya, membimbing peneliti sampai kepada tahap pengumpulan data, pencatatan informasi, menentukan solusi masalah-masalah di lapangan dan terakhir sampai kepada penyimpanan data. Semua langkah-langkah pengumpulan data Creswell sangat cocok dengan tahap-tahap pengumpulan data yang telah dilakukan peneliti, sehingga proses ini dipakai dalam proses pengumpulan data.

Langkah-langkah sebelum perolehan data, kondisi situs penelitian, tahap pengumpulan data, pencatatan informasi sampai kepada penyimpanan data merupakah langkah-langkah yang harus peneliti lakukan dalam perolehan data. Inilah yang

menjadi alasan utama mengapa metode pengumpulan data Creswell yang digunakan. Kegiatan pengumpulan data Creswell sangat cocok dengan kondisi lapangan yang dihadapi. Adapun proses pengumpulan data di maksud, digambarkan pada Gambar 2.2. Proses pengumpulan data yang telah dilakukan seperti yang telah dijelaskan, berawal dari tahap lokasi/individu, dan berakhir pada tahap penyimpanan data.

Gambar 2.2: Kegiatan Pengumpulan Data

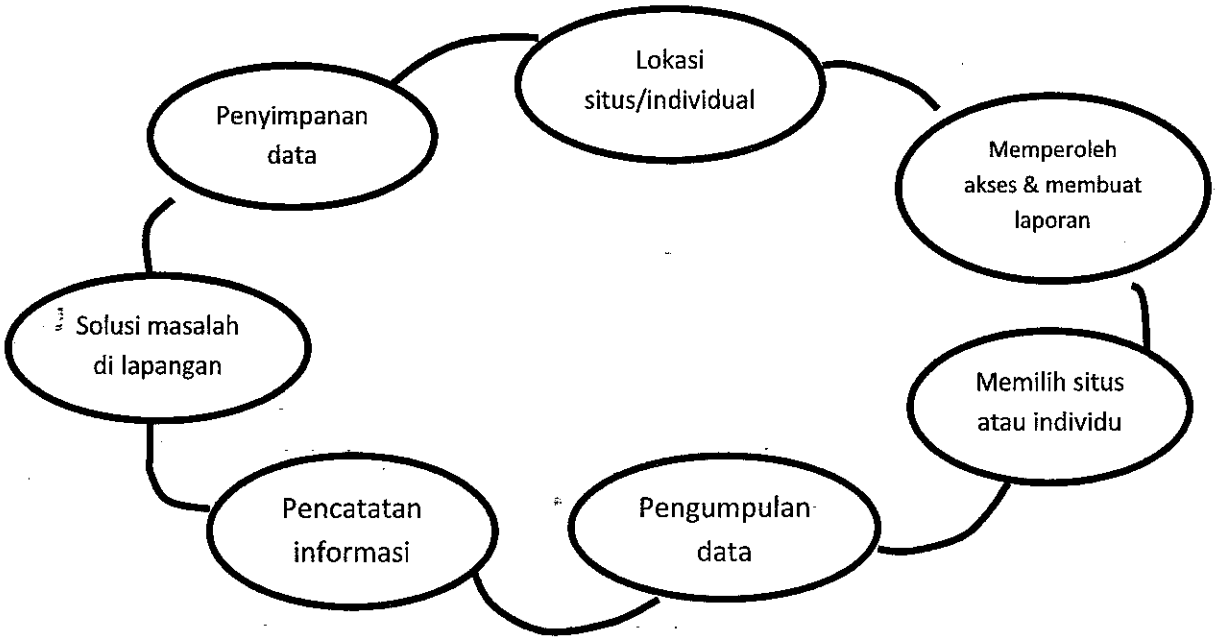

Sumber: Creswell, 2007.

Koleksi data dimetaforakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkualitas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses penelitian. Proses pengumpulan data dalam gambar di atas dapat dimulai dari mana saja, tergantung pada situasi situs yang dihadapi. Poin terpenting di sini adalah peneliti harus mempertimbangkan bermacam langkah dalam pengumpulan data.

Langkah terpenting dalam semua proses pengumpulan data adalah menemukan orang atau tempat yang diteliti, serta memperoleh akses dan membuat laporan kepada pertisipan sehingga mereka bersedia menyediakan data yang berkualitas. Di sinilah diperlukan strategi untuk maksud penetapan sampling individu atau peta yang dapat memberikan kepada peneliti dalam menjawab masalah penelitian yang diuji. Tahap penyimpanan data merupakan bagian terakhir dari kegiatan pengumpulan data apabila kita memulainya dari penetapan lokasi situs atau individual.

Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa setiap kajian penelitian memerlukan suatu cara yang sistematis untuk menyimpan data lapangan yang sudah dikode, dan cara untuk mendapatkan kembali data itu, bilamana dibutuhkan selama

pelaksanaan analisis. Berg (2001) juga mengutip pernyataan Miles dan Huberman yang menegaskan bagaimana sebuah data disimpan dan dipanggil sebagai jantung dari sebuah manajemen data. Sistem penyimpanan, pemanggilan dan penggunaan data yang jelas merupakan bagian dari hal yang paling kritis sehubungan dengan pemeliharaan data yang telah dikumpulkan.

Adapun data-data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah data tentang manuskrip inventaris harta yang dimiliki oleh Kerajaan Siak Sri Inderapura. Data manuskrip inventaris harta Kerajaan Siak diperoleh dari berbagai sumber terutama di bekas Istana Kerajaan Siak Sri Indra pura yang berada di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Manuskrip data penelitian juga diperoleh dari sumber lainnya seperti di Museum Nasional Jakarta dan di Museum Kebudayaan yang ada di Pekanbaru. Data yang menyangkut dengan Pengungkapan regulasi pengelolaan dan kepemilikan harta yang dikeluarkan oleh kerajaan merupakan bagian data lainnya yang ditelusuri dalam penelitian ini. Data ini diupayakan melalui penelusuran naskah-naskah yang ada pada saat Kerajaan Siak membangun komunikasinya baik dengan pihak kumpeni maupun dengan rakyatnya. Data tentang nilai-nilai ataupun makna setiap pencatatan harta yang ada diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang berkompeten untuk memberikan informasi dan sekaligus tempat untuk melakukan konfirmasi.

Merriam (2002) menyatakan bahwa terdapat tiga Sumber utama data dalam penelitian kualitatif yakni interview, observasi dan dokumentasi. Interview merupakan sumber yang menempati struktur teratas dari dua sumber lainnya karena sebagai penentu dan sekaligus konfirmasi tentang data. Konfirmasi data telah dilakukan mulai penyajian bab V dari penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat teratur dan spesifik menyangkut substansi data merupakan bagian utama dari interview. Pertanyaan-pertanyaan disiapkan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan fokus penelitian. Observasi menempati struktur kedua setelah interview dan merupakan tangan pertama dalam perolehan data karena menyangkut dengan peristiwa, tempat, benda-benda dan rekaman gambar.

Observasi dilakukan mulai dari Museum Nasional Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Museum Daerah Pekanbaru, Perpustakaan Daerah Pekanbaru, sampai dengan Perpustakaan Siak dan Istana Siak. Sumber data yang menempati struktur ketiga adalah dokumentasi peninggalan yang ada mengenai Kerajaan Siak Sri Inderapura. Dokumentasi bentuknya dapat bervariasi seperti benda-benda berupa Istana Siak dan seisinya, manuskrip berupa Surat Wakaf, Bab Al-qawa'id, dan Catatan Muhammad Jamil sebagai sekretaris Sultan Syarif Kasim yang merupakan peninggalan masa lalu.

2.6. METODE ANALISIS

Analisis yang digunakan untuk mengkonstruksi akuntansi harta dalam penelitian ini didasari pada metode sejarah menurut pemikiran Foucault (1926-1984). Metode analisis sejarah Foucoult secara garis besar dicirikan pada dua hal pokok yakni arkeologi dan geneologi. Arkeologi diartikan sebagai upaya pengujian atau penganalisisan arsip yang merupakan kumpulan pernyataan yang disebut dengan diskursus (Stewart, 1992). Kumpulan pernyataan yang disebut dengan diskursus atau sistem pemikiran inilah yang sering disebut dengan *episteme*. Episteme adalah produk dari analisis sejarah arkeologi Foucoult. Episteme dalam penelitian ini merupakan pengetahuan yang menjadi tujuan utama untuk ditemukan dalam menghasilkan sebuah konsep yang sudah lama ada dalam suatu masa tertentu. Proses analisis arsip yang telah dilakukan tergambar pada bab IV sampai dengan bab X.

Geneologi Foucoult, didasari pada perspektif analisis sejarah menurut Nietszche, yang di maksudkan untuk mengidentifikasi aksiden-aksiden pengetahuan yang berserakan (ruptures). Geneologi Foucoult tidak dimaksudkan untuk melihat keterkaitan antara masa sekarang yang dipengaruhi oleh masa lalu, melainkan suatu pengetahuan yang murni terjadi pada suatu masa dan bersifat diskursif (Stewart, 1992). Dengan demikian, posisi penelitian ini meskipun meneliti kajian terhadap masa lampau, tidak dimaksudkan untuk menghubungkannya dengan masa sekarang atau dengan kata lain keadaan sekarang ditentukan oleh keadaan masa lalu, kecuali sebagai refleksi untuk masa sekarang dan yang akan datang. Hal inilah yang membedakan antara sejarawan *fungsionalist* seperti yang banyak dipaparkan dengan sejarawan non fungsionalist seperti Foucoult.

Sejarawan fungsionalist berpandangan bahwa apa yang ada sekarang ditentukan oleh keadaan masa lalu. Dengan demikian, sejarah masa lalu menentukan kondisi saat sekarang. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan sejarawan non fungsionalist seperti Foucoult yang mengatakan bahwa kondisi sekarang sama asingnya dengan kondisi masa lalu. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda dalam mengartikan sejarah, dalam konteks-konteks tertentu di antara para sejarawan memiliki banyak persamaan pandangan, sehingga mengutip dari beberapa pandangan yang sama adalah bagian dari harmonisasi pemikiran para ahli yang disajikan dalam metode penelitian.

Harmonisasi pemikiran telah lama diperkenalkan oleh para filsuf dalam sebuah istilah *commensurability*. *Commensurability* merupakan konsep dalam filsafat ilmu yang berupaya untuk memadukan teori-teori ilmiah yang sepadan atau saling mendukung dalam satu pembahasan atau diskusi konsep dalam menentukan teori yang lebih benar. *Incommensurability* sebagai lawan kata *Commensurability* merupakan istilah yang menggiring pada suatu upaya untuk menggunakan berbagai konsep atau teori dari berbagai paradigma dalam mengintrpretasikan sebuah teks (Kuhn, 1983).

Pengetahuan yang disajikan pada bab IV sampai dengan bab X merupakan produk analisis geneologi yang bersifat diskursif pada masa masing-masing dari sebuah Kerajaan Siak Sri Inderapura sampai kepada era Sultan Syarif Kasim.

Pemikiran analisis sejarah Foucoult menegaskan bahwa pengetahuan secara sosial dikonstruksi pada masing-masing era yang berbeda yang dia sebut dengan episteme (Brown, 2005). Pemikiran Foucoult sangat cocok dengan kondisi situs penelitian yang menjadi salah satu kerajaan dari sekian banyak kerajaan besar di masa pergerakan nasional. Penelitian ini tidak berpretensi untuk mencari salah satu faktor yang menentukan kemajuan akuntansi pada masa sekarang, namun dimaksudkan untuk menjadi refleksi bagi pengembangan akuntansi sekarang. Pandangan oposisi biner tidak cocok untuk digunakan dalam melihat urgensi penelitian ini karena pemikiran atau tindakan akuntansi yang terjadi 100 tahun sebelumnya bisa saja menjadi ilham dan sangat diperlukan dalam pengembangan akuntansi setelahnya.

Tahapan analisis sumber seperti terlihat pada gambar 2.1 dilakukan dengan metode arkeologi Foucault, yakni melalui pengujian "*Archive*" (arsip). Aktivitas arkeologi dalam menguji arsip terdiri dari pertama, Menentukan dan mendefinisikan diskursus itu sendiri, dalam hal ini akuntansi harta. Kedua, Bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala spesifikasinya, seperti surat wakaf yang dapat disamakan dengan standar akuntansi pengelolaan harta pada saat itu, sikap dan tindakan Sultan Syarif Kasim terhadap harta. Ketiga, Menentukan aturan-aturan bagi praktik-praktik diskursif yakni yang hanya terkait dengan akuntansi. Keempat, Penulisan ulang dalam bentuk eksterioritas dalam bentuk yang diusahakan agar tetap awet, yakni bagian dari interpretif peneliti (Foucault, 2012).

Seperti telah disinggung sebelumnya, Arsip diartikan sebagai sistem-sistem yang memantapkan pernyataan-pernyataan baik sebagai peristiwa-peristiwa dengan kondisi dan wilayah pemunculannya. Dalam konteks penelitian ini, arkeologi bertugas untuk menganalisis sejarah "sistem pemikiran" masa lalu (*histocrical a prior)* yang ditujukan pada cara mempraktikan pengetahuan pada masa tertentu. Sistem pemikiran menurut Foucault seperti dijelaskan Brown (2005) disebut dengan episteme. Dijelaskan bahwa episteme merupakan suatu kondisi yang memungkinkan bagi munculnya pengetahuan-pengetahuan dan teori-teori dalam suatu masa tertentu.

Kombinasi antara proses konstruksi akuntansi perspektif sejarah menurut Kartodirjo (1993), proses pengumpulan data metode Creswell (2007) dan metode analisis sejarah Foucoult (2007) digambarkan seperti pada gambar 2.1. Penjelasan gambar metode CKF dimulai dari lokasi situs/individu sebagai berikut.

Sebelum melangkah lebih jauh, peneliti melakukan prasurvei ke lokasi situs penelitian dan para individu yang nantinya menjadi informan peneliti. Tahap awal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam rangka menjamin bahwa

penelitian dapat dilakukan atau tidak. Tahap awal ini telah dilakukan peneliti sejak akhir Tahun 2011 disela-sela libur perkuliahaan dan hasilnya sangat menggembirakan, meskipun baru sekedar nama-nama informan yang layak untuk dimintai konfirmasinya. Setelah ada keyakinan bahwa penelitian sangat mungkin dilakukan, tahap berikutnya mulai melakukan survei lapangan dengan membawa berbagai perangkat penelitian berupa surat ijin penelitian untuk ke Museum Nasional, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Wilayah Pekanbaru, Museum Daerah Pekanbaru dan situs penelitian yakni melalui Pemerintah Daerah Riau untuk akses ke Istana Siak Sri Inderapura.

Ijin penelitian ke situs sangat diperlukan karena situs saat ini bukanlah milik kerajaan, melainkan milik Pemerintah Daerah Riau, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan perolehan data berupa manuskrip dan artefak harus seizin Pemerintah Daerah Riau. Penjelasan tentang situs penelitian secara khusus disajikan pada bagian dalam bab ini. Izin yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Riau sangat mempermudah dalam mengakses Istana Siak dan penentuan individu informan yang sangat berkompeten untuk dijadikan sebagai informan. Meskipun Pemda dalam hal ini Kementrian Pariwisata Daerah Riau merekomendasikan hanya 2 orang yang paling berkompeten, namun di lapangan diperoleh 6 orang sesuai dengan saran beberapa informan yang telah dihubungi.

Keenam informan tersebut telah memberikan informasi serta data yang ada pada masing-masingnya terkait dengan manuskrip dan artefak Kerajaan Siak pada masa Sultan Syarif Kasim. Hasil rekaman dan foto dengan beberapa informan terinventarisir dalam sebuah file dan laporan khusus. Setelah dapat dipastikan berapa jumlah informan dan kesediaan situs penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data dengan sistem trasir yang dimulai dari Jakarta.

Penelusuran data dimulai dari Museum Nasional Jakarta atau terkenal dengan nama Museum Gadjah. Hasil dari penelusuran Museum Gadjah berupa artefak yang terdiri dari Mahkota Kerajaan Siak dan pedang Sultan Siak asli yang terletak di Gedung Emas Ruang Etnographi. Disamping artefak, diperoleh beberapa dokumen lainnya berupa buku-buku yang terkait dengan Kerajaan Siak melalui perpustakaan Museum Nasional. Dengan demikian, hasil penelusuran yang diperoleh dari Museum Nasional adalah artefak dan dokumen. Penelusuran berikutnya dilakukan ke Perpustakaan Wilayah Pekanbaru.

Kunjungan ke perpustakaan Pekanbaru, hasil yang diperoleh hanya berupa dokumen, khususnya diperoleh pada ruang Bilik Melayu. Penelusuran berikutnya dilakukan ke Museum Daerah Sang Nila Utama Pekanbaru. Hasil yang diperoleh dari museum ini berupa uang kertas yang berlaku pada zaman Sultan Syarif Kasim seperti terlihat pada lampiran foto. Namun pengambilan foto uang kertas ini mengalami sedikit gangguan karena faktor pencahayaan. Berbagai macam artefak banyak ditemukan di Museum Daerah Pekanbaru, namun sayanganya semua berbentuk replikasi.

Penelusuran terakhir dilakukan ke Istana Siak, sebelum penulis melakukan konfirmasi dan explorasi ke para informan. Tahap pengumpulan data merupakan bagian dari penelusuran episteme akuntansi yang ada selama era Sultan Syarif Kasim.

Tahap selanjutnya adalah pencatatan hasil temuan dari pengumpulan data lapangan. Pencatatan hasil temuan data lapangan menggunakan beberapa media yang memiliki fidelitas tinggi seperti alat perekam dan kamera. Pencatatan hasil pengumpulan data, diperoleh melalui peng"copy"an fisik naskah-naskah yang dimiliki oleh para informan. Terhadap naskah-naskah yang secara fisik tidak mungkin untuk di *copy*, maka pencatatannya dilakukan dengan memotret fisik naskah tersebut. Seluruh proses pengumpulan dan pencacatan data di lapangan bukanlah tanpa masalah. Banyak masalah yang ditemukan terkait dengan perolehan data, mengingat beberapa manuskrip dan artefak tidak semuanya berada di satu tempat seperti di Istana Siak, melainkan terdapat di tengah-tengah masyarakat yang dulunya memiliki peran atau dari keturunan tokoh yang memiliki peran.

Setiap temuan masalah-masalah dalam pengumpulan dan pencatatan data di lapangan dapat diselesaikan dengan melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh tua Masyarakat Melayu yang tergabung dalam Wadah Lembaga Adat Melayu (LAM). Melalui Lembaga Adat Melayu diperoleh beberapa dokumen dan artefak yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen yang diperoleh di antaranya catatan Muhammad Jamil tentang tugasnya selama menjadi sekretaris pribadi Sultan Syarif Kasim, Surat Wakaf Tulisan Arab Melayu, catatan perhitungan sumbangan sultan. Artefak dapat Berupa Istana Asserayah Hasyimiah dan seisinya, Mahkota Raja, dan benda lainnya yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Hasil temuan data dan informasi berupa dokumen manuskrip ataupun artefak, di"file"kan kedalam rekaman khusus dengan para informan. Demikian halnya dengan dokumen foto-foto yang telah diperoleh dari lapangan, disimpan kedalam file foto, cetak foto dan tersimpan dalam beberapa USB dan *external Hardisk*. Rekaman tertulis berupa salinan daftar harta, salinan surat wakaf dan Babul al-qawaid, salinan *besluit* penggunaan harta dan penjualan harta direkam secara fisik. Kumpulan buku-buku dari berbagai sumber secara fisik terkumpul secara khusus. Hasil penelusuran situs baik berupa dokumen maupun artefak merupakan bahan sejarah yang memiliki arti objektif. Dokumen maupun artefak adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui konfirmasi dan explorasi, sehingga dapat dianalisis. Analisis dilakukan dengan mempertanyakan dan menggali sumber sejarah dalam kerangka kritik atas sumber-sumber tersebut. Hasil analisis inilah yang dapat menentukan faktor-faktor sebagai unsur-unsur pembuat kesimpulan. Pada tahap ini pula episteme akuntansi ada dan menemukan berbagai cara atau pengetahuan yang muncul pada saat itu untuk mengatasi problematik akuntansi. Hasil kesimpulan berupa penentuan faktor-faktor merupakan produk dari sejarah dalam arti subjektif.

2.7. SITUS PENELITIAN

Situs penelitian merupakan tempat atau individu yang menjadi sasaran pengkajian. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Kerajaan Siak Sri Inderapura yang berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kerajaan Siak yang ditandai dengan dibangunnya Istana Asseraiyah Hasyimiah merupakan bagian sisa kerajaan yang pernah jaya di masa terakhir kesultanan pada tahun 1908 -1946. Kerajaan Siak berada ± 120 km dari kota Pekanbaru atau dapat ditempuh dalam waktu ± 2 – 2,5 jam melalui *Speedboat* menyusuri Sungai Siak atau dapat ditempuh dalam waktu 3 jam melalui jalan darat.

Sejarah Riau telah mempunyai peranan penting di masa lampau dan masa-masa yang akan datang. Berasal dari Riau inilah dahulunya datang apa yang disebut dengan "Bahasa Melayu Riau", yang dijadikan sebagai bahasa persuratan, bahasa ilmu pengetahuan (Hamka, 1994). Bahasa Indonesia yang digunakan saat ini adalah bagian dari bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan dan pengayaan dari bahasa daerah lain. Penelusuran sejarah Riau khususnya dari perspektif akuntansi sangat menarik untuk penyelidikan sejarah akuntansi di tanah air. Mempelajari sejarah Riau dari perspektif akuntansi diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan khasanah ilmu akuntansi yang ada saat ini. Riau memiliki sangat banyak sisa-sisa kebesaran yang perlu digali dari paradigma akuntansi.

Riau memiliki beberapa nama kerajaan lama seperti Lingga, Kandis, Kuantan, Indragiri, dan Siak Sri Inderapura. Namun berdasarkan informasi yang ada, sisa peninggalan kerajaan berupa istana yang saat ini masih eksis adalah Kerajaan Siak Sri Inderapura. Kerajaan Siak Sri Inderapura ditandai dengan masih berdirinya istana kerajaan yang saat ini menjadi salah satu tujuan wisata dan kajian kebudayaan serta ilmu pengetahuan lainnya. Latar belakang pendirian Kerajaan Siak Sri Inderapura mengalami proses yang sangat panjang yakni dari tahun 1100 M. tidak mudah untuk mendapatkan literatur dalam rangka penelusuran proses perkembangan sejarah tersebut. Salah satu masalahnya adalah terjadi *missing link* antar generasi sebelum dan sesudahnya.

Masalah lainnya adalah sangat sedikit mereka dari garis keturunan yang meninggalkan dokumen khususnya dokumen secara tertulis. Adanya dokumen tertulis dari beberapa sumber bukan dengan serta merta dapat diterima oleh khalayak, melainkan banyak memunculkan perdebatan atas berbagai tulisan tersebut. Namun, sebuah tulisan sejarah bukan maju karena mendapat pengakuan semua pihak, tetapi semakin maju setelah mendapatkan kritikan dari berbagai pihak.

Keberadaan Kerajaan Siak Sri Inderapura dimulai dari Raja *keci'* (Kecil) yang di masa hidupnya pernah mengharungi laut Selat Malaka, merebut dan menguasai Johor, berlabuh ke Riau, Lingga, dan beberapa negeri di pesisir timur Pulau Sumatera

sebelum akhirnya sampai ke Buantan Siak Sri Inderapura. Raja Kecil mengakui dirinya sebagai anak yang sah dari Sultan Johor dan yang berhak atas tahta Johor, yang kemudian tetap menjadi raja atas Negeri Siak Sri Inderapura (Hamka, 1994). Proses jalannya kerajaan dari Sultan ke Sultan mengalami pasang surut yang berorientasi pada perebutan kekuasaan. Intrik-intrik antar keluarga dalam perebutan tahta, perselisihan antar keluarga dan campur tangan penjajah menjadi warna yang senantiasa menghiasi perjalanan kerajaan dari waktu kewaktu. Oleh sebab itu, dapat dipahami apabila kajian-kajian sejarah lebih banyak mengungkapkan dari aspek kebudayaan, peperangan, adat istiadat, asal usul atau silsilah keluarga dan perkawinan. Namun perjalanan Kerajaan Siak Sri Inderapura di era terakhir yakni era Sultan Syarif Hasyim dan Sultan Syarif Kasim mengalami banyak perubahan dan orientasi khususnya di era Sultan Syarif Kasim.

Masa Sultan ke 11 yaitu Sultan Assayaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah Kerajaan Siak sampai dengan tahun 1908, dibangun istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun tahun 1889. Istana ini oleh bangsa Eropa diberi nama *The Sun Palace From East* (istana matahari timur). Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke 12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Perjalanan Sultan Syarif Kasim dari kecil sampai menjadi Raja Siak terakhir sangat berbeda dengan perjalanan Sultan-Sultan sebelumnya. Orientasi pandangannya sangat dipengaruhi oleh sikapnya terhadap penjajahan yang terlihat dimatanya, pendidikan yang dijalaninya, pemahaman agama yang dimilikinya dan pengetahuan hukum agama yang dikuasainya. Semua faktor yang memengaruhinya ini ikut berkontribusi pada bagaimana sikap, pandangan serta orientasinya serta nilai-nilai yang dianutnya ketika menjadi Sultan Siak terakhir. Bahkan puncak dari sikapnya ini, beliau secara ikhlas menyerahkan Mahkota sebagai simbol kerajaan dan harta lainnya ke Pemerintah Republik Indonesia sebagai dukungan moril dan materil bagi Kemerdekaan Republik Indonesia. Syarat dengan pengetahuan yang dimilikinya, menjadi faktor utama mengapa Kerajaan Siak dijadikan sebagai situs penelitian

Penelusuran perlakuan akuntansi dari perspektif sejarah di Riau khususnya bekas Kerajaan Siak Sri Inderapura sangat menarik untuk diteliti sebagai bagian dari sejarah akuntansi di tanah air. Mempelajari akuntansi dari perspektif sejarah di Riau, diharapkan bisa mendapat tambahan kekayaan untuk meningkatkan khasanah akuntansi yang ada saat ini. Riau memiliki sangat banyak sisa-sisa kebesaran yang perlu pengkajian lebih dalam dari paradigma akuntansi.

Mulai Sultan Siak pertama tahun 1723, Siak sudah membuka hubungan dagang dengan beberapa negeri Timur Tengah, seperti Turki, Arab dan Mesir. Pada saat itu, para pedagang muslim dari Arab dan negeri timur tengah lainnya, sudah memegang peran dalam pelayaran dan perdagangan melalui selat Malaka sejak abad ke-7 dan ke-8 M (Soejono dan Leirissa, 2010). Di samping itu, Siak senantiasa menjaga hubungan baik dengan negeri tetangga seperti Minangkabau, daerah tempat beliau dibesarkan (Dewi, 2000). Keadaan perdagangan era Raja Sultan Syarif Kasim berjalan sesuai dengan pola perdagangan yang berlaku saat itu yakni dibawah pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi perdagangan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). Sejak Malaka dikuasai oleh Belanda tahun 1641, kekuasaan politik dan ekonomi perdagangan VOC mengharuskan semua hasil tambang khususnya timah dijual hanya kepada VOC (Soedjono dan Leirissa, 2010).

Pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi perdagangan VOC yang sangat kuat sejak menguasai Malaka (masa kental dengan peperangan), menyebabkan mata uang Belanda (lihat lampiran 9) digunakan dalam bertransaksi. Kondisi ini sejalan dengan sejarah perkembangan uang yang identik dengan peperangan (Ferguson, 2001). Uang merupakan sesuatu yang sangat fundamental terhadap akuntansi, tidak hanya sebagai fasilitas alat penukaran saja, tetapi sebagai dasar pencatatan dan pengukuran dalam akuntansi (Sukoharsono dan Gafffikin, 2005). Catatan tertua yang masih *survive* ditulis pada tablet tanah liat dari Mesopotamia kuno . Catatan ini menunjukkan bahwa sistem moneter didunia pada awal periode 1700 SM didasarkan pada jumlah berat perak. Catatan ini menyatakan bahwa sistem moneter logam mungkin setidaknya telah berumur 4.500 tahun dan Pembuatan uang pertama kali dicetak di Lydia,Turki pada tahun 700 SM (Armstrong, 2014).

Masa era Sultan Syarif Kasim sebagai Raja Kerajaan Siak, terutama dilihat dari keadaan menjelang Kemerdekaan Republik Indonesia atau masa pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat tiga macam uang yang beredar (Lihat lampiran 9,10, dan 11) yakni: Pertama, *De Japansche Regeering,* dengan satuan Gulden dan menggunakan bahasa Belanda. Emisi 1942. Kedua, Pemerintah Dai Nippon, dengan satuan Rupiah dan menggunakan bahasa Indonesia. Emisi 1943 dan Ketiga, Dai Nippon Teikoku Seihu, dengan satuan Rupiah dan menggunakan bahasa Jepang, 1943 Emisi 1943 (Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 & Perum Peruri,1991). Jauh sebelumnya berlaku mata uang burung atau mata uang ayam yang berbentuk logam di wilayah kekuasaan Siak Sri Inderapura, seperli terlihat pada lampiran 6 bagian akhir tulisan.

Kelima mata uang yang beredar pada masa era Kerajaan Siak Sri Inderapura yang dipimpin oleh Sultan Syarif Kasim II memegang peranan sangat penting mengingat situasi saat itu seluruh kerajaan di Indonesia termasuk Kerajaan Siak Sri Inderapura berada dalam bayang-bayang peperangan, karena masih berada dalam kekuasaan Belanda. Sejarah mencatat bahwa sejak awal peperangan, sampai dengan masa–masa

terakhir ini, perang telah menjadi motor perubahan keuangan suatu Negara. Perang adalah ayah dari segala sesuatu seperti kata Herodotus dalam buku Ferguson (2001) yang menyatakan bahwa antara hal-hal yang terjadi selama Perang Pelopponesian hanyalah peningkatan pengeluaran biaya Athena, yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan penerimaan dari pajak yang lebih tinggi dan peningkatan pendapatan dari sumber-sumber lainnya.

Kesultanan Siak yang relatif kurang digarap oleh perkebunan-perkebunan asing (kecuali Jepang), dapat lebih mempertahankan sifat tradisional dan semangat keuletannya jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Dilihat dari segi kesukuannya, 117.000 penduduknya relatif homogen, variasinya hanya 30.000 orang Minang Kabau (Reid, 2012). Meskipun konsep kelompok etnis rupanya telah menjadi alat yang diciptakan dan digunakan selama zaman Kolonial untuk mengontrol penduduk lokal Siak Sri Inderapura (Perret, 2010), namun hanya di daerah inilah terdapat kelas pedagang pribumi yang kuat dan mereka melakukan perdagangan karet dan kopra yang tumbuh di dalam wilayah kesultanan. Pada tahun 1924, ada 109 pedagang pribumi di Siak dengan penghasilan lebih dari *f* 760 per tahun (Reid, 2012). Lebih dari dua kali lipat jumlah pedagang pribumi di seluruh bagian lain Sumatera Timur.

Sultan Syarif Kasim telah berhasil mempertahankan dan bahkan mengembangkan kesuksesan yang telah diraih oleh raja sebelumnya. Sultan Syarif Kasim (1915 – 1946) akan dikenang oleh rakyatnya sebagai Sultan yang telah mereformasi pendidikan dan sistem administrasi pemerintahan. Sementara itu, di mata Belanda, daerah itu tampak sebagai daerah yang luar biasa mandiri, namun terbelakang dan korup (Reid, 2012).

2.8. INFORMAN PENELITIAN

Informan merupakan kunci bagi keberhasilan dalam memperoleh atau mengkonfirmasi data penelitian kualitatif. Informan adalah pihak yang diharapkan dapat memberikan informasi melalui berbagai pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti, termasuk untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh melalui dokumen dan survei. Spradley (1997) mencatat beberapa pertanyaan mendasar yang diajukan kepada informan yakni 1. Apa yang diketahui oleh informan peneliti tentang kebudayaan mereka yang dapat peneliti temukan?, 2. Konsep apa yang digunakan oleh informan peneliti untuk mengklasifikasikan pengalaman mereka?. 3. Bagaimana informan-informan peneliti mendefinisikan konsep-konsep ini?. 4. Teori-teori seperti apa yang digunakan oleh informan peneliti untuk menerangkan pengalaman mereka?, dan 5. Bagaimana peneliti dapat menerjemahkan pengetahuan peneliti kedalam suatu uraian kebudayaan yang dapat dimengerti oleh rekan sejawat peneliti?.

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive* mengingat tidak semua orang yang mengenal dan mengetahui Kerajaan Siak dapat menjadi informan, termasuk mereka yang masih dalam garis keturunan sekalipun. Oleh sebab itu, informan yang dipilih haruslah yang telah memenuhi syarat yang peneliti tetapkan setelah menerima berbagai saran dari pihak yang berkompeten, sehingga menjamin kesahihan data. Jumlah informan dalam penelitian ini berkembang menjadi 6 orang setelah sebelumnya diperoleh saran-saran dari Departemen Kepariwisataan, tokoh Melayu dan koordinator Istana Siak Sri Inderapura yang terfokus pada 2 orang saja. Memang tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan acuan berapa orang seharusnya informan dalam penelitian kualitatif. Namun, secara struktur dan kedudukan, informan telah ditetapkan di antaranya merupakan putra pertama dari asisten pribadi Sultan Syarif Kasim, tokoh bagian dari keluarga istana yang juga sebagai seorang sastrawan Riau, informan yang bertugas sebagai koordinator istana, dan tokoh masyarakat yang mengenal Sultan Syarif Kasim ketika masih hidup.

Semua informan tersebut dianggap sangat berkompeten setelah menerima saran-saran dari berbagai pihak dan sangat layak dijadikan sebagai nara sumber. Proses penetapan informan mengalami tarik ulur setelah mendengar saran dari beberapa pihak yang juga bertindak sebagai informan. Proses tarik ulur yang berdampak kepada berapa jumlah informan yang layak untuk dihubungi secara otomatis sudah merupakan bagian dari proses kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Informan-informan yang telah disaring berdasarkan saran-saran dari tokoh dan masyarakat Melayu ini telah memberikan banyak bantuan moril dalam rangka memperoleh informasi-informasi yang *reliable* dan *valid.*

Meskipun proses komunikasi di lapangan menemukan informan sejumlah 6 orang, namun pandangan-pandangan yang ada cendrung menyarankan agar Informan mengerucut pada dua orang yang paling berkompeten untuk menjadi nara sumber yakni H.O.K. Nizami Jamil dan Tenas Effendy. Nizami Jamil adalah putra kandung dari Muhammad Jamil yang pada saat Sultan Syarif Kasim berkuasa menjadi Asisten Pribadi Sultan yang membantu Sultan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi lainnya. Beliau terlibat langsung membantu semua gerak sultan dalam memimpin Kerajaan Siak. Surat pengangkatan beliau tertanggal 1 Januari 1921 dapat dilihat pada lampiran 1. Ayahanda dari Nizami merupakan tokoh sentral Sultan yang banyak tahu tentang kiprah Sultan di Istana Siak dan telah sangat membantu Sultan dengan baik sehingga beliau diberi kehormatan oleh Sultan dengan gelar Orang Kaya (OK) yang berarti orang cakap, bijak dan sangat menguasai bidangnya. Surat pengangkatan pemberian gelar dapat dilihat pada lampiran 2. Nizami kebetulan pernah berkomunikasi langsung dengan Sultan Syarif Kasim pada saat melakukan inventarisasi harta kerajaan untuk pertama kalinya pada tahun 1964.

Informan kedua yang sangat berkompeten menurut berbagai pihak adalah Tenas Effendy. Beliau adalah tokoh satrawan dan budayawan Riau yang masih memiliki kekerabatan dengan kerajaan. Beliau sangat mengetahui banyak tentang kerajaan termasuk dengan kiprah Sultan Syarif Kasim. Saat ini, meskipun di usianya yang sudah sepuh, beliau tetap aktif menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi pengembangan Budaya Melayu. Beliau juga banyak berkiprah melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Riau

2.9. KEABSAHAN DATA

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, maka peneliti melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan proses kredibilitas dan transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas menyangkut dengan apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Kredibilitas telah digambarkan pada bagian sebelumnya. Agar proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jika dirasa kurang data yang diperoleh, maka dilakukan perpanjangan masa pengamatan untuk mendapatkan sumber informasi dan informasi yang dibutuhkan. Masa pengamatan hanya dihentikan jika peneliti yakin bahwa tidak ada lagi sumber informasi dan informasi yang bakal diperoleh. Puncak dari masa pengamatan adalah diperolehnya dokumen salinan kembali mengenai catatan pribadi Muhammad Jamil tentang perjalanannya selama menjadi sekretaris pribadi Sultan Syarif Kasim. Dokumen ini diperoleh langsung dari putra sulung Muhammad Jamil yang menjadi salah satu informan kunci penelitian.
2. Pengamatan dilakukan terus-menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan fokus penelitian dan memusatkan diri secara rinci.
3. Triangulasi, untuk pemeriksaan keabsahan data yang memfokuskan sesuatu yang lain dengan di luar data untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding data tersebut. Perolehan data secara triangulasi terutama menyangkut dengan wawancara tokoh oleh peneliti sebelumnya tentang informasi yang berkaitan dengan kajian penelitian dan Catatan pribadi Muhammad Jamil ketika menjadi sekretaris pribadi Sultan Syarif Kasim. Hal ini dilakukan oleh karena tokoh yang informasinya sangat dibutuhkan telah tiada.
4. *Peer debriefing*, dilakukan dengan membicarakannya dengan orang lain yaitu mengexpose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisik dengan rekan-rekan sejawat. Proses ini di fasilitasi langsung oleh program studi dalam bentuk kegiatan seminar hasil.

5. Mengadakan *member check* dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian untuk pengecekan analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data. Tahap ini didukung oleh kegiatan *focus discussion* dengan beberapa tokoh yang berkompeten untuk diundang.

Transferabilitas untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain atau tidak. Metode penelitian yang digunakan sangat menentukan transferabilitas ini. Dependabilitas dimaksudkan untuk memastikan kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interprestasi untuk menarik kesimpulan. Terakhir konfirmabilitas yang dilakukan dengan cara membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian, agar hasil penelitian dapat lebih objektif. Bagian tahap akhir ini dilakukan melalui seminar hasil yang di fasilitasi oleh Program Studi.

BAB 3

BERLAYAR MENYUSURI PELABUHAN PUSTAKA DAN DERMAGA TEORI

3.1. SEKAPUR SIRIH PENELITIAN AKUNTANSI MASA LAMPAU

Sebuah kerajaan dalam penguasaan harta, berbeda dengan sebuah bentuk pemerintahan lainnya dalam hal penguasaan harta. Kerajaan sebagai pusat kekuasaan yang dipimpin oleh seorang Raja, umumnya tidak hanya sebagai pusat kekuasaan dalam pemerintahannya, tetapi sebagai pusat kekuasaan dalam hal penguasaan harta. Kalau dalam bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden, maka dalam penguasaan harta selain harta yang telah dimiliki oleh rakyatnya, maka dikatakan sebagai harta milik Negara. Sedangkan dalam penguasaan harta selain yang telah dimiliki oleh rakyatnya dalam sistem kerajaan, maka dikatakan sebagai harta milik kerajaan. Kepemilikan harta oleh Raja, identik dengan kepemilikan harta oleh keluarga kerajaan, karena sistem kerajaan bersifat turun-temurun. Sifat turun-temurun ini digunakan oleh kerajaan untuk mewarisi kebesaran masa lalu, sehingga kebesaran Raja yang sedang berkuasa dibayangi oleh kebesaran Raja sebelumnya dalam rangka meningkatkan prestise atau harga dirinya (Omar, 1995). Demikian halnya dalam penguasaan harta yang bersifat turun-temurun dalam keluarga kerajaan.

Tulisan-tulisan berupa artikel atau jurnal tentang hasil penelitian yang menyangkut dengan sejarah kerajaan masa lalu telah ada yang melakukannya, meskipun belum mendapat banyak perhatian. Tulisan-tulisan ini akan jauh lebih sedikit jumlahnya, jikalau tulisan tersebut dikaitkan dengan penelitian akuntansi berbasis perspektif sejarah. Beberapa tulisan yang menyangkut dengan akuntansi masa lampau di antaranya ditulis oleh Gaffikin (2005) yang memfokuskan pada sejarah perubahan metodologi

dalam penelitian akuntansi oleh para teoritis maupun oleh para peneliti. Funnel (2005) meneliti tentang sejarah perkembangan akuntansi yang salah satu fokus bahasannya menyangkut dengan akuntansi sektor publik di tengah-tengah konflik konstitusi antara Monarkhi dan Parlemen Inggris. Periode ini merupakan titik awal dari perkembangan akuntansi sektor publik di Inggris. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gaffikin tersebut, Irvine (2005) melakukan penelitian pada situs yang sama mengenai kekuatan legitimasi laporan keuangan dalam menyelamatkan tentara di Inggris pada tahun 1865-1892. Moore dan Gaffikin (2005) melakukan penelitian sejarah dengan rentang waktu 1600-1855. Fokus penelitiannya pada penyelidikan sejarah titik awal berkembangnya profesi akuntansi. Kesimpulan dari penelitian mereka menyatakan bahwa redistribusi sosial yang berawal dari terjadinya revolusi industri menjadi titik awal bagi perkembangan profesi akuntansi.

Penulis lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya adalah Moore dan Cooper (2005) yang memfokuskan penelitiannya pada pengkonsolidasian profesi di era 1880-1906. Kedua penulis ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan strategi "*consciously and unconsciously*", faktor eksklusif, agensi, dan asosiasi secara sadar atau tidak telah membuat pengetahuan akuntansi menjadi sesuatu yang isoterik atau hanya diketahui dan dipahami oleh beberapa orang tertentu saja (para akuntan sebagai penyaji dan pembaca informasi akuntansi), sehingga informasi profesi harus dipisahkan dari hukum. Robson (1991) meneliti tentang proses translasi yang dielaborasi melalui sebuah studi silsilah program penyusunan standar di UK. Di Indonesia, Sukoharsono dan Gaffikin (2005) melakukan penelitian sejarah tentang asal-muasal akuntansi pertama kali di Indonesia berupa bookkeeping atau pencatatan pembukuan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa "*The Dutch East Indies Company*" pada tahun 1609 merupakan titik awal dari pengadopsian teknik *bookkeeping* modern melalui proses politik, sosial dan penetrasi ekonomi. Tulisan-tulisan yang diuraikan di atas merupakan bentuk dari penelitian sejarah yang mengangkat peristiwa masa lalu sebagai kajiannya. Topik-topik penelitian sejarah di atas mengangkat masalah yang berbeda-beda mulai dari masalah metodologi penelitian, akuntansi di bidang pemerintahan, sistem monarki di Inggris, asal-muasal akuntansi, sampai dengan masalah organisasi profesi dengan basis perhatian akuntansi.

3.2. ELEMEN SEJARAH

Elemen terpenting dalam istilah sejarah adalah waktu dan peristiwa (Hasbullah dan Supriyadi, 2012). Kedua elemen ini selalu terdapat dalam pengertian sejarah yang berasal dari berbagai Negara. Masih menjadi perdebatan tentang dari mana sebenarnya asal-muasal dari istilah sejarah. Ejaan sejarah dengan makna yang sama dapat memiliki perbedaan dalam penyebutannya, tergantung pada negaranya. Dalam bahasa Yunani disebut dengan *historia*, dalam bahasa Perancis disebut dengan *historie*, dalam bahasa

Italia disebut dengan *storia*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *geschichte*, dan dalam bahasa Belanda disebut *ghescheiedenis*. Demikian halnya dengan bahasa Inggris menyebut sejarah sebagai *history*. Terakhir dalam bahasa Arab yang memiliki dua kata yakni *tarikh* yang berarti menulis atau mencatat waktu serta peristiwa dan *syajarah* yang berarti terjadi (Hasbullah dan Supriyadi, 2012).

Waktu dan peristiwa yang telah terjadi merupakan bagian dari masa lalu. Namun untuk menyatakan apakah waktu dan peristiwa masa lalu tersebut bagian dari sejarah atau tidak sangat bergantung pada momennya. waktu dan peristiwa yang baru terjadi beberapa tahun yang lalu dapat saja dikatakan sebagai sebuah sejarah, meskipun belum lazim untuk dikatakan sebagai sebuah sejarah. Sebuah momen yang penting yang telah terjadi, lazim orang untuk mengatakannya sebagai "akan menjadi sebuah sejarah". Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sejarah adalah silsilah atau asal usul keturunan. Namun demikian jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, maka sejarah berarti pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990). Pengertian sejarah ini berbeda penekanannya dengan pengertian sejarah yang dikemukakan oleh Steel (2000) yang mendefinisikan sejarah sebagai semua peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu ditekankan pada momen-momen penting dalam sejarah. Momen-momen penting dalam sejarah inilah yang sering diistilahkan dengan Apipeni

Pengertian sejarah yang terdiri dari elemen waktu dan peristiwa tidak berarti dapat dilekatkan pada semua kejadian. Waktu dan peristiwa masa lalu hanya dapat dilekatkan pada kejadian-kejadian penting di masa lalu. Dengan demikian, tidak semua peristiwa masa lalu dapat dikategorikan sebagai sebuah sejarah. Pemahaman ini sangat penting apabila digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Sejarah dalam kontek ilmu pengetahuan adalah peristiwa penting atau momen penting di masa lalu yang benar-benar terjadi. Peristiwa bagaimana proses terjadinya pencatatan akuntansi dalam suatu sistem kerajaan, bagaimana pemaknaannya dalam setiap pencatatan serta naskah berupa kebijakan tentang harta yang pernah dikeluarkan oleh raja dalam sistem kerajaan adalah merupakan momen penting dalam sejarah ilmu akuntansi.

3.3. FILSAFAT SEJARAH

Apabila sejarah dipandang sebagai sebuah cerita tentang peristiwa masa lalu, untuk disampaikan kepada khalayak baik secara tertulis maupun lisan, maka dalam penyampaiannya tidak memerlukan sebuah metodologi dan teori untuk menyusun dan melaporkannya. Cerita tentang sejarah banyak sekali ditemukan di lingkungan masyarakat seperti sejarah terbentuknya organisasi profesi akuntansi di Indonesia, sejarah perjuangan pengurus organisasi dalam membesarkan organisasinya, atau dalam bentuk umum seperti sejarah kelahiran, sejarah terjadinya bencana dahsyat dan lainnya. Semua cerita sejarah tersebut, di samping menguraikan proses terjadinya

suatu peristiwa atau situasi berdasarkan alur logika (runtut), juga menyampaikannya dengan imajinasi (angan-angan), penyampaiannya dengan bahasa yang teratur, serta menyampaikan fakta-fakta yang berkaitan dengan realitas masa lalu. Pengungkapan cerita sejarah tersebut dapat disampaikan secara bebas dan kreatif tanpa membutuhkan sebuah metode dan teori.

Suatu cerita sejarah apabila disampaikan dengan suatu cara yang menarik dari sisi gaya bahasa, bergairah dan hidup sehingga orang akan terpikat dan sangat menikmati untuk mendengar atau membacanya, maka suatu cerita sejarah tersebut, dapat dikatakan sebagai sesuatu yang telah memenuhi unsur sastra. Jika demikian halnya, maka sejarah dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu dan seni (Kartodirjo, 1993). Dalam perkembangan penulisan sejarah, banyak sekali kalau tidak sebagian besar karya sejarah yang dapat digolongkan sebagai sejarah naratif, terutama yang dihasilkan oleh penulis bukan ahli sejarah (Kartodirjo, 1993). Jenis penulisan sejarah seperti ini, merupakan bagian dari sejarah tanpa menggunakan teori dan metodologi. Sejarah naratif umumnya menggunakan bahasa umum dan tidak ada pengembangan peristilahan secara khusus seperti yang terjadi pada disiplin ilmu akuntansi.

Menurut Kartodirjo (1993) masalah teori dan metodologi sebagai bagian pokok ilmu sejarah mulai diketengahkan apabila penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, konteks sosial-kulturalnya. Intinya secara mendalam hendak diadakan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji. Dalam konteks ini, peneliti bukanlah berpretensi untuk mengatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian karya dari seorang ahli sejarah, namun hanya secara kebetulan bahwa kajian yang menjadi fokus dalam penelitian ini terjadi di masa lampau dan melakukan interpretasi dalam mengkonstruksi akuntansi harta. Oleh karena waktu dan peristiwanya telah berlalu, maka wilayah penelitian ini bagian dari sebuah kajian sejarah yang menggunakan sebuah metodologi penelitian dan teori filsafat untuk mengkaji akuntansi harta. Terlepas dari itu semua, kajian penelitian ini merupakan bagian dari sebuah pendalaman topik akuntansi harta yang bersentuhan dengan filsafat sejarah.

Filsafat sejarah merupakan bidang ilmu yang mengkaji pengetahuan tentang masa lalu, ontology peristiwa masa lalu, hubungan bahasa masa lalu dan sifat representasi dari masa lalu (Hasbullah dan Supriyadi, 2012). Apabila dibandingkan dengan pendapat Kartodirjo (1993) yang tegas dalam mengklasifikasikan sejarah sebagai bagian ilmu sejarah atau bukan, filsafat sejarah justru berkaitan dengan metode konsep dan teori yang digunakan dalam sejarah. Masalah filsafat muncul dari upaya kita untuk mendapatkan pemahaman dalam diri kita sendiri tentang institusi sosial, memahami masyarakat lainnya dan untuk membuat makna perubahan sosial

(Hollins, 1995). Berbeda dengan para filsuf ilmu alam yang mendalami kemunculan dari praktik kejadian alam itu sendiri, para filsuf ilmu sosial sebagian besar terfokus pada konsep-konsep tentang kebangsaan, kelompok, lembaga, keluarga, kesukuan, peraturan-peraturan, ekonomi pasar, tingkah laku dan tindakan manusia, dan lainnya yang merupakan item-item yang ditemukan dalam suatu diskursus dari pembahasan yang luar biasa (Ruben, 1998).

Filsafat secara etimologi memiliki banyak pengertian dan berbeda-beda sesuai dengan siapa filsuf yang mendefinifsikannya. Namun demikian, dari semua pengertian filsafat yang didefinisikan mengandung unsur-unsur adanya proses berpikir secara radikal (mendasar, mendalam, sampai keakar-akarnya), dan sistematik (teratur, runtut, logis dan tidak serampangan) untuk mencapai kebenaran universal (umum, terintegrasi dan tidak khusus serta tidak parsial) (Maksum, 2011). Inti dari pengertian filsafat adalah berpikir mendalam, mendasar, sistematis untuk mencari kebenaran. Inti berpikir ini untuk membedakan antara berpikir filsafat dan berpikir biasa atau dengan kata lain tidak semua orang yang berpikir berfilsafat, namun filsafat pastilah berpikir. Selanjutnya inti dari sejarah adalah waktu dan peristiwa masa lampau, sehingga apabila filsafat dikaitkan dengan kata sejarah maka dapat berarti mengkaji suatu peristiwa masa lampau secara mendalam, mendasar, sistematis untuk mencari kebenaran terhadap perististiwa di masa lalu. Produk dari kajian terhadap peristiwa masa lampau secara mendalam, mendasar, sistematis untuk mencari kebenaran akan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Salah satu bagian terpenting dalam kajian sejarah adalah mengenai pemikiran atau pengetahuan akuntansi yang ada dalam suatu sistem kerajaan di masa lampau.

3.4. SISTEM KERAJAAN

Sistem pemerintahan sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia semuanya berbentuk kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut terdapat mulai dari pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Nusa Tenggara, pulau Maluku, pulau Sulawesi sampai dengan pulau Kalimantan. Berdasarkan catatan yang ditelusuri oleh Soedjono dan Leirissa (2010) yang tergabung dalam Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, terdapat lebih kurang delapan belas kerajaan Islam yang berada di pulau-pulau tersebut. Adapun Jumlah kerajaan Islam terbanyak terdapat di Sumatera yakni enam kerajaan yang terdiri dari Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan-Kerajaan Islam di Riau, Kerajaan Islam di Jambi, Kerajaan Islam di Sumatera Selatan dan Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Kerajaan Islam di Jawa terdiri dari Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Banten. Di Nusa Tenggara terdapat dua kerajaan Islam yakni Lombok dan Sumbawa serta Bima. Di Maluku terdapat dua kerajaan yakni Ternate dan Tidore. Di Sulawesi terdapat Kerajaan Gowa-Tallo, Bone Dan Wajo. Terakhir di Kalimantan terdapat tiga kerajaa Islam yakni Kerajaan Banjar,

Kutai dan Pontianak. Jumlah kerajaan tersebut tentu saja akan bertambah banyak jika dihitung secara kuantitas tanpa melihat besar kecilnya dan label agama.

Kerajaan-kerajaan Islam tersebut merupakan kerajaan Hindu sebelum masuknya pengaruh Islam. Hal ini terutama dapat diketahui karena budaya Hindu di Indonesia kebanyakan menyentuh lapisan kaum bangsawan, Raja-raja, itupun hanya mengambil beberapa aspek kehidupan. Namun, masyarakat yang hidup di luar tembok keraton lebih banyak hidup dalam tradisi Indonesia yang telah mereka miliki sebelum kedatangan pengaruh Hindu di Indonesia (Soedjono dan Leirissa, 2010). Dalam sistem kerajaan, kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Raja dan seorang Raja berhak menyandang gelar sehingga setiap Raja memiliki gelar masing-masing. Kartodirdjo seperti dikutip oleh Soedjono dan Leirissa dalam Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia (2010) menyatakan bahwa Seorang Raja bertanggung jawab untuk menyatukan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dan berbagai lambang yang bersifat magis dan mistis, yang menyatukan kualitas perlengkapan-perlengkapan kekuasaan itu.

Seorang Raja diangkat melalui prosesi kerajaan oleh pemuka agama, orang-orang besar cerdik pandai, para wali, dewan pemangku adat dan ada yang diangkat oleh rakyat, tergantung pada kondisi lingkungan kerajaan. Apabila Raja mangkat dalam masa kekuasaannya, maka biasanya digantikan oleh putranya atau pihak keluarga lainnya. Keturunan di luar Raja biasanya tidak bisa menerima takhta kerajaan. Namun, apabila dengan kondisi tertentu tidak ada pihak keluarga yang menggantikannya, maka prosesi adat bisa saja mengangkat anggota di luar keturunan Raja seperti yang terjadi di kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar yang saat itu disebut dengan kerajaan Nagaradhipa dipimpin oleh Raja Aria Mangkubumi yang bukan keturunan Raja. Ketika Mangkubumi mangkat, diganti oleh Ampu Jatmika dengan syarat harus membuat dua arca laki-laki dan perempuan dan kemudian ditempatkan di candi untuk disembah oleh rakyat, setelah itu baru dia dapat dianggap sebagai Raja. Setelah Ampu Jatmika wafat, ia berpesan bahwa anaknya Ampu Mandastana dan Lambung Mangkurat tidak berhak naik takhta karena bukan keturunan Raja.

3.5. KEWAJIBAN DAN HAK RAJA

Seorang Raja memiliki posisi seimbang dalam hak dan kewajibannya yaitu di samping sebagai seorang raja yang memiliki hak berkuasa atas rakyatnya, seorang raja juga memiliki kewajiban yang tak kalah besarnya. Menjadi seorang Raja meskipun sifatnya turun-temurun bukanlah tanpa persyaratan yang harus dipenuhi. Kriteria umum yang harus dimiliki oleh Seorang Raja adalah memiliki sifat bijaksana, empati pada rakyatnya, bertanggung jawab, adil dan cerdas untuk mensejahterakan rakyatnya. Tentu saja banyak persyaratan lainnya untuk dapat diangkat sebagai Raja. Dalam kondisi-kondisi tertentu, kadangkala martabat Raja dihubungkan dengan kedewaan,

Raja adalah penjelmaan dari dewa (Soedjono dan Leirissa (2010. Heine (1942) seperti dikutip Soedjono dan Leirissa (2010) mengatakan bahwa pada kerajaan yang bertradisi Hindu atau Budha terdapat anggapan struktur kerajaan sebagai mikrokosmos dengan alam semesta sebagai makrokosmos. Hal inilah yang menyebabkan struktur hubungan antara kerajaan sebagai pusat kekuasaan dengan lingkungan sekitarnya dibangun atas dasar konsep alami. Soedjono dan Leirissa (2010) mengutip Martono (1962) yang mengemukakan bahwa organisasi kerajaan cendrung untuk tidak berubah meskipun terdapat tantangan politik dan ekonomi. Bahkan kelanjutan kedudukan Raja atau keturunan raja dianggap sebagai syarat utama pengakuan dan peneguhan kedudukan Raja tersebut.

Hak Raja umumnya diwujudkan dalam bentuk kekuasaan untuk mengatur sistem kerajaan. Hak raja untuk mengatur sistem dalam suatu kerajaan berbeda antar satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Soedjono dan Leirissa (2010) mengungkapkan Hak-hak yang dimiliki oleh Raja dari adat Makuta Alam (Aceh) di antaranya; (1) Hak mengangkat panglima, (2) Hak mengangkat *uleebalang*, (3) Hak mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan pemerintahan seperti menindak uleebalang yang melakukan pelanggaran, (4) Hak menerima audiensi seperti tamu asing yang akan berdagang dan (5) Kekuasaan untuk mengangkat orang-orang yang ahli dalam hukum (ulama) dan cerdik pandai. Apabila diklasifikasikan kelima hak umum seorang Raja tersebut, maka hak mengangkat panglima dan uleebalang merupakan hak yang menyangkut dengan keamanan kerajaan. Hak mengadili merupakan hak untuk memutuskan segala perkara dalam wilayah kerajaan. Hak menerima audiensi merupakan hak yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang akan berimplikasi kepada hak pengendalian harta, dan hak kekuasaan merupakan hak untuk mencari orang-orang bijak dalam membantu Raja untuk memberikan berbagai nasehat dan sekaligus memberikan pengawasan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Hak istimewa yang diberikan kepada seorang Raja, memiliki konsekuensi yakni seorang Raja berkewajiban untuk melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang para pejabat kerajaan. Memberikan rasa aman dan nyaman dari kesewenangan anggota keluarga kerajaan dan orang-orang besarnya. Dalam menjalankan kekuasaannya, Sultan atau Raja mendapat pengawasan dari alim ulama, kadi dan dewan kehakiman, tergantung pada pola struktur kerajaan masing-masing. Pengawas Raja terutama memberikan peringatan kepada Raja terhadap pelanggaran pada adat dan syara'. Sistem kerajaan, kewajiban dan hak Raja serta sistem pengawasan yang diuraikan di atas berlaku umum untuk semua kerajaan yang ada sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk, termasuk kerajaan Siak Sri Inderapura.

3.6. KERAJAAN SIAK SRI INDERAPURA DI TENGAH KEKUATAN ASING

Keberadaan kerajaan Siak Sri Inderapura tidak terlepas dari keberadaan kerajaan-kerajaan di Riau lainnya. Dalam masa kebangkitan nasional tahun 1900 sampai dengan tahun 1942, kerajaan-kerajaan di Riau telah mulai menurun kekuasaannya (Pusat penelitian sejarah dan budaya DepDikBud, 1977). Lebih lanjut disebutkan penyebab dari menurunnya kekuasaan kerajaan adalah Belanda dengan segala macam usahanya mengadakan perjanjian dengan Raja-raja dari kerajaan di Riau. Perjanjian inilah yang menyebabkan makin berkurangya kedaulatan dan semakin sempitnya kekuasaan Raja-raja. Menurut catatan politik yang dikutip tahun 1937 oleh Pusat penelitian sejarah dan budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977). Pada tahun 1784 diadakan penandatanganan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Riau yang menetapkan bahwa Belanda mulai berkuasa di Riau. Perjanjian berikutnya diadakan pada tanggal 26 November 1818 yang mempertegas bahwa daerah kekuasaan Riau meliputi Johor, Pahang, Riau Lingga serta rantau jajahan taklukannya. Periode selanjutnya1824 dibuat perjanjian antara Belanda dan Inggis yang menyatakan bahwa Kerajaan Riau dan Lingga langsung di bawah kekuasaan Belanda. Sedangkan Johor dan Pahang diserahkan kekuasaannya ke Inggris (Pusat penelitian sejarah dan budaya DepDikBud, 1977). Perjanjian selajutnya dibuat antara Sultan Riau dan Belanda pada tanggal 29 oktober 1830 yang makin memperkuat kekuasaan Belanda di Riau. Perjanjian demi perjanjian yang tidak seimbang inilah yang menyebabkan keberadaan Sultan Riau-Lingga hanya menjadi topeng belaka, karena sudah tidak memiliki kedaulatan di mata Belanda.

Perjanjian tahun 1784 yang isinya menegaskan Belanda mulai berkuasa di Riau, jelas memperlihatkan bahwa Belanda dengan VOC-nya memang menjajah kerajaan-kerajaan yang ada di Riau khususnya dan kerajaan lain di Indonesia umumnya. Alangkah anehnya apabila sebuah perjanjian yang isinya hanya memberi tahu mulai berkuasanya salah satu pihak yang membuat perjanjian, tanpa kekuasaan untuk menjajah. Kerajaan Riau di bawah tekanan Belanda yang sangat kuat tidak mampu untuk menolak perjanjian tersebut, terkecuali pasrah untuk menerimanya. Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi adalah betapa tidak berdayanya kerajaan-kerajaan di Riau saat Belanda dan Inggris membagi dua kerajaan Riau. Pembagian atau pemisahan kerajaan Riau menjadi Kerajaan Riau dan Lingga di satu pihak serta Johor dan Pahang di pihak lain mencerminkan tidak adanya penghargaan terhadap Sultan Riau di mata kedua Negara tersebut. Hal ini hanya bisa terjadi apabila suatu Negara menjajah Negara lain, sehingga apa pun yang diperlakukan oleh Negara penjajah atas jajahannya sangat mudah terjadi. Kerajaan-kerajaan lainnya di Riau meskipun tidak bersentuhan dengan Belanda, namun harus mengikut pada perjanjian yang telah dibuat dengan kerajaan lainnya dan ternyata hal ini dialami oleh Kerajaan Siak.

Dampak perjanjian-perjanjian yang dibuat Belanda dengan Sultan Riau berimbas kepada Kerajaan Siak Sri Inderapura, karena Belanda memaksakannya. Kerajaan diikat dalam bentuk kontrak politik, berupa *Lange Contract* (kontrak jangka panjang) atau *Korte Verklaring* (perjanjian singkat). Untuk Kerajaan Siak Sri Inderapura, Belanda menerapkan *lange contract* ((Pusat penelitian sejarah dan budaya DepDikBud, 1977). Disebutkan oleh sumber yang sama bahwa Perjanjian berikutnya terjadi pada tanggal 26 Juli 1873 antara Belanda dengan Sultan Siak Sri Inderapura. Adapun isinya bahwa pulau Bengkalis (bagian Kerajaan Siak Sri Inderapura) diserahkan kepada Belanda dengan memberikan uang jasa *f* 8000 setahun. Memang tidak ada sumber yang menyebutkan batas waktu dari perjanjian ini. Namun, dari sisi penerimaan kerajaan, perjanjian ini merupakan salah satu pundi-pundi keuangan bagi kerajaan. Pundi-pundi ini ikut berperan dalam menambah jumlah harta Kerajaan Siak Sri Inderapura. Bertitik tolak pada tanggung jawab Raja yang berlaku umum seperti telah diuraikan sebelumnya, maka dengan sumber penerimaan yang diterima oleh kerajaan haruslah digunakan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, maka diperlukan sistem pengelolaan harta kerajaan.

Sistem Pengelolaan harta kerajaan dalam praktiknya, tidak harus bekaitan dengan proses catat mencatat, namun dapat berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang menghasilkan tindakan-tindakan yang bersentuhan dengan pengetahuan akuntansi. Secara teoritis, praktik-praktik akuntansi dalam pengelolaan harta akan tersistematis dalam kajian-kajian tentang pengertian harta, sifat harta, pengakuan harta, penilaian harta, penyajian harta dan pengungkapan harta. Kajian-kajian ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai kerangka dalam penelitian ini, namun hanya sebagai pembanding dalam rangka manambah khasanah perspektif akuntansi saja. Oleh karena Siak secara *de facto* adalah kerajaan Islam, maka tinjauan tentang harta dalam perspektif Islam perlu diungkapkan dalam pembahasan berikutnya. Penyajian ini dimaksudkan untuk memperkaya khasanah tentang konsep harta dari berbagai sudut pandang, termasuk pandangan Islam.

3.7. PENGERTIAN HARTA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI

Pengertian harta telah banyak didefinisikan oleh badan pengembangan akuntansi seperti *Financial Accounting Standard Board* (FASB). FASB seperti yang dikutip Suwardjono (2005) mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang memiliki manfaat pada masa yang akan datang. Manfaat tersebut harus cukup pasti dan diperoleh atau dikendalikan sepenuhnya oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Pengertian harta yang diberikan oleh APB No. 4 sebagai berikut;

> *"Assets – economic resources of an enterprise that are recognized and measured in conformity with generally accepted accounting principles. Assets also include certain*

deffered charges that are not resources but that are recognized and measured in conformity with generally accepted accounting principles".

Definisi harta oleh APB jelas lebih luas pemaknaannya karena harta lebih disifati sebagai manfaat ekonomik (*resources*) karena manfaat ekonomik tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomik yang dapat dimasukkan sebagai harta (Suwardjono, 2005). Definisi tersebut tidak membedakan antara harta real (*real assets*) dan harta finansial (*financial assets*) dan antara sumber ekonomik (*economic resources*) dan non sumber ekonomik (*non economic resources*) Suwardjono (2005). Pengertian aset oleh FASB dan APB menegaskan bahwa suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di masa datang dan cukup pasti. Hal ini berarti bahwa manfaat tersebut harus terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas masuk dan keluar di masa yang akan datang.

Pengertian harta oleh kedua lembaga tersebut memberikan suatu makna "sebaliknya" dari apa yang telah didefinisikan. Makna sebaliknya itu adalah suatu harta meskipun dimiliki oleh suatu entitas dan berapa pun nilainya, namun kalau akan menjadi beban di masa yang akan datang, tidak dapat disebut dengan harta, meskipun secara fisik dan hukum dimiliki oleh sebuah entitas. Hal ini juga dapat dimaknai bahwa harta yang tidak diberdayakan dan dibiarkan begitu saja, sehingga akan menjadi beban di masa yang akan datang, tidak dapat dikatakan sebagai harta.

3.8. SIFAT HARTA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI

Perkembangan pemikiran akuntansi yang menghasilkan sebuah teori, akan menyediakan suatu pedoman untuk menjelaskan sifat-sifat harta secara jelas dan tegas. Sebagai sumber ekonomik, harta menggambarkan potensi jasa atau hak atas manfaat yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Penekanan ini menghasilkan definisi harta yang bersifat menyeluruh dan memungkinkan masalah pengukuran diperlakukan secara terpisah. Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi sifat harta yaitu *Pertama*, Harta memiliki potensi daya guna di masa yang akan datang dan sesuatu yang tidak memiliki daya guna di masa yang akan datang tidak dapat dikatakan sebagai harta. *Kedua*, entitas harus memiliki harta tersebut, sehingga entitas dapat mengubah atau memanfaatkannya sedemikian rupa dan dapat memisahkannya dari harta lainnya. *Ketiga*, adanya kepastian hukum bahwa manfaat di masa yang akan datang bersifat pasti dan yang terakhir adalah Manfaat ekonomik tersebut berasal dari peristiwa masa lalu (Hendrikson, 1977).

Secara gamblang kita dapat menyatakan bahwa syarat untuk dapat dikatakan sebagai harta harus memiliki potensi daya guna di masa yang akan datang, dimiliki atau dikuasai oleh entitas, ada kepastian manfaat di masa yang akan datang dan hasil dari peristiwa masa lalu. Kontek yang berkaitan dengan harta kerajaan, maka harta yang

memiliki daya guna di masa yang akan datang tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi saja, melainkan juga dilihat dari nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung pada harta tersebut. Harta yang memiliki daya guna tersebut haruslah dimiliki oleh kerajaan untuk kemaslahatan rakyat dalam suatu sistem pengelolaan yang ada saat itu dan memiliki kepastian untuk dimanfaatkan. Semua harta tersebut merupakan hasil dari peristiwa masa lalu dan ini menunjukkan bahwa harta merupakan bagian dari upaya-upaya yang dilakukan oleh kerajaan untuk memakmurkan rakyatnya.

3.9. PENGUKURAN HARTA MENURUT AKUNTANSI

Harta dalam akuntansi diukur dengan menggunakan satuan moneter berupa uang untuk melaporkan seluruh kekayaan, kewajiban, ekuitas, pendapatan beserta beban. Kelima klasifikasi perkiraan dalam akuntansi seluruhnya dinyatakan dengan satuan moneter atau uang. Penentuan satuan moneter kedalam suatu objek atau perkiraan merupakan bagian dari aktivitas pengukuran (*measurement*). Dengan demikian, Esensi dalam konsep pengukuran adalah melakukan penandingan antara nilai intrinsik suatu harta dengan nilai berlaku sebagai dasar untuk menentukan angka moneternya. Bentuk lain dari Konsep penandingan ini dapat dengan mudah dipahami pada saat kita harus menentukan laba atau rugi. Pelaporan pendapatan suatu usaha mengasumsikan bahwa variabel pendapatan dan biaya dapat diukur dengan baik. Dengan membandingkan antara pendapatan dan biaya kita dapat dengan mudah menentukan berapa laba yang diperoleh atau rugi yang dialami. Namun hal ini tidak mudah untuk diterapkan dalam pengukuran harta. Penandingan antara nilai intrinsik suatu harta dengan nilai berlakunya sebagai dasar untuk menentukan angka moneternya tidak semudah membandingkan antara pendapatan dengan beban.

Suatu entitas tidak dapat dengan mudah dalam melakukan penandingan untuk mengukur harta, karena banyak entitas tidak mempunyai cara untuk melakukan penandingan secara cermat, sehingga terjadi pemberian nilai yang bersifat arbitrasi. Hal ini menyebabkan banyak cara yang tidak logis digunakan dalam pengukuran harta, sehingga menyebabkan adanya keraguan dalam melaporkan nilai harta dalam laporan keuangan. Terkait dengan harta, Schroder *et. al* (1987) menyatakan bahwa satu syarat yang harus terpenuhi dalam penilaian harta adalah objek atau transaksi atas harta harus mampu di golongkan atau dirangking. Pengukuran merupakan penilaian terhadap sejumlah objek atau transaksi sesuai dengan aturan. Terjadinya kenaikan nilai harta di masa yang akan datang (akresi) merupakan bagian dari harta, meskipun tidak mudah menentukan berapa nilai wajar dari harta tersebut. Menurut konsep akresi (*accretion concept*), laba perusahaan dianggap telah terjadi saat nilai aktiva naik atau saat nilai kewajiban berkurang tanpa transaksi modal. Transaksi penjualan dan penagihan piutang akan menyebabkan pertambahan nilai yang berasal dari persediaan saat terjadinya transaksi dan saat terjadinya penerimaan piutang.

Pendekatan penandingan sangat penting dalam pengukuran atau penilaian harta, karena berusaha untuk mendekatkan antara keluaran dengan kas yang akan diterima. Nilai kas yang akan diterima di masa yang akan datang lebih mendekati nilai bersih bagi entitas yang memiliki dibandingkan dengan nilai historis. Namun demikian, nilai historis sangat berguna dalam menentukan nilai yang berlaku saat harta tersebut dimiliki. Konsep penandingan dalam akuntansi sangat dekat dengan konsep realisasi. Dalam konsep realisasi terkandung makna perubahan sesuai dengan perkembangan waktu. *American Accounting Association* (1987) menyatakan bahwa Makna esensi dari realisasi adalah perubahan pada setiap harta dan kewajiban yang telah menjadi definitif dan bertujuan untuk menjamin penilaian terhadap harta. Beberapa jenis penilaian yang berlaku dapat dipilih berdasarkan apakah jasa utama telah dilakukan entitas atau belum, Veriabilitas dan kebebasan relatif dari bias prosedur penilaian, kepastian relatif dari konversi yang diharapkan menjadi kas dan kemampuan untuk mengukur beban tersebut. Namun demikian, tujuan penilaian harta, tetap pada mengukur kenaikannnya dan bukan dimaksudkan untuk menyajikan nilai bagi kepentingan *user* manapun. Pengukuran dimaksudkan untuk memenuhi kriteria pengakuan harta. Oleh sebab itu, salah satu kriteria pengakuan harta adalah keterukurannya (*measurability*) manfaat di masa yang akan datang.

Ankarath *et, al.* (2012) dalam bukunya memahami IFRS, menjelaskan kerangka menguraikan elemen-elemen laporan keuangan dalam kelompok dampak keuangan dari transaksi dan kejadian lain secara luas. Dijelaskan bahwa elemen-elemen laporan keuangan terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban. Aset diartikan sebagai penggunaan sumber yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai suatu akibat kejadian masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi masa datang yang diharapkan mengalir ke dalam entitas. Liabilitas diartikan sebagai suatu liabilitas sekarang dari entitas yang timbul atas penggunaan sumber yang diwujudkan dalam ekonomi. Ekuitas diartikan sebagai kepentingan residu dalam aset entitas setelah dikurangkan dengan semua liabilitasnya. Pendapatan diartikan sebagai meningkatnya manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menyebabkan peningkatan ekuitas, selain yang terkait dengan kontribusi dari partisipasi ekuitas. Beban diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi aset atau peningkatan liabilitas yang menyebabkan penurunan ekuitas selain yang terkait dengan distribusi kepada partisipasi ekuitas.

Menurut kerangkanya, suatu pos yang memenuhi definisi dari suatu elemen harus diakui (misalnya terkait dengan laporan keuangan) apabila: *pertama,* Adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan terkait dengan pos, akan mengalir ke atau dari entitas, dan *kedua,* Pos yang memiliki biaya pokok atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Kerangka mencatat bahwa basis atau dasar pengukuran yang

paling umum di dalam laporan keuangan adalah "biaya historis" (*histical cost*), tetapi basis pengukuran lain juga digunakan, seperti biaya kini (*current cost*), nilai yang dapat direalisasi atau nilai penyelesaian (*realizable or settlement value)*, dan nilai sekarang (*present value*).

3.10. PENILAIAN HARTA

Penilaian (*valuation*) dalam akuntansi adalah penentuan angka untuk suatu objek tertentu sesuai dengan aturan, di mana angka untuk objek tersebut dinyatakan dalam satuan moneter (Most, 1977). Satuan moneter yang dimaksud adalah uang dan menjadi alat utama dalam ekonomi modern. Uang yang digunakan untuk menunjukkan makna tertentu atas suatu objek memiliki empat fungsi yakni sebagai alat pertukaran, penyimpanan nilai, pengukuran nilai dan sebagai unit rekening atau akun (Most, 1977). Dalam pengertian akuntansi, objek yang dimiliki oleh sebuah entitas dapat berupa barang atau jasa. Kalau unit moneter dijadikan satuan pengukur untuk menunjukkan makna ekonomik suatu objek, maka pengukuran itu disebut dengan penilaian. Dengan demikian, penilaian merupakan proses penentuan jumlah rupiah atas suatu objek untuk memberikan makna nilai ekonomik pada masa lalu (pengukuran), sekarang dan yang akan datang (Suwardjono, 2006).

Apabila ditinjau dari waktu dan tujuannya, maka istilah pengukuran dan penilaian memiliki perbedaan yang sangat jelas meskipun dalam akuntansi seringkali tidak membedakannya. Dapat dipahami jika akuntansi tidak membedakannya, karena hanya melihat dari aspek unit moneter saja dalam mengukur dan menilai suatu objek tertentu atau dengan kata lain akhir dari suatu pengukuran dan penilaian adalah berupa satuan moneter. Perbedaan dari kedua pengertian tersebut ditinjau dari sisi waktu adalah pengukuran dilakukan pada saat harta diperoleh, sedangkan penilaian dilakukan pada saat harta harus disajikan dalam laporan keuangan atau dalam suatu pertanggungjawaban (Suwardjono, 2005). Namun, apabila ditinjau dari tujuannya, jelas bahwa pengukuran bertujuan untuk merekam sejarah perolehan harta tersebut untuk menjadi informasi di masa yang akan datang. Penilaian bertujuan untuk memberikan suatu laporan pertanggungjawaban tentang berapa harta yang dimiliki pada saat tertentu di masa yang akan datang.

Mengkonstruksi nilai-nilai setiap tindakan akuntansi harta di kerajaan Siak Sri Inderapura, memerlukan makna penilaian dan pengukuran dari perspektif akuntansi. Hal ini dapat membantu untuk memberikan interpretasi mendalam mengenai tujuan yang terkandung di dalam pencatatan harta yang mungkin dilakukan oleh kerajaan Siak Sri Inderapura. Indikator adanya makna penilaian harta, terungkap dari keiklasan sultan untuk memberikan bantuan yang jumlahnya sangat fantastis pada saat itu yakni setara dengan 151 juta Gulden atau € 69 juta Euro di Tahun 2011 (Opini, 2012).

Jumlah ini menurut keluarga sultan sama dengan 3 juta Gulden dan emas tiga gantang (Hamka, 1994, Admin, 2012). Nilai uang yang begitu besar artinya dalam kemerdekaan Republik Indonesia tentu saja merupakan hasil penilaian harta yang saat itu diberikan kepada kemerdekaan republik ini.

3.11. AKUNTABILITAS PENGUNGKAPAN HARTA

Akuntansi memiliki semangat transparan dan menjunjung kejujuran dalam setiap prosesnya mulai dari munculnya suatu harta sampai dengan pelaporannya. Standar akuntansi memberikan pedoman penyajian dan pengungkapan tiap-tiap pos harta dari suatu entitas. Pengungkapan harta haruslah memenuhi syarat akuntabilitas agar laporan harta dapat dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Di samping itu, mengapa suatu laporan pertanggungjawaban harta harus memenuhi syarat akuntabilitas, tidak lain agar laporan tersebut benar-benar menjadi bermanfaat bagi yang menerima laporan atau yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Terdapat banyak ukuran yang dijadikan sebagai dasar untuk memenuhi syarat dikatakan sebagai laporan yang memiliki akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika dan pemerintahan, yang umumnya digunakan dalam lingkup sistem administrasi publik pemerintahan seperti lembaga eksekutif yakni **pemerintah**, lembaga legislatif yakni **parlemen** dan lembaga yudikatif yakni **Kehakiman**. Akuntabilitas yang melekat pada masing-masing lembaga publik tersebut dapat mempunyai beberapa arti. Dalam konteks etika dan pemerintahan, arti tersebut selalu disandingkan dengan pengertian-pengertian seperti yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipertanggung jawabkan (*responsibility*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*), kewajiban (*liability*), dan pemenuhan harapan atas laporan yang diberikan (Wikipedia.org, 2014, Dykstra dan Clarence,1939). Steel (2000) dalam *Oxford Wordpower* memberikan catatan tentang asal usul pengertian akuntabilitas. Pengertian Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin yaitu *accomptare* (mempertanggung jawabkan) bentuk kata dasar dari *computare* (memperhitungkan) yang berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Pengertian kata akuntabilitas itu sendiri tidak pernah digunakan dalam bahasa Inggris secara sempit tetapi dikaitkan dengan berbagai istilah dan ungkapan yang sangat luas seperti keterbukaan (*openness*), transparansi (*transparency*), aksesibilitas (*accessibility*), dan berhubungan kembali dengan publik (*reconnecting with the public*) yang penggunaannya mulai abad ke-13 (Dubnick dan Melvin, 1998).

Pengertian akuntabilitas tersebut juga dipertegas dalam tulisan Seidman dan Gary (2005) yang mensyaratkan adanya keempat unsur tersebut. Konsep akuntabilitas yang berarti memberikan pertanggungjawaban, ternyata memiliki sejarah panjang dalam pencatatan kegiatan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sebuah

pemerintahan dan sistem pertanggungjawaban uang dalam sebuah negara. Awal perkembangan konsep akuntabilitas pertama kali dilakukan di Babylon oleh Urch dan Edwin (1929). Selanjutnya konsep akuntabilitas dikembangkan lagi di Yunani oleh Roberts dan Jennnifer (1982). Tahun selanjutnya akuntabilitas mendapat perhatian di Mesir yang dipelopori oleh Ezzamel dan Mahmoud (1997) serta terakhir di Roma oleh Plescia dan Joseph (2001). Tentunya konsep ini terus bergulir di Negara lainnya karena sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam suatu pemerintahan. Saat ini, konsep akuntabilitas sudah menjadi sesuatu yang wajib dan sudah merupakan tuntutan masyarakat umumnya dalam sebuah Negara. Pertanggungjawaban yang tidak memenuhi unsur akuntabiltas dapat berdampak pada ketidakpercayaah terhadap pemerintah yang berkuasa dalam sebuah negara. Saat ini masyarakat dalam sebuah Negara termasuk Indonesia, sudah sangat mengerti dan menuntut akuntabilitas dalam setiap laporan yang dilakukan oleh penyelenggara, baik pemerintah, pemerintah daerah. Organisasi bermotif laba maupun oleh organisasi nirlaba.

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan (Mulgan dan Richard, 2000). Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa penulis lainnya seperti Sinclair dan Amanda (1995). Akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara pertanggungjawaban yang menyangkut saat sekarang dengan masa depan. Pertanggungjawaban antar individu dan kelompok terhadap lingkungannya yang sudah menjadi sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan atas tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan (Schedler dan Danreas, 1999). Penjelasan tentang akuntabilitas yang telah dipaparkan di atas, memberikan suatu gambaran adanya hubungan antara pihak yang menerima mandat dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemberi mandat, lingkungan, dan sosial. Hubungan antara ketiga unsur tersebut merupakan bagian dari perkembangan konsep akuntabilitas yang saat ini harus dilakukan oleh sebuah entitas modern. Elkington (1997) dalam Sukoharsono (2010) menjelaskan hubungan akuntabilitas dalam sebuah konsep *triple bottom line* dengan triple "P" yakni Profit, Planet dan *People*. Konsep ini mengembangkan pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada *owner* (profit), tetapi juga kepada lingkungan (planet) dan masyakarat sekitarnya (*people*). Namun demikian yang terpenting dari hubungan tersebut adalah pertanggungjawaban kepada penguasa abadi karena "Dialah" sebagai pemilik mutlak atas apa yang ada di alam ini.

3.12. SELAYANG PANDANG TENTANG HARTA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Islam mengajarkan pada pengikutnya untuk menyikapi harta dengan berorientasi pada kebaikan dan manfaat yang optimal. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kebahagiaan bersama saudara-saudara yang lain. Rasulullah menegaskan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sementara manusia hanyalah pemegang amanah (*agent of trust*) (Antonio, 2010). Islam tidak membenci harta dengan alasan zuhud yang diartikan tidak tepat atau qana'ah yang salah kaprah karena pada dasarnya harta itu baik, mulia, dan indah. Harta bersifat pasif dan manusialah yang menentukan baik buruknya harta tersebut dipergunakan. Sikap manusia terhadap harta, akan menentukan prilakunya dalam berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya dan kemuliaan seseorang salah satunya ditentukan oleh bagaimana sikapnya terhadap harta. Nilai-nilai sikap terhadap harta yang diajarkan agama menjadi moral penentu dalam akuntansi. Pemilik mutlak harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia terhadap harta bersifat relatif, sebatas demi melaksanakan amanah dan membelanjakannya sesuai ketentuannya-Nya.

Islam mengajarkan kepada kita bahwa karunia Allah SWT, seperti harta harus dicari dengan kerja keras dan karya nyata, bukan dengan berharap belas kasihan orang, apakah itu dengan cara meminta-minta atau hanya berharap pada pemberian orang lain bagaikan "sang ajengan" yang mengecam harta dan menganjurkan zuhud secara kaku, tetapi ia duduk manis di rumahnya sambil mengharap amplop dari jemaah yang datang (Antonio, 2010). Kerja keras adalah cara yang diajarkan Allah SWT untuk mendapatkan karunianya yang tak berhingga di dunia dan tidak akan ada karunia Allah yang diperoleh tanpa usaha. Saat mencari harta, kita tidak boleh lalai akan perintah Allah SWT, apalagi tergoda untuk melakukan praktik bisnis haram dan subhat. Pasalnya, tidak ada balasan yang lebih tepat untuk seorang koruptor selain laknat Allah (Antonio, 2010). Pesan moral inilah yang harus dipahami dan menjadi landasan dalam praktik akuntansi.

Berikut bagaimana pandangan Islam terhadap harta secara lengkap, yang direpresentasikan dengan pandangan Rasulullah.

Sumb

Gambar 3.1: Pandangan Rasulullah Terhadap Harta

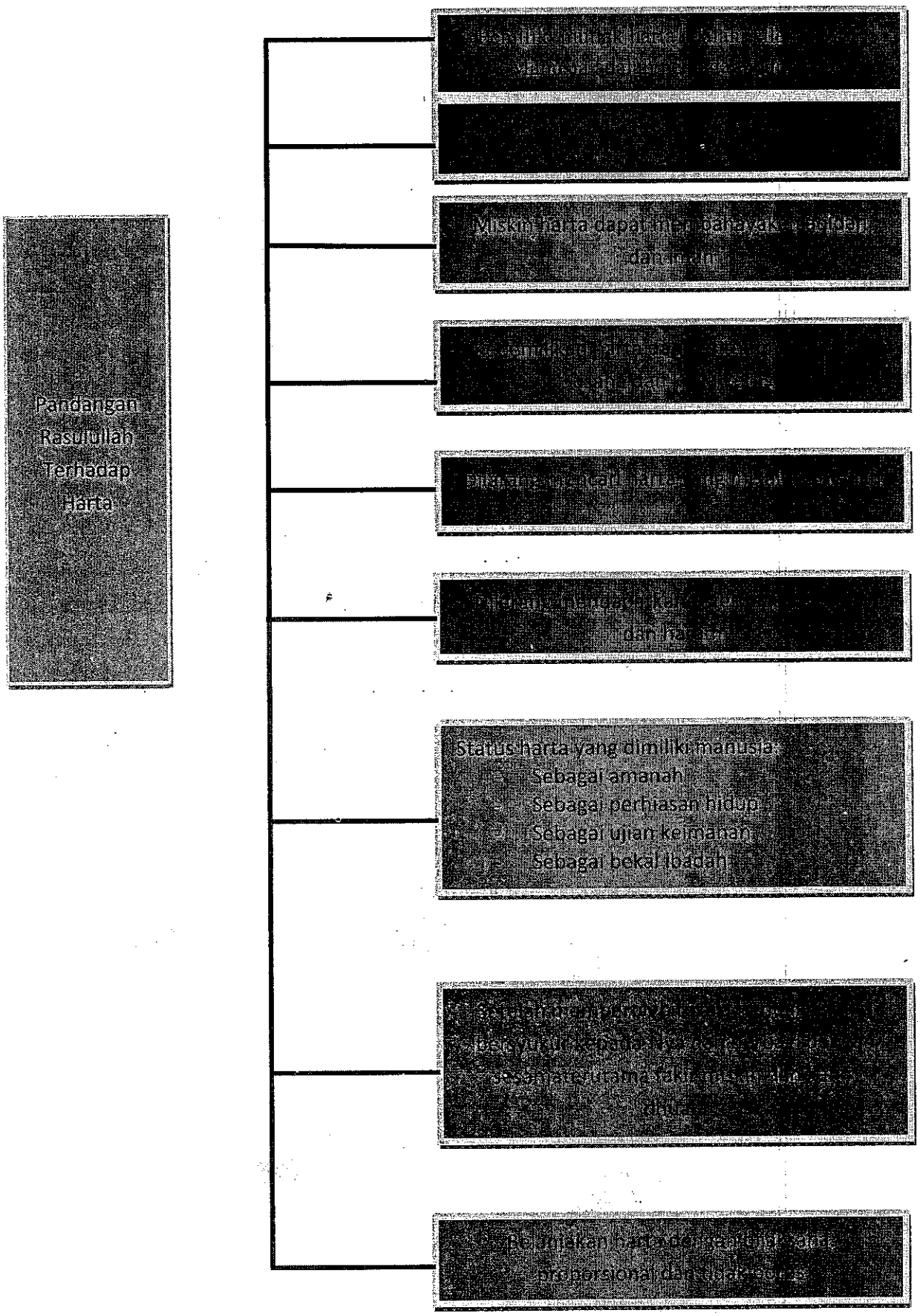

Sumber: Antonio, 2010.

3.13. SELAYANG PANDANG SUMBER MENGALIRNYA HARTA KERAJAAN SIAK

Siak sebagai sebuah kerajaan dari awal sudah membuka diri terhadap dunia luar, sesuai dengan ciri-ciri keterbukaan masyarakat suku Melayu. Masyarakat Melayu yang berada di pesisir timur sudah sangat terbuka dengan pengaruh luar sehingga mudah mengalami pembauran ras sejak awal masehi (Perret, 2010). Hal ini dibuktikan dari sejak Sultan Siak pertama, Siak sudah membuka hubungan dagang dengan beberapa negeri luar khususnya Timur Tengah seperti Turki, Arab dan Mesir (Effendy dan Effendy, 1972). Di samping itu, Siak juga menjaga hubungan baik dengan kerajaan tetangga, seperti kerajaan Minangkabau. Keterkaitan hubungan baik dengan Kerajaan Minang Kabau dapat dimaklumi karena Raja Kecil sebagai pendiri Kerajaan Siak, lama dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung.

Tradisi menjaga hubungan dagang dengan negeri lainnya menjadi ciri khas kerajaan Siak dalam memelihara sumber pendapatan untuk mendukung kegiatan operasional. Tradisi menjadikan Kerajaan Siak sebagai pusat perdagangan dipelihara terus oleh generasi Sultan selanjutnya sampai dengan dua Sultan terakhirnya yakni Sultan ke XI dan XII. Tolok ukur untuk menentukan maju tidaknya perkembangan sebuah kerajaan pada saat itu terlihat dari ramai atau tidaknya negeri kerajaan tersebut didatangi oleh para saudagar dalam melakukan transaksi perdagangan. Perdagangan adalah salah satu sumber utama mengalirnya harta kerajaan Siak Sri Inderapura.

Perdagangan sebagai sumber utama mengalirnya pendapatan bagi Kerajaan Siak, didukung oleh kegiatan kerajaan dari sumber lainnya. Sumber lainnya sebagai sumber pendapatan kerajaan di antaranya Pancung alas, pajak dan pemanfaatan harta di sekitar wilayah istana yakni Siak Sri Inderapura maupun di semua wilayah taklukannya (Jamil, 2011, Aziz, 1991). Pancung alas merupakan bagian kontribusi hasil produksi pertanian rakyat yang diserahkan kepada kerajaan karena menggunakan tanah garapan di wilayah kerajaan. Besarnya pancung alas yang harus diberikan kepada kerajaan oleh rakyat semasa Sultan adalah seiklasnya meskipun, Sultan telah membuat aturan bagi dua. Hasil garapan dapat diberikan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang burung yang berlaku saat itu (lihat lampiran 6).

Sumber pendapatan dari pajak diterapkan Sultan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kerajaan oleh para saudagar yang melewati atau berlabuh di pelabuhan wilayah Kerajaan Siak (Effendy dan Effendy, 1972). Pajak dilakukan oleh aparat Syahbandar sebagai personil kerajaan dan berada di setiap pintu masuk dari dan ke kerajaan. Semasa Sultan Syarif Kasim berkuasa, penerapan pajak yang dikenakan pada setiap lalu lintas dari dan ke wilayah Kerajaan Siak tidak terlalu menjadi perhatian karena Belanda selalu mengintervensinya (jamil, 2010). Sumber penerimaan pajak terlama dan bersifat turun-temurun dari ketiga sumber yakni perdagangan, pancung alas

dan pajak adalah perdagangan. Sampai dengan kerajaan Sultan Syarif Kasim, sumber pendapatan dari perdagangan tetap menjadi yang utama.

Bidang lainnya yang beliau upayakan dalam rangka menciptakan sumber pendapatan bagi kerajaan dan rakyatnya adalah membuat atau membuka perkebunan, dan mengelola hasil kehutanan (Aziz, 1991). Hasil hutan ditampung dan dijual ke Singapura, sehingga semakin memajukan perdagangan yang ber dampak pada kemajuan ekonomi kerajaan dan rakyat. Kegiatan usaha yang dilakukan kerajaan memiliki banyak bentuk dan semua hasilnya menjadi bagian dari pundi-pundi keuangan kerajaaan dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Kegiatan kerajaan yang mengelola lahan usaha tersebar di beberapa wilayah di luar pusat Siak Sri Inderapura seperti perkebunan karet, Perkebunan sagu, Perkebunan kelapa dan Terakhir perkebunan durian (Aziz, 1991). Kegiatan perkebunan ini tetap dilaksanakan oleh Sultan meskipun berada pada situasi tekanan Belanda. Kegiatan perkebunan merupakan salah satu bagian dari sumber harta kerajaan yang dikuasai oleh Sultan Syarif Kasim. Hasil perkebunan dijadikan sebagai sumber pendapatan kerajaan untuk membiayai berbagai kebutuhan kerajaan.

Kemajuan dalam bidang ekonomi, terjadinya hubungan dagang dengan luar negeri khususnya timur tengah seperti turki, arab dan mesir, penyerahan uang senilai 13 juta Gulden bagi kemerdekaan RI, dan menyerahkan Mahkota Kerajaan Sultan Siak serta uang sebesar 10.000 Gulden dan kemajuan di bidang lainnya menggambarkan banyaknya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi harta seiring dengan mengalirnya sumber kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Siak. Sumber utama dari mengalirnya kekayaan harta kerajaan yang berasal dari perdagangan dan berdampak pada kemajuan ekonomi berjalan dalam sebuah aliran transaksi. Transaksi bisnis telah menjadi suatu bagian dari aktivitas yang terjadi pada masyarakat kerajaan saat itu. Sebelum masa Sultan Syarif Kasim, kerajaan juga diuntungkan oleh adanya perjanjian yang dibuat dengan Belanda tahun 1873 untuk penyerahan Bengkalis ke Belanda dengan mendapatkan sewa *f* 8000 setahun. Tentu saja pendapatan dari pajak dan cukai yang menjadi kebijakannya ikut memberikan kontribusi untuk menambah kekayaan kerajaan. Namun tidak dapat diketahui persis apakah sewa fee tersebut masih diperoleh pada masa Sultan Syarif Kasim atau tidak.

Dinamika perkembangan dalam perdagangan, setiap transaksi dagang baik domistik maupun luar negeri selalu berhadapan dengan berbagai resiko. Hal ini berlaku untuk semua lingkungan bisnis baik dalam lingkungan industri maupun pertanian yang menjadi bagian dari aktivitas sebagian besar masyarakat saat itu. Akuntansi dalam proses perkembangannya, juga dipengaruhi oleh elemen-elemen yang berkembang dari perdagangan. Kenyataann menunjukkan bahwa konstruksi atau persepsi resiko merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam pengembangan praktik dan pemikiran akuntansi lingkungan dan sosial.

Nilai-nilai sosial dari suatu proses perdagangan selalu muncul dari berbagai kondisi (Georgakopoulos dan Thomson, 2004). Dengan demikian, terjadinya hubungan dagang dengan luar negeri yang berdampak bagi kemajuan ekonomi membawa pada satu hipotesis bahwa sesungguhnya akuntansi harta telah berperan pada masa keemasan kerajaan Siak Sri Inderapura bagaimanapun bentuknya. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk ditelusuri sebagai bagian dari upaya menambah kasanah akuntansi harta di Indonesia. Aktivitas catat mencatat dan berbagai tindakan sebagai sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi harta memungkinkan suatu masyarakat memperoleh gambaran tentang berapa jumlah kekayaannya dan akan membantu dalam pengambilan berbagai keputusan.

Kemakmuran sebuah kerajaan akan sangat menarik apabila dikaitkan dengan kebijakan yang membawa perubahaan tatanan pengelolaan kenegaraan. Kebijakan yang sangat menarik dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sebuah kerajaan adalah ditetapkannya Kerajaan Sultan Siak untuk bergabung dengan Republik Iindonesia. Proses pengambilan keputusan tersebut syarat dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah pemerintahan kerajaan. Tentu saja keputusan yang diambil Sultan Siak merupakan respon beliau melihat perkembangan masyarakatnya dan telah juga disosialisasikan kepada rakyatnya pada saat itu. Keputusan tersebut, haruslah di hasilkan dari suatu proses komunikasi yang intens dan dapat dipertanggung jawabkan. Disinilah penulis melihat adanya nilai-nilai yang sangat berharga untuk dikemukakan.

3.14. SEJARAH AKUNTANSI HARTA

Penyelidikan akuntansi harta telah dilakukan sejak manusia mengenal pertama kali pencatatan harta dalam upayanya untuk mengumpulkan kekayaan yang telah berlangsung sejak zaman kenabian. Hal ini ditelusuri dengan menggunakan metode penyelidikan Arkeologi dalam penelitiannya, sehingga informasi tentang bagaimana kebudayaan manusia masa lalu bahkan beribu-ribu tahun sebelumnya dapat diketahui. Penyelidikan Arkeologi menunjukkan bahwa pencarian harta, dan praktik yang terkait dengan akuntansi harta telah menjadi bagian integral dari sejarah manusia dari awal manusia mengenal pencatatan (Baker, 2004).

Baker (2004) lebih lanjut menjelaskan bahwa Berbagai penyelidikan tersebut terungkap dalam catatan akuntansi tertulis pada tablet tanah liat Mesopotamia atau tercermin dalam arsip seperti Kode Hammurabi, atau dalam *Christian Bibel* tentang kehidupan Abraham (Nabi Ibrahim dalam Islam), konsep kekayaan telah menjadi tema yang terus-menerus dibicarakan dalam sejarah manusia. Investigasi kepurbakalaan dilakukan dengan mencari bukti fisik dan melakukan penafsiran bukti sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kegiatan manusia dalam budaya sebelumnya. Secara metodologi, budaya manusia pada zaman sebelum

masehi dapat ditelusuri dari penyelidikan Arkeologi yang dilakukan dengan investigasi kepurbakalaan dan melakukan penafsiran terhadap bukti-bukti tersebut. Penelusuran ini akan menjadi sangat kaya apabila menggunakan konsep a priori dan arsip yang dimaksudkan oleh Foucault (2012).

Foucault (2012) memperkenalkan jenis arkeologi lain di mana tujuannya adalah untuk "mengusulkan konfigurasi tertentu dalam mengungkapkan hubungan antara domain formasi diskursif dan nondiscursif. Asumsi ini menghasilkan bukti dari penyelidikan arkeologi tradisional metode Foucauldian dan melakukan pengkajian arkeologi dalam menginterpretasi silsilah untuk mengembangkan sejarah harta. Seperti rekomendasi Foucault (2012), sebenarnya harta telah dipahami mengalami perubahan yang signifikan melalui waktu; ada masa keretakan dan berpencar ke masa transisi dalam memahami tentang kekayaan dan perannya dalam sejarah manusia. Untuk menerangi keretakan ini dan berpencar ke masa-masa transisi, penyelidikan difokuskan pada penelitian kehidupan Nabi Ibrahim yang telah dibahas dan disebutkan dalam berbagai kitab umat Islam yakni Al-qur'an, umat yahudi dalam bahasa Ibrani dan umat Kristen dalam Alkitab. Berdasarkan ketiga sumber kitab suci inilah dapat disimpulkan bahwa konsep kekayaan telah menjadi perhatian sentral di seluruh sejarah manusia.

Peradaban kuno Mesopotamia (Irak saat ini) adalah salah satu peradaban tertua yang tercatat dalam sejarah. Sekitar lima ribu tahun sebelum munculnya pembukuan double-entry di zaman Renaissance Eropa, dan hampir 5.300 tahun sebelum munculnya kapitalisme modern, telah terjadi kemajuan di Sumeria, Babilonia dan peradaban Asyur yang berada di sepanjang Tigris dan Eufrat (Baker, 2004). Pada zaman tersebut sebenarnya telah terjadi transaksi pertukaran komersial dalam bentuk yang sangat canggih. Peradaban pada zaman ini telah menghasilkan beberapa catatan akuntansi paling awal dikenal seperti di lembah Sungai Nil di Mesir. Banjir yang terjadi secara periodik di sepanjang sungai Tigris dan Efrat malah memberikan kontribusi lingkungan pertanian yang kaya. Akibat banjir yang terjadi secara periodik, Pertanian dikembangkan, para pedagang kecil, produsen,dan pengrajin muncul di negara-negara kota Ur, Babel, Niniwe, dan Sippar, dan hal ini juga terjadi di lokasi serupa lainnya (Baker, 2004). Kota-kota di setiap negara menjadi pusat perdagangan yang ramai dan telah menggunakan perbankan dalam mendukung setiap transaksinya.

Pinjaman uang dengan bunga pada saat itu sudah biasa, dan terdapat langkah-langkah standar untuk setiap transaksi dengan emas dan perak yang berfungsi sebagai media pertukaran moneter. Catatan akuntansi yang disimpan oleh juru tulis profesional, akan mencatat transaksi komersial pada tablet tanah liat dan memastikan bahwa perjanjian bisnis telah memenuhi persyaratan dari aturan hukum yang berlaku seperti misalnya Kode Hammurabi (Danré-Salvini dalam Baker, 2004). Selanjutnya Robson (1992) menjelaskan bahwa catatan akuntansi dalam bentuk token tanah liat terbungkus dalam amplop bersegel untuk masing-masing individu tertentu yang

ditandai dengan tanah liat panggang di atasnya. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memungkinkan transaksi komersial dapat diidentifikasi dengan jelas, dan juga untuk dijadikan semacam *bill of lading* pada saat itu. Seorang pedagang bisa mengirim barang ke kota-kota lain melalui agen, disertai dengan amplop yang berisi tanah liat yang menunjukkan jumlah dan jenis perdagangan.

3.15. KESEPAKATAN RAJA DAN RAKYAT MENGENAI HARTA

Menjadikan kerajaan sebagai situs penelitian tentu saja sangat di mungkinkan, mengingat kayanya nilai-nilai yang terkandung dalam perjalanan masyarakat kerajaan dan sangat diperlukan untuk saat ini. sehubungan dengan harta, ada suatu persetujuan yang dibuat oleh Raja Kecil sebagai pendiri kerajaan Siak dengan Kepala Suku di mana raja tidaklah menguasai hutan tanah atau territorial. Masyarakat di Kerajaan Siak terdiri dari dua golongan yakni golongan asli (*Autochthone*) dan golongan pengusaha yang datang kemudian (Ghalib, 1991). Sebelum adanya Kerajaan Siak Sri Inderapura, kepala-kepala suku yang menguasai hutan tanah "territorial" bernaung di bawah Kerajaan Johor. Namun setelah Raja Kecil yang tidak dapat menduduki tahta kerajaan Johor, terpaksa meninggalkan Johor dan terakhir membuka kerajaan baru di Sungai Jantan, sehingga kerajaannya dinamakan Kerajaan Buantan dan berubah nama menjadi Siak Sri Inderapura. Untuk mendapatkan dukungan dari kepala-kepala suku yang dimasukkannya kedalam daerah kekuasaannya, diadakanlah persetujuan dengan kepala suku. Di antara persetujuan itu adalah; "Raja Kecil diakui sebagai sultan, tetapi tidak menguasai hutan tanah. Hutan tanah tetap dalam penguasaan kepala-kepala suku dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan anggota suku masing-masing (Ghalib, 1991). Dengan demikian maka Sultan beserta orang besarnya yaitu Datuk Empat Suku, tidak mempunyai hutan tanah. "untuk Datuk Empat Suku, yaitu Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh, Datuk Pesisir Dan Datuk Kampar beserta keturunannya diberikan daerah pemukiman saja" (Ghalib, 1991)

Persetujuan yang telah disepakati antara Raja Kecil dengan para kepala suku sebagai wakil masyarakat setempat pada saat itu, sangat menentukan bagaimana pengelolaan harta yang dilakukan oleh Kerajaan Siak, termasuk nilai-nilai yang dianut dalam pengelolaan harta. Regulasi tertulis maupun lisan dalam sebuah perjanjian adat, kemungkinan besar akan dijadikan sebagai dasar sebuah perjanjian. Namun demikian, persetujuan yang mengikat saat Kerajaan Siak masih eksis, tidak lagi mengikat pada saat bergabung dengan Republik Indonesia. Perubahaan ketatanegaraan membawa perubahan pula dalam stratifikasi sosial ini. Pada saat sekarang, ketentuan-ketentuan adat ini sudah tidak mengikat lagi dan pada umumnya sudah disesuaikan dengan alam demokrasi sekarang, sehingga perbedaan golongan tingkatan ini sudah tidak kelihatan lagi dalam pergaulan (Ghalib, 1991).

3.16. AKUNTANSI HARTA DALAM PERSPEKTIF MULTI PARADIGMA

Hasil dari berbagai kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh sebuah kerajaan, tentu saja berimplikasi pada penambahan harta kekayaan yang dikuasai oleh kerajaan. Penambahan harta kekayaan akan berimplikasi pada praktik-praktik yang berhubungan dengan pengakuntansian harta dengan substansinya berupa pengukuran dan penilaian harta itu sendiri. fokus utama dalam penelitian ini menjelaskan fenomena berupa praktik-praktik yang dilakukan kerajaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan konstruksi praktik akuntansi yang pernah dilakukan oleh kerajaan agar tidak lepas dari realitas riil atau peristiwanya, dan dapat menangkap realitas data dalam bentuk informasi yang terkandung dalam laporan harta sebagai produk akuntansi. Konstruksi praktik akuntansi harta digunakan dalam merepresentasi bentuk/informasi akuntansi. Sterling (1990) mengatakan bahwa konstruksi praktik akuntansi harta dapat memotret bentuk riil dan kejadian. Bentuk riil yang dimaksud adalah seorang peneliti seharusnya membentuk teori akuntansi dengan melihat proses akuntansi, bagaimana akuntan membuat laporan keuangan hingga selesai. Jadi persyaratan mengamati proses dari awal hingga akhir, barulah dapat dikatakan bahwa konstruksi teori yang dibangun tidak lepas dengan realitas nyata dan peristiwanya.

Sterling (1990) selanjutnya mengusulkan adanya antropologi akuntansi (*Anthropology of Accounting*) yang tidak melihat fenomena akuntansi dari hasil konstruksi matematik saja yaitu laporan keuangan, namun juga dengan menggunakan paradigma non-positivis (*multiparadigm*). Tinker *et al* (1982) dalam artikelnya *The Normative Origins of Positives Theories: Ideology dan Accounting Thought*, mengusulkan *historical materialism*. Tampaknya *historical materialism*a yang dimaksud adalah ala *a historian* dan *antiquarian*. Perlu dipahami bahwa baik saran akuntansi alternatifnya Sterling (1990) maupun Tinker et al. (1982) juga tetap dan sedang bahkan terus berlangsung dan senantiasa mengalami *metamorphosis* tanpa batas.

Selanjutnya Sterling (1990) mengkritik istilah *value free. Value free* yakni menghindari pertanyaan mengenai nilai (positif atau deskriptif) sebagai syarat untuk dapat disebut ilmiah. Setiap yang mempertanyakan nilai (normatif atau regulasi) dianggap tidak ilmiah. *Science* adalah bebas nilai atau positif karena lahir dari pengamatan atas objek. Objek yang diamati oleh subjek adalah satu arah. Sifat pengamatan tersebut bebas nilai dalam arti bebas ruang dan waktu maupun geografis. Hal ini lebih cocok dan berlaku karena asal-muasalnya pada bidang ilmu pengetahuan alam dan termasuk biologi.

Realitas akuntansi itu sendiri sebenarnya tidak bebas dari aspek normatif, karena akuntansi dengan sendirinya merupakan suatu disiplin yang dipandang sarat dengan nilai. Ketika Watts dan Zimmerman (1986) mendefinisikan Teori Akuntansi Positif

sebagai buku teks yang diterbitkan tahun 1986, saat itu pulalah Teori Akutansi Positif telah menjadi teori normatif (*what should be*). Artinya Watts dan Zimmerman (1986) telah memasukkan nilai bahwa yang benar adalah proses empiris. Realitas empiris ternyata turut mempraktikkan aspek normatif akuntansi, kemudian diuji secara statistik sebagai konstruktif matematik (teori positif) untuk selanjutnya melakukan konfirmasi teori sebagai eksplanasi ilmiah sepanjang tidak terjadinya paradoks dengan yang bersifat normatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan memiliki rantai hubungan aktivitas. Rantai hubungan aktivitas dapat berupa teori positif lalu teori normatif kemudian empirisme neo positif. Dalam bentuk realitasnya, peneliti mula-mula mencari dan menemukan teknik yang lebih maju (apa itu = *what is* yaitu positif), akademisi kemudian mengajarkan teknik tersebut (apa yang seharusnya = *what should be* yaitu normatif), dan seterusnya maka praktisi mengimplementasikan teknik lebih baik (empiris).

Watts dan Zimmerman (1990) mengevaluasi konsep metodologi, bagaimana perkembangannya saat ini dan pengembangan hipotesisnya yang dapat digunakan untuk menunjang konsep utama Teori Akuntansi Positif. Konsep yang dimaksud adalah untuk menjelaskan dan memprediksi prilaku akuntan dan manajer dalam melakukan pemilihan metode akuntansi berdasarkan *utility maximization* kepentingan individual yang berbasis *selfishness*. Watts dan Zimmerman (1990) juga mengakui atas asumsi filosofis dan saintifik. Demikian pula bahwa sains tidak bebas nilai telah dipahami oleh kedua penulis tersebut. Ini berarti bahwa masukan atau akuntansi alternatif yang diusulkan Sterling (1990) danTinker et al (1982) bahwa perlunya antropologi akuntansi dan *historical materialism* telah dapat dipahami oleh kedua penulis tersebut. Hal ini merupakan dinamika falsifikasi dari sebuah imu pengetahuan yang juga menginspirasi peneliti dalam penelitian ini. proses falsifikasi sebuah teori akan terus berjalan sepanjang manusia terus berfalsafah.

3.17. KESIMPULAN

Hak Raja umumnya diwujudkan dalam bentuk kekuasaan untuk mengatur sistem kerajaan. Seorang Raja memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang para pejabat kerajaan. Memberikan rasa aman dan nyaman dari kesewenangan anggota keluarga kerajaan dan orang-orang besarnya. Kewajiban untuk melindungi rakyat dalam berbagai tindakan sewenang-wenang termasuk mengkontribusikan harta kepada rakyatnya, merupakan tanggung jawab penuh seorang raja.

Sistem Pengelolaan harta kerajaan dalam praktiknya, tidak harus bekaitan dengan proses catat mencatat, namun juga berkaitan dengan pemikiran atau tindakan-tindakan yang bersentuhan dengan pengetahuan akuntansi. Harta dalam rerangka

konseptualnya merupakan manfaat ekonomik masa yang akan datang yang cukup pasti diperoleh atau dikuasai/dikendalikan entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Suatu perkiraan dapat disebut sebagai aset, apabila mengdanung manfaat ekonomik cukup pasti pada masa yang datang.

Syarat untuk dapat dikatakan sebagai aset, suatu objek juga tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Apabila kepemilikan menjadi kriteria aset, maka akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan dalam neraca. Harta dalam akuntansi diukur dengan menggunakan satuan moneter dan pengukuran dilakukan pada saat harta diperoleh. Penilaian dilakukan pada saat harta harus disajikan dalam laporan keuangan atau dalam suatu pertanggungjawaban.

Islam mengajarkan pada pengikutnya untuk menyikapi harta dengan berorientasi pada kebaikan dan manfaat yang optimal. Kerja keras adalah cara yang diajarkan Allah untuk mendapatkan karunianya yang tak berhingga di dunia dan tidak akan ada karunia Allah yang diperoleh tanpa usaha. Tradisi menjaga hubungan dagang dengan negeri lainnya menjadi ciri khas Kerajaan Siak dalam memelihara sumber pendapatan untuk mendukung kegiatan operasional sesuai dengan tuntutan Islam yakni kerja keras.

Perdagangan sebagai sumber utama mengalirnya pendapatan bagi kerajaan Siak, didukung oleh kegiatan kerajaan dari sumber lainnya. Sumber lainnya sebagai sumber pendapatan kerajaan di antaranya Pancung alas, pajak dan pemanfaatan harta di sekitar wilayah istana yakni Siak Sri Inderapura maupun pada semua wilayah taklukannya.

Hasil dari berbagai kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh sebuah kerajaan, tentu saja berimplikasi pada penambahan harta kekayaan yang dikuasai oleh kerajaan. Penambahan harta kekayaan akan berimplikasi pada praktik-praktik yang berhubungan dengan pengakuntansian harta dengan substansinya berupa pengukuran dan penilaian harta itu sendiri.

Realitas akuntansi itu sendiri sebenarnya tidak bebas dari aspek normatif, karena akuntansi dengan sendirinya merupakan suatu disiplin yang dipandang sarat dengan nilai. Teori Akutansi Positif telah menjadi teori normatif (*what should be*) karena telah memasukkan nilai bahwa yang benar adalah proses empiris. Realitas empiris ternyata turut mempraktikkan aspek normatif akuntansi, kemudian diuji secara statistik sebagai konstruktif matematik (teori positif) untuk selanjutnya melakukan konfirmasi teori sebagai eksplanasi ilmiah, sepanjang tidak terjadinya paradoks dengan yang bersifat normatif.

4.
Sil
sel
tur
per
ber
pen
sep
kar
kon
saja
Link
pros
mun

tenta
pulul
Missi
Sri In
perbu
memi

BAB 4

MENYUSURI CARA PERBURUAN HARTA KERAJAAN SEBELUM SIAK SRI INDERAPURA

4.1. MERANGKAI PERBURUAN HARTA PENDAHULUAN

Silsilah suatu kerajaan umumnya bertautan dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, sehingga dapat ditelusuri asal-muasalnya sesuai dengan pola turun-temurun. Pola turun-temurun hampir berlaku pada semua kerajaan di Indonesia, meskipun dalam perjalanannya suatu kerajaan bisa saja dipimpin oleh seorang raja yang bukan berasal dari keturunan keluarga. Kondisi ini terjadi pada saat-saat adanya jeda waktu pentabalan seorang putra raja yang belum saatnya untuk diangkat karena faktor umur seperti yang terjadi pada perjalanan Kerajaan Siak Sri Inderapura (Jamil, 2010) atau karena terjadinya konflik sehingga kerajaan dikendalikan oleh pihak yang netral dalam konflik yang terjadi (Effendy dan Effendy, 1972). Penelusuran silsilah kerajaan dapat saja terhenti dalam arti sejarah sebagai akibat dari terputusnya informasi (*Missing Link*) yang dapat diungkapkan tentang kerajaan tersebut, namun dari sisi keturunan proses tersebut tidak akan pernah terputus karena adanya keturunan darah yang tidak mungkin tidak diketahui oleh generasi berikutnya.

Putusnya informasi sejarah dapat menyebabkan adanya *missing link* cerita tentang perjalanan suatu kerajaan dan cerita sejarahnya akan muncul lagi setelah puluhan tahun bahkan ratusan tahun kemudian yang dibukukan oleh keturunannya. *Missing Link* sejarah turun-temurun kerajaan juga terjadi pada sejarah Kerajaan Siak Sri Inderapura yang secara singkat dijelaskan pada bagian ini. Penjelasan sejarah cara perburuan harta dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber buku sejarah yang memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Siak Sri Inderapura. Analisis dilakukan dengan

mengkritisi sejarah dalam artian objektif, kemudian dibandingkan dengan sumber lainnya termasuk konfirmasi kepada informan dan diakhiri dengan berbagai interpretif yang dikaitkan dengan perburuan harta dari generasi ke generasi. Oleh karena sumber sejarah tentang kerajaan sebelum Siak Sri Inderapura umumnya sejarah dalam artian subjektif, maka referensi lainnya juga digunakan dalam penganalisisan.

4.2. RAJA ASYHAR-AYA SEBAGAI NENEK MOYANG PENDIRI KERAJAAN SIAK

Penelusuran sejarah Kerajaan Siak Sri Inderapura dimulai dari tahun 1100 M sesuai dengan data sejarah yang berhasil diperoleh tentang geneologi dari Kerajaan Siak Sri Inderapura. Penyajian sejarah mulai tahun 1100 M, memang terlalu jauh jika dibandingkan dengan masa Kerajaan Siak Sri Inderapura. Namun, hal ini dilakukan untuk menunjukkan peta asal-muasal bangsa Melayu yang telah terpisahkan oleh pergolakan politis, namun tidak akan pernah terpisahkan oleh keturunan nenek moyang. Budaya, bahasa, dan agama Islam yang dianut suku Melayu merupakan sifat yang tidak akan lekang oleh karena pemisahan nafsu politis seperti pemisahan antara Indonesia dan Malaysia oleh Raffles pada tahun 1819 M (Hamka,1994). Perjanjian Inggris dan Belanda tahun 1824 M memutuskan, kesultanan dibagi kedalam dua wilayah kekuasaan. Johor dan Pahang di bawah kekuasaan Ingris dan Riau-Lingga di bawah kekuasaan Belanda (Tan, 2010). Kebudayaan Melayu menjarah daerah antropologi yang sangat luas, tidak hanya kepulauan Melayu, tetapi dari kepulauan Polinesia hingga pulau Madagaskar (Kasim, 2003).

Awal dari sejarah Siak Sri Inderapura bermula dari kepulauan Riau yakni dari pulau Bintan yang dulunya terkenal dengan sebutan *Pulau Besar*. Di pulau besar inilah terdapat sebuah kerajaan terkenal pada saat itu yang bernama Kerajaan Riau Bintan yang berpusat di pulau besar atau pulau Bintan itu sendiri (Effendy dan Effendy, 1972). Pulau Bintan atau sering disebut Bentan ini dikatakan terkenal apabila dilihat dari sisi letaknya yang sangat strategis sebagai daerah lalu lintas perdagangan di jalur selat Melaka. Melaka pada saat itu terkenal sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam (Yusuf, et al, 1993). Oleh karena letaknya yang sangat strategis, tidaklah salah jika penghuninya datang dari berbagai negeri seperti Indragiri, Kampar, Jambi, Kamboja, India dan lain-lain (effendi dan effendi, 1972). Letak yang sangat strategis serta jadi target kunjungan oleh berbagai suku bangsa, menyebabkan daerah ini sangat cepat berkembang terutama dari sisi perdagangan. Kemajuan-kemajuan yang dialami daerah ini ikut berkontribusi besar bagi terbentuknya suatu kerajaan pada tahun 1100 M. Raja pertama yang dilantik pada saat itu ialah Raja Asyhar-Aya dengan gelar Raja Iskandar Syah (Malik et al, 2012).

Raja Iskandar Syah memerintah Kerajaan Riau selama hampir 50 tahun yakni dari tahun 1100 M sampai dengan tahun 1150 M. Istri beliau bernama Wan Seri Benai dan dari hasil perkawinan ini mereka dikarunia seorang putri yang diberi nama Wan Seri Beni dan terkenal dengan sebutan Putri Bintan atau ada yang menulis Putri Bentan. Prestasi yang dapat dicatat selama pemerintahan Raja Iskandar Syah adalah kemajuan negerinya sebagai pusat perdagangan berkat dukungan letak yang sangat strategis. Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Kerajaan Riau menyebabkan daerah ini menjadi makmur dan menjadi daerah tujuan bagi banyak orang yang berasal dari luar daerahnya (Luthfi,1991). Namun, apabila sebuah kerajaan mengalami suatu kejayaan, maka di samping sebagai daerah tujuan, sekaligus juga bisa menjadi daerah incaran bagi penguasaan oleh kerajaan lainnya. Kondisi ini sudah menjadi sebuah proses alami dan sangat sering dijumpai dalam perkembangan sejarah kerajaan di Indonesia. Kuasa-menguasai, serang-menyerang sudah menjadi warna kehidupan dari kerajaan-kerajaan dahulunya seperti dialami oleh Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu dalam sejarahnya berkali-kali dikuasai kerajaan lain seperti oleh Sriwijaya (pada abad 7-11M), Kerajaan Singhasari (abad ke-13 M) dan pada abad ke 14 M oleh Kerajaan Majapahit (Utomo, 1994). Motif dari semuanya itu tentu harta yang direbut dengan kekuatan tahta serta keinginan untuk meluaskan wilayah kekuasaan.

Kekuasaan Raja Iskandar Syah berakhir setelah beliau wafat pada tahun 1150 M. Setelah beliau mangkat, praktis kerajaan langsung di bawah kendali Permaisurinya Wan Seri Benai, karena tidak memiliki putra lelaki yang akan meneruskannya sesuai dengan tradisi kerajaan. Kendali kerajaan oleh Wan Seri Benai menjadikan dia tercatat sebagai Ratu wanita pertama dalam sejarah Kerajaan Riau (Effendy dan Effendy, 1972). Namun, umur kepemimpinan Ratu Seri Benai boleh dibilang tidaklah lama untuk sebuah kerajaan karena hanya berkisar lebih kurang 8 tahun. Perkembangan sekitar tahun 1158, Kerajaan Riau ini dikunjungi oleh seorang raja muda yang berasal dari Palembang (Effendy dan Effendy, 1972). Raja muda tersebut bernama Sang Nila Utama yang masih keturunan Raja Iskandar Zulkarenain dan anak dari Sang Sapurba (Luthfi, 1991). Bak pucuk ulam tiba, kunjungan Sang Nila Utama sangat berarti bagi Kerajaan Riau umumnya dan bagi Putri Bintan khususnya. Sang Nila Utama dijadikan menantu oleh Ratu Seri Benai dan tentu saja mengawinkannya dengan putri semata wayangnya yakni Putri Bintan (Effendy dan Effendy, 1972, Luthfi, 1991). Keberuntungan Sang Nila Utama tidak saja hanya mendapatkan seorang istri, lebih dari itu, ia juga mendapatkan tahta dari ibu mertuanya.

Ratu Wan Seri Benai menyerahkan tahta kepada menantunya sebagai Raja Riau ke tiga pada tahun 1158 M sehingga tercatat ada tiga orang terkenal sebagai raja kerajaan ini yakni Asyhar-Aya bergelar Raja Iskandar Syah (1100-1150), Ratu Wan Seri Beni (1150-1158) dan Sang Nila Utama bergelar Seri Tri Buana (Malik et al, 2012). Peristiwa kunjungan Sang Nila Utama, perkawinannya dengan Putri Bintan dan penerimaan

tahta dari mertuanya Wan Seri Benai terjadi dalam waktu singkat yakni di tahun 1158 M. Dengan demikian, Terdapat 3 Raja terkenal yang pernah berkuasa pada Kerajaan Riau Bintan di antaranya sebagai berikut;

Tabel 4.1
Kerajaan Riau Bintan
Raja-Raja Yang Pernah Berkuasa
Periode 1100 – 1208 M

Raja	Nama Raja/Gelar	Mulai Berkuasa	Akhir Berkuasa	Keterangan
I	Raja Asyhar – Aya/Raja Iskandar Syah	1100 M	1150 M	50 tahun
II	Wan Seri Benai	1150 M	1158 M	8 tahun
III	Sang Nila Utama	1158 M	1160 M	2 tahun

Sumber: Dikembangkan dari beberapa sumber.

4.3. RAJA SANG NILA UTAMA PENDIRI NEGERI SINGAPURA

Perkembangan Kerajaan Riau selanjutnya berada di bawah kendali Raja Sang Nila Utama yang cukup agresif dalam memajukan kerajaannya. Salah satu kemajuan yang dicapai oleh Raja Sang Nila Utama yang berkuasa mulai tahun 1158 adalah memperluas wilayah kekuasaannya. Pada masa Raja Sang Nila Utama, wilayah kekuasaannya bertambah dengan membangun negeri Temasik, kemudian berubah nama menjadi Singapura (Malik et al, 2012 dan menurut sejarah Melayu yang diungkapkan oleh Luthfi, 1991). Negeri Singapura yang baru dibangun pada saat umur tahtanya baru 2 tahun, kiranya mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai pusat perdagangan. Tumbuh dan berkembangannya negeri ini, menyebabkan banyak perhatian dari berbagai penjuru negeri untuk berkunjung ke negeri tersebut.

Tingkat pertumbuhan dan perkembangan Singapura barangkali melebihi pulau Bintan sebagai pusat kerajaan. Menurut penulis, hal inilah yang dijadikan pertimbangan Raja Sang Nila Utama untuk memindahkan pusat kerajaannya ke Singapura pada tahun 1160 M. Tidak ada data yang diperoleh bagaimana raja dengan mudahnya memindahkan pusat kerajaan dari Bintan ke Singapura. Namun secara pasti dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu daerah baik dari sisi pertumbuhan dan perkembangan perdagangan menjadi alasan utama untuk memindahkan pusat kerajaan. Ternyata, masalah pindah memindahkan ibu kota sebagai pusat kerajaan sudah terjadi sejak tahun 1150 M atau 10 abad yang lalu. Sampai dengan pemerintahan Raja Sang Nila Utama dapat dicatat bahwa beliaulah yang membangun Negara Singapura yang ada sekarang. Puncak dari kejayaan Sang Nila Utama sebagai Raja Riau adalah dengan dilantiknya beliau pada tahun 1160 sebagai raja dari 3 kerajaan yakni Kerajaan Palembang, Bintan, dan Singapura (Effendy dan Effendy, 1972). Gelar yang dilekatkan pada beliau saat itu adalah Sri Tri Buana.

Perkawinan Raja Sang Nila Utama dengan Putri Bintan melahirkan seorang putra bergelar Sri Rakna Wikrama (beberapa sumber menulis Sri Rama Vikaram). Raja inilah sebagai penerus kerajaan selanjutnya. Namun, Malik et al (2012) mengatakan bahwa selepas Sri Tri Buwana, raja yang memerintah Singapura antara lain Sri Pikrama Wira, Sri Rakna Wikrama dan Paduka Sri Maharaja. Data sejarah yang lebih lengkap diungkapkan oleh Marsden (2008) bahwa pengganti Sri Tri Buwana secara berurutan adalah Paduka Rama Vikaram, Sri Maharaja, dan Sri Iskandar Syah. Namun terdapat perbedaan informasi tentang tahun berkuasa raja-raja dalam perjalanan Kerajaan Singapura sebagai kelanjutan Kerajaan Bintan sejak Sri Iskandar Syah. Hal ini disimpulkan jika tolok ukur yang digunakan adalah penyerangan Majapahit terhadap Kerajaan Singapura.

Penyerangan Kerajaan Majapahit ke Kerajaan Singapura saat itu terjadi sekitar tahun 1384 M (Hamka, 1961). Raja Singapura yang diserang oleh Majapahit adalah Raja Singapura yang terakhir bernama Permaisura (beberapa catatan sejarah menulis Perameswara) dengan gelar Raja Kecil Besar. Data silsilah Kerajaan Riau yang terdata hanyalah Raja Riau pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya terjadi missing link informasi. Informasi yang mendominasi tentang kerajaan hanya berkisar tentang pertumbuhan daerah, perkembangan perdagangan dan serang menyerang untuk menguasai sebuah kerajaan dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan. Informasi yang menyinggung tentang harta pada saat Kerajaan Riau I sampai dengan IV boleh dikatakan belum ada. Namun demikian, walaupun harta belum menjadi fokus pembicaraan, dapat dikatakan bahwa kuasa menguasai antar satu kerajaan dengan kerajaan lainnya merupakan bentuk perburuan harta pada saat itu.

Menurut versi Buya Hamka (1961) Raja Kecil besar yang pada saat itu berkuasa di Singapura, Bintan dan Palembang diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1384 M. Namun dari beberapa catatan sejarah Melayu menyebutkan bahwa penyerangan oleh Majapahit terjadi pada tahun 1252 M. Effendi dan Effendy (1972) lebih membenarkan pendapat Buya Hamka bahwa penyerangan terjadi pada tahun 1384 M dilihat dari kronologi keturunan Kerajaan Riau. Pendapat menurut catatan Melayu mungkin lebih mendekati kebenaran apabila yang dimaksudkan adalah Kerajaan Singhasari. Sedangkan pendapat Buya Hamka terlalu jauh perbedaannya apabila dibandingkan dengan periode raja-raja Singapura yang pernah berkuasa. Awal berdirinya Kerajaan Majapahit yakni pada tahun 1293 M (Soedjono dan Leirissa, 2010), sebagai penerus Kerajaan Singhasari. Dengan demikian, kejadian sebelum tahun 1293 M sebenarnya bukanlah bagian dari Kerajaan Majapahit, tetapi masih bernama Kerajaan Singhasari.

Kerajaan Singhasari di bawah kekuasaan Raja Kertanagara memang mengirimkan ekspedisi untuk menaklukan Melayu pada tahun 1280 M (Soedjono dan Leirissa, 2010). Apabila kita kaitkan dengan penyerangan Singhasari terhadap Singapura, maka catatan Melayu agak lebih cocok, meskipun ada perbedaan tahun dari beberapa sumber.

Terjadinya penyerangan terhadap Kerajaan Singapura oleh Singhasari, benar-benar mengakhiri kekuasaan, kesenangan, kemewahan yang diperoleh selama ini di kerajaan tersebut. Akibat dari penyerangan Singhasari, membuat Raja Kecil besar sebagai Raja Singapura harus menyelamatkan diri keluar dari Singapura. Raja Kecil besar lari ke wilayah selatan, terus menyelamatkan diri ke Semananjung Tanah Melayu, lalu terus ke Johor. Dari Johor pelarian dilanjutkan ke Muar, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Sungai Ujung dan akhirnya menetap di Melaka (Effendy dan Effendi, 1972).

Kerajaan Singhasari saat itu memang sedang jaya-jayanya, bahkan daerah taklukannya sampai dengan kerajaan di Semananjung Tanah Melayu, Seluruh Sumatra, Seluruh Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur (Soedjono dan Leirissa, 2010). Sehubungan dengan penyerangan Singhasari terhadap Kerajaan Singapura sekitar tahun 1280 M, tahun itulah tercatat sebagai kejayaan Kerajaan Singhasari. Setelah Kerajaan Singapura dikuasai oleh Kerajaan Singhasari, praktis pusat perdagangan Kerajaan Riau berpindah ke Melaka. Dengan perpindahan ini, berarti hilang pula kekayaan harta yang telah dimiliki selama berkuasa di Kerajaan Singapura. keberadaan harta pada masa itu, diperoleh dengan cara kuasa-menguasai kerajaan. Kerajaan yang berkuasa umumnya menaklukan kerajaan lain dalam rangka memperoleh upeti dari kerajaan yang ditaklukannya. Beberapa Raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Singapura di antaranya sebagai berikut;

Tabel 4.2
Raja-Raja Singapura Yang Pernah Berkuasa
Periode 1158– 1252 M

Raja	Nama Raja	Mulai Berkuasa	Akhir Berkuasa	Keterangan
I	Sang Nila Utama/Sri Tri Buana	1158 M	1208 M	50 tahun
II	Paduka Pikaram Wira	1208 M	1223 M	15 tahun
III	Sri Rama Vikaram	1223 M	1236 M	13 tahun
IV	Sri Paduka Maharaja	1236 M	1248 M	12 tahun
V	Sri Iskandar Syah	1248 M	1252 M	4 tahun

Sumber: Dikembangkan dari beberapa sumber

4.4. PERDEBATAN SEJARAH TENTANG RAJA MELAKA

Perdebatan sejarah yang terjadi sampai saat ini adalah tentang siapa sebenarnya Raja Singapura yang lari saat diserang oleh Majapahit?. Buya Hamka (1961) dalam bukunya sejarah perjuangan umat Islam mengatakan bahwa Raja Singapura yang lari ke Melaka ialah Permaisyura dengan gelar "Raja Kecil Besar". Hamka mengatakan bahwa Raja Melaka pertama adalah Raja Kecil besar dan Raja Melaka yang kedua ialah Sultan Iskandar Syah yang dalam catatan Portugis dinamakan Zaquidharsha dan dalam catatan Tionghoa dinamakan Mu-kan-sautir-sha. Raja Permaisyura yang bergelar

Raja Kecil Besar pada awalnya adalah penganut hindu, kemudian beliau berpindah menjadi penganut Islam dengan merubah namanya menjadi Sultan Muhammad Syah (Hamka,1961).

Berdasarkan cerita inilah Sejarah mencatat bahwa Raja Melayu Islam pertama adalah Raja Melaka dengan Rajanya Sultan Muhammad Syah. Urutan sejarah inilah yang berbeda menurut catatan sejarah Melayu yang mengatakan bahwa Raja Singapura yang lari adalah Raja Iskandar Syah dan beliau bukan seorang Muslim. Sedangkan Raja Melaka kedua ialah Raja Besar Muda dengan nama kecil "Raja Ahmad". Perbedaan lainnya adalah soal penakhlukan Majapahit atas Kerajaan Singapura seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Catatan Melayu menyebutkan bahwa penakhlukan Singapura oleh Majapahit terjadi pada tahun 1252 M, sedangkan Buya Hamka berpendapat tahun 1384 M. Penulis lebih setuju dengan catatan Melayu apabila yang dimaksudkan adalah Singhasari, karena Kerajaan Majapahit itu sendiri berdiri pada tahun 1294 M (Soedjono dan Leirissa, 2010), sehingga penakhlukan Majapahit pada tahun 1252 M mungkin kurang mengandung kebenaran, terkecuali yang dimaksudkan adalah Kerajaan Singhasari. Meskipun Kerajaan Majapahit adalah kelanjutan dari Kerajaan Singhasari, namun memiliki periodisasi dan karakter masa yang berbeda. Terlepas dari perdebatan data sejarah, yang pasti Kerajaan-kerajaan Melayu sudah memeluk Islam di pertengahan abad 12 dan terus berkembang. Hal ini terlihat dari pernyataan Sultan Rum (Sultan aceh) pada abad 16 yang mengatakan bahwa di bagian barat kami Raja Besar, dan di bagian timur Sri Sultan Perkasa Alam (Iskandar Muda) adalah raja yang terbesar dan yang memegang teguh agama Tuhan dan Nabinya" (Reid, 2005).

Perkembangan Kerajaan Melaka pada abad ke 15 masuk ke masa penyerangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso De' Albuquerque, tepatnya pada tahun 1511 (Reid, 2005) yang merupakan hulu dari Kerajaan Johor, Riau Kepulauan, dan Siak Sri Inderapura. Pada saat penyerangan oleh Portugis, Kerajaan Melaka dikendalikan oleh Sultan Mahmud Syah yang merupakan turunan raja generasi keenam. Tidak diperoleh data mengenai tahun kapan awal berkuasanya Sultan Mahmud Syah, namun tahun berakhirnya diketahui pada tahun 1511 M bersamaan dengan penyerangan oleh Portugis.

Tabel 4.3
Kerajaan Melaka
Raja-Raja Yang Pernah Berkuasa
Periode 1384 – 1511

Raja	Nama Raja	Mulai Berkuasa	Akhir Berkuasa	Keterangan
I	Sultan Muhammad	1384 M	1414 M	30 tahun
II	Sultan Iskandar Syah	1414 M	1424 M	10 tahun
III	Sultan Muzaffar Syah	1424 M	1444 M	20 tahun
IV	Sultan Mansyur Syah	1444 M	1477 M	33 tahun
V	Sultan Alaidin Riayat Syah	1477 M	Missing Link	Missing Link
VI	Sultan Mahmud Syah	Missing Link	1511 M	Missing Link

Sumber: Dikembangkan dari beberapa sumber

Penyerangan Kerajaan Melaka oleh Portugis menyebabkan Sultan Mahmud Syah lari ke Riau Kampar bersama putranya Raja Ahmad dan wafat di daerah tersebut dengan gelar Marfum Kampar. Setelah bertahun-tahun kemudian, salah seorang dari keturunan inilah yang mendirikan Kerajaan Johor. Beberapa Raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Melaka disajikan pada Tabel 4.3.

4.5. ASAL MUASAL KERAJAAN SIAK SRI INDERAPURA YANG TERDEKAT

Kerajaan Johor dibangun oleh keturunan Kerajaan Melaka, namun tidak diketahui oleh keturunan raja mana yang mendirikannya. Terdapat kesimpang siuran tentang keturunan raja yang mana mendirikan Kerajaan Johor. Yang pasti, pada saat Kerajaan Melaka diserang oleh portugis tahun 1511, raja yang berkuasa adalah Sultan Mahmud Syah dan melarikan diri ke Kampar bersama putranya Raja Ahmad (Sinar, 2007, Malik *et. al*, 2012, Effendy dan Effendy, 1972, Yusuf *et. al*, 1993). Oleh sebab itu, Kalau dilihat dari sisi periode waktu, maka keturunan dari Raja Ahmad atau putra dari Sultan Alaidin Riayat Syah yang lain yang kemungkinan mendirikan Kerajaan Johor.

Kerajaan Johor merupakan asal-muasal silsilah Kerajaan Siak Sri Inderapura yang terdekat. Masa kejayaan Kerajaan Johor terbilang cukup lama yakni 156 tahun dengan 5 Raja yang pernah berkuasa. Tidak terdapat informasi mengenai kejayaan masing-masing raja dari sisi kepemilikan harta, kecuali hanya berupa informasi tentang siapa saja Raja yang pernah berkuasa. Beberapa Raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Johor di antaranya mulai dari sultan pertama sampai dengan seterusnya disajikan pada Tabel 4.4. Tabel mengenai raja-raja yang pernah berkuasa disarikan dari berbagai sumber, sehingga tersusun secara berurutan mulai tahun 1529 M sampai dengan 1761 M. Data setelah tahun 1761 M tidak diperoleh kapan awal dan akhirnya, kecuali menyangkut dengan nama asal keturunannya. Susunan raja-raja yang pernah berkuasa selengkapnya disajikan berikut ini.

Tabel 4.4
Kerajaan Johor
Raja-Raja Yang Pernah Berkuasa
Periode 1529 – 1685

Raja	Nama Raja	Mulai Berkuasa	Akhir Berkuasa	Keterangan
I	Sultan Alauddin Riayat Syah	1529 M	1550 M	29 tahun
II	Sultan Abdul Jalil Riayat Syah	Meninggal sebelum ditabalkan		
III	Sultan Abd Ma'ayah Syah	1550 M	1623 M	73 tahun
IV	Sultan Abd Jalil Riayat Syah III	1623 M	1673 M	50 tahun
V	Sultan Ibrahim Syah	1673 M	1685 M	12 tahun
VI	**Bendahara Paduka Raja, Tun Habib Abdul Majid**	**1685 M**	**1691 M**	**6 tahun, bersifat sementara**
VI	*Sultan Mahmud Syah II*	*1691 M*	*1699 M*	*Ayahanda Raja Kecil*
VII	**Sultan Abdul Jalil IV**	1708	**1720 M**	**Bendahara Paduka Raja**
VIII	Raja Kecil	1720 M	1722 M	2 tahun
IX	**Raja Sulaiman**	**1722 M**	1760 M	**Melalui serah kekeluargaan**
X	**Sultan Abdul Jalil Muazam Syah**	**1760 M**	**1761 M**	**Anak Raja Sulaiman**
dst	**Turunan Raja Kamariah & Upu Daeng Perani**	Missing Link	Missing Link	Missing Link

Sumber: Dikembangkan dari berbagai sumber
Catatan: Cetak tebal bukan keturunan sultan-sultan sebelumnya

Sultan Ibrahim Syah yang berkuasa lebih kurang 12 tahun, diakhir masa kejayaannya pernah dikuasai oleh Kerajaan Jambi. Penguasaan oleh jambi menyebabkan Sultan Ibrahim Syah hengkang ke Bintan menuju daerah yang terkenal dengan nama "Bandar Riuh" dan mendirikan kerajaan baru disana (Effendy dan Effendy, 1972). Menurut beberapa catatan, Bandar Riuh inilah asal-muasal kata Riau. Namun demikian, pada tahun 1680 M Sultan Ibrahim Syah berhasil merebut kembali Johor dari kekuasaan Jambi dan memindahkan pusat kekuasaannya dari Bandar Riuh kembali ke Johor. Perkembangan selanjutnya dari Kerajaan Johor berlangsung normal, namun terjadi sedikit kendala pada saat perpindahan kekuasaan dari Sultan Ibrahim Syah ke Raja Mahmud pada tahun 1685 M. Masalah tersebut terjadi karena Raja Mahmud Syah belum cukup dewasa untuk menjadi penguasa di Kerajaan Johor (Effendy dan Effendy, 1972). Oleh sebab itu, puncak kendali sementara Kerajaan Johor dipegang oleh Bendahara Paduka Raja dan Tun Habib Abdul Majid sebagai pengendali Kerajaan Johor ke VI. Ketika Paduka Raja Tun Habib mangkat, barulah dilantik Raja Mahmud dengan gelar "Sultan Mahmud Syah II" pada tahun 1691 M. Sultan Mahmud Syah II adalah ayahanda dari Sultan Abdul Jalil Rakhmad Syah Yang Dipertuan Raja Kecil, pendiri Kerajaan Siak Sri Inderapura. Sultan Mahmud Syah II adalah Sultan

terakhir yang berkuasa di Kerajaan Johor dan merupakan raja yang mengantarkan terbentuknya Kerajaan Siak Sri Inderapura dengan sebuah tragedi keluarga yang sangat memilukan (Effendy dan Effendy, 1972).

4.6. TEMPAT RAJA KECIL DI BESARKAN

Tempat lahirnya Raja Kecil dalam perjalanan penyelamatan dari Johor, Jambi, Indragiri dan akhirnya ke Pagaruyung memang masih menjadi perdebatan sejarah, demikian juga soal asal usul ibundanya. Namun yang pasti, semua catatan sejarah setuju untuk mengatakan bahwa beliau dari kecil hingga dewasa ditempa dan dididik di Kerajaan Pagaruyung Minang Kabau (Effendy dan Effendy, 1972, Yusuf et al, 1993). Penerimaan Raja Kecil sebagai putra angkat Raja Pagaruyung dan terpaan serta memperlakukannya bak seperti anak raja pada saat itu, barangkali dapat membantu kesimpang siuran soal asal usul dari ibunda Raja Kecil. Pendapat yang mengatakan Encik Pong memiliki hubungan darah dengan Kerajaan Pagaruyung mungkin lebih tepat. Biasanya dalam suatu struktur keluarga kerajaan, tidak mudah untuk mengangkat seorang anak, apalagi memperlakukannya seperti anak raja sendiri, kecuali memiliki hubungan dalam silsilah keluarga.

Orang yang berjasa membawa Raja Kecil ke Pagaruyung adalah Malin seorang saudagar Minang Kabau dan memberi nama anak itu Tuan Bujang (Yusuf et al, 1993). Raja Kecil dibesarkan oleh Ibunda Maharaja Minang Kabau yakni Putri Jamilan seperti membesarkan anak sendiri. Maharaja Minang Kabau saat itu Yam Tuan Sakti juga sangat senang menerima anak tersebut oleh karena ketampanan si anak dan pembawaan di rajanya (Yusuf et al, 1993). Terpaan serta didikan yang diperoleh Raja Kecil di Kerajaan Pagaruyung sudah barang tentu sedikit banyak akan memengaruhi kepribadian, kebiasaan dan kultur Minang Kabau pada diri Raja Kecil. Hal ini menujukkan bahwa hubungan bathin antara Kerajaan Siak Sri Inderapura dengan negeri Minang Kabau sebenarnya sudah terjalin lama dan menempatkan hubungan yang sangat emosional. Bahkan riwayat inilah yang mungkin menyebabkan munculnya pendapat masyarakat di jejaring sosial yang mengatakan bahwa Raja Kecil adalah orang Minang.

Modal pendidikan sejak kecil dan terpaan berbagai macam pengetahuan yang berkaitan dengan sistem kerajaan di Pagaruyung menjadikan semangat Raja Kecil untuk kembali menjadi seorang raja sangat besar. Apalagi proses sebelum dapat diangkat sebagai putra angkat Raja Pagaruyung yang berlaku di kerajaan pada saat itu telah membuktikan bahwa beliau memang seorang turunan Raja dari Kerajaan Johor. Keyakinan bahwa Raja Kecil memang turunan Kerajaan Johor, menyebabkan pemerintah Pagaruyung memaklumi maksud Raja Bujang untuk menuntut balas atas kematian ayahnya dan mewarisi Kerajaan Johor (Yusuf et al, 1993).

4.7. KEMBALI KE JOHOR

Niat Raja Kecil untuk kembali ke Johor pastilah telah dikomunikasikannya kepada Raja Pagaruyung yang berkuasa saat itu. Buktinya, beliau mendapat dukungan penuh Raja Pagaruyung untuk kembali ke negeri asalnya. Sebagai bentuk dukungan dari Raja Pagaruyung, beliau mendapat pengawalan dari orang-orang besar dan hulu balang Pagaruyung. Tidak jelas berapa persis pengawal yang diberikan untuk Raja Kecil, namun beberapa sumber ada yang menyebutkan 40 orang, 20 orang, 17 orang dan ada yang mengatakan hanya 5 orang (Effendy dan Effendy, 1972). Setelah direstui Raja Pagaruyung dan mendapat pengawalan dari beberapa orang besar dan hulu balang, beliau berangkat dari Pagaruyung menuju Johor melewati daerah Tapung Kiring (petapahan), lalu terus ke Sungai Jantan (Siak) dan singgah di Bandar Sabak Auh. Bandar Sabak Auh adalah salah satu daerah yang cukup besar dan ramai dikunjungi pedagang di sepanjang aliran Sungai Jantan. Setelah singgah di Bandar Sabak Auh, beliau berangkat menuju Bengkalis.

Sebelum berangkat menuju Bengkalis, beliau mengalami sedikit hal yang tidak diduga sebelumnya yakni harus membayar "Cukai Kepala" kepada Syahbandar yang berkuasa di daerah tersebut (Effendy dan Effendy, 1972). Peristiwa ini tentu saja biasa bagi pedagang yang singgah di Bandar Sabak Auh, namun tidak bagi Raja Kecil yang memang bermental sebagai seorang Raja. Pada saat Syahbandar meminta upeti "Cukai Kepala" beliau tanpa protes memerintahkan pengawalnya untuk memberikan "Uncang" atau pundi-pundi emasnya kepada Syahbandar. Namun setelah menyerahkan permintaan Syahbandar seperti halnya dengan pedagang umumnya dan sebelum berangkat menuju Bengkalis, Raja Kecil sempat berucap kepada Syahbandar sebagai berikut; "orang kaya, hari ini hamba serahkan uncang hamba, tetapi kelak kemudian hari, Syahbandar akan menyerahkan kembali kepada hamba, Percayalah!". Pernyataan ini adalah bentuk uangkapan kekecewaan serta semangat seorang turunan Raja yang kelak menjadi raja berkuasa di Johor dan pendiri Kerajaan Siak Sri Inderapura (Effendy dan Effendy, 1972). Lain halnya dengan yang dialami Raja Kecil di Bandar Sabak Auh, di mana beliau diperlakukan seperti sebagai pedagang umumnya karena mungkin sebenarnya Syahbandar tidak mengetahui siapa beliau, maka di Bangkalis sebaliknya mendapat perlakuan yang sangat bersahaja dari masyarakatnya. Kalau di Bandar Sabak Auh beliau barangkali tidak sempat berinteraksi dengan baik sehingga Syahbandarnya tidak mengenal sejarah beliau, maka di Bengkalis beliau sempat mengambil hati masyarakatnya sehingga timbul simpatik dan rasa sayang masyarakat Bengkalis kepada beliau. Pengalaman suka dan duka ternyata silih berganti dialami oleh Raja Kecil sebagai halnya juga dialami oleh setiap orang biasa umumnya.

Pada saat Raja Kecil sampai di Bengkalis, situasi Bengkalis sudah cukup maju yang ditandai dengan jumlah penduduk yang ramai. Kemudian adanya tertib masyarakat karena mereka sudah memiliki pimpinan yang saat itu disebut dengan Bathin atau

kepala suku. Paling tidak saat itu terdapat tiga Bathin yang menjadi pemimpin masyarakat yakni Bathin Senggoro di Senggoro dengan gelar Bathin Hitam, Kemudian ada Bathin putih di ketam putih serta Bathin Tua di Bantan (Effendy dan Effendy, 1972). Bathin hitam adalah Bathin yang terkenal pada saat itu. Di sisi lain, Raja Kecil bersama dengan pengiringnya meskipun menyamar sebagai pedagang dan membawa banyak harta, cepat menarik hati penduduk Bengkalis sehingga beliau disayang dan dihormati. Interaksi yang harmonis ini menyebabkan Raja Kecil membuka rahasia siapa dia sebenarnya. Kepada masyarakat Bengkalis beliau mengatakan bahwa beliau adalah putra Sultan Mahmud Syah Mangkat di Julang Johor. Beliau juga menceritakan kepada penduduk Bengkalis bagaimana kisah perjalanannya mulai sejak lahir sampai ke Pagaruyung. Akhir dari semua cerita yang disampaikannya, belau juga mengungkapkan keinginan beliau untuk merebut kembali tahta ayahandanya. Semua cerita yang sangat terbuka dan terus terang inilah yang mengundang simpatik penduduk Bengkalis untuk membantu beliau (Effendy dan Effendy, 1972).

Respon simpatik penduduk Bengkalis atas pengakuan Raja Kecil muncul karena Masyarakat Bengkalis telah lama menjalin hubungan di bidang perdagangan dengan Johor. Penduduk Bengkalis mengakui Raja Kecil sebagai putra Sultan Mahmud Syah, mungkin saja karena mereka telah mendengar pergolakan yang terjadi di Kerajaan Johor sebelumnya sehingga mengkaitkannya dengan pengakuan Raja Kecil. Orang laut di bawah pimpinan Raja Negara Salat mendukung rencana Raja Kecil menyerang Johor dan segera menemuinya (Yusuf, 1993). Simpatik penduduk Bengkalis diberikan dalam bentuk sumpah setia untuk membantu Raja Kecil merebut kembali tahta Kerajaan Johor. Setelah mendapat dukungan dari penduduk Bengkalis serta dukungan penuh Raja Pagaruyung, pada tahun 1720 M atau setelah 29 tahun masa pelariannya bersama ibunda, Raja Kecil berhasil menyusun angkatan perangnya (Effendy dan Effendy, 1972). Akhirnya beliau dan angkatan perangnya bertolak ke Johor untuk merebut tahta Kerajaan Johor yang pada saat itu dikuasai oleh Sultan Abdul Jalil IV.

Kondisi Kerajaan Johor pada saat Sultan Abdul Jalil IV memegang kendali kerajaan sangat lemah. Hal ini terjadi karena beliau kurang memperhatikan pertahanan negerinya. Kemudian beliau terlalu hanyut dengan kemewahan dan kesenangan istana sebagai pengendali kerajaan tanpa memperhatikan kekuatan dan kewibawaan kerajaan. Hal ini terbukti pada saat beliau memegang kendali, banyak Lanun yang merajalela di laut. Kelemahan terpenting adalah Sultan Abdul Jalil IV tidak mendapat dukungan dari orang laut yang merupakan inti kekuatan dan bagian terbesar personal angkatan laut pada zaman Melaka maupun Johor (Yusuf, 1993). Lemahnya kendali beliau ditambah dengan Timbulnya perpecahan di kalangan istana yang mempersoalkan keberadaannya karena beliau bukanlah keturunan Sultan-Sultan Raja Johor sebelumnya. Disamping itu, pengaruh bangsa asing juga sangat kuat di sana. Sultan Abdul Jalil IV hanyalah putra bendahara paduka Raja yang memegang kendali kekosongan kerajaan setelah

Megat Sri Rama dan Sultan Mahmud Syah II tewas dan diikuti terjadinya kerusuhan antara kedua pengikut (Effendy dan Effendy, 1972). Kelemahan-kelemahan Sultan Abdul Jalil IV inilah yang menyebabkan rencana pengambil alihan kerajaan oleh Raja Kecil berjalan mulus. Raja Kecil dan pasukannya berhasil memukul Johor dengan mudah dan dalam waktu yang singkat pada tahun 1717 M (Sinar, 2007). Keberhasilan Raja Kecil memukul Johor menyebabkan Sultan abdul Jalil IV melarikan diri ke hulu Johor (tempat pada saat ibunya melarikan diri setelah huru hara antar pengikut Megat Sri Rama dan Sultan Mahmud Syah II). Beliau akhirnya meninggal dalam pelariannya dengan gelar Marhum Mangkat Dibatang dan meninggalkan 3 orang putra yang tetap berada di Johor.

Menurut penulis, terjadinya perebutan kekuasaan di Kerajaan Johor pada masa Sultan Mahmud Syah II, dan dilanjutkan perebutan kekuasaan oleh Raja Kecil atas Johor bukanlah bermotif harta, tetapi lebih bermotif pada harga diri. Megat Sri Rama membunuh Sultan Mahmud Syah II, oleh karena Sultan telah membunuh istrinya. Sultan Mahmud Syah II membalas serangan Megat Sri Rama sehingga tewas, juga bukan karena motif harta, melainkan membela diri. Demikian juga dengan penyerangan Kerajaan Johor oleh Raja Kecil, hanya di motivasi untuk membalas kematian ayahandanya serta mengambil kembali kekuasaan Johor sebagai keturunan asli Kerajaan Melaka dan Johor.

4.8. KESIMPULAN

Apabila sebuah kerajaan mengalami suatu kejayaan, maka di samping sebagai daerah tujuan, sekaligus juga bisa menjadi daerah incaran bagi penguasaan oleh kerajaan lainnya. Informasi yang mendominasi tentang kejayaan kerajaan asal-muasal Siak Sri Inderapura hanya berkisar pada pengembangan dan pertumbuhan daerah, perkembangan perdagangan dan serang menyerang untuk menguasai sebuah kerajaan dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan. Motif dari kuasa-menguasai kerajaan adalah harta yang direbut dengan kekuatan tahta serta keinginan untuk meluaskan wilayah kekuasaan. Semangat memburu harta telah terjadi sejak lama, namun tidak diperoleh informasi tentang bagaimana harta tersebut dikelola.

Masa Raja Sang Nila Utama, wilayah kekuasaannya bertambah dengan membangun negeri Temasik, kemudian berubah nama menjadi Singapura. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan Singapura melebihi pulau Bintan sebagai pusat kerajaan. Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan inilah, diduga menjadi pertimbangan Raja Sang Nila Utama untuk memindahkan pusat kerajaannya ke Singapura pada tahun 1160 M. Tidak ada data yang diperoleh bagaimana raja dengan mudahnya memindahkan pusat kerajaan dari Bintan ke Singapura. Namun secara pasti dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu daerah baik dari sisi pertumbuhan daerah

karena perkembangan perdagangan menjadi alasan utama untuk memindahkan pusat kerajaan. Ternyata, masalah pindah memindahkan ibu kota sebagai pusat kerajaan sudah terjadi sejak tahun 1150 M atau 10 abad yang lalu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cara perburuan harta di masa kerajaan sebelum Siak Sri Inderapura dilakukan dengan dua cara yakni *pertama*, membuka wilayah baru dan mengembangkannya atau *kedua*, merebut wilayah yang telah berkembang dan menguasainya.

BAB 5

IDENTIFIKASI PERALIHAN HARTA ANTAR SULTAN SIAK SRI INDERAPURA

5.1. MERINTIS HARTA PENDAHULUAN

Sistem kerajaan yang bersifat turun-temurun memiliki dua makna substansi yakni turun-temurun dalam hal kekuasaan dan turun-temurun dalam hal harta. Turun-temurun kekuasaan biasanya mengikuti garis keturunan putra lelaki dari sultan yang berkuasa sebelumnya, Sedangkan turun-temurun dalam hal harta mengikat pada turun-temurun keluarga kerajaan. Ini artinya bahwa Putra Mahkota berhak menguasai harta kerjaaan dan menggunakan harta kerajaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Penentuan atau penetapan harta kerajaan pada saat kerajaan telah terbentuk, tidak memiliki masalah dalam pelaksanaannya. Namun bagi sebuah kerajaan yang baru terbentuk, apalagi terbentuk dari dukungan kekuatan masyarakat yang telah ada sebelumnya, kedudukan harta biasanya didasarkan pada suatu kesepakatan antara masyarakat dengan Raja yang didukung. Hal ini terjadi antara masyarakat dengan Raja Kecil pada saat pendirian Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Ghalib (1991) menjelaskan bahwa terdapat dua golongan masyarakat sebelum terbentuknya Kerajaan Siak Sri Inderapura. Kedua golongan masyarakat tersebut adalah golongan rakyat atau penduduk asli (*autochthone*) dan golongan pendatang yang merupakan para saudagar. Para penduduk asli saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Johor. Keberadaan penduduk asli yang berada dalam naungan Kerajaan Johor, sangat menentukan sejarah terbentuknya Kerajaan Siak Sri Inderapura. Hal ini di sebabkan oleh karena Raja Kecil sangat memerlukan dukungan mereka, untuk

mendirikan sebuah kerajaan. Dukungan nyata penduduk asli terhadap Raja Kecil sangat berarti pada saat itu untuk pembentukan sebuah kerajaan baru.

Dukungan penuh diperoleh Raja Kecil setelah dilakukan persetujuan antara Raja Kecil dan Kepala Suku, sehingga terbentuk Kerajaan Siak yang awalnya bernama Kerajaan Buantan. Isi persetujuan yang sangat penting dan memengaruhi Kerajaan Siak berikutnya adalah:

> "Raja Kecil diakui sebagai Sultan, tetapi tidak menguasai hutan tanah. Hutan tanah tetap dalam penguasaan kepala-kepala suku dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan anggota suku masing-masing. Dengan demikian, Sultan beserta orang besarnya yaitu Datuk Empat Suku, tidak mempunyai hutan tanah. Untuk Datuk Empat Suku yaitu Datuk Tanah Datar, Datuk Limapuluh, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar beserta keturunannya diberikan daerah pemukiman saja. Kedudukan kepala suku dianggap setara dengan Datuk Empat suku dan dinamakan "golongan orang baik-baik".(Ghalib, 1991).

Persetujuan di atas dipertegas oleh Anrooijt (1885) yang menyatakan bahwa Raja Kecil dan pengikutnya serta Datuk Empat Suku tidak ada hak untuk memiliki tanah yang diserahkan pengaturannya oleh mereka. Persetujuan di atas memberikan informasi bahwa baik keluarga raja, para pengikutnya maupun para Datuk Empat Suku bukanlah penduduk asli. Kesepakatan antara Kepala Suku dan Raja Kecil dalam sebuah perjanjian, menjadi dasar yang harus diikuti oleh Sultan-Sultan penerusnya. Ketika Raja Kecil menjadi Raja Johor, tanah dikuasai oleh penduduk pribumi dan dia tetap tunduk (Anrooijt, 1885). Namun, dalam perkembangannya apakah perjanjian ini masih dipegang atau tidak, akan terlihat dari kiprah masing-masing Sultan Kerajaan Siak Sri Inderapura mulai dari Raja Kecil sebagai sultan pertama sampai dengan Sultan Syarif Kasim II sebagai sultan kedua belas atau yang terakhir.

5.2. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ABDUL JALIL RAKHMAD SYAH (1723 M – 1746 M)".

Sultan Abdul Jalil Rakhmad Syah Yang Di Pertuan Raja Kecil memimpin Kerajaan ini selama 23 tahun yakni mulai tahun 1723 M sampai dengan 1746 M. Beliau adalah pendiri dan menjadi Sultan pertama yang memimpin Kerajaan ini, dengan cara menyatukan berbagai unsur masyarakatnya yang terdiri dari orang Melayu, Perantauan Minang Kabau dan orang asli yakni Orang Laut, Sakai dan Petalangan serta menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk memperkuat kerajaannya (Rohana, 2008). Beliau berkepentingan untuk menempatkan Kerajaannya sebagai dasar dari sebuah Kerajaan besar dengan harapan akan menjadi berkembang di bawah garis keturunannya.

Selama membangun Kerajaannya, beliau menata hubungan dagang dengan baik, karena perdagangan adalah barometer yang paling baik dan cepat untuk memajukan suatu wilayah kerajaan pada saat itu. Perjalanan menuju pengembangan hak azasi manusia, kemerdekaan sosial, dan demokrasi memang berlari melalui pertumbuhan bisnis dan perkembangan ekonomi (Nasr, 2009). Dengan penataan hubungan dagang yang baik inilah menyebabkan kerajaannya manjadi tumbuh dan berkembang dengan cepat. Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan di kerajaan ini ditandai oleh banyaknya pedagang mengunjungi daerah Buantan, tempat Kerajaan Siak pertama kali didirikan (Effendy dan Effendy, 1972). Pedagang yang paling banyak mengunjungi daerah ini adalah pedagang-pedagang yang berasal dari Pesisir Timur Sumatra.

Situasi perdagangan saat Raja Kecil mendirikan Kerajaan Siak berjalan secara normal oleh karena belum menjadi perhatian pihak Kolonial. Situasi ini sebenarnya potensi bagi pihak Raja Kecil untuk mengumpulkan harta dari transaksi perdagangan yang ada. Kelompok kapitalisme politik saat baru berdirinya Kerajaan Siak cendrung belum ada, sehingga akan memberikan keuntungan bagi kerajaan untuk mendapatkan pundi-pundi dari praktik perdagangan yang diselenggarakan secara murni. Namun kondisi sebaliknya akan terjadi apabila kelompok kapitalisme politik telah memengaruhi kehidupan kerajaan. Kapitalisme politik tidak mengenal perdagangan bebas dan golongan borjuis sebagai pendukungnya. Apabila aristokrasi feodal muncul, maka kecendrungan untuk memperluas hegemoni sehingga dapat menambah upeti dari kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada mereka akan terjadi (Kartodirdjo, 1992). Di samping itu, kapitalisme politik cendrung menguasai pajak atau Bea Cukai dari kapal-kapal yang berlabuh, sehingga akan mempersempit ruang gerak kerajaan untuk menambah pendapatannya. Oleh karena kerajaan masih baru berdiri, wajar saja orientasi untuk mengumpulkan pundi-pundi harta kerajaan belum menjadi perhatian, kecuali tata pemerintahan dan adat istiadat.

Tata pemerintahan dan adat istiadat yang telah dibangun oleh Raja Kecil dalam sistem kerajaan yang dibangunnya merupakan landasan yang sangat fundamental bagi kelanjutan Kerajaan di masa yang akan datang. Tugas Raja Kecil yang sangat menentukan keberadaan Kerajaan Siak Sri Inderapura di masa yang akan datang, akan menjadi fundamen dan falsafah bagi jalannya roda sistem pemerintahan. Perjuangan dan jasa yang diberikan oleh Raja Kecil bagi Kerajaan dan Rakyat Melayu Riau tak terhingga besarnya. Namun peran Raja Kecil tentu saja tidak akan mampu berjalan selama-lamanya. Hukum alam sesuai dengan kehendak Tuhan yang berkuasa harus dalam format ada awal dan ada akhir dalam proses kehidupan. Sesuai dengan kaidah tersebut, tugas Raja Kecil juga harus berakhir ditelan oleh perjalanan waktu, di mana beliaupun pada akhir hidupnya sudah mulai sakit-sakitan. Kondisi fisik juga sudah uzur dan lemah dalam menerima kenyataan yang dilihat dan didengar oleh beliau. Hal ini terlihat sekali pada saat beliau harus menerima kenyataan bahwa putra-putranya

saling berperang satu sama lainnya. Kenyataan inilah yang membuat beliau semakin terpukul dan semakin hancur perasaannya, yang pada akhirnya membuat beliau semakin sakit-sakitan.

Pertikaian yang terjadi adalah antara putra sulung yang bernama Tengku Alam dengan putra bungsu beliau yang bernama Tengku Buang Asmara. Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah memiliki tiga putra yakni tertua Tengku Alam dengan gelar Yang Di Pertuan Muda, Tengku Tengah yang meninggal sebelum dewasa dan paling kecil Tengku Buang Asmara dengan gelar Tengku Mahkota (Effendy dan Effendy, 1972). Pertikaian yang terjadi di antara kedua putranya menyebabkan beliau memanggil keduanya untuk bicara. Pada saat itulah beliau mengatakan kepada kedua putranya sebagai berikut; "kalau kamu tak mau menurut titahku, pergilah kamu salah seorang atau kedua-duanya dari negeri ini. Negeri yang aku dirikan dengan susah payah ini bukanlah untuk tempat pertarungan antara kamu!". (Effendy dan Effendy, 1972). Pernyataan ini membuat putra sulungnya Tengku Alam mengalah dan pergi meninggalkan Buantan dan akhirnya menyingkir ke Johor (Suwardi et al, 2006).

Kepergian putra sulungnya setelah mematuhi permintaan orang tuanya, kiranya bukan menyelesaikan masalah untuk Raja Kecil sendiri, malah membuat penyakitnya semakin parah karena dilanda kesedihan dan kepedihan tak terkira. Beliau kiranya tidak sanggup menerima kenyataan dari apa yang beliau putuskan sendiri. Rasa kasih sayang dan sangat penyayang serta baik hati, menyebabkan Raja Kecil tidak sanggup menerima ketegasannya sendiri yang menyebabkan salah satu putranya harus meninggalkan beliau. Tanpa mengesampingkan takdir Tuhan, kesedihan dan kepedihan inilah diduga menyebabkan beliau bertambah sakit parah dan akhirnya wafat pada tahun 1746 M dengan gelar Marhum Buantan (Effendy dan Effendy, 1972). Wafatnya Raja kecil, menjadi tonggak sejarah bagi kelanjutan kerajaan yang dibangunnya di masa-masa yang akan datang. Sesuai dengan tradisi kerajaan, maka penerus kerajaan berasal dari putra kandungnya yang masih tetap berada di Buantan.

Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah tidak meninggalkan harta bagi penerusnya. Tidak ada niat dan upayanya untuk menimbun harta yang dapat diwariskannya, kecuali bagaimana menata sistem kerajaan untuk diteruskan kepada putranya sebagai Sultan penerus kerajaan. Fokus Sultan sebagai pendiri kerajaan hanyalah pada upaya membangun dasar-dasar kerajaan sebagai fundamen utama bagi kerajaan selanjutnya. Hasil penelusuran data yang dilakukan, tidak ada catatan tentang kekayaan, kecuali Tiga fundamen yang dibangunnya yakni membangun kerajaan sebagai pusat perdagangan, membangun Tata pemerintahan dan membangun tata adat istiadat yang berlaku di wilayah kerajaan. Harta pada masa Raja Kecil hanya sebatas pada tempat tinggal dan apa yang langsung dimilikinya. Wilayah kekuasaan bukanlah harta beliau karena terikat pada perjanjian.

5.3. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ABDUL JALIL MUZAFFAR SYAH (1746 – 1765 M)".

Wafatnya Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah menjadi titik awal yang sangat menentukan bagi perkembangan kerajaan berikutnya. Hal ini disebabkan karena kerajaan ditinggalkan oleh pendirinya dan berganti kepada keturunan generasi pertama. Dikatakan titik awal karena maju tidaknya kerajaan selanjutnya sangat bergantung kepada generasi seterusnya. Beliau digantikan oleh putra ketiganya yakni Tengku Buang Asmara yang *ditabalkan* pada 1746 M. Effendy dan Effendy (1972) menjelaskan bahwa Tengku Buang Asmara adalah sultan yang mengganti nama Sungai Siak menjadi Sungai Jantan dan Kerajaan Buantan menjadi Kerajaan Siak Sri Inderapura. Kedua nama tersebut yakni Sungai Siak dan Kerajaan Siak Sri Inderapura sampai saat ini masih dikenal dan digunakan orang, termasuk dalam judul buku ini.

Selama beliau menjadi Raja, di samping merubah nama Sungai Siak dan nama kerajaannya, beliau juga berusaha mengembangkan kerajaan dari landasan yang telah dibangun oleh ayahandanya menjadi lebih baik. Salah satu upaya untuk mengembangkan Kerajaannya adalah beliau memperkuat sistem pertahanan Kerajaan dengan mengangkat Tengku Muhammad Ali yang tak lain adalah putra dari kakaknya Tengku Alam, menjadi panglima besar kerajaan (Effendy dan Effendy, 1972). Pengangkatan ini juga di maksudkan untuk menjaga hubungan baik dengan kakaknya yang telah meninggalkan Buantan karena harus mengalah dengan beliau. Kerajaan Buantan setelah Raja Kecil wafat, seharusnya digantikan oleh kakaknya Sultan Alamuddin Syah yang meninggalkan Buantan karena konflik dengan beliau. Pada saat Raja Kecil meninggal, otomatis beliaulah yang berada di dekat jenazah orang tuanya. Menurut tradisi Melayu, pada waktu ayahnya meninggal, sebagai calon pengganti Sultan, dia harus berada ditempat untuk segera ditabalkan (Yusuf et al, 1993).

Orientasi beliau masih di bidang pertahanan mengingat ancaman dari Belanda yang ada di Melaka dan Johor yang masih menyimpan dendam selalu tetap ada, termasuk dari saudara kandungnya Tengku Alam yang terus-menerus berusaha mengacau (Netscher, 2002). Benar saja, setelah mengangkat Tengku Muhammad Ali menjadi Panglima Besar Kerajaan, pertempuran dengan Belanda terjadi yang terkenal dengan perang Guntung. Kisah perang guntung diceritakan secara lengkap oleh Mahyudin (1988) dalam bukunya yang berjudul Perang Guntung. Setelah memimpin Kerajaan Siak Sri Indarapura selama 19 tahun (1746 – 1765 M) Sultan Muzaffar wafat pada tahun 1765 M dan digantikan oleh putranya.

Harta kerajaan pada masa Sultan Muzaffar Syah atau Tengku Buang Asmara sudah terlihat perubahannya. Hal ini paling tidak terindikasi dari kemampuannya untuk memindahkan pusat kerajaan dari Buantan ke Mempura. Penambahan harta masa Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah dapat dikatakan tidak ada. Hal ini dapat dimaklumi

karena beliau adalah orang tangan pertama yang menerima tongkat kepemimpinan kerajaan setelah pendiri Kerajaan Siak. Meskipun beliau telah mampu memindahkan kerajaan ke Senapelan, tidak memberikan dampak yang berarti pada penambahan harta kerajaan karena masih bersifat individual sehingga hanya diturunkan kepada anaknya langsung.

5.4. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ABDUL JALIL JALALUDDIN SYAH (1765 -1766 M)".

Masa Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Syah adalah yang sangat menarik dari kisah sebuah Kerajaan Siak Sri Inderapura. Betapa tidak, pada masa Sultan inilah Kerajaan yang dijalankannya bercampur baur antara amanah, kejujuran, ketaatan, pengkhianatan, ancaman, peperangan, dan kesedihan. Ancaman berkaitan langsung dengan potensi serangan Belanda dan Kerajaan Johor yang saat itu masih menaruh dendam kepada Raja Kecil. Pengkhianatan terkait dengan adanya kesepakatan Belanda dengan Sultan Alam dan ikut sertanya beliau dalam armada penyerangan terhadap Kerajaan Siak oleh Belanda. Kerja sama antara Sultan Alam dengan kumpeni Belanda tertuang pada kesepakatan yang dibuat tanggal 16 Januari 1761 yang berisi 13 pasal (Netscher, 2002). Kejujuran dan ketaatan berkaitan dengan keiklasan Sultan Jalaluddin untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Alam sesuai dengan amanah orang tuanya. Kesedihan berkaitan dengan penyerahan kekuasaan kepada Sultan Alam yang ternyata dimanfaatkan oleh Belanda pada saat Sultan Jalaludin hampir berhasil melumpuhkan pasukan Belanda. Keenam variabel tersebut mewarnai kisah Kerajaan di bawah kepemimpinan Sultan Jalaluddin.

Peralihan dari Sultan yang kedua kepada Sultan yang ketiga dari Kerajaan Siak Sri Inderapura dijalankan atas dasar amanah dari Sultan kedua kepada Sultan ketiga dari Kerajaan ini. Wasiat berupa amanah yang harus dipegang oleh Sultan Jalaluddin Syah dari ayahandanya sebagai berikut; "*Pertama*; jangan mau tunduk kepada Belanda kafir itu, *Kedua*: jangan berperang dengan saudara atau keluarga dan *Ketiga*; kalau seandainya Tengku Alam Yang Di pertuan Muda kembali ke Siak, serahkan tahta kerajaan kepadanya" (Effendy dan Effendy, 1972). Wafatnya Sultan Muzaffar yang terkenal tangguh, langsung tersiar ke seantero di Semenanjung Melayu terutama Kerajaan Johor dan Belanda di Melaka. Tidak diragukan lagi, berita ini langsung menimbulkan kembali niat Belanda untuk menguasai Kerajaan Siak Sri Indrapula.

Effendy dan Effendy (1972) menjelaskan bahwa niat Belanda semakin besar untuk merebut Kerajaan Siak setelah beliau bisa berkomunikasi dengan Tengku Alam yang tak lain adalah saudara kandung dari Raja Muzaffar yang meninggalkan Buantan setelah berseteru dengannya. Keberadaan Tengku Alam dengan Belanda inilah yang mungkin tidak disangka oleh almarhum Muzaffar Syah akan dimanfaatkan Belanda

untuk menyerang Kerajaan Siak Sri Inderapura. Wasiat yang langsung menaklukkan Sultan Jalaluddin adalah "serahkan tahta Kerajaan kepada Tengku Alam apabila beliau kembali ke Siak Sri Inderapura". Tentu saja wasiat ini tidak akan dibuat oleh Almarhum Muzaffar Syah, jika beliau mengetahui bahwa Tengku Alam akan dimanfaatkan. Wasiat ini bertambah memberatkan Sultan Jalaluddin, karena Tengku Alam di samping pamannya, dia juga menjadi ayahanda dari sepupunya Tengku Muhammad Ali yang menjadi Panglima Besar Kerajaan. Strategi pemecahan keluarga telah berhasil dijalankan oleh pihak Pemerintah Kolonial pada saat itu.

Kembalinya Tengku Alam ke Kerajaan Siak yang saat itu berpusat di Mempura, menyebabkan Sultan Jalaluddin menyerahkan kekuasaanya kepada Tengku Alam dan Tengku Alam langsung dilantik menjadi Raja Siak Sri Inderapura. Tengku Alam setelah dilantik jadi Raja, diberi gelar Sultan Abdul Jalil Alammudin Syah. Pentabalan Tengku Alam sebagai Raja Siak Sri Inderapura, diiringi oleh mundurnya Sultan Jalaluddin dari Mempura dan pergi meninggalkan Mempura menuju Pelalawan dan terus ke Langkat. Kepergian Sultan ini diikuti oleh beberapa pengikut lainnya yang tidak setuju Belanda masuk atau bekerjasama dengan Kerajaan. Akhir masa hidupnya dihabisi di langkat dan di sanalah beliau wafat dengan gelar marhum Balai. Pada masa Sultan ketiga Kerajaan Siak ini, tidak ada penambahan harta sama sekali karena masa berkuasanya tergolong sangat singkat yakni hanya 1 tahun. Pada masa Sultan ini Kerajaan yang dijalankannya bercampur baur antara, amanah, kejujuran, ketaatan, pengkhianatan, ancaman, peperangan, dan kesedihan.

5.5. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ABDUL JALIL ALAMUDDIN SYAH (1766 – 1780 M)".

Sultan keempat Siak Sri Inderapura ini adalah anak sulung dari Raja Kecil yang pergi meninggalkan Buantan karena pertengkaran yang terjadi antara beliau dengan adiknya Tengku Buang Asmara. Beliau pergi meninggalkan Buantan untuk mengalah kepada adik bungsunya memenuhi perintah ayahandanya agar perselisihan dapat diatasi. Salah satu atau kedua-duanya harus meninggalkan Buantan jika tidak mau menuruti titah ayahandanya untuk berdamai. Pada saat itu beliau harus mematuhi titah ayahandanya untuk pergi meninggalkan Buantan dalam waktu yang cukup lama. Kabar tentang di mana Sultan Alam berada tidak diketahui sama sekali oleh kerajaan sampai dengan adik bungsunya dilantik menjadi Raja Siak Sri Inderapura. Namun, sebenarnya Sultan Alam setelah terpukul di Siak, pergi ke Linggi, 20 mil sebelah utara Malaka (Netscher,2002). Hal itu pula yang membuat adiknya yang bergelar Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah harus memindahkan pusat kerajaan dari Buantan ke Mempura dalam rangka menghilangkan rasa sedih tiada tara Sultan ini atas kenangannya dengan kakandanya Tengku Alam (Effendy dan Effendy, 1972)

Kehidupan ini memang melingkar dan bukan linear, tiada disangka bahwa peristiwa yang sama terjadi kembali pada keluarganya yang kalau dulu beliau yang harus meninggalkan Buantan, saat ini giliran keponakannyalah yang mengalami hal yang sama. Keponakannya yang menjadi Raja setahun saja, harus mundur meninggalkan Mempura pergi menuju pelalawan dan terus ke langkat hingga akhir hayat hidupnya. Peristiwa ini terjadi setelah Sultan Jalaludin Syah menyerahkan tahtanya kepada pamannya Tengku Alam atau Sultan Alamuddin Syah pada tahun 1766 M sesuai dengan amanah Ayahandanya Sultan Muzaffar. Namun sangat disayangkan, Sultan Alam berhasil dipengaruhi Belanda dalam perkelanaannya di Selat Melaka. Keberadaannya tercium oleh Belanda dan kesempatan tersebut tidak disia-siakan Belanda untuk melakukan bujuk rayuan yang tak henti-hentinya (Effendy dan Effendy, 1972). Kebetulan Belanda sangat dipermalukan karena kalah telak oleh kekuatan adiknya dalam perang Guntung (Mahyudin. 1986).

Setelah Sultan Alamuddin Syah dilantik menjadi Raja Siak yang ke empat, beliau terikat oleh janji-janji yang telah disepakati dengan Belanda sebelum menjadi Raja. Di antara janji-janji yang telah disepakatinya dengan Belanda adalah mengijinkan kembali Belanda untuk melakukan perdagangan secara bebas di wilayah Kerajaan Siak (Netscher, 2002). Hal ini membuat pengaruh Belanda semakin kuat di wilayah Kerajaan ini, karena mendapat angin segar dari Sultan Alamuddin Syah. Namun, lama kelamaan akhirnya Sultan sendiri sudah sangat tidak nyaman oleh tingkah laku Belanda yang seenaknya dan kelihatan sekali sangat rakus di mata beliau. Keyataan-kenyataan ini membuat beliau merasa sangat sedih karena merasa bersalah membuat perjajian sebelumnya. Rasa sedih semakin bertambah lagi saat beliau teringat kembali saat harus meninggalkan Buantan karena berselisih dengan adiknya. Dapat dimaklumi bahwa kenyataan yang dihadapinya adalah adanya pihak ketiga yang berprilaku seenaknya sehingga merusak tatanan kerukunan keluarga Kerajaan dan raknyatnya. Apalagi beliau sangat terkenal dengan seorang yang taat menjalankan syariah agama. Oleh karena taatnya beragama, beliau sangat mendambakan adanya turunan beliau yang dapat dikawinkan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Keinginan ini tentu saja muncul karena pemahamannya terhadap agama Islam yang sangat kental.

Sama seperti adiknya yang memindahkan pusat Kerajaan dari Buantan ke Mempura dengan berbagai alasan, beliau juga melakukan hal sama yakni dengan memindahkan pusat Kerajaannya dari Mempura ke Senapelan yang sekarang menjadi salah satu kecamatan di kota Pekanbaru. Pemindahan pusat Kerajaan ini terjadi pada tahun 1775 M atau setelah 9 tahun beliau berkuasa. Setelah pusat Kerajaannya dipindahkan ke Senapelan, Tuhan mengabulkan apa yang selama ini menjadi keinginannya yakni memiliki menantu dari salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengawinkan anaknya yang bernama Tengku Embung Badariah, dengan salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayed Syarif Osman Ibnu Sayed Syarif Abdul Rakhman Syahbudin (Effendy dan Effendy, 1972). Setelah apa

yang didoakan beliau selama ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, beliau tidak terlalu banyak terdengar kiprahnya dalam membangun Kerajaannya terkecuali digunakannya hanya untuk beribadah. Aktivitas ini beliau lakukan terus sampai dengan akhir hayat hidupnya pada tahun 1780 M dengan gelar Marhum Bukit. Beliau dimakamkan persis di depan Masjid Raya yang berada di Kecamatan Senapelan (berada di sekitar Pasar Bawah Pekanbaru sekarang).

Sultan Alamuddin Syah memiliki putra-putri; *pertama*, Tengku Muhammad Ali yang bergelar Tengku Panglima Besar. *Kedua*, Tengku Embung Badariah yang dikawinkannya dengan salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW . *Ketiga*, Tengku akil, keempat Tengku Hawi dan kelima Tengku Osman (Effendy dan Effendy, 1972). Tahta Kerajaan Siak selanjutnya diberikan kepada Tengku Muhammad Ali yang saat itu umurnya sudah termasuk tua saat dilantik menjadi Raja. Namun peran beliau di Kerajaan sudah sangat terkenal saat melawan Belanda dalam perang Guntung di Mempura. Keinginan Sultan Alamudin memperoleh seorang menantu dari turunan Nabi Muhammad, ternyata membawa perubahan bagi Kerajaan Siak Sri Inderapura selanjutnya.

Perubahan yang paling menonjol adalah terjadinya perluasan wilayah kekuasaan Kerajan Siak berkat upaya yang dilakukan oleh menantunya serta cucunya, meskipun tidak bertindak sebagai seorang sultan (Efendy dan Efendy, 1972). Banyak perubahan-perubahan lainnya yang bersifat memperkuat keberadaan kerajaan yang dilakukan oleh menantunya. Di antara perubahan itu adalah perubahan di bidang perdagangan, pertahanan khususnya angkatan laut, perubahan di bidang ekonomi, kerjasama bidang perdagangan dengan wilayah lainnya, dan yang sangat menonjol adalah dalam hal pengembangan Agama Islam. Harapan dan doa Sultan Alamuddin untuk mendapatkan seorang menantu yang berasal dari turunan Nabi Muhammad menjadi kenyataan. Sayed Syarif Osman Ibnu Sayed Syarif Abdulrakhman adalah generasi ke 28 dari silsilah Nabi Muhammad (Efendy dan Efendy, 1972). Perkawinan antara Syed Osman dengan putri Sultan Alamuddin Syah menjadi awal perubahan baru dalam silsilah kerajaan Siak Sri Inderapura di masa selanjutnya yakni Sultan Siak yang dipimpin oleh keturunan Arab.

Masa pemerintahan Sultan Alamuddin Syah tidak memiliki arti penting bagi penambahan harta kerajaan. Apalagi beliau sangat terkenal dengan seorang yang taat menjalankan syariah agama. Beliau tidak terlalu banyak terdengar kiprahnya dalam membangun Kerajaannya terkecuali digunakannya hanya untuk beribadah. Namun terdapat indikator adanya penambahan harta kerajaan yakni kemampuannya memindahkan pusat Kerajaannya dari Mempura ke Senapelan yang sekarang menjadi salah satu kecamatan di kota Pekanbaru. Dampak dari pemindahan pusat kerajaan dari Mempura ke Senapelan, menyebabkan adanya penambahan harta kerajaan meskipun masih sangat individual karena belum mengenal konsep harta kerajaan. Suatu hal yang pasti adalah telah terjadi perubahan struktur harta kerajaan dari satu tempat, bertambah ke tempat lainnya.

5.6. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ABDUL JALIL MUAZZAM SYAH (1780 – 1782 M)".

Mohammad Ali yang terkenal dengan perang Guntungnya menjadi sultan selanjutnya menggantikan ayahandanya yang telah wafat pada tahun 1780 M. Meskipun hanya memerintah selama 2 tahun, beliau sudah berperan sejak lama di Kerajaan Siak Sri Inderapura yakni semenjak Sultan kedua dari Kerajaan Siak Sri Inderapura. Beliau dipercaya oleh Sultan Muzaffar Syah sebagai Panglima Besar Kerajaan dan beliaulah bersama Indra Pahlawan sebagai perancang dari Serangan Guntung. Beliau ditabalkan menjadi Raja setelah ayahandanya Tengku Alamuddin Syah wafat pada tahun 1780 M dengan gelar Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah. Meskipun beliau hanya memerintah selama 2 tahun saja, beliau sangat berperan dalam bidang pembangunan bagi Kerajaannya. Pembangunan fisik menjadi konsentrasi Muhammad Ali selama memimpin kerajaan.

Selama beliau memerintah Kerajaan, beliau menggagas dibangunnya jalan dari Senapelan sampai dengan ke Teratak Buluh (Effendy dan Effendy, 1972). Beliau juga sebagai penggagas memajukan perniagaan dengan Sumatera Barat (Minang Kabau) melalui Payakumbuh, perniagaan dengan Singapura dan dengan negeri lainnya. Selama beliau inilah terjadinya pembangunan dan perluasan Pekanbaru dengan cara mengadakan pekan (pasar) pada waktu-waktu tertentu. Ramainya pasar yang diadakan pada waktu-waktu tertentu menyebabkan lahirnya nama Pekan "baharu" yang akhirnya disebut dengan Pekanbaru (Suwardi, 2006). Dengan demikian, nama kota Pekanbaru diberikan semasa beliau memerintah Kerajaan Siak Sri Inderapura. Singkatnya masa pemerintahan beliau bukanlah karena masalah pemerintahannya, melainkan karena beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pada tahun 1782 M dengan gelar Marhum Pekan. Perannya dalam membangun fasilitas penghubung antar daerah, menyebabkan beliau dikenal sebagai inspirator bagi pembangunan daerah atau wilayah kerajaan selanjutnya.

Masa Sultan Mohammad Ali atau Muazzam Syah meskipun hanya berlangsung selama dua tahun, sangat memberikan arti pada pembangunan wilayah Kerajaan Siak. Masa Pemerintahan beliau memang tidak mengalami penambahan pada harta kerajaan. Beliau lebih mementingkan pembangunan untuk rakyatnya dengan membangun berbagai fasilitas untuk kemajuan wilayahnya. Pembangunan yang telah dilakukannya adalah *pertama*, membangun jalan dari Senapelan sampai dengan ke Teratak Buluh. *Kedua*, memajukan perniagaan dengan Sumatera Barat (Minang Kabau) melalui Payakumbuh, perniagaan dengan Singapura dan dengan negeri lainnya. *Ketiga*, pembangunan dan perluasan Pekanbaru dan *terakhir* mengadakan pekan (pasar) pada waktu-waktu tertentu (Effendy dan Effendy, 1972).

5.7. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN YAHYA ABDUL JALIL MUZAFFAR SYAH (1782–1784 M)"

Saat Sultan Yahya menggantikan Sultan Muazzam Syah, kondisi kerajaan secara *de facto* didominasi oleh keturunan Tengku Embung Badariah dengan Sayed Oesman (Efendy dan Efendy, 1972). Putra-putra dari Tengku Embung Badariah terkenal kuat dalam bekerjasama untuk membangung kerajaan. Dominasi ini sudah sangat terlihat sejak Sayed Oesman menjadi menantu Sultan Alamuddin Syah, meskipun bukan sebagai penguasa. Dominasi ini terus berlanju ke anak cucunya dan mengalahkan peran turunan sultan lainnya yang bukan dari turunan Arab, termasuk Sultan Yahya. Sultan Yahya *ditabalkan* tahun 1782 M dengan gelar Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah. Semasa pemerintahannya, tanpa alasan yang jelas, beliau memindahkan kembali pusat Kerajaan dari Senapelan Pekan baru ke Mempura (Effendy dan Effendy, 1972). Oleh karena umur pemerintahannya sangat singkat, dan kiprahnya di Kerajaan sebelumnya juga tidak diketahui, maka beliau tidak banyak tercatat dalam sejarah dari sisi perannya.

Menurut Efendy dan Efendy (1972), pada saat setelah beliau dilantik, beliau sangat berkeinginan untuk pergi ke Dungun, menziarahi makam nenek moyangnya yang ada di Melaka dan Johor, meskipun hal ini diragukan kebenarannya oleh Thoha dalam suatu wawancara. Mengingat perjalanannya cukup panjang, maka roda pemerintahan diserahkannya sementara kepada Tengku Sayed Ali yang tidak lain adalah putra dari Tengku Embung Badariah dengan Sayed Syarif Osman (Efendy dan Efendy, 1972). Beliau wafat dalam perjalanannya ke Dungun, dan tersiar kabar tersebut ke Siak bahwa Tengku Yahya wafat. Adanya kabar inilah estafet Kerajaan Siak dilanjutkan oleh Tengku Sayed Ali yang sudah mendapatkan delegasi dari Sultan Yahya. Inilah sejarah pertama kali Raja Siak dipimpin oleh seorang keturunan berdarah Arab (Luthfi, 1991). Hasil penganalisisan berbagai literatur, masa pemerintahan Tengku Yahya sama sekali tidak ditemukan informasi adanya penambahan harta ataupun pada pembangunan fisik wilayah kerajaan. Hal ini dapat di mengerti oleh karena masa pemerintahannya berjalan sangat singkat.

5.8. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ASSYAIDIS SYARIF ALI ABDUL JALIL SYAIFUDIN BAALAWI (1784 – 1810 M)".

Tengku Sayed Ali adalah orang yang tepat menerima tongkat sebagai Raja ketujuh dari Kerajaan Siak Sri Inderapura ketika Tengku Yahya wafat di Dungun. Hal ini di karenakan beliaulah orang yang menerima amanah untuk menjalankan roda pemerintahan Kerajaan ketika Tengku Yahya berangkat ke Dungun untuk suatu hal (Effendy dan Effendy, 1972). Peran Tengku Sayed Ali memang sangat dominan, meskipun kerajaan saat itu dipegang oleh Tengku Yahya. Beliau merupakan putra Tengku Embung Badariah dengan Sayed Syarif Osman seorang Arab yang memiliki

kekerabatan dengan Nabi Muhammaad SAW seperti dijelaskan sebelumnya. Beliau ditabalkan pada tahun 1784 M dengan gelar Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifudin Baalawi. Tengku Yahya merubah struktur turunan dari Raja Kerajaan Siak yang semula dipimpin oleh turunan Melayu berkembang menjadi sultan yang berdarah Arab (luthfi, 1991).

Beliau memimpin Kerajaan terbilang lama yakni 26 tahun sehingga peran beliau dalam membangun Kerajaan sangat terlihat. Semasa pemerintahannya, beliau terus-menerus melakukan perluasan daerah tahklukannya dengan dibantu oleh saudara-saudaranya. Daerah perluasan taklukannya di antaranya Kota Pinang, Asahan, Kualih, Bilah, Panai Deli, Langkat, Batubara, Serdang, Pagar Awan, Bedagai Dan Temiang (berbatasan dengan Aceh), bahkan sampai ke Sambas Kalimantan (Effendi dan Effendy, 1972). Semasa pemerintahan Tengku Sayed Ali, beliau berupaya memperkuat armada keamanannya. Sasarannya adalah untuk mengamankan Selat Melaka dari para Lanun dan bajak laut.

Kuatnya armada perang dan amannya Selat Melaka serta semakin luasnya wilayah taklukannya, membuat Kerajaan Siak terkenal dan disegani di seantero Semenanjung Melayu (Johor dan Melaka) sampai Kalimantan sehingga mengalami masa keemasannya (Effendy dan Effendy, 1972). Tidak ada kedengaran konflik senjata antara Sultan Syarif Ali dengan Belanda meskipun VOC sedang gencar-gencarnya melakukan transaksi perdagangan Timah dan telah menghabiskan banyak rupiah dalam perdagangannya di Riau saat itu. Hal ini mempertegas pernyataan Reinout (1993) yang mengatakan bahwa VOC dalam segala hal hanyalah merupakan perusahaan perdagangan yang hanya menjelaskan upah peperangan sebagai investasi. Status mereka sebagai perusahaan perdagangan lebih diterima masyarakat Riau, dari pada sebagai Negara yang memiliki cap penjajah. Mereka telah menghabiskan hampir seperempat juta rupiah dalam expedisinya ke Riau. Jumlah ini besarnya sama dengan empat kali jumlah biaya skuadron Van Braam (Reinout ,1993)

Sultan Syarif Ali dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh keempat saudaranya yang menjadi panglima dalam setiap bidang pertahanan dan keamanan. Tengku Sayed Abdul Rakhman dan Tengku Sayed Ahmad diangkat sebagai panglima besar. Tengku long Putih diangkat sebagai Laksemana. Tengku Hitam diangkat sebagai penasehat peperangan berpangkat panglima. Upaya memperluas wilayah taklukannya terus dilakukan sampai ke Pelelawan. Sejak Pelelawan dapat ditaklukannya, maka Tengku Sayed Abdul Rakhman dilantik menjadi Raja Muda. Dengan demikian semakin luaslah wilayah kekuasaan Kerajaan Siak sehingga Kerajaan ini menjadi salah satu Kerajaan besar dan terkenal sampai saat ini. Beliau wafat pada tahun 1810 M dengan gelar Marhum Kota Tinggi.

Perkembangan harta kerajaan masa pemerintahan Syarif Ali secara langsung boleh dikatakan tidak ada, namun secara tidak langsung tentu ada sebagai akibat dari perluasan wilayah taklukannya. Semasa pemerintahannya, beliau terus-menerus melakukan perluasan daerah tahklukannya dengan memperkuat armada keamanannya.

5.9. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ASSYAIDIS SYARIF IBRAHIM ABDUL JALIL KHALILUDDIN (1810 – 1815 M)".

Sultan Ibrahim adalah putra dari Syarif Ali yang menjadi Raja kedelapan Kerajaan Siak Sri Inderapura. Beliau dilantik jadi Raja dengan gelar Sultan Assyaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin. Pada saat beliau menjadi Raja, beliau tidak terlalu efektif dalam memimpin karena penyakit yang di deritanya. Beliau sering mengalami sakit-sakitan sehingga roda pemerintahan banyak dijalankan oleh Tengku panglima besar yang bergelar Wali Ul Sultan Muhammad. Meskipun beliau sering mengalami sakit-sakitan, beliau adalah Raja pertama yang mulai membangun konsep istana Kerajaan sebagai pusat Kerajaan (Effendy dan Effendy, 1972). Beliau membangun istana tepatnya di Kuala Sungai Mempura Kecil.

Masa pemerintahan beliau, di samping selalu dirudung oleh masalah kesehatan, juga dirudung oleh adanya perselisihan di antara kalangan keluarga istana yang semakin meruncing. Perselisihan yang semakin meruncing terutama terjadi antara Tengku Sayed Ismail dengan putra beliau sendiri yakni Tengku Putra. Perselisihan inilah awal dari kehancuran Kerajaan Siak Sri Inderapura karena prilaku pihak yang berselisih suka minta bantuan pihak asing untuk memerangi saudaranya sendiri. Perselisihan selanjutnya masuk pada era yang semakin parah setelah Tengku Ibrahim wafat pada tahun 1815 M dengan gelar Marhum Mempura Kecil. Masa pemerintahan Tengku Ibrahim merupakan titik awal dari adanya harta benda milik kerajaan karena konsep istana yang dicetuskannya. Pemerintahan kerajaan sebelumnya tidak mencatat adanya harta miliki kerajaan, kecuali hanya tempat tinggal Sultan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Konsep tempat tinggal Sultan tidak berimplikasi kepada harta miliki kerajaan, kecuali hanya sebagai milik pribadi Sultan saja.

5.10. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ASSYAIDIS SYARIF ISMAIL ABDUL JALIL JALALUDDIN (1815 – 1864 M)

Sultan Sayed Ismail pada saat menggantikan Sultan Ibrahim termasuk di luar dari ketentuan kerajaan, karena bukan putra langsung dari Sultan Ibrahim. Putra langsung Sultan Ibrahim adalah Tengku Putra yang merupakan musuh bebuyutan Tengku Sayed Ismail (Effendy dan Effendy, 1972). Tengku Sayed Ismail dilantik menjadi Raja dengan gelar Assyaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin dan berkuasa lebih kurang selama 49 tahun. Masa suram dan kemunduran Kerajaan Siak sangat terasa pada saat beliau menjadi sultan. Seperti telah disinggung di atas bahwa konflik antar keluarga ini merupakan awal titik nadir bagi Kerajaan Siak Sri Inderapura. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya prilaku untuk meminta bantuan kepada pihak asing yang jelas-jelas musuh nyata bagi Kerajaan.

Pihak Tengku Ismail adalah yang memulai untuk meminta bantuan kepada pihak Inggris untuk menghantam saudaranya sendiri Sultan Putra (Effendy dan Effendy, 1972) Permintaan Tengku Ismail langsung diterima oleh Inggris yang saat itu dikomandani oleh Wilson. Namun setelah Sultan Putra tersingkir, sudah menjadi kebiasaan bahwa yang membantu akan meminta kompensasi kepada pihak yang dibantunya. Betul saja, Wilson karena telah menerima keleluasaan sebagai kompensasi dari Tengku Ismail menampakkan kesewenangannya. Kesewenangan inilah yang menyebabkan Sultan dan kalangan istana menjadi sangat gerah. Namun istana tidak dapat berbuat banyak terhadap Wilson karena kekuatan persenjataannya yang sangat kuat, sehingga akhirnya Sultan meminta bantuan Belanda untuk mengusir Wilson dari Bengkalis (Effendy dan Effendy, 1972). Permintaan Sultan tentu dengan senang hati diterima Belanda dan langsung mengusir Wilson dari Bengkalis. Setelah Wilson berhasil diusir dari Bengkalis, selesaikah masalah yang dihadapi Sultan Ismail?. Kiranya Sultan keluar dari mulut harimau, masuk lagi ke mulut singa, sehingga masalah keberadaan Kerajaan semakin tak menentu.

Belanda yang merasa berjasa membantu Tengku Ismail, nyata-nyata menampakkan nafsunya untuk menguasai Kerajaan Siak Sri Inderapura. Kesewenangannya kepada Tengku Ismail tidak beda dengan Wilson dan malah lebih parah dengan memaksa sultan untuk menandatangani perjanjian yang disebut dengan "Traktat Siak" pada tahun 1858 M (Effendy dan Effendy, 1972). Isi perjanjian yang ditandatangani oleh sultan adalah bahwa Kerajaan Siak dan daerah taklukannya berada di bawah naungan Kerajaan Belanda. Secara politis, kekuasaan di Kesultanan Siak sudah berada di pihak Belanda (Luthfi, 1991). Inilah yang penulis katakan sebagai titik nadir bagi Kerajaan Siak Sri Inderapura. Sultan Ismail telah termakan oleh kebijakannya sendiri untuk melawan saudaranya dengan meminta bantuan kepada Inggris dan Belanda. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, Sultan Ismail menyadari sendiri kekeliruannya dan berusaha untuk mengembalikannya kesemula. Namun usaha ini sia-sia, karena begitu Belanda mengetahui niatnya, Belandapun bertindak dengan menggunakan taktik politik *devide et empera* yang sangat terkenal tersebut (Effendy dan Effendy, 1972). Politik *devide et empera* inilah yang membuat terjadinya perpecahan antar kalangan istana yang tak terhindarkan. Puncak dari perpecahan itu mengarah kepada pemakzulan Sultan Ismail pada tahun 1864 M. Tidak lama setelah itu, Sultan Ismail mangkat dengan gelar Marhum Inderapura.

Masa Sultan Sayed Ismail meskipun menjabat selama 49 tahun, tidak berdampak pada penambahan harta kerajaan yang telah menggunakan konsep istana sebagai pusat kerajaan. Malah keadaan sebaliknya terjadi di mana wilayah taklukan kerajaan yang telah luas diambil alih oleh kekuasaan Pemerintah Kolonial melalui perjanjian Traktat Siak tahun 1858 M. Kenyataan ini yang dijadikan dasar bahwa harta swapraja yang diperoleh melalui kekuasaan politik tidak dapat di katakan sebagai harta kerajaan karena keberadaannya dapat hilang seketika oleh kekuatan politik pula.

5.11. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ASSYAIDIS SYARIF KASIM ABDUL JALIL SYAIFUDDIN (1864 – 1889M)

Satu-satunya lembar sejarah yang agak pahit dalam sejarah kekeluargaan Siak Sri Inderapura dialami masa Raja Sultan Syarif Ismail. Bagaimana tidak, masa beliaulah perseteruan keluarga yang membawa-bawa orang asing untuk melawan keluarga sendiri terjadi. Kemudian beliaulah Raja yang berakhir dengan pemakzulan, di mana sebelumnya belum pernah terjadi kecuali karena faktor mangkat. Membawa-bawa kekuatan lain untuk melawan saudara sendiri kiranya menjadi pelajaran berharga bagi Kerajaan di masa yang akan datang. Tidak ada satu keuntunganpun yang dapat diperoleh dari tindakan tersebut, terkecuali kehancuran. Bagi Sultan Syarif Ismail, puncak dari kehancuran tersebut adalah dengan dilengserkannya beliau menjadi Raja dan digantikan oleh saudaranya sendiri yakni Sayed Syarif Kasim. Sayed Syarif Kasim dilantik menjadi Raja dengan gelar Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin atau yang sering dikenal dengan Sultan Syarif Kasim I. Diibaratkan dengan pepatah "habis gelap timbullah terang", maka ini terjadi pada peralihan dari Sultan Syarif Ismail kepada Sultan Syarif Kasim 1 Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Sultan Syarif Kasim I merupakan seorang yang brillian dalam membaca situasi. Hal ini terbukti dari pilihannya dalam menghadapi situasi di mana Belanda semakin kuat menghujamkan pengaruhnya dalam Kerajaan dengan melengserkan saudaranya sebagai Raja Siak. Menyadari akan kuatnya pengaruh kekuasaan Belanda, beliau mengambil inisiatif perlawanan non fisik untuk menghadapi Belanda. Masa Sultan Siak kesepuluh mulai memberikan warna terhadap pengembangan harta kerajaan. Hal ini dimungkinkan karena beliau memilih cara yang tepat untuk menghadapi Pemerintah Kolonial sambil mengembangkan kerajaannya. Beliau lebih menjuruskan kegiatannya kepada kemakmuran rakyat seperti memajukan perdagangan, menggiatkan penanaman lada (merica), pembukaan hutan kayu kapur, dan menghapuskan perbudakan (Suwardi *et, al.* 2006).

Masyarakat Siak telah banyak mengetahui peran Sultan Syarif Kasim I melalui berbagai informasi saat itu dan sekarang. Menurut sepengetahuan Nizami Jamil yang merupakan anak kandung dari Sekretaris Pribadi Sultan Syarif Kasim II yakni Orang Kaya Muhammad Jamil, bahwa beliau tahu betul bagaimana harus bersikap melawan Belanda. Bersikap frontal terhadap Belanda sangat sulit untuk dilakukan, sehingga cara-cara tersebut harus dirubah. Hal ini terkonfirmasi melalui informan Nizami Jamil sebagai berikut.

> "Sultan Syarif Kasim I mengambil inisiatif untuk melakukan perlawanan non fisik terhadap Belanda karena sadar tidak kuat untuk melawan secara fisik". Masa Sultan Syarif Kasim I adalah awal dari perlawanan non fisik atas kekuatan Pemerintah Kolonial di wilayah Kerajaan Siak Sri Inderapura".

Inisiatif perlawanan inilah yang dikatakan sebagai inisiatif Brillian. Ada tiga upaya perlawanan yang dilakukan beliau yakni melawan dengan meningkatkan bidang sosial, agama dan memajukan pendidikan untuk mencerdaskan rakyat pada waktu itu. Ketiga konsep perlawanan tersebut dilakukan beliau dengan suatu tindakan mendirikan Masjid Syahabuddin, mendirikan Qubbah Khasimiyah, membuat Mahkota Siak dan tentu saja mendidik putranya untuk dipersiapkan bagi masa yang akan datang. Salah satu putranya yang menonjol dalam bisnis adalah Tengku Ngah Hasyim. Sultan Syarif Hasyim dengan segala kontroversinya, memiliki talenta di bidang ekonomi. Beliau juga memiliki kedekatan dengan pihak penguasa Belanda. Zainudin yang bertugas sebagai koordinator istana, juga sering disebut dengan juru kunci istana dalam konfirmasi mengatakan:

> "Sultan Syarif Hasyim seorang yang mempunyai kemampuan di bidang ekonomi. Beliau adalah seorang pebisnis yang memiliki kedekatan dengan Ratu Hilma".

Satu hal yang diprediksi oleh Sultan Syarif Kasim I adalah akan ada perubahan keadaan pada masa yang akan datang. Persiapan yang perlu dilakukan untuk menyambut perubahan tersebut adalah menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan ini dilakukan oleh Sultan Syarif Kasim I. Inilah tajamnya visi Sultan Syarif Kasim I untuk menatap masa yang akan datang. Perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial menurut pemikiran Sultan Syarif Kasim I bukan saja hanya dengan perlawanan fisik, melainkan juga dapat dengan perlawanan non fisik. Semua persiapan untuk menghadapi perubahan di masa yang akan datang dan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial ternyata benar-benar membuahkan hasil. Putranya sebagai pewaris tahta kontroversial yakni Sultan Syarif Hasyim benar-benar dapat merealisasikan apa yang menjadi keinginan ayahandanya, meskipun menurut beberapa informan beliau sangat licik dalam perebutan takhta. Setelah berjuang untuk memperkokoh fundamen rakyat Siak, pada tahun 1889 M, Sultan Syarif Kasim I kembali memenuhi panggilan yang maha kuasa dengan gelar Marhum Mahkota.

Perubahan orientasi dalam menghadapi Pemerintah Kolonial dan upaya memajukan kualitas pengetahuan rakyatnya terjadi pada masa Sultan Syarif Kasim I. Perubahan orientasi ini juga diikuti oleh perkembangan harta milik kerajaan baik berupa fisik maupun non fisik. Perkembangan harta berupa fisik yang sifatnya turun-temurun adalah pembangunan Masjid Syahabuddin, mendirikan Qubbah Khasimiyah dan membuat Mahkota Siak. Perkembangan harta berupa non fisik adalah mendidik putra-putranya untuk dipersiapkan bagi masa yang akan datang. Perkembangan harta berupa fisik dan non fisik ini menjadi perhatian peneliti karena belum pernah dilakukan oleh Sultan-Sultan sebelumnya.

5.12. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ASSYAIDIS SYARIF HASYIM ABDUL JALIL SYAIFUDDIN (1889 – 1908 M)

Setelah Sultan Syarif Kasim I mangkat, muncullah salah satu putranya yang memiliki talenta bisnis dan sangat cerdik di mata keluarga kerajaan, yaitu Sayed Syarif Hasyim. Beliau ditabalkan dengan gelar Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. Seperti yang telah diprediksi dan mungkin juga telah dipersiapkan sebelumnya, Sultan Syarif Hasyim benar-benar menjadi sultan yang membawa Kerajaan Siak pada masa keemasannya. Harapan dari ayahandanya untuk memajukan Kerajaan dan rakyatnya dapat terealisir berkat kegigihan dan sedikit nakal dalam membangun pemerintahannya. Nakal dalam arti beliau melakukan tindakan rekayasa dalam perebutan menjadi Sultan terhadap kedua saudara seayahnya yang saat itu dianggap lebih berhak menjadi Sultan berikutnya (Depdikbud, 1989).

Proses perebutan jabatan kesultanan menurut *catatan Tubagus* diketahui oleh Belanda yang sengaja mendukung Sultan Hasyim untuk kepentingan tertentu. Kepentingan yang disodorkan Belanda adalah perjanjian baru yang semakin mempersempit hak raja tersebut. Perjanjian yang disodorkan oleh Belanda adalah mengganti perjanjian yang dibuat pada tanggal 1 Februari 1858, yaitu dihapusnya lembaga orang-orang besar menurut Adat Melayu, sehingga Sultan dijadikan penguasa tunggal di Kerajaan Siak (Sinar, 2007). Terlepas dari kontroversi yang dilakukannya, beliau memiliki Jalur perjuangan yang dilakukan sesuai dengan jalur perjuangan yang telah ditempuh oleh ayahandanya. Upaya perlawanan non fisik terhadap Belanda terus dilakukan, meskipun secara personal hubungan beliau dengan Ratu Hilma terbilang dekat. Kedekatan antara Sultan Syarif Hasyim dengan Ratu Hilma juga ditegaskan pula oleh Nizami dalam pernyataan wawancara sebagai berikut.

> "Beliau adalah teman sebangku dalam menempuh studi bidang ekonomi di Batavia. Sifat cerdas dan cerdik beliau benar-benar membawa angin segar bagi Kerajaan dan rakyat Siak Sri Inderapura".

Pada masa beliau menjadi Raja Siak kesebelas, banyak kemajuan yang diraih oleh Kerajaan dan rakyatnya seperti roda perekonomian rakyatnya sangat meningkat, semua rakyat yang ingin bekerja di bidang apa pun ditampung dan disiapkan lapangan peKerajaan untuk mereka. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pengangguran pada masa beliau (Effendy dan Effendy, 1972). Kemajuan yang sangat monumental pada masa beliau adalah dengan dibangunnya Istana Siak yang diberi nama Asserayatul Hasyimiah seperti yang masih dapat disaksikan sampai saat ini di Kabupaten Siak Sri Inderapura. Pada masa beliau, semua perlengkapan Kerajaan diisi dengan barang-barang yang berasal dari Belanda dan Jerman setelah beliau melakukan perlawatan pada kedua negara tersebut. Kedekatan dan penghormatan Ratu Belanda kepada Sultan Syarif Hasyim juga dipertegas oleh Nizami melalui pernyataan wawancara sebagai berikut.

"Pada saat melakukan perlawatan ke Belanda, salah satu tamu yang mendapat kesempatan untuk menaiki kereta kencana Ratu Belanda pada saat itu adalah beliau". Ini artinya bahwa beliau sangat dihormati oleh Ratu Belanda dan telah menjadi tamu istimewa Belanda pada saat itu, sejajar dengan tamu asing lainnya. Tidak semua tamu Kerajaan Belanda diterima dengan menumpangi kereta kencana saat itu".

Bidang lainnya yang beliau upayakan dalam rangka memperkuat ekonomi Kerajaan dan rakyatnya adalah membuat atau membuka perkebunan, membuat kapal-kapal laut, mendirikan usaha percetakan sendiri untuk mencetak buku-buku Kerajaan termasuk BAB Al QAWA'ID. Hasil hutan ditampung dan dijual ke Singapura, sehingga semakin memajukan perdagangan yang berdampak pada kemajuan ekonomi Kerajaan dan rakyat. Di bidang penegakan hukum, beliau membangun Balai Kerapatan Siak yang saat itu disebut dengan Balai Rung Sari. Kemajuan-kemajuan nyata yang telah dicapai oleh Sultan Hasyim, membuat Belanda agak gerah dan mencurigai tindak-tanduk beliau, sehingga berupaya untuk menekan beliau. Namun, berbagai kecurigaan dan tekanan yang dilakukan oleh Belanda tidak membuat beliau surut dan bahkan mengabaikan tekanan tersebut. Hal inilah yang mendorong Belanda melakukan taktik *devide et empera* dengan membagi-bagi daerah Kerajaan Siak kedalam 10 Provinsi. Upaya yang dilakukan oleh Belanda ini tidak membuat Sultan menjadi tertekan dan bahkan beliau dengan asiknya mengembangkan cara-cara berpakaian adat serta tata cara penggunaan pakaian adat. Pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat Riau saat ini merupakan bagian dari karya beliau dalam menciptakan karakter dan identitas masyarakat Riau. Setelah memajukan berbagai bidang, beliau harus memenuhi panggilan Illahi pada tahun 1908 M dengan gelar Marhum Baginda. Berbagai persiapan administrasi seperti surat wasiat atas istana berikut isinya juga telah beliau siapkan seperti terlihat pada lampiran 15.

Masa keemasan Kerajaan Siak sangat terasa terjadi saat pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, sehingga berimplikasi kepada penambahan harta kerajaan secara signifikan. Penambahan harta kerajaan yang dicapai oleh Sultan yang ke XI ini adalah *pertama,* dibangunnya Istana Siak yang diberi nama Asserayatul Hasyimiah. *Kedua,* mengisi perlengkapan Kerajaan dengan barang-barang yang berasal dari Belanda dan Jerman. *Ketiga,* mengembangkan bisnis kerajaan di antaranya membuka perkebunan, membuat kapal-kapal laut, mendirikan usaha percetakan sendiri untuk mencetak buku-buku Kerajaan termasuk BAB Al QAWA'ID dan menampung hasil hutan untuk dijual ke Singapura, sehingga semakin memajukan perdagangan yang berdampak pada kemajuan ekonomi Kerajaan dan rakyat. *Keempat,* membangun Balai Kerapatan Siak yang saat itu disebut dengan Balai Rung Sari. *Kelima,* bagian terpenting secara akuntansi adalah mempersiapan ketentuan pengelolaan harta seperti surat wasiat atas istana berikut isinya yang dapat dikatakan dengan standar akuntansi pengelolaan harta harta kerajaan pada saat itu.

5.13. PERKEMBANGAN HARTA MASA "SULTAN ASSYAIDIS SYARIF KASIM ABDUL JALIL SYAIFUDDIN (1815 – 1946 M)

Sultan Syarif Kasim II adalah Sultan Siak terakhir yang menjadi legenda sampai saat ini karena peristiwadukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau tanpa ikatan apa pun apalagi tekanan siapa pun, secara sukarela menyerahkan Mahkota Kerajaannya untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan menyatakan kesetiannya pada Republik Indonesia (Effendy dan Effendy, 1972, Jamil, *et. al*, 2011). Sama halnya dengan strategi ayahandanya serta kakeknya, untuk melawan Belanda sulit dilakukan secara fisik karena terlalu tangguh, maka perlawanan non fisik adalah jalan terbaik untuk menghadapi Belanda. Tentu saja perlawanan secara fisik dan terang-terangan akan dilakukan jikalau situasi memungkinkan. Hal ini dibuktikan oleh beliau pada saat yang tepat yakni dengan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan beliau terhadap kemerdekaan dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakekatnya adalah perlawanan terang-terangan beliau kepada Pemerintah Kolonial saat itu. Beliau memang tidak akan melakukan kompromi dengan Pemerintah Kolonial Belanda, apabila kesempatan memungkin untuk melakukannya.

Sultan Syarif Kasim pada saatnya tiba sebagai pewaris Kerajaan, didahului oleh "waktu" dari pada kesiapannya sebagai seorang Raja. Didahului oleh waktu maksudnya adalah waktu untuk memintanya sebagai seorang Raja lebih cepat dari kematangan kondisi beliau untuk menjadi seorang Raja. Saat "waktu" memintanya sebagai seorang Raja adalah pada waktu ayahandanya wafat pada tahun 1908 M, sedangkan beliau pada saat itu baru berkisar 16 tahun dan sedang menuntut ilmu di Batavia atau Jakarta saat ini. Meskipun beliau memiliki saudara seayah yakni Tengku Long Putih, beliau adalah pewaris yang telah ditunggu oleh Kerajaan dan rakyatnya untuk memimpin kerajaan. Tradisi Kerajaan Siak selama ini, memang seorang Raja diangkat setelah cukup umur dan dianggap mumpuni dalam memimpin Kerajaan. Kondisi inilah yang menyebabkan Kerajaan untuk sementara waktu, dipegang secara kolektif oleh Tengku Besar Sayed Syarif Syagaf dan Datuk Lima Puluh yang saat itu menjadi menteri Kerajaan. Jabatan sementara yang dipegang oleh kedua tokoh kerajaan ini berlangsung selama 7 tahun. Berdasarkan catatan yang dikumpulkan, Hampir tidak ada kendala selama kerajaan dipegang sementara oleh kedua tokoh kerajaan tersebut.

Pada tanggal 3 Maret 1915 M, sampailah waktunya untuk Sultan Syarif Kasim Sani menjadi Raja Siak yang kedua belas dan yang terakhir dalam sejarah Kerajaan Siak Sri Inderapura. Menjadi Raja Siak terakhir dan berakhirnya Kerajaan Siak, karena keputusan monumentalnya untuk menyerahkan Mahkota Kerajaan Siak sebagai simbol kedaulatan Kerajaan Siak kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1946 (Jamil, 2010). Dengan penyerahan mahkota sebagai simbol kedaulatan Kerajaan Siak, maka berakhirlah Kerajaan Siak dan bergabung menjadi bagian Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Secara garis besar, perkembangan masing-masing era kesultanan di bidang pemerintahan dan perkembangan harta dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1: Tahap Perkembangan Bidang Pemerintahan Dan Konsep Harta Kesultanan Siak Sri Inderapura

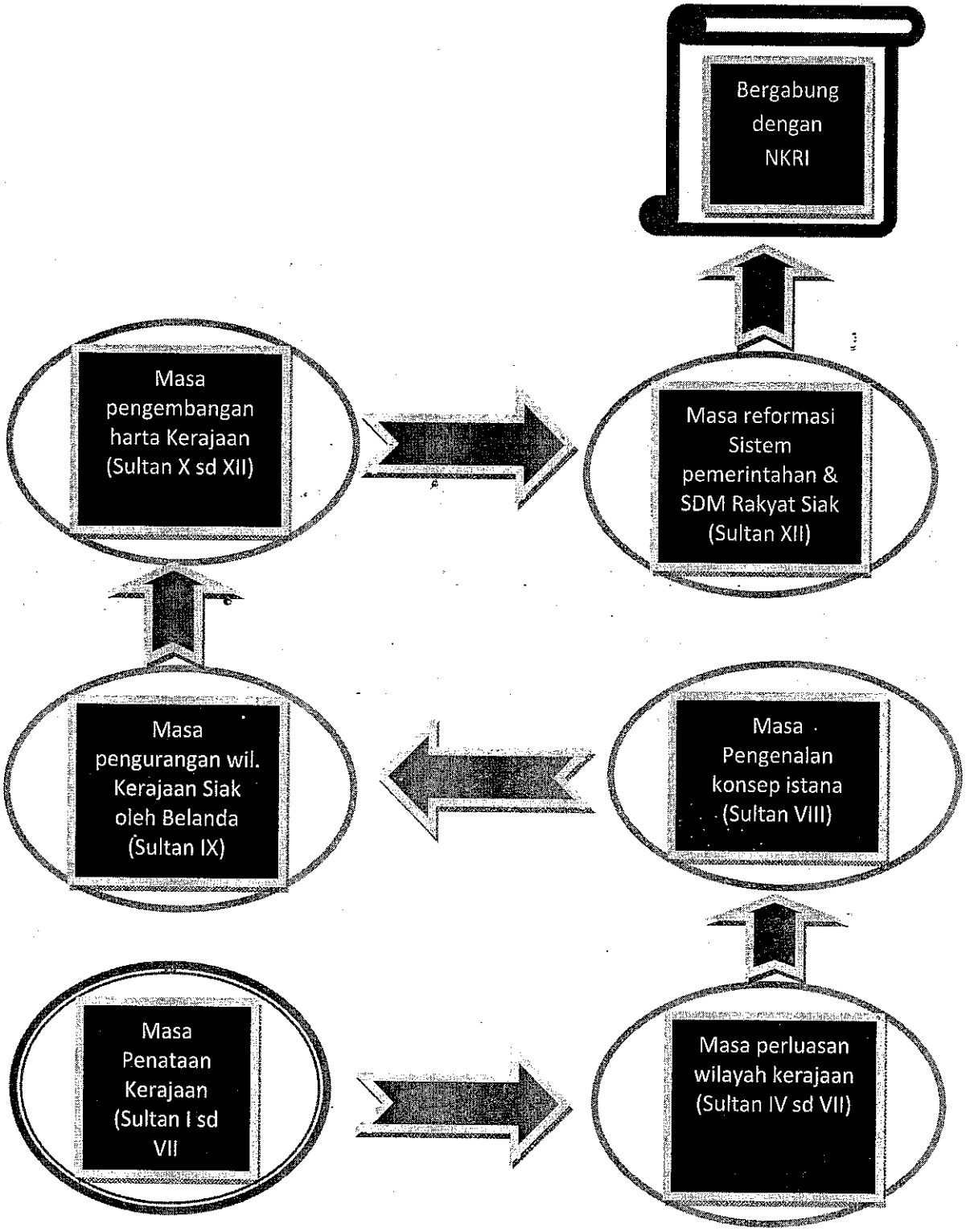

Sumber: Dikembangkan dari berbagai sumber

Penyerahan Mahkota Raja Kerajaan Siak memiliki makna berakhirnya masa era Kerajaan Siak dan bergabung menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia tanpa ingin menguasai harta benda yang menjadi milik Kerajaan. Inilah sebuah keputusan monumental dan sangat emosional di tengah sebuah Kerajaan yang secara fisik masih terjaga sampai saat ini. Sebuah emosional yang dilandasi oleh kecintaannya pada Rakyat Indonesia, khususnya Rakyat Siak Sri Inderapura.

5.14. KESIMPULAN

Identifikasi harta Kerajaan Siak Sri Inderapura belum terlihat secara spesifik sejak dari sultan pertama sampai dengan sultan ke 7. Pada masa-masa sultan tersebut, kerajaan belum mengenal konsep istana, terkecuali hanya sebatas tempat tinggal sultan yang merupakan harta pribadi sultan-sultan pada saat tersebut. Namun, Indikator penambahan harta sudah ada yakni karena adanya perpindahan pusat kerajaan dari Buantan ke Mempura, lalu ke Senaplean, kembali lagi ke Mempura dan terakhir ke Siak Sri Inderapura. Meskipun perpindahan tersebut diprakarsai oleh masing-masing Sultan, cukup memberikan indikasi adanya perkembangan harta pada masing-masing Sultan yang berkuasa. Perpindahan pusat kerajaan dari Buantan sampai ke Mempura lagi, mengkonfirmasi bahwa tidak ada harta kerajaan yang dapat diwariskan kepada kerajaan selanjutnya.

Identifikasi Peralihan Harta Antar Sultan Siak Sri Inderapura mulai terjadi pada masa Sultan Siak kedelapan. Pada saat Sultan ke delapan yakni Sultan Ibrahim, mulai mengenalkan konsep istana sebagai pusat kerajaan. Namun penambahan harta kerajaan mulai terjadi pada saat kerajaan dipimpin oleh Sultan Syarif Kasim I sebagai sultan kesepuluh yang ditandai dengan dibangunnya Masjid Syahabuddin, Qubbah Khasimiyah, dan membuat Mahkota Siak. Penambahan harta kerajaan yang dicapai oleh Sultan Syarif Hasyim sebagai sultan kesebelas adalah *pertama*, dibangunnya Istana Siak yang diberi nama Asserayatul Hasyimiah. *Kedua*, mengisi perlengkapan istana kerajaan dengan barang-barang dan perhiasan yang berasal dari Belanda, Jerman dan China. *Ketiga*, mengembangkan bisnis kerajaan di antaranya membuka perkebunan, membuat kapal-kapal laut, mendirikan usaha percetakan dan menampung hasil hutan untuk dijual ke Singapura, sehingga semakin memajukan perdagangan yang berdampak pada kemajuan ekonomi Kerajaan dan rakyat. Namun pencapaian pada bagian ketiga ini merupakan bagian dari harta milik pribadi Sultan Syarif Hasyim, jika berpedoman pada surat wakaf yang telah dibuatnya. Beliau tidak mencantumkan harta pribadi yang diperolehnya dalam surat wakaf sebagai harta kerajaan. *Keempat*, membangun Balai Kerapatan Siak yang saat itu disebut dengan Balai Rung Sari. *Terakhir*, bagian terpenting secara akuntansi adalah membuat surat wasiat atas istana berikut isinya yang dapat disamakan dengan standar akuntansi pengelolaan harta kerajaan.

Perubahan warna perjalanan kerajaan kearah yang lebih maju terjadi mulai pada masa Sultan Syarif Kasim I, dilanjutkan Sultan Syarif Hasyim dan terakhir oleh Sultan Syarif Kasim II. Perubahan kearah yang sangat maju dan bahkan cukup modern pada masanya ditandai dengan adanya produk Undang-undang Bab Al-qawaid dan surat wakaf pada masa Sultan Syarif Hasyim. Kedua produk tersebut dibuat secara tertulis dan bahkan tercetak dengan baik sehingga dikatakan sebagai loncatan kemajuan yang modern pada masanya. Kandungan nilai ilmu pengetahuan dan budaya di samping kandungan yang telah ada sebelumnya lebih kental terasa pada era dua Sultan terakhir yakni Sutan Syarif Hasyim dan Sultan Syarif Kasim II. Berbagai *episteme* ilmu pengetahuan dalam kehidupan kerajaan sangat sarat adanya, termasuk dalam hal episteme akuntansi. Pengkonstruksian berbagai ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang sangat diperlukan terhadap Kerajaan Siak dan salah satunya adalah akuntansi.

Kepemilikan harta dari perpindahan pusat kerajaan dari Buantan ke Mempura, dari Mempura ke Senapelan, dari senapelan ke Mempura lagi dan dari Mempura ke Siak tidak dapat dikatakan sebaga harta kerajaan. Wilayah taklukan kerajaan tidak dapat dikatakan sebaga harta kerajaan karena dimiliki dengan kekuasaan. Harta yang dimiliki dengan kekuasaan ini disebut dengan harta Swapraja. Harta swapraja pada masa Sultan Syarif Hasyim tidak dinyatakan dalam surat wakafnya, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai harta Kerajaan. Masa Sultan Syarif Kasim mempertegas bahwa harta swapraja tidak dimasukkan sebagai harta yang diserahkan kepada NKRI. Ini berarti bahwa Sultan Syarif Kasim telah memperlakukan harta Swapraja sebagai harta yang tidak dinyatakan sebagai harta kerajaan.

BAB 6

MENELISIK CIKAL-BAKAL PERLAKUAN AKUNTANSI ERA SULTAN SYARIF KASIM II

6.1. AWAL KESULTANAN SYARIF KASIM II

Tongkat kesultanan setelah Sultan Syarif Hasyim wafat pada tanggal 2 April 1908 di Singapura, jatuh ke tangan Sultan Syarif Kasim II sebagai Putra Mahkota. Menurut adat Kerajaan Siak, setiap Sultan mangkat harus segera diganti dengan sultan penggantinya (Jamil, 2010). Namun, sultan pengganti yakni Tengku Sulung Sayed Kasim masih kecil serta masih sekolah di Batavia atau Jakarta sekarang, maka penobatannya ditunda sampai waktunya. Sebagai sebuah sistem filosofi kerajaan, kondisi ini paling tidak membuktikan apa yang dikatakan Potter (2001) bahwa salah satu kelemahan filosofi adalah prakmatisme yang menyebabkan perbedaan antara filosofi dengan praktiknya.

Sebagai pengganti sementara, maka Datuk Empat Suku menugaskan dua pembesar di Siak yakni Tengku Besar Sayed Sagaf dan Datuk Lima Puluh untuk menjalankan roda kerajaan (Effendy dan Effendy, 1972). Berdasarkan kondisi ini, sebenarnya Sultan Syarif Kasim telah syah menggantikan posisi ayahandanya pada tahun 1908, hanya saja karena faktor umur, maka serimonial pentabalan ditunda sampai saatnya tiba. Tahun inilah yang menjadi rujukan untuk menetapkan tahun 1908 sebagai awal Kesultanan Syarif Kasim, meskipun penobatannya baru dilakukan pada tahun 1915. Sebuah tanggung jawab telah menanti kehadiran beliau, meskipun dalam pelaksanaannya ditunda. Saat tanggung jawab secara adat telah datang, beliau masih berumur sekitar 14 tahun, sebuah umur yang masih sangat belum memadai untuk mengemban tanggung jawab yang besar yakni memimpin kerajaan. Namun demikian, meskipun secara formal beliau belum memikul tanggung jawab, secara sadar pastilah

beliau mengetahuinya, sehingga beban yang harus dipikulnya sudah menjadi pikiran beliau yang tidak mungkin dihindari. Inilah esensi dari sebuah tanggung jawab yang tidak bisa dihindari dan harus dipikul setelah saatnya tiba.

Merujuk pada sejarah kerajaan sebelumnya yakni tahta sultan menjadi incaran bagi setiap turunan yang berhak sehingga menjadi sebuah jabatan yang diperebutkan, maka beliau tidak mengalami suasana persaingan tersebut. Namun di balik itu semua, menyadari akan tanggung jawab besar yang segera tiba bagi beliau yang masih belum cukup umur, tentu akan memengaruhi jiwa beliau yang seharusnya berhak menikmati dunia remajanya menurut ukuran normal perjalanan hidup seseorang. Inilah yang akan memengaruhi bagaimana pola dan gayanya dalam memimpin ketika tanggung jawab tersebut sudah tidak bisa diwakilkan lagi. Masa depan Kerajaan Siak, tergantung kepada kemampuan individu beliau, di samping adanya kontribusi dari para orang besar kerajaan yang mendampingi setiap sultan dalam memimpin kerajaan.

6.2. MASA PENDIDIKAN

Sultan Syarif Kasim memang telah dipersiapkan oleh ayahandanya sebagai Putra Mahkota menggantikan ayahanda ketika telah wafat. Persiapan ini dibuktikan dari keseriusan ayahandanya untuk memberikan pendidikan yang mumpuni bagi putranya jika kelak menjadi Sultan berikutnya. Pendidikan yang diberikan kepada Sultan Syarif Kasim yang juga dipanggil dengan nama Tengku Sulung Sayed Kasim dimulai dari lingkungan istana pada saat beliau masih kecil. Beliau diajarkan adat istiadat, tata krama kerajaan, pendidikan fisik maupun mental (Jamil, 2010). Pendidikan di kerajaan yang dipersiapkan untuknya sedari kecil, diharapkan cukup memadai bagi pengetahuannya untuk menjalankan tatakrama dan protokoler kerajaan pada saat beliau menjadi Sultan.

Setelah mendapatkan pendidikan dari kerajaan, beliau dibekali lagi pendidikan yang harus diperolehnya di luar kerajaan. Bidang pendidikan lanjutan yang diperolehnya adalah pendidikan agama. Bidang pendidikan agama sesuai dengan keinginan ayahandanya agar anaknya dapat memimpin kerajaan secara Islami. Memimpin dengan ide bahwa Tuhan adalah sumber nilai-nilai keiklasan (Cottingham, 2005). Budaya Melayu Riau memang sangat dekat dengan Islam sejak nenek moyangnya mendirikan kerajaan ini (Hamka, 1961). Oleh sebab itu, prinsip-prinsip kehidupan yang Islami sangat kental dalam setiap kehidupan di Kerajaan Siak Sri Inderapura. Pendidikan agama diperolehnya sampai dengan umur 12 tahun. Pendidikan agama inilah yang memengaruhi gaya kepemimpinan Sultan di kemudian hari. Beliau diharapkan dapat memimpin dengan kaedah dan tatakelola pemimpin yang Islami.

Setelah beliau dibekali pendidikan adat istiadat kerajaan dan pendidikan agama, beliau dibekali lagi dengan pendidikan di bidang hukum Islam dan ilmu ketatanegaraan. Kedua bidang ilmu ini ditempuhnya dalam waktu 11 tahun di Batavia.

Bekal ilmu hukum dan ketatanegaraan, membuat beliau semakin matang dalam berbagai pengetahuan, yang nantinya sangat berguna pada saat memimpin kerajaan. Pemahaman tentang ilmu politik, ilmu pemerintahan, demokrasi, keadilan, hak-hak azasi manusia sudah menjadi keahlian beliau sebelum ditabalkan menjadi Sultan Siak ke 12 (Jamil, 2010). Ilmu hukum yang ditekuninya adalah Hukum Islam, sehingga sangat mudah baginya untuk menguasai karena sudah mendapat pengetahuan sejak kecil. Ilmu ketatanegaraan yang diperolehnya tentu saja terfokus pada ketatanegaraan Eropa sesuai dengan perkembangan ilmu pada saat itu. Bekal ilmu yang ada, membuat Sultan Syarif Kasim memiliki pola dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan para pendahulunya. Beliau menjadi Sultan beralaskan dataran yang sangat damai, tentram, tanpa intrik dan tanpa pesaing dari internal. Beliau juga menjadi Sultan dengan memiliki banyak bekal ilmu, sehingga sangat memungkinkan mengelola kerajaan dengan modern, berlandaskan pada profesional.

Proses pendidikan yang dijalani beliau hampir menghabiskan semua waktu anak-anak dan remajanya. Beliau ternyata sangat menikmati proses ini, sehingga semua waktu masa kecil hingga remajanya habis untuk menuntut ilmu. Kalau dihitung dari masa kanak-kanaknya sampai beliau ditabalkan menjadi raja ke 12, maka baginya tiada waktu tanpa belajar. Masa-masa seperti ini di zamannya tidak bisa dilakukan oleh banyak orang meski memiliki kesempatan yang sama. Hanya orang-orang tertentulah yang memiliki kemauan belajar seperti ini, sehingga tidak berlebihan kalau beliau memang dapat disejajarkan dengan semangat tokoh-tokoh muda saat itu seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lainnya. Masa pendidikannya telah dijalani sebaik-baiknya dengan menghabiskan waktu anak-anak dan remajanya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan yang telah ada ditangannya.

Masa kanak-kanak dan remaja yang habis digunakan untuk belajar memperlihatkan bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang ilmuwan dan teknokrat di berbagai bidang. Kemampuan beliau dalam berbagai bidang kiranya berasal dari kenginan beliau sendiri dan bukan paksaan dari ayahandanya. Hal ini dibuktikan beliau pada saat harus memilih segera menjadi raja atau melanjutkan studi terlebih dahulu. Ternyata beliau memilih untuk melanjutkan studi terlebih dahulu (Jamil, 2010). Beliau memang pecinta ilmu sejati dan sangat tekun menjalani proses pendidikan, bukan jabatan. Kemampuan personal yang dimiliki Sultan Syarif Kasim kiranya sekaligus menjadi kelemahannya di mata lawan. Satu-satunya kendala beliau atas kemampuan yang dimilikinya adalah resistensi yang tinggi dari Pemerintah Kolonial Belanda terhadap dirinya.

Kemampuan dan kecerdasan sultan serta sifat progresifnya, menyebabkan Belanda tidak setuju beliau sebagai penerus Sultan Siak menggantikan ayahandanya. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kolonial untuk menghalang-halanginya. Belanda memutuskan untuk tidak merestui Sultan Kerajaan Siak berasal dari turunan Sultan Syarif Hasyim. Pada saat itu dan masa-masa sebelumnya, campur tangan

Belanda untuk merestui seseorang yang diangkat menjadi raja tetap diperlukan. Bahkan meskipun secara adat dan turun-temurun telah memenuhi syarat secara syah, bisa saja tidak jadi oleh karena tidak memperoleh restu dari Pemerintah Kolonial. Salah satu bukti Belanda sangat berperan dalam memberikan restu, terjadi pada saat Sultan Syarif Hasyim menjadi raja, meski yang lebih berhak adalah saudara sebapak lainnya (Depdikbud, 1989).

Peran Belanda untuk mengesahkan raja yang akan berkuasa merupakan dampak dari kekuasaan di Kesultanan Siak sudah berada di bawah kontrol Belanda (Luthfi, 1991). Namun, semua cara dan sikap penolakan Belanda terhadap Sultan Syarif Kasim tetap tidak diindahkan oleh Datuk Empat Suku yang secara adat bertugas untuk mengangkat sultan. Keempat datuk yang berwenang mengangkat sultan tetap memutuskan dan sepakat menjalankan proses adat penobatan Sultan Syarif Kasim pada tanggal 15 Maret 1915. Keempat datuk yang saat ini fungsinya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Kampar dan Datuk Lima Puluh.

6.3. KONSEKUENSI PENGANGKATAN SULTAN SYARIF KASIM

Penobatan Sultan Syarif Kasim oleh Datuk Empat Suku mengundang kemarahan pihak kolonial terhadap Kerajaan Siak yang dipimpin Sultan Syarif Kasim. Sebagai akibat kemarahan tersebut, pihak kolonial berusaha untuk memberikan berbagai tindakan yang bertujuan untuk menggoyang dan merusak keutuhan kerajaan agar sistem kerajaan tidak berjalan secara normal. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial memang tidak sampai kepada tindakan fisik. Tindakan hanya dilakukan secara non fisik namun bertujuan untuk melumpuhkan kerajaan dengan berbagai cara adu domba dan lainnya. Tindakan popular yang menyebabkan Sultan mendapat apresiasi dari rakyatnya adalah salah satu tindakan yang coba dicegah oleh Belanda dan tindakan ini terus dilakukan semasa Pemerintahan Sultan Syarif Kasim. Beberapa konsekuensi pengangkatan sultan yang berakibat pada adanya tindakan Pemerintah Kolonial sangat memengaruhi jalannya sistem pemerintahan kerajaan yang akan dijelaskan selanjutnya.

Pemerintah Kolonial melakukan tekanan berupa pemantauan terhadap semua gerak-gerik sultan dalam memimpin Kerajaan Siak (Jamil 2010). Tindakan kolonial ini menyebabkan tidak bebasnya sultan dalam melakukan setiap aktivitasnya untuk Melayani dan memakmurkan rakyatnya. Tindakan pemantauan ini juga berakibat sulitnya sultan untuk memajukan rakyatnya baik di bidang ekonomi, pemerintahan, maupun di bidang keamanan. Kecurigaan atas setiap tindakan sultan tentu saja akan mengganggu aktivitas sultan dalam menjalankan roda pemerintahan. sultan memimpin di bawah bayang-bayang Pemerintahan Kolonial yang terus melakukan

tekanan-tekanan dengan cara mencurigai setiap gerak-gerik yang dilakukannya. Dapat dikatakan bahwa semasa Sultan Syarif Kasim memimpin, tidak akan mampu bergerak bebas dalam memberikan pelayanan kepada Rakyat Siak, karena hal ini pasti akan mendapatkan pembatasan oleh Belanda. Berbagai tindakan populer untuk Melayani dan apalagi mensejahterakan rakyatnya dapat dibilang sangat minim. Belanda memang ingin menjadikan kerajaan hanya sebagai boneka belaka yang cocok dijadikan sebagai penghias, mainan saja serta alat bagi kepentingannya. Namun, kiranya sultan bukanlah tipe pemimpin yang hanya diam dan pasrah pada kondisi saja, beliau tetap berpikir untuk mencari celah sebagai bentuk perlawanan yang paling mungkin dilakukan.

Tabel 6.1: Penghasilan Tetap Pertahun Sebelum Dan Sesudah Penghapusan Dewan Orang Besar
(Dalam Gulden)

No.	Nama Pejabat	Penghasilan tetap pertahun sebelum dan sesudah penghapusan dewan orang besar			
		Sebelum penghapusan		Sesudah penghapusan	
		1893	1970	1916	1938
1.	Sultan Siak	106.070	90.470	45.000	45.000
2.	Tengku Ngah Said Hasyim	50.000	50.000	-	-
3.	Datuk Pesisir	3.000	3.000	-	-
4.	Datuk Lima Puluh	3.000	3.000	-	-
5.	Datuk Tanah Datar	3.000	3.000	-	-
6.	Datuk Kampar	3.000	3.000	-	-
7.	Datuk Laksamana	4.800	4.800	-	-
8.	Datuk Bandar Pekanbaru	1.600	1.600	-	-
9.	Tengku Besar Petapahan	200	200	-	-
10.	Penghulu di Pekanbaru (4 org)	2.400	2.400	-	600
11.	Penghulu Melayu Besar Tanah Putih.				
	Penghulu-Penghulu:	750	750	-	750
12.	a. Melayu Tengah				
	b. Mesah	375	375	-	375
	c. Batu Hampar	375	375	-	375
	Kepala Sungai Merbau	375	375	-	375
13.	Kepala Bukit Batu dan Dumai	-	-	-	360
14.		-	-	-	360
	Jumlah	178.945	158.545	45.000	48.105

Sumber: Luthfi (1991).

Selain memantau setiap aktivitas sultan, Belanda juga melakukan tekanan dengan cara tidak memberikan kewenangan bagi sultan untuk menjalankan bidang ekonomi. Semua aktivitas ekonomi Rakyat Siak Sri Inderapura harus dilakukan dan dikendalikan oleh Pemerintah Kolonial (Jamil, 2010). Pengambil alihan aktivitas ekonomi ini, terutama difokuskan pada hasil-hasil kerajaan yang sangat besar yakni hasil hutan (kayu, rotan, damar dan gaharu), perairan (ikan di Bagan Siapi-Api penghasil nomor 2 terbesar di dunia saat itu), minyak bumi (sampai saat ini) dan perdagangan. Keempat

aktivitas ekonomi tersebut merupakan sumber pemasukan utama bagi kerajaan yang saat itu diambil alih oleh Pemerintah Kolonial.

Sebagai kompensasi atas pengambil alihan aktivitas perekonomian ini, Pemerintah Belanda memberikan bantuan bagi sultan dan kerajaannya setiap tahun. Daftar penghasilan tetap Sultan Siak serta Pejabat lainnya sebagai akibat dari pengambilalihan bidang ekonomi dapat dilihat dari penghasilan sebelum dan sesudah penghapusan dewan orang besar pada table 6.1. Tabel penghasilan tetap pertahun di atas dibenarkan keberadaannya oleh informan Nizami yang mendasarkan informasinya dari catatan OK Muhammad Jamil Sultan pada prinsipnya hanya diberikan gaji oleh Pemerintahan Kolonial Belanda seperti yang dijelaskan dari catatan Muhammad Jamil, ayahanda dari OK. Nizami Jamil.

Merujuk pada sumber catatan tulisan tangan asli Muhammad Jamil sebagai Sekretaris Pribadi Sultan yang ditulis kembali sesuai aslinya oleh Nizami dapat memperkuat analisa ini. Pernyataan catatan O.K.M. Jamil tentang dari mana penghasilan sultan untuk membiaya kerajaan sebagai berikut.

> "Penghasilan dan pendapatan Sri Sultan pada waktu itu hanyalah merupakan bantuan subsidi dari Pemerintahan Belanda Jakarta lewat Gubernur Belanda di Medan. Pendapatan ini tidaklah mencukupi untuk membangun negeri. Kekuasaan Belanda semakin mencekam dan memperbodoh rakyat pribumi".

Tekanan dari Pemerintahan Kolonial lainnya adalah dalam bentuk pengambil alihan urusan pemerintahan dan keamanan. Dalam hal pemerintahan, semuanya dilakukan dan dikendalikan oleh Pemerintah Kolonial, sehingga kerajaan tidak lagi memiliki hak otonomi, Begitu juga dalam hal urusan keamanan. Tekanan di bidang keamanan, Kerajaan tidak dibolehkan memiliki tentara keamanan sendiri, kecuali opas yang berfungsi untuk pengawalan istana. Tekanan berupa pengambilalihan di bidang pemerintahan dan keamanan, menyebabkan kerajaan Siak tidak berkutik terhadap kolonial Belanda. Bentuk kekuasaaan yang diberikan Pemerintah Belanda kepada sultan hanyalah di bidang adat istiadat dan keagamaan. Pembatasan dan pengurangan ruang gerak yang dilakukan oleh Belanda, menyebabkan sultan tidak memiliki kesempatan untuk berbuat bagi rakyatnya kecuali dalam hal adat istiadat dan keagamaan saja.

Konsekuensi lainnya yang harus diterima oleh kerajaan dengan pengangkatan sultan oleh para Datuk Empat Suku adalah Belanda sengaja menghapus keberadaan Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan. Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan tersebut sesungguhnya adalah Datuk Empat Suku yang selama ini membantu jalannya sistem pemerintahan kerajaan (Suwardi *et. al*, 2007). Tujuan Belanda melakukan tindakan ini adalah untuk melumpuhkan kerajaan serta menjalankan politik adu dombanya. Belanda menganggap kerajaan akan lumpuh karena sultan bergerak sendirian dalam

memimpin, sehingga akan menjadi lemah. Selama ini kekuatan sultan tidak terlepas dari bantuan Dewan Kerajaan ini. penghapusan dewan orang besar atau dewan kerajaan ini juga bagian dari merubah struktur kerajaan secara signifikan dalam sejarah Kerajaan Siak.

Tindakaan Belanda yang mengambil alih pemerintahan adalah dengan mengurangi wilayah kekuasaan sultan dari 10 Provinsi menjadi 5 distrik saja (Suwardi *et. al*, 2007). Tindakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kekuasaan dan wibawa Sultan Kerajaan Siak di mata rakyatnya serta sekaligus melakukan politik adu dombanya. Keputusan ini ditandatangani oleh sultan dengan suatu paksaan Belanda dan disyahkan oleh Gubernur Belanda yang berkedudukan di Pantai Timur Sumatera. Tujuannya adalah agar seolah-olah surat ini dibuat oleh sultan, sehingga mendapat perlawanan dari rakyatnya (Effendy dan Effendy, 1972). Pengurangan wilayah kekuasaan ini menyebabkan banyak kepala suku tidak lagi memegang kekuasaan pemerintahan yang berdaulat, kecuali hanya sebagai pembantu dalam wilayah saja. Di lain pihak, Datuk-datuk yang menjabat kepala hakim polisi otomatis tidak memiliki kedudukan lagi, sehingga Datuk-datuk tersebut tidak bisa melakukan kontak langsung dengan sultan. Intinya mata rantai komunikasi antara sultan dengan pembantunya selama ini diputus. Belanda mengaharapkan adanya resistensi dari pihak yang kehilangan kedudukan serta memutus mata rantai komunikasi di antara mereka.

Pengurangan wilayah kekuasaan sultan yang seolah-olah dibuat oleh sultan sangat berdampak pada hilangnya hak-hak rakyat Kerajaan Siak. Hak hutan dan ulayat kepunyaan kepala suku dan batin hilang. Hutan dan tanah ulayat yang selama ini digunakan secara bebas sebagai sumber penghasilan rakyat juga hilang. Satu-satunya hak yang masih bisa dimiliki oleh rakyat hanyalah hak pancung alas (hak garap). Rakyat yang ingin menggarap tanah harus mendapatkan surat pemakaian (*grand*) dari sultan. Semua skenario Belanda ini di samping agar mendapat resistensi dari rakyat, juga lebih mudah mengawasi dan mengendalikan sultan sebagai pemegang kekuasaan tunggal di bawah Belanda. Politik pecah belah dengan penciutan wilayah kekuasaan sultan yang berakibat pada hilangnya hak kelola rakyat ternyata tidak memiliki pengaruh kepada hubungan rakyat dengan sultan.

6.4. SIKAP SULTAN SYARIF KASIM MENGHADAPI SITUASI SAAT MEMIMPIN

Sultan Syarif Kasim sejak sebelum ditabalkan menjadi raja sangat menyadari akan adanya berbagai konsekuensi tindakan dari Belanda yang harus dihadapi. Sebagai seorang penerima tahta Kesultanan Siak Sri Inderapura, Sultan Syarif Kasim mau tidak mau harus menerima berbagai konsekuensi atas status tersebut, meskipun secara formal belum ditabalkan sebagai sultan. Konsekuensi tersebut sebagai akibat

sikapnya yang tidak menerima berbagai perlakuan Belanda atas tekanan dan campur tangan terhadap kerajaan. Perlakuan Belanda yang saat itu sangat berkuasa atas semua kerajaan di Indonesia termasuk Siak Sri Inderapura sudah sangat keterlaluan, namun beliau tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melalui pendidikan. Inilah sikap yang dilihatkan Sultan Syarif Kasim pada saat itu, meskipun beliau masih terbilang belum cukup umur. Sikap beliau yang tidak sepaham dan status beliau sebagai Putra Mahkota telah diketahui oleh Belanda sehingga setiap gerak-geriknya tidak lepas dari pantauan (Jamil, 2010). Pemantauan terhadap Sultan Syarif Kasim, dimulai sejak beliau masih sekolah di Batavia sampai dengan beliau menjadi raja Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Pemantauan Belanda terhadap gerak-gerik Sultan Syarif Kasim di samping sikap penolakannya terhadap Belanda, juga disebabkan oleh adanya kekawatiran yang tinggi dari Belanda karena Sultan Syarif Kasim adalah orang yang berpendidikan (Jamil, 2010). Belanda mengetahui bahwa beliau orang yang menguasai ilmu hukum Islam dan mengerti soal ketatanegaraan. Di samping itu Belanda menganggap beliau adalah seorang yang sangat progresif. Sehubungan dengan kemampuan Sultan Syarif Kasim, diakui melalui konfirmasi kepada Nizami berikut ini.

> "Beliau sangat cerdas, taat beragama, sayang kepada rakyatnya dan mengerti bagaimana melindungi rakyatnya. Beliau memang membangkang dengan Belanda, namun tidak secara fisik melainkan secara non fisik. Cara non fisik yang dilakukannya adalah menambah ilmu bagi rakyatnya, sehingga muncul keberanian dan kecerdasan untuk melihat masalah apa yang ada di depan mata".

Komentar Nizami di samping beliau mengingatnya sendiri karena pernah hidup di zaman sultan meski masih berumur 7 tahun, juga didasarkan pada catatan tulis tangan biografi ayahandanya selama membantu sultan sebagai asisten pribadi. Sultan Syarif Kasim terus menunjukkan sikap penolakan atas kebijakan Belanda sebisa yang dia lakukan. Perlawanan yang dilakukan juga sangat cerdas yakni dengan memberikan suatu argumen yang dikaitkan dengan hak kekuasaan yang masih diberikan pemerintah Belanda kepada kerajaan. Perlawanan yang dilakukan Sultan Syarif Kasim terhadap kebijakan Belanda selalu dilakukan dengan sangat diplomatis. Penghapusan Dewan Kerajaan atau Dewan Menteri dilawannya dengan tetap menghendaki dan mempertahankan adanya kerapatan tinggi dari Kerajaan Siak sebagai tempat untuk bermusyawarah, berunding secara resmi dengan para datuk dan orang-orang besar yang menjadi kepercayaannya. Beliau beralasan bahwa badan ini sangat diperlukan sebagai badan peradilan yang menangani masalah Syariah Agama Islam, adat istiadat dan masalah sengketa ahli waris serta sengketa antara rakyat di persukuan di dalam kerajaan. Meskipun Belanda menolak badan kerapatan ini, namun sultan tetap saja mempertahankannya sehingga pada akhirnya tidak jadi dihapus. Pembentukan Badan Kerapatan ini menghilangkan semua asumsi Belanda bahwa sultan akan kehilangan

wibawa dari rakyatnya. Adanya Dewan Krapatan ini, berarti sultan masih tetap bisa berkomunikasi dengan para datuk, orang besar dan sekaligus masih disayang dan disegani oleh rakyatnya.

Sikap tegas sultan kepada Belanda terus ditunjukkannya dengan menantang kebijakan Belanda lainnya. Kebijakan Belanda yang tidak disetujui oleh Sultan Syarif Kasim adalah menyangkut dengan kerja rodi yang diterapkan Belanda terhadap rakyatnya. Pada tahun 1916, Belanda memberlakukan kerja rodi kepada Rakyat Siak dengan tidak mendapat upah, tanpa imbalan (rodi) yang banyak menguras tenaga serta kemiskinan bagi rakyatnya (Nizami, 2010). Akibat adanya kerja rodi mereka tidak sempat untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Kerja rodi ini secara tegas dan lantang tidak disetujui oleh Sultan Syarif Kasim dengan mengatakan rakyatnya tidak boleh dipekerjakan sebagai rodi dan berlaku di seluruh anak negeri di Kerajaan Siak (Effendy dan Effendy, 1972). Meskipun mendapat kecaman dari Belanda, sultan secara diam-diam terus membangun komunikasi dengan para datuk untuk menantang kebijakan ini. Hasil akhir dari perlawanan ini menyebabkan terjadinya pemberontakan rakyat pertama melawan Belanda pada bulan Desember 1931 di pulau Merbau dan daerah lainnya (Jamil, 2010). Para pemberontak tidak berhasil ditangkap oleh Belanda karena mendapat perlindungan dari sultan. Sultan mengamankan mereka dan disuruh melarikan diri ke Malaya Negeri Johor (Malaysia sekarang).

Sikap perlawanan lainnya dari Sultan Syarif Kasim terhadap Belanda ditunjukkan pada saat Belanda memintanya untuk menandatangani *Zelf Bestuursrcelen* atau peraturan mengenai Pemerintahan Swapraja pada tahun 1939. Pada saat itu, Belanda sengaja memanggil semua raja-raja Melayu di Sumatera Timur termasuk Sultan Syarif Kasim untuk berkumpul di Medan. Tujuan pertemuan itu adalah Belanda meminta semua raja untuk menandatangani peraturan pemerintahan Swapraja dimaksud. Sikap yang ditunjukkan oleh Sultan Syarif Kasim adalah dengan tegas menolak untuk menandatangani (Jamil, 2010). Tidak ada informasi apakah pada saat itu hanya Sultan Syarif Kasim saja yang menolak untuk menandatangani atau ada Raja Melayu lainnya yang juga tidak menandatangani. Peristiwa penolakan ini juga diketahui oleh Jepang yang bekerjasama dengan Kerajaan –Kerajaan Melayu untuk menggarap hutan industri.

Perlawanan Sultan Syarif Kasim terhadap Belanda juga ditunjukkannya pada saat Belanda meminta bantuannya untuk membentuk pasukan pengawal negara atau *Staatswach* pada tahun 1940. Pasukan pengawal negara bertugas untuk mempertahankan Kerajaan Siak dari serangan Jepang sebagai musuh sekutu yang di dalamnya termasuk Belanda. Permintaan Belanda tersebut juga ditolak tegas oleh sultan dengan tidak bersedia membentuknya. Barangkali sultan sangat mengetahui akal-akalan Belanda bahwa pembentukan pasukan itu hanya untuk kepentingan mereka. Ketidakpercayaan sultan kepada Belanda memang sudah begitu akut sebagai manifestasi perlawanannya.

Penolakan sultan kepada Pemerintah Kolonial sesungguhya pada prilaku orang-orang Belanda yang menjajah dengan mengendalikan dan mencampuri kerajaan serta menindas rakyatnya. Pada saat kerajaan beliau dikendalikan dan dicampuri serta rakyatnya dipaksa dan ditindas oleh Belanda, beliau sangat bersahabat dengan Jepang yang tidak berprilaku seperti Belanda. Hubungannya dengan Jepang lebih sebatas urusan bisnis yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Namun ketika Jepang berhasil menguasai Belanda dan berprilaku seperti Pemerintah Kolonial Belanda, maka sultan menunjukkan kemarahannya dan penolakannya terhadap tindakan tersebut. Jepang yang semula mengikrarkan diri sebagai sahabat, disanggah sultan karena prilakunya yang memaksa dan menangkap raja-raja yang menentang kebijakan Jepang.

Sikap konsisten Sultan Syarif Kasim Sani atas ketidaksepahaman dengan penindasan terhadap rakyatnya, dibuktikan dari penolakkannya terhadap permintaan Jepang yang sebelumnya mengikrarkan diri sebagai sahabat, bukan penindas. Pada saat Pemerintah Jepang memohon kepada sultan agar mengerahkan Rakyat Siak bergotong royong memperpanjang lapangan terbang Simpang Tiga, beliau dengan tegas menolaknya. Beliau menganggap permintaan tersebut sebagai kerja paksa atau Romusa dan beliau tidak akan membiarkan rakyatnya untuk Romusa tersebut (Jamil, 2010). Prinsip beliau adalah Pemerintah Jepang sebagai sahabat seperti yang telah diikrarkan, bukan sebagai penjajah.

6.5. MEMIMPIN DENGAN AGAMA DAN PENDIDIKAN

Kedaulatan yang terbatas, disadari oleh sultan dalam memimpin kerajaan Siak Sri Inderapura. Dua hal yang menjadi kewenangan sultan dalam memimpin kerajaan adalah di bidang adat istiadat dan keagamaan (Jamil 2010). Selain dari itu, maka dikendalikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda meskipun tetap mendapat perlawanan dari sultan. Politik pecah belah oleh Belanda terhadap sultan dengan rakyatnya ternyata tidak berhasil sesuai yang diharapkan karena sultan secara cerdik dan arif menghadapinya. Perlawanan fisik secara terbuka sulit untuk dilakukan sehingga perlawanan secara halus dan cerdas harus dipilih oleh sultan dan rakyatnya. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh kerajaan semasa Sultan Syarif Kasim sampai dengan Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Memimpin dalam kekangan Belanda memang harus dihadapi secara cerdas dan arif sehingga memengaruhi corak dan warna kepemimpinan Sultan Syarif Kasim selama menjadi raja.

Salah satu bentuk corak dan warna kepemimpinan yang dijalankan oleh sultan adalah dengan menggunakan kekuasaannya di bidang adat istiadat dan keagamaan untuk melawan sekaligus memimpin rakyatnya. Sultan menjalankan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam sepanjang bisa dilakukan, sebagai bentuk

perlawanan terhadap kekuatan Kolonial Belanda (Jamil, 2010). Meskipun Kerajaan Siak bukanlah kerajaan Islam, namun semua napas dan sendi kehidupan yang berlaku di Negeri Siak didasarkan pada nilai-nilai ke Islaman. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat Melayu (Ambary, 2007). Hal ini membuat di mata rakyatnya, kedudukan sultan di samping sebagai pemimpin negeri, juga sebagai khalifatullah atau Wali Allah atau bayang-bayang Allah di muka bumi ini (Lutfi, 1983). Sehubungan dengan ketokohan sultan di bidang agama, terkonfirmasi dengan tokoh Riau yang pernah hidup di zaman Sultan Syarif Kasim yaitu **Tenas Effendy** sebagai berikut.

> "Sultan seorang alim ulama yang sangat kharismatik dan sangat berwibawa di mata rakyatnya. Beliau taat beragama dan sangat disayangi oleh rakyatnya". Ini merupakan modal kuat dari sultan dalam memimpin kerajaan yang tidak bisa ditembus oleh politik adu domba Kolonial Belanda".

Selama menjadi raja, Pemerintah Kolonial Belanda cukup pusing menghadapi sultan karena bentuk perlawanannya yang sangat elegan. Beliau sangat menyadari bahwa kekuatan fisik harus diimbangi dengan kekuatan pembinaan mental dan pendidikan rakyat. Cara inilah yang terus dilakukan oleh sultan sebagai bentuk perlawanannya terhadap Belanda. Sejak beliau dinobatkan sebagai Sultan Siak, beliau segera membangun sekolah untuk rakyatnya. Selama kurun waktu 10 tahun sekitar tahun 1929 sampai dengan tahun 1939 beliau memberikan beasiswa kepada anak-anak negeri yang berbakat dan cerdas. Sebagian dari mereka beliau kirim ke Batavia, Medan dan Bukit Tinggi. Melalui pendidikan, sultan seakan menyadarkan rakyatnya bahwa penjajahan dan penindasan harus segera disingkirkan (Aziz, 1991). Melalui pendidikan beliau mengharapkan terbinanya mental rakyat secara baik sehingga rakyat bisa melakukan berbagai perlawanan secara cerdas, seperti yang beliau lakukan.

6.6. MEMIMPIN DALAM KEKANGAN JEPANG

Masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim tidak lepas dari tekanan dan kendali asing yang menyebabkannya tidak bebas dan leluasa dalam memimpin rakyat negerinya. Lepas dari tekanan dan kendali Belanda, kiranya tidak berarti lepas bebas untuk berbuat, karena diganti oleh Jepang yang masuk ke Siak Sri Inderapura. Seperti pepatah yang berbunyi "keluar dari mulut singa, masuk ke mulut harimau", benar-benar di alami oleh sultan dan rakyatnya. Namun meskipun Jepang menggantikan peran Belanda menguasai Siak Sri Inderapura, sultan tidak terlalu kawatir menghadapi Jepang karena selama ini telah memiliki hubungan semenjak ayahandanya menjadi raja. Hubungan tersebut adalah dalam bentuk kerja sama pengelolaan hutan industri seperti penanaman karet di Siak seluas 750 hektar, ribuan hektar di Lubuk Ampoi Mandau dan Merempan serta kerjasama tanaman karet rakyat (Jamil, 2010). Keterangan ini membenarkan peryataan Reid (2012) yang mengatakan bahwa perkebunan di Siak kurang digarap

oleh asing kecuali Jepang. Oleh sebab itu, sultan tidak merasa ragu berhadapan dengan Jepang yang sudah lama mengetahui bahwa sultan tidak sepaham dengan Belanda.

Kekuasaan Jepang yang telah mengalahkan Belanda meskipun mengikrarkan diri sebagai sahabat cukup mengkawatirkan sultan. Prilaku Jepang terhadap rakyatnya tidak ubahnya seperti prilaku Belanda yakni memaksa dan melakukan tindakan sewenang-wenang seperti mengambil seenaknya padi rakyat yang berujung pada pemberontakan rakyat Suku Sakai. Sultan tidak memiliki kekuatan apa-apa terhadap perintah Jepang untuk menyelesaikan pemberontakan tersebut, kecuali mengikutinya dengan menangkap dan menyerahkan pemimpin pemberontak untuk diserahkan kepada Jepang. Sebaliknya dapat dilihat bagaimana cinta dan patuhnya rakyat kepada sultan dengan ikhlas pula menyerahkan diri pada saat utusan sultan memanggilnya ke istana untuk diserahkan pada Jepang. Sebuah dilemma yang tidak mudah untuk menghadapinya karena tidak mungkin beliau membiarkan dan ikhlas menyerahkan rakyatnya yang memberontak kepada Jepang yang sesungguhnya penjajah.

6.7. AKTIVITAS EKONOMI SULTAN SYARIF KASIM

Pengambil alihan aktivitas ekonomi yang dilakukan Belanda pada masa Sultan Syarif Kasim bukan berarti beliau sama sekali tidak bisa menggerakan perekonomiannya. Beliau masih bisa menggerakan roda ekonomi kerajaan dan rakyatnya untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatannya di samping menerima bantuan Belanda. Terdapat dua sumber aktivitas ekonomi yang menunjang pendapatan sultan dan rakyatnya pada saat itu yakni di bidang perkebunan dan perikanan. Perkebunan yang ada di wilayah Kerajaan Siak dapat dibagi kedalam dua golongan (Aziz, 1991) yaitu perkebunan Raja dan perkebunan Rakyat. Selanjutnya dijelaskan bahwa perkebunan Raja terdiri dari perkebunan karet, sagu dan perkebunan kelapa. Kecerdikan Sultan Syarif Kasim dalam menyiasati pembatasan kegiatan ekonomi oleh Belanda dilakukan dengan memanfaatkan peluang untuk mengolah berbagai usaha baik di bidang perkebunan maupun di bidang lainnya. Kekuatan rakyat di bawah kekuasaan kerajaan dan banyaknya rakyat dalam suatu kerajaan tidak mudah untuk dikalahkan oleh kekuatan Pemerintah Kolonial sekalipun.

Perkebunan karet terdapat di wilayah Balai Kayang yang dikelola dengan nama Balai Kayang Estate. Selanjunya di Okura yang dikelola dengan nama Okura Estate dan di Lubuk Ampoi yang dikelola dengan nama Ampoi Estate. Semua wilayah tersebut berada di daerah Siak Sri Inderapura (Aziz, 1991). Perkebunan sagu terdapat di daerah Selat Panjang tepatnya di wilayah Merbau. Perkebunan kelapa terdapat di wilayah Tanjung Layang daerah Sungai Apit. Terakhir perkebunan durian terdapat di daerah Pebeda dekat dusun Pusaka dan Menayah. Kegiatan perkebunan ini tetap dilaksanakan oleh sultan meskipun berada pada situasi tekanan Belanda. Kegiatan perkebunan ini

merupakan salah satu bagian dari harta kerajaan yang dikuasai oleh Sultan Syarif Kasim. Hasil perkebunan ini dijadikan sebagai sumber pendapatan kerajaan untuk membiayai berbagai kebutuhan kerajaan.

Perkebunan Rakyat pada waktu itu dilaksanakan secara berpindah-pindah atau disebut dengan Ladang Kasang. Cara berpindah-pindah sangat dimungkinkan karena pada saat itu banyak terdapat tanah-tanah kosong atau hutan yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Wedana Siak Aminuddin (1955), Tanah Daerah Siak umumnya berawa-rawa, sehingga banyak mengandung asam. Kondisi ini menyebabkan padi ditanam dalam bentuk perladangan, karena sawah tidak dapat dilakukan. Tanah bekas tuai padi ini juga memungkinkan penanaman selanjutnya berupa karet yang dibiarkan hidup bebas dan setelah berhasil baru diambil getahnya. Rakyat Siak selain dapat memanfaat hutan belukar yang banyak kayu-kayuan besar yang bermacam-macam jenisnya, juga mendapat hasil dari tanaman lainnya seperti karet, kopi, kelapa, pisang, sagu, talas, jagung, timun, cengkeh, nanas dan lainnya sesuai kebutuhan masing-masing. Semua pohon kayu dan hasil hutan lainnya dilindungi dan tidak boleh ditebang sebagai milik bersama.

Potensi hutan wilayah Kerajaan Siak yang ditanami banyak pohon besar umumnya menghasilkan berbagai macam bentuk produk. Pohon Sialang dijadikan sebagai tempat lebah berkumpul yang akan menghasilkan madu lebah. Pohon Seminai dapat menghasilkan minyak goreng untuk masak memasak. Kayu kapur dapat menghasilkan kapur barus yang sangat bermanfaat pada waktu itu. Kayu kruing dapat menghasilkan minyak kruing dan kayu balam dapat menghasilkan buah balam sebagai bahan mentah untuk menghasilkan minyak (Aziz, 1991). Semua pohon-pohon besar yang tumbuh di hutan Siak Sri Inderapura dilindungi oleh kerajaan dan tidak boleh ditebang sebagai harta milik bersama. Komitmen kerajaan masa Sultan Syarif Kasim inilah sebagai bukti bahwa potensi wilayah kekuasaan kerajaan dilindungi dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat negeri. Berkaitan dengan potensi yang terdapat di wilayah kekuasaan Kerajaan Siak, Nizami menegaskan keterangannya melalui konfirmasi sebagai berikut.

> "Potensi wilayah kerajaan Siak oleh Sultan Syarif Kasim digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan rakyatnya".

Aktivitas ekonomi lainnya yang dijalankan oleh kerajaan adalah di bidang perikanan. Potensi hasil bidang perikanan sangat tinggi disebabkan oleh karena sebagian besar wilayah Kerajaan Siak berada di pinggir Sungai Siak, dan daerah taklukannya berada di pinggir lautan seperti Bagan Siapi-Api. Potensi geografis seperti inilah yang menyebabkan sebagian sumber aktivitas perekonomian kerajaan dan rakyatnya berasal dari kegiatan nelayan. Hasil nelayan untuk Kerajaan Siak terutama berasal dari Bengkalis dan Bagan Siapi-Api yang sampai dengan tahun 70an masih terkenal sebagai

penghasil ikan terbesar di dunia. Terkait dengan potensi hasil nelayan, dibenarkan oleh Syafe'I sebagai salah seorang informan dalam konfirmasi sebagai berikut.

> "Bagan Siapi-Api penghasil ikan terbesar di dunia pada saat itu dan sampai dengan tahun 70an masih menghasilkan ikan terbesar. Namun saat ini tidak ada lagi karena berbagai perubahan struktur alam. Dulunya, sungai yang bernama Sungai Garam yang dulunya lebar dan dalam sehingga dapat dimasuki oleh kapal tongkang besar sekarang sudah menjadi daratan".

Perubahan Sungai Garam menjadi daratan (sedimentasi) juga sudah diketahui oleh peneliti yang menyaksikan secara langsung area aliran sungai tersebut. Pada saat ini, Sungai Garam tersebut sudah menjadi got kecil dan dipermukaannya sudah berdiri banyak rumah penduduk.

Hasil nelayan yang paling terkenal dari Siak adalah Ikan Terubuk yang dikeringkan. Secara tradisional, ikan ini ditangkap oleh nelayan selama satu bulan 7 hari yakni pada saat bulan purnama (Aziz, 1991). Pada malam purnama ikan tersebut timbul dalam jumlah tak terhingga sehingga sangat mudah menangkapnya. Fenomena alam ini merupakan rahmat tak terhingga bagi kerajaan dan rakyat Siak, sehingga dari hasil penangkapan ikan terubuk memberikan penghasilan dan kebutuhan bagi kerajaan dan rakyatnya. Sifat lain dari ikan terubuk adalah kebanyakan bertelor dan telor ikan terubuk yang sudah diawetkan sangat terkenal di dunia dan sudah menjadi komoditi ekspor pada waktu itu (Suwandi, 1978). Meskipun Sultan Siak berada dalam kekangan Belanda maupun Jepang, namun beliau tetap dapat mengelola dan memanfaatkan potensi hutan dan perikanan yang ada di wilayah kerajaan untuk rakyatnya. Aktivitas perekonomian ini merupakan bagian dari keunggulan sultan dalam menjalankan roda perekonomian ditengah-tengah kekangan dari pihak koloni Belanda maupun Jepang bagi kemakmuran rakyatnya.

Rangkaian kegiatan perekonomian sultan lainnya adalah memasarkan produk yang dihasilkan oleh kerajaan dan rakyatnya. Secara umum, seluruh rangkaian kegiatan perdagangan Kerajaan Siak berorientasi ekspor. Semua produk-produk tersebut diekspor ke negara tetangga seperti Singapura. Proses perdagangan ekspor ke Singapura tidak sulit dilakukan oleh sultan, karena beliau memiliki harta turunan yang cukup banyak dari ayahandanya di Singapura berupa rumah dan toko. Tidak diperoleh informasi apakah semasa Sultan Syarif Kasim II hartanya di Singapura bertambah atau hanya tetap berupa peninggalan orang tuanya saja. Namun melihat karakter Sultan Syarif Kasim yang sangat agamis, beliau sebenarnya tidak tertarik untuk menambah harta kekayaan kecuali memanfaatkan harta peninggalan ayahandanya. Karakter sultan terkait dengan harta dikonfirmasi kepada Nizami dalam wawancara sebagai berikut.

> "Sultan tidak pernah melakukan transaksi pembelian harta, kecuali hanya untuk kebutuhan operasional yang dipercayakannya pada ayah dari OK Nizami yakni

Muhammad Jamil. Hasil ekspor perkebunan dan perikanan digunakan Sultan untuk membangun daerahnya dan memakmurkan rakyatnya".

Hubungan timbal balik dari ekpor perkebunan dan perikanan Sultan ke Singapura berupa impor bahan kebutuhan rakyat kerajaan Siak. Kebutuhan tersebut berupa bahan textil seperti pakaian, bahan tenunan, dan beras (Aziz, 1984). Distribusi penjualan hasil bumi dilaksanakan oleh China yang umumnya menguasai jalur pendistribusian. Transportasi yang digunakan Sultan untuk memperlancar proses perdagangan ini menggunakan kapal sendiri yang saat itu bernama kapal Tongkang. Hal ini membuat proses perdagangan yang dijalankan oleh Sultan sangat lancar untuk berhubungan dengan luar negeri terutama antara Kerajaan Siak dengan Singapura.

6.8. RAPAT KEUANGAN BERMUARA DARI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Perhatian Sultan dalam memajukan pendidikan bagi rakyatnya sudah tidak dapat disangsikan lagi pada masa beliau berkuasa. Di balik bentuk perlawanannya terhadap Belanda dengan memajukan pendidikan, sesungguhnya mengembangkan pendidikan juga dimaksudkannya untuk memajukan dan mencerdaskan rakyatnya dalam upaya mensejahterakan. Sultan sangat menyadari bahwa dengan pendidikan, maka rakyatnya akan dapat hidup sejahtera karena bisa mengelola kehidupan dengan baik (Aziz, 1991). Wawancara dengan Tenas Efendy membenarkan pernyataan tersebut, seperti dinyatakan di bawah ini.

> Bahwa "Bagi beliau, pendidikan bukan saja sekedar mengajar ilmu pengetahuan tetapi yang lebih utama adalah dapat membentuk rasa kepribadian yang utuh dan menanamkan rasa patriotisme pada anak negeri".

Latarbelakang pandangan sultan inilah, menyebabkan beliau dengan semangatnya dan dibantu oleh permaisurinya Tengku Agung terus mengembangkan berbagai corak pendidikan bagi rakyatnya. Semula corak pendidikan yang dibangunnya bersama permaisuri lebih bersifat keagamaan dan umum. Muatan pendidikan keagamaan dan umum dipandang oleh Sultan sudah cukup memadai untuk menampung rakyatnya yang mau menimba ilmu. Namun sesuai dengan kebutuhan kondisi saat itu, beliau masih memandang kurang cukup terutama pendidikan yang mampu membangkitkan rasa patriotisme kepada para peserta didik (Aziz, 1991).

Sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh Sultan tidak banyak yang bersifat membangun patriotisme yang justru saat itu sangat dibutuhkan menghadapi situasi penjajahan Belanda. Sultan memandang perlu adanya sekolah yang dapat mengimbangi muatan pendidikan yang sudah ada. Sultan dan Permaisuri juga memandang bahwa pendidikan di negeri lain seperti Medan telah lebih maju. Kondisi inilah yang

memotifasi Sultan untuk segera mendirikan sekolah yang bernama Sultanah Latifah dan belajarnya diselenggarakan pada sore hari. Sekolah ini tepatnya didirikan pada tahun 1926 dengan lama pendidikan 3 tahun. Rencana serta realisasi pengembangan pendidikan ini dilakukan oleh Sultan dan Permaisuri dengan terencana. Proses pengembangan pendidikan dilakukan oleh kerajaan dengan sebuah rencana tahunan. Rencana tahunan untuk pengembangan pendidikan dilakukan melalui proses rapat tahunan kerajaan (Aziz, 1991). Muatan rapat tahunan di samping merencanakan di bidang pemerintahan khususnya pendidikan, juga membuat rencana tentang keuangan. Rencana keuangan inilah menjadi muara adanya rapat keuangan yang berimplikasi kepada aktivitas akuntansi pada saat itu. Aktivitas keuangan sudah menjadi bagian dari cara penyelesaian dalam menjalankan berbagai program kerajaan tahunan.

6. 9. RENCANA TAHUNAN, RAPAT KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Rencana tahunan merupakan sebuah rencana kegiatan yang akan dilakukan pada satu tahun mendatang. Rencana tahunan biasanya dibuat untuk melakukan suatu kegiatan khusus tertentu agar dikemudian hari dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Setiap kegiatan yang dilakukan dengan terencana umumnya akan memberikan hasil yang baik pula. Sultan Kasim telah terbiasa menggunakan rencana tahunan untuk melakukan suatu kegiatan khusus. Kegiatan khusus yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan. Ini maknanya bahwa Sultan menginginkan agar kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Harapan ini menggambarkan bahwa beliau tidak main-main dengan pendidikan rakyatnya. Kegiatan pendidikan yang direncanakan dengan baik, mencerminkan pula bagaimana perhatian Sultan terhadap rakyatnya. Merujuk pada sumber catatan tulisan tangan asli Muhammad Jamil sebagai Sekretaris Pribadi Sultan yang ditulis kembali sesuai aslinya oleh Nizami dapat memperkuat interpretasi ini.

> "Baginda mendirikan beberapa sekolah sekolah agama untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan dan mendatangkan guru Agama Islam yang baik-baik dan terpilih dari tamatan mesir dan guru Agama Islam dari Padang Panjang, Medan dan Singapura. Semua biaya dan gaji guru ditanggung oleh Baginda".

Mendirikan beberapa sekolah agama untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan dan mendatangkan guru agama Islam yang baik-baik dan terpilih dari tamatan mesir dan guru agama Islam dari Padang Panjang, Medan dan Singapura sudah dapat dijadikan bukti bahwa beliau melakukan perencanaan yang sangat matang dalam pendidikan. Rencana sudah menjadi bagian dari cara Sultan dalam menjalankan kegiatan penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban operasional.

Rapat keuangan yang menjadi bagian dari perencanaan dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama* bahwa Sultan sangat serius mempersiapkannya dengan merencanakan

berbagai konsekuensi dari apa yang telah direncanakan. Beliau sangat menyadari bahwadukungan kerajaan sangat besar artinya bagi rakyat pada saat itu. *Kedua*, upaya Sultan untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikan adalah merupakan bagian pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang tidak hanya disampaikan kepada rakyatnya yang ingin sekolah, tetapi langsung dirasakan sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada rakyatnya.

Akuntansi merupakan bagian dari yang dikonstruksi dalam penelitian ini, telah dilaksanakan oleh sultan sebagai bagian dari hasil perencanaan dan pengelolaan keuangan. Hasil nyata dari kegiatan akuntansi yang dilakukan oleh Sultan Syarif Kasim adalah adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan melibatkan jumlah dana yang cukup besar harus berakhir dengan sebuah pertanggungjawaban. Sultan Syarif Kasim sangat peduli dengan pertanggungjawaban. Beliau sangat konsen dan tegas apabila suatu kegiatan tanpa dapat dipertanggung jawabkan. Beliau tidak bisa diajak berdamai dalam hal penyelewengan ataupun kesilafan yang menurut beliau tidak harus terjadi. Hal ini dapat diketahui dari konfirmasi yang Merujuk pada sumber catatan tulisan tangan asli Muhammad Jamil sebagai Sekretaris Pribadi Sultan yang ditulis kembali sesuai aslinya oleh Nizami berikut ini.

> Haji Wahid tuan kadhi di kerajaan pada mula Jepang masuk, membuat kesilafan tentang mengurus harta anak yatim karena tidak membuat "pertanggungjawaban". Sehingga beliau dipensiunkan oleh Sultan dan diganti dengan Haji Muhammad Yunus dari selat panjang. Itulah bentuk tegasnya dalam pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan perencanaan, rapat keuangan dan Akuntansi yang sesuai dengan keadaan saat itu merupakan suatu kemajuan yang *hyper* bagi sultan apabila dibandingkan dengan kondisi saat beliau berkuasa dan kondisi sultan-sultan sebelumnya seperti yang telah diuraikan pada bab 5 sebelumnya.

6.10. KESIMPULAN

Sultan Syarif Kasim telah syah menggantikan posisi ayahandanya pada tahun 1908, namun karena belum cukup umur, serimonial pentabalan ditunda sampai saatnya tiba. Tahun inilah yang dijadikan rujukan untuk menetapkan tahun 1908 sebagai awal kesultanan Syarif Kasim II, meskipun penobatannya baru dilakukan pada tahun 1915. Kemampuan personal yang dimiliki Sultan Syarif Kasim kiranya sekaligus menjadi kelemahannya di mata Pemerintah Kolonial. Kemampuan dan kecerdasan Sultan serta sifat progresifnya, menyebabkan Belanda tidak menyetujui beliau sebagai penerus Sultan Siak menggantikan ayahandanya. Namun, semua cara dan sikap penolakan Belanda terhadap Sultan Syarif Kasim tetap tidak diindahkan oleh Datuk Empat Suku yang secara adat bertugas untuk mengangkat Sultan. Keempat datuk yang berwenang

mengangkat Sultan tetap memutuskan dan sepakat menjalankan proses adat penobatan Sultan Syarif Kasim pada tanggal 15 Maret 1915. Penobatan Sultan Syarif Kasim oleh Datuk Empat Suku mengundang kecaman pihak kolonial terhadap Kerajaan Siak yang dipimpin Sultan Syarif Kasim.

Pemerintah Kolonial melakukan tekanan berupa pemantauan terhadap semua gerak-gerik Sultan dalam memimpin Kerajaan Siak. Selain memantau setiap aktivitas Sultan, Belanda juga melakukan tekanan dengan cara tidak memberikan kewenangan bagi Sultan untuk menjalankan bidang ekonomi. Pengambil alihan aktivitas ekonomi ini, terutama difokuskan pada hasil-hasil kerajaan yang sangat besar seperti hasil hutan (kayu, rotan, damar dan gaharu), perairan (ikan di bagan siapi-api penghasil nomor 2 terbesar di dunia saat itu), minyak bumi (sampai saat ini) dan perdagangan. Sultan pada prinsipnya hanya diberikan gaji oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Bentuk kekuasaan yang diberikan Pemerintah Belanda kepada Sultan hanyalah di bidang adat istiadat dan keagamaan.

Penciutan wilayah kekuasaan Sultan yang seolah-olah dibuat oleh Sultan sangat berdampak pada hilangnya hak-hak rakyat kerajaan Siak. Hak hutan dan ulayat kepunyaan kepala suku dan batin hilang. Hutan dan tanah ulayat yang selama ini digunakan secara bebas sebagai sumber penghasilan rakyat juga hilang. Satu-satunya hak yang masih bisa dimiliki oleh rakyat hanyalah hak pancung alas (hak garap). Rakyat yang ingin menggarap tanah harus mendapatkan surat pemakaian (grand) dari Sultan. Inilah bentuk regulasi yang dikeluarkan Sultan sehubungan dengan pengelolaan tanah oleh rakyat Siak. Politik pecah belah dengan penciutan wilayah kekuasaan Sultan yang berakibat pada hilangnya hak kelola rakyat ternyata tidak memiliki pengaruh kepada hubungan rakyat dengan Sultan.

Selama kurun waktu 10 tahun sekitar tahun 1929 sampai dengan tahun 1939 beliau memberikan beasiswa kepada anak-anak negeri yang berbakat dan cerdas. Sebagian dari mereka beliau kirim ke Batavia, Medan dan Bukit Tinggi. Melalui pendidikan, Sultan seakan menyadarkan rakyatnya bahwa penjajahan dan penindasan harus segera disingkirkan.

Sultan Syarif Kasim masih bisa menggerakan roda ekonomi kerajaan dan rakyatnya untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatannya di samping menerima bantuan Belanda. Terdapat dua sumber aktivitas ekonomi yang menunjang pendapatan sultan dan rakyatnya pada saat itu yakni di bidang perkebunan dan perikanan. Perkebunan yang ada di wilayah Kerajaan Siak dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu perkebunan Raja dan perkebunan Rakyat. Perkebunan Raja terdiri dari perkebunan karet, sagu dan perkebunan kelapa.

Kegiatan perkebunan ini merupakan salah satu bagian dari harta kerajaan yang dikuasai oleh Sultan Syarif Kasim. Hasil perkebunan ini dijadikan sebagai sumber

pendapatan kerajaan untuk membiayai berbagai kebutuhan kerajaan. Rangkaian kegiatan perekonomian Sultan lainnya adalah memasarkan produk yang dihasilkan oleh kerajaan dan rakyatnya. Secara umum, seluruh rangkaian kegiatan perdagangan kerajaan Siak berorientasi ekspor. Semua produk-produk tersebut diekspor ke negara tetangga seperti Singapura. Proses perdagangan ekspor ke Singapura tidak sulit dilakukan oleh Sultan, karena beliau memiliki harta turunan yang cukup banyak dari ayahandanya di Singapura berupa rumah dan toko.

Memajukan pendidikan sebagai bentuk perlawanan sultan terhadap Belanda, juga dimaksudkannya untuk memajukan dan mencerdaskan rakyatnya dalam upaya mensejahterakan rakyat. Latarbelakang pandangan Sultan inilah, menyebabkan beliau dengan semangatnya dan dibantu oleh permaisurinya Tengku Agung terus mengembangkan berbagai corak pendidikan bagi rakyatnya. Rencana serta realisasi pengembangan pendidikan ini dilakukan oleh Sultan dan Permaisuri dengan sebaik-baiknya. Proses pengembangan pendidikan dilakukan oleh kerajaan dengan sebuah rencana tahunan. Rencana tahunan untuk pengembangan pendidikan dilakukan melalui proses rapat tahunan kerajaan. Muatan rapat tahunan di samping merencanakan di bidang pemerintahan khususnya pendidikan, juga membuat rencana tentang keuangan. Kegiatan inilah yang menjadi muara adanya rapat keuangan yang berimplikasi kepada aktivitas akuntansi pada saat itu.

BAB 7

INTEGRITAS HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN SULTAN SYARIF KASIM II

7.1. AWAL MENGALIRNYA KEPERCAYAAN

Sultan Syarif Kasim sebagai Sultan Kerajaan Siak Sri Inderapura yang terakhir memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dengan rakyatnya. Proses pengakuan dan pengangkatan Raja Siak Sri Inderapura tidak terlepas dari adanya kontribusi para Datuk dan Kepala Suku mewakili rakyat berupa kepercayaan yang tinggi terhadap Sultan yang berkuasa. Kontribusi terhadap Sultan juga diberikan oleh rakyatnya karena kepribadian yang dimiliki oleh Sultan. Adanya kontribusi dari rakyat serta adanya kepribadian yang tinggi di mata rakyat kepada Sultan inilah yang menjadi harta tak ternilai bagi Sultan sebagai Raja Kerajaan Siak.

Harta yang tak ternilai ini terus-menerus ada pada Sultan-sultan Kerajaan Siak Sri Inderapura dan terpelihara secara turun-temurun sampai kepada rajanya yang terakhir yakni Sultan Syarif Kasim II. Mengalirnya kepercayaan rakyat dan adanya potensi pribadi Sultan Syarif Kasim menjadi bagian dari integritas hak dan kewajiban untuk dipertanggung jawabkannya. Penjelasan akan dimulai dari munculnya integritas hak dan kewajiban Sultan Syarif Kasim dan diakhiri dengan penjelasan tentang pertanggungjawabannya. Penjelasan tentang integritas hak dan kewajiban dimulai dari ekuitas (modal) sebagai syarat mutlak dalam sistem kerajaan yakni seorang raja atau sultan harus memiliki pengesahan atau sah sebagai sultan untuk menguasai harta kerajaan bagi pemenuhan tanggung jawabnya kepada rakyat. Berikut diuraikan aksidental masing-masing integritas hak dan kewajiban serta pertanggungjawabannya

yang dimulai dari analisis tentang ekuitas atau modal dan kewajiban di satu sisi. Kemudian dilanjutkan hasil analisis yang terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan harta berwujud dan tak berwujud dari Sultan Syarif Kasim.

Kepercayaan rakyat yang diwakili para Datuk Lima Suku berimplikasi kepada adanya kewajiban Sultan Syarif Kasim untuk membuktikannya dalam berbagai tindakan dan kebijakan atas rakyatnya. Ruang lingkup rakyat dalam kenyataannya tidak terbatas pada Rakyat Siak saja, namun lebih luas dari itu dapat diberikan oleh sultan. Hal ini sangat bergantung pada kebijakan yang dilakukan sultan bagi kemaslahatan rakyat secara lebih luas. Kepribadian sultan, harta kerajaan yang diamanahkan kepada sultan dan intelektualitas yang dimiliki, juga sebagai modal bagi sultan untuk digunakan dalam mewujudkan kemaslahatan bagi kerajaan dan rakyat secara bertanggung jawab. Penjelasan tentang integritas hak dan kewajiban serta pertanggungjawabannya dianalisis berdasarkan berbagai literatur yang diperoleh selama penulisan dan keterangan para informan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi tentang Sultan Syarif Kasim. Akumulasi berbagai keterangan dijadikan sebagai dasar untuk memberikan nilai-nilai yang tidak lepas dari unsur subjektifitas peneliti. Uraian tentang integritas hak dan kewajiban serta pertanggungjawabannya dijelaskan selengkapnya berikut ini.

7.2. KEPRIBADIAN SANG RAJA

Figur Sultan Syarif Kasim II terkenal sangat bersahaja dan penyayang kepada Rakyat Negeri Siak. Beliau dalam kesehariannya juga menunjukkan rasa kasih sayang dan suka menanyakan siapa orang tua dari orang yang ditanya khususnya kepada anak-anak. Wawancara dengan informan Nizami, menggambarkan bagaimana beliau menyapa anak-anak yang dijumpainya sebagai berikut.

> "Kata-kata yang paling sering digunakannya adalah; *"oi budak!, dikau anak siapo?*. Beliau sangat menyayangi anak-anak dan sangat memperhatikannya".

Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1893 atau 11 Jumadil awal 1310 H di Siak Sri Inderapura dan Ibundanya bernama Tengku Yuk. Beliau diberi nama Sultan Assaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifudin yang bermakna Kasim yang mulia, yang rajin, hamba yang mulia dan pedang agama yang agung (Jamil, 2010). Beliau adalah anak tunggal dari Sultan Syarif Hasyim dengan istrinya Tengku Yuk, namun memiliki seorang saudara seayah yakni Tengku Long Putih dengan ibundanya bernama Encik Rafe'ah dari kalangan biasa. Meski memiliki saudara kandung seayah, posisi beliau sebagai anak turunan bangsawan lebih kuat dari saudara kandungnya Tengku Long Putih menurut garis turunan ibu. Struktur keturunan ini yang memperkuat dan menegaskan secara jelas bahwa beliau adalah pewaris tahta tunggal dari Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Berbeda dengan keturunan raja-raja sebelumnya yang memiliki banyak putra-putri baik dari kalangan bangsawan atau dari kalangan biasa, maka Sultan Syarif Kasim II dapat dikatakan terhindar dari hingar-bingar perebutan kekuasaan dari keluarga sendiri. Saudara seayah beliau satu-satunya Tengku Long Putih selama hidupnya lebih memilih untuk tinggal di Singapura (Jamil, 2010). Latarbelakang keluarga ini tentu saja sangat memengaruhi kepribadian beliau semenjak kecil yakni Tenang, bersahaja dan penyayang. Pandangan beliau tentang kehidupan di dasari pada landasan yang tenang, bersahaja, damai dan cinta kasih. Kondisi lingkungan dan kerajaan yang tertekan oleh campur tangan Belanda pada saat itu, tentu saja tidak disenangi beliau apalagi yang berbau penindasan. Hal inilah yang menyebabkan beliau tidak akan pernah setuju dan memihak kepada penindasan Belanda terhadap kerajaannya dan lingkungannya. Beliau seorang pribadi yang sangat menantang penjajahan, penindasan dan bentuk kezaliman lainnya.

Sultan Syarif Kasim memiliki kepribadian *philos* yang dalam bahasa Yunani berarti cinta dan juga Sophia yang berarti pengetahuan atau kebijaksanaan atau kearifan. Beliau adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan atau kearifan. Cinta akan pengetahuan telah dibuktikan beliau pada saat harus memilih apakah mau melanjutkan studi atau segera menerima tongkat tahta Kerajaan Siak pada saat itu. Pilihan beliau jatuh kepada tetap ingin melanjutkan studi yang lebih tinggi (Jamil, 2010). Pilihan ini tentu saja tidak akan diambil beliau kalau beliau sendiri tidak cinta pada ilmu pengetahuan. Pilihan ini tentu saja didukung oleh situasi di kerajaan yang telah memaklumi bahwa beliau adalah Putra Mahkota yang paling berhak untuk menerima tahta kerajaan, sehingga dapat dengan tenang menuntut ilmu di Batavia (Jakarta sekarang). Ini merupakan bagian dari kesempatan yang dapat memengaruhi latarbelakang yang dimiliki oleh Sultan Syarif Kasim. Kepribadian sebagai seorang ilmuan yang lebih banyak menggunakan pikiran dari pada mengikuti hawa nafsu tanpa berpikir.

Kepribadian lainnya yang sangat menonjol dari Sultan Syarif Kasim adalah seorang yang sangat agamis sesuai dengan harapan keluarganya memberi nama Kasim yang berarti pedang agama yang agung. Kepribadian agamis yang dimiliki beliau memengaruhi gaya beliau dalam memimpin kerajaan. Meskipun Kerajaan Siak bukanlah Kerajaan Islam, tetapi prinsip-prinsip Islam diterapkannya sepanjang beliau dapat melakukannya dan dapat mengusahakannya (Jamil, 2010). Beliau memegang prinsip-prinsip Islam secara konsisten dalam memerintah kerajaan dan sebagai simbol perlawanan beliau terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Kepribadian agamis beliau sangat didukung oleh pandangan masyarakatnya bahwa seorang sultan selain sebagai pemimpin negeri, juga sebagai Kalifatullah atau wali Allah atau bayangan Allah di muka bumi (Lutfi,1983).

Pandangan beliau terhadap harta sangat jauh berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu. Kepribadian yang sangat mencintai ilmu dan pribadi yang sangat agamis memengaruhi pandangan sultan terhadap harta. Beliau berpandangan bahwa harta hanya sebagai sebuah titipan dari yang maha kuasa. Oleh sebab itu, beliau bukanlah seorang raja yang suka menumpuk harta dalam masa kejayaannya. Hal ini dibuktikan beliau dengan tidak terlalu tertarik untuk mengurusi harta sebagai milik pribadi. Wawancara dengan informan Tenas Effendy mengkonfirmasi hal tersebut seperti berikut ini.

> "Beliau memang sangat berbeda pandangan soal harta dengan orang kebanyakan. Beliau berpandangan dengan pernyataan "saya tidak mau memegang harta karena itu najis". Jadi beliau tak mau pegang harta".

Pernyataan ini merupakan pandangan beliau terhadap keberadaan harta kerajaan yang sangat berlimpah dan sangat memengaruhi pandangan beliau dalam pengelolaan harta. Harta yang merupakan titipan Allah SWT hanya digunakan sesuai dengan peruntukkannya yakni kemaslahatan bagi kerajaan dan rakyatnya. Bagi sultan, harta diukur dari sisi fungsinya untuk kemaslahatan rakyatnya, bukan hanya untuk keluarga apalagi pribadi beliau. Pandangan beliau terhadap harta ikut berkontribusi besar dalam keiklasannya untuk menyerahkan harta, rakyat dan kerajaan Siak bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Pandangan Sultan Syarif Kasim terhadap harta ikut membentuk mentalnya yang sangat diperlukan dalam sistem akuntansi harta kerajaan. Mentalitas meminta seseorang untuk memvisikan keterlibatan akuntansi dalam memerangi korupsi (Everett, 2007).

Sebagai pewaris tahta tunggal dari Kerajaan Siak Sri Inderapura, beliau telah nyata-nyata menunjukkan sikap yang jelas atas kondisi saat itu yakni kerajaan berada di bawah tekanan dan kendali Pemerintahan Kolonial Belanda. Beliau tidak akan pernah setuju dan memihak kepada penindasan Belanda terhadap kerajaannya dan lingkungannya. Sebagai bekal bagi perlawanan beliau terhadap situasi saat itu dan masa yang akan datang, beliau sangat ingin melanjutkan studi yang lebih tinggi daripada harus segera menerima tongkat tahta kerajaan. Sikap ini juga bagian dari kepatuhan beliau terhadap agama dan pada saat beliau telah memegang tampuk kerajaan, beliau juga menerapkan prinsip-prinsip Islam sepanjang beliau dapat melakukannya dan dapat mengusahakannya dalam kerajaan. Sikap yang tegas, berpendidikan tinggi, tidak bernafsu menumpuk harta dengan kekuasaannya menyebabkan beliau menjadi seorang sultan yang sangat berwibawa di mata rakyatnya. Nilai-nilai yang dianut beliau sangat mendukung semangat dalam pengelolaan harta dari sisi Islam.

7.3. HARTA KERAJAAN/SULTAN

Secara perlakuan akuntansi, ekuitas harta Sultan Syarif Kasim II berawal dari adanya surat wasiat harta yang dibuat oleh ayahandanya untuk dipermaklumkan bagi seluruh keluarga kerajaan dan turunannya serta bagi rakyat Negeri Siak Sri Inderapura. Surat wasiat tersebut berjudul **"Kemudian Hendaklah Mengetahui"** dan sampai saat ini diletakan pada bagian ruang depan Istana Kerajaan Siak Sri Inderapura. Konstruksi akuntansi pengelolaan harta era Sultan Syarif Kasim dimulai dari surat wasiat ini karena peralihan kekuasaan sesungguhnya diawali pula dengan adanya amanah dari Sultan Syarif Hasyim sebagai Sultan ke XI kepada penerus tahta kerajaan untuk dapat melaksanakannnya.

Berikut disajikan penulisan kembali dari hasil pemotretan langsung surat wasiat yang terletak di ruang depan Istana Kerajaan Siak Sri Inderapura dan dari salinan yang diperoleh dari **informan Nizami Jamil**. Bentuk asli dari surat wasiat atau wakaf ini berbahasa Arab Melayu, **seperti terlampir di bagian akhir buku ini**. Naskah di bawah ini dikutip dari salinan asli bahasa Arab Melayu kedalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh O.K. Muhammad Jamil, ayahanda dari O.K. Nizami Jamil pada tanggal 16 November 1951.

Gambar 7.1: Salinan Ulang Surat Wakaf Yang Dibuat Sultan Syarif Hasyim 1904

KEMUDIAN HENDAKLAH MENGETAHUI

Segala orang-orang yang melihat atas surat wakaf ini bahwasanya MAULANA SULTAN ASSYAIDISSYARIF HASYIM ABDULJALIL SYAIFUDDIN menjadikan ia akan Astanah Asserayah Hasyimiah dan sekalian barang yang meliputi atasnya daripada sekalian jenis kursi-kursi dan segala lampu-lampu dan segala meja-meja dan segala almari-almari dan segala cermin-cermin dan tiap-tiap yang dinamakan perhiasan bagi Astanah Asserayah Hasyimiah tempat kediaman bagi barang siapa-siapa memerintah pekerjaan Sultan Negeri Siak daripada kemudiannya yaitu dari pada segala anak-anak Assyaidis Syarif Hasyim dan anak-anak cucu cicitnya turun-temurun dialah yang tinggal di situ dan sekira-kira jika tiada ada diperoleh seorang juapun dari anak cucu cicitnya yang memerintah pekerjaan Sultan Negeri Siak maka mufakatlah mereka itu atas siapa-siapa yang mendiami ia akan dia daripada mereka itu maka tiada dapat mufakat mereka itu yang keturunan Assyaidis Syarif Hasyim maka kembalilah pekerjaan itu kepada Sultan Negeri Siak Sri Inderapura serta segala wazir-wazirnya menimbang atas pekerjaan yang tersebut itu maka barang siapa yang terpatut pada pikirannya atas keturunan Assyaidis Syarif Hasyim ahli bagi mendiaminya diamlah padanya.

Maka jika tiada mau ia mendiaminya segala mereka yang patut itu maka berkuasalah mereka yang terlebih patut itu ia menyewakan akan dia atas barang siapa yang menghendaki mendiaminya jika ada ia ahli bagi mendiaminya dan membahagiakan ia akan sewanya antara segala orang-orang yang mempunyai hak dari pada segala waris-warisnya Assyaidis Syarif Hasyim yang lain daripada istri-istrinya – lizzakari misla hassil hunsayeini – artinya bahagian seorang laki-laki seumpama bahagian dua orang perempuan dan segala anak-anak mereka itu kemudian daripada mereka itu serta demikian itu jua peraturannya dan tiada boleh dijual atau digadaikan Astanah Asserayah Hasyimiah dan begitu juga segala barang-barang yang meliputinya atasnya daripada barang yang disebutkan di atas ini dan sekira-kira tiada dapat orang yang menyewanya sekali-kali atau dengan sewa yang tiada patut maka meambillah oleh wazir wakaf dari pada hasil wakaf buat upah empat orang laki-laki menunggulah keempat-empatnya dengan memeliharanya bagi memelihara taman-tamannya dan tiap-tiap yang menghiasi ia akan dia hingga bahwa mendapat oleh wazir dan siapa-siapa yang menyewa akan dia atau mendiami akan dia siapa-siapa yang dipatutkan oleh Sultan Negeri Siak dan wazirnya yang ahli bagi mendiaminya telah sungguh dengan benarnya serta termateri signed dan cap kita Assultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin dengan segala menteri-menteri dan saksi-saksi Wabillahi I'tamadi wakafa billahi syahida tammat adanya dan ini surat diperbuat dua satu bunyinya.

Bersambung.....

.....lanjutan

Diperbuat ini surat di dalam Negeri Siak Sri Inderapura pada 27 rabiul akhir tahun seribu tiga ratus dua puluh dua Sanah 1322 bersamaan pada 11 Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Empat 1904.

Dto STARIF HASYIM Cap Sultan	Diperbuat ini surat dihadapan saya Kadhi Siak Sri Inderapura dengan diperoleh segala syarat-syaratnya Dto HAJI IBRAHIM Cap Kadhi Siak
Syahid 'ala zalik Datuk-datuk Empat Suku Siak	
dto MOHAMMAD SALEH Cap Datuk Limapuluh	dto MOHAMMAD KAHAR Cap datuk Tanah Datar

dto Dto STARIF HASYIM Cap Sultan	Diperbuat ini surat dihadapan saya Kadhi Siak Sri Inderapura dengan diperoleh segala syarat-syaratnya Dto HAJI IBRAHIM
Syahid 'ala zalik Datuk-datuk Empat Suku Siak	
dto MOHAMMAD SALEH Cap Datuk Limapuluh	dto MOHAMMAD KAHAR Cap Datuk Tanah Datar
dto MUZAFFAK Cap Datuk Kampar	dto SONTEL Cap Datuk Pesisir
Syahid 'ala zalik nama-nama yan tertera di bawah ini:	
dto TENGKU BESAR Cap Magistraat	
dto MOHAMMAD YUSUF Datuk Warga Dalam	
dto. Alhakir Illah (tidak dapat dibaca) dto. (tidak dapat dibaca) dto. (tidak dapat dibaca)	

Surat wasiat ditujukan kepada semua pihak, baik dari keluarga istana kerajaan maupun kepada Rakyat Negeri Siak Sri Inderapura di kemudian hari. Namun apakah surat wasiat ini sudah dipublikasikan untuk diketahui semua pihak kerajaan dan Rakyat Negeri Siak ketika Sultan Syarif Kasim II berkuasa merupakan ukuran keterbukaan dalam sistem akuntansi harta kerajaan Siak Sri Inderapura. Surat wasiat di atas memiliki beberapa makna yang sangat penting untuk diuraikan dalam kerangka analisis akuntansi harta. Oleh karena surat wasiat ini ditujukan untuk semua pihak di Negeri Siak Sri Inderapura, maka surat wasiat ini merupakan sebuah surat terbuka yang juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi keturunan raja selanjutnya untuk dipatuhi. Makna pertama yang perlu diungkapkan adalah surat wasiat tersebut sebenarnya merupakan awal dari perlakuan akuntansi harta yang harus dilaksanakan oleh Sultan Syarif Kasim

Sani sebagai Putra Mahkota. Keputusan akhir yang dibuat oleh Sultan Syarif Kasim untuk menyerahkan mahkota kepada Pemerintah Republik Indonesia tidak terlepas dari bagian pelaksanaan surat wasiat ini.

Surat wasiat atau wakaf juga menyebutkan harta kerajaan Siak Sri Inderapura yang terdiri dari Istana Asserayah Hasyimiah dan sekalian barang-barang yang ada di dalamnya meliputi semua jenis kursi-kursi, lampu-lampu, meja-meja, segala lemari-lemari, cermin-cermin dan segala perhiasan milik Istana Asserayah Hasyimiah. Pernyataan ini juga merupakan penyebutan daftar rekapitulasi harta yang dimiliki oleh Kerajaan Siak untuk digunakan oleh sultan yang berkuasa selanjutnya. Semua harta kerajaan ini merupakan ekuitas bagi sultan di kemudian hari dalam pengelolaan kerajaan untuk dipertanggung jawabkan. Meskipun tidak diperoleh informasi tentang nilai harta kerajaan saat itu, penyebutan jenis harta sudah cukup memadai dalam mengungkapkan daftar kekayaan kerajaan. Penentuan berapa nilai suatu harta pada saat itu di Negeri Kerajaan Siak belum menjadi trend dalam pengungkapan laporan pertanggungjawaban harta. Laporan pertangungjawban harta diwujudkan dalam pemanfaatan harta secara langsung bagi kemaslahatan rakyatnya, bukan melalui laporan tertulis untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan seperti kepada Datuk dan Kepala suku. Sifat perolehan harta mungkin lebih banyak dilakukan melalui pembangunan sendiri, hadiah, pembelian dan mungkin juga dengan barter barang. Istana Kerajaan Asserayah Hasyimiah yang dibangun dalam kurun waktu 9 tahun sulit untuk ditentukan berapa nilainya. Begitu juga dengan semua isi istana yang sebagian besar diperoleh dari Eropa tidak mencantumkam berapa harga perolehannya. Namun kalau dinilai untuk saat sekarang, harta yang terdapat di istana bernilai sangat tinggi.

Wasiat yang paling menarik dari Sultan Syarif Hasyim adalah siapa pun dari anak, cucu, cicit dan keturunan selanjutnya yang tidak bersedia atau tidak dapat menjadi sultan, maka agar menyerahkan Istana Siak dan seisinya kepada Pemerintah yang berkuasa di Siak Sri Inderapura. Kepada keturunan yang berhak dari Sultan Syarif Hasyim atau dengan prediket apa pun sebagai turunan tidak boleh mencampurinya apabila telah diserahkan kepada Pemerintah yang berkuasa di Negeri Siak. Pesan ini mengandung makna bahwa dari sultan ke XI Siak Sri Inderapura telah mewakafkan istana dan seisinya kepada rakyat Negeri Siak melalui pemerintah yang berkuasa apabila dari turunannya tidak ada yang dapat menjadi sultan dan tidak ada kata mufakat yang paling berhak untuk menempati Istana Asserayah Hasyimiah. Wasiat ini juga dapat dimaknai bahwa akuntansi pertanggungjawaban harus dilaksanakan oleh sultan berikutnya kepada rakyat melalui pemerintah yang berkuasa. Pesan-pesan inilah yang menjadi dasar bagi Sultan Syarif Kasim dalam membuat kebijakan tentang harta Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Wasiat Sultan Syarif Hasyim juga mengamanatkan kepada keluarga turunannya di kemudian hari untuk mendiami istana dengan cara menyewa. Hasilnya harus

dibagikan kepada keluarga turunan lainnya sesuai dengan Syariah Islam di mana turunan laki-laki mendapat dua kali lipat dari turunan perempuan. Wasiat ini juga menjadi pedoman pembagian pendapatan yang harus dijalankan oleh sultan atau keluarga turunan lainnya di kemudian hari. Meskipun istana dan seisinya dapat disewa oleh salah satu turunannya dan membagikan sewanya kepada turunan lainnya yang berhak, namun istana tidak boleh digadaikan apalagi dijual oleh turunannya di kemudian hari. Ketentuan amanat hanya membolehkan istana untuk disewakan kepada turunan yang mau mendiami dan membagikan sewanya kepada keluarga yang lain atau diserahkan kepada Pemerintah Siak yang berkuasa di kemudian hari. Ketentuan ini dapat dimaknai sebagai bagian dari standar akuntansi pengelolaan harta pada saat itu yang telah mengatur tentang pembagian pendapatan, sewa menyewa dan pemeliharaan harta.

Bagian terakhir dari surat wasiat atau wakaf yang ditandatangani oleh tokoh masyarakat dan para Datuk Kerajaan Siak pada saat itu adalah istana harus tetap dipelihara. Apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak satupun keturunan yang berhak dapat mendiami istana, maka wajib mengupah empat orang lelaki untuk memelihara istana yang begitu luasnya. Pesan ini dijalankan sampai saat ini sehingga istana tersebut sampai saat ini masih berdiri kokoh dan dapat disaksikan di Kabupaten Siak Sri Inderapura. Istana sebagai simbol kerajaan yang pernah berdiri di Siak Sri Inderapura Riau sesuai dengan amanat dalam surat wakaf menjadi kebanggaan Rakyat Siak yang harus dipelihara oleh Pemerintah yang berkuasa saat ini. Kepemilikan istana jatuh kepada Rakyat Siak dengan pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Sri Inderapura Provinsi Riau.

Surat wasiat atau surat wakaf yang dibuat oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1904 sebagai sultan ke sebelas dan sekaligus ayahanda dari Sultan Syarif Kasim menjadi bagian dari ekuitas yang dapat melegalkan tindakan Sultan Syarif Kasim dalam memimpin kerajaan bagi mensejahterakan rakyatnya. Surat ini juga memberikan semacam penyertaan modal Sultan Syarif Kasim untuk mengelola istana bagi rakyatnya. Dengan demikian, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa awal dari perlakuan akuntansi di Kerajaan Siak Sri Inderapura adalah dari surat wasiat atau surat wakaf ini. Surat wasiat ini juga merupakan bagian dari ekuitas Sultan Syarif Kasim dalam menjalankan pemerintahan kerajaan.

7.4. KEWAJIBAN TERHADAP RAKYAT KERAJAAN

Tanggung jawab Sultan Syarif Kasim terhadap rakyatnya adalah sebuah kewajiban yang harus direalisasikan dalam sistem kerajaan. Realisasi tanggung jawab akan sangat menentukan perkembangan dari sebuah kerajaan yang tercermin dalam bentuk maju atau tidaknya negeri kerajaan tersebut. Maju tidaknya perkembangan sebuah kerajaan pada saat itu terlihat dari ramai atau tidaknya negeri kerajaan tersebut didatangi oleh

para saudagar dalam melakukan transaksi perdagangan. Ukuran ini juga digunakan oleh Pemerintah Kolonial untuk mengakui keberhasilan seorang sultan yang berkuasa pada saat itu. Bagaimana upaya Sultan Syarif Hasyim untuk meramaikan Pasar Siak agar terlihat oleh Belanda adanya kegiatan rakyat dalam perdagangan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa daerah yang menjadi pusat keramaian dianggap sukses dalam sistem kerajaan.

Semasa Sultan Syarif Kasim II, tanggung jawab untuk memajukan Negeri Siak telah direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan tanggung jawabnya untuk memajukan Negeri Siak telah diakui oleh seorang penulis yang mengatakan "Hanya di daerah inilah terdapat kelas pedagang pribumi yang kuat dan mereka melakukan perdagangan karet dan kopra yang tumbuh di dalam wilayah kesultanan". Pada tahun 1924, ada 109 pedagang pribumi di Siak dengan penghasilan lebih dari *f* 760 per tahun (Reid, 2012), dan salah satu tokoh pengusaha sukses di maksud ditulis kembali oleh Thohiran (2012). Apabila ukuran kemajuan dilihat dari tanggung jawab untuk memajukan negeri dan untuk mengsejahterakan rakyatnya, maka masa Sultan Syarif Kasim kewajiban tersebut telah dapat dipenuhi dengan baik. Kecintaan rakyat terhadap rajanya sangat ditentukan oleh bagaimana raja tersebut dapat menunjukkan cintanya kepada rakyat.

Keberadaan sebuah kerajaan sangat bergantung kepada rakyat atau ada tidaknya rakyat yang dipimpin. Seorang sultan berupaya untuk menjadikan wilayahnya sebagai pusat keramaian sehingga keberadaanya diakui. Sementara rakyat pada masa kerajaan dulu akan dengan mudah untuk mendatangi dan meninggalkan suatu daerah kerajaan. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan agar rakyat tetap berada pada suatu wilayah kerajaan, tak jarang seorang sultan sengaja untuk mencegah orang agar tidak meninggalkan daerahnya. Tindakan ini terjadi pada masa awal Sultan Syarif Hasyim berkuasa di Kerajaan Siak. Menurut catatan Tengku Bagus, saat terjadi pergolakan perebutan kekuasaan secara tidak wajar, Tengku Ngah panggilan Sultan Syarif Hasyim sengaja menahan orang-orang agar tidak meninggalkan Negeri Siak dengan mengupah penjaga di perbatasan untuk tindakan pencegahan (Depdikbud, 1989). Pristiwa ini dibenarkan oleh salah seorang informan M Toha dari hasil wawancara berikut.

"Dari informasi yang saya terima dari Datuk saya Tengku Bagus, bahwa "perebutan kekuasaan pada masa Sultan Syarif Hasyim berlangsung secara kurang wajar". Terjadi pergolakan atau penolakan dari keluarga serta Rakyat Siak, sehingga banyak yang pergi meninggalkan Siak".

Kejadian ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa selama kewajiban raja atas rakyatnya terpenuhi, maka rakyat dengan senang hati untuk tetap menjadi bagian dari wilayah kerajaan dan sebaliknya. Hal ini juga dapat dimaknai apabila seorang debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dengan baik, maka pihak kreditur dengan senang hati pula untuk tetap mendukung debitur berapa pun juga dana yang dibutuhkan.

7.5. KEWAJIBAN TERHADAP RAKYAT INDONESIA

Tanggung jawab Sultan Syarif Kasim kepada rakyat ternyata tidak sebatas hanya kepada rakyat Negeri Siak saja, lebih dari itu beliau menunjukkan tanggung jawabnya kepada rakyat Indonesia. Tanggung jawab ini dibuktikannya dengan menyerahkan hartanya dan Mahkota kerajaan sebagai simbol kedaulatannya bagi kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia (Brinkgreve and Retno, 2009). Sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk ukuran kerajaan yang pernah mengalami masa-masa keemasan. Beliau memang sangat berbeda dengan ayahandanya yang memang seorang pengusaha. Perbedaan sifat beliau dengan ayahandanya terungkap dalam wawancara dengan informan Tenas Effendy yang mengkonfirmasi hal tersebut sebagai berikut.

> "Beliau tidak punya anak sehingga hidupnya hanya memberikan dan membantu orang saja, termasuk mengangkat anak dari saudaranya". Sifat membantu dan memberi inilah yang menyebabkan beliau dicintai oleh rakyatnya. Namun, sifat membantu dan memberi ini ternyata tidak terbatas kepada keluarga dan rakyat Negeri Siak saja, tetapi juga bagi Rakyat Indonesia sesuai dengan yang dapat beliau lakukan.

Tanggung jawab sultan terhadap Rakyat Indonesia dibuktikan dari sumbangannya bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau secara ikhlas menyerahkan harta kerajaan bersama dengan rakyatnya bagi kemerdekaan Indoenesia yang pada saat itu membutuhkan dana. Pernyataan sultan adalah pernyataan yang sangat ditunggu-tunggu Rakyat Siak pada saat itu karena sultan menjadi panutannya selama ini. Keikhlasan sultan pada saat bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia terungkap dari tulisan tangan Muhammad Jamil yang menjadi Asisten Pribadi Sultan Syarif Kasim pada saat itu sebagai berikut.

> "Sultan Syarif Kasim sudah membaca keinginan rakyatnya dan menunggu gerakan dari rakyat untuk mendukung kemerdekaan R.I. Setelah itulah beliau berpidato: menyerahkan Kerajaan Siak, rakyat serta hartanya untuk perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Inilah yang ditunggu-tunggu Rakyat Siak karena Rakyat Siak kebiasaannya adalah mematuhi perintah dari sultan".

Mengenai realisasi sumbangan sultan bagi Kemerdekaan Republik Indonesia juga terkonfirmasikan dari M. Toha yang memiliki catatan dari pihak keluarga istana dari pihak Tengku Bagus dalam pernyataan berikut.

> "Catatan yang tersimpan dan dipegang oleh saya menjelaskan bahwa, pada tanggal 1 November 1945, Sultan Syarif Kasim dalam upacara yang semarak di depan Istana Asseraiyah Hasyimiah menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000,- untuk keperluan perjuangan Negara Republik Indonesia dan berjanji jika Negara menghendaki akan menjual seluruh barang-barang istana untuk perjuangan

kemerdekaan Republik Indonesia. Saya memperkirakan nilai Rp 20.000 tersebut dapat menggaji sebanyak 1.334 orang guru, karena gaji guru pada saat itu Rp 15. Apabila nilai tersebut disesuaikan dengan gaji seorang guru Tahun 2005 kira-kira sebesar Rp 1000.000, maka nilai Rp 20.000 sama saja dengan Rp 1.334.000.000,. Nilai materi ini jauh akan lebih besar apabila dilihat sumbangan beliau tahap kedua sebesar *f* 13.000.000 Gulden pada tahun 1949.

Tentu saja jumlah materi ini tidak lengkap apabila tidak melihat dari sumbangan moril yang diberikan beliau bagi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sikap perlawanan yang bisa Beliau lakukan semasa memimpin Kerajaan Siak dan sesudah pemerintah memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945 adalah bentuk kecintaan dan tanggung jawabnya kepada Rakyat Indonesia umumnya.

Sambutan sultan atas Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di samping tanggung jawabnya kepada Rakyat Siak khususnya dan Rakyat Indonesia umumnya, juga dilatarbelakangi oleh akumulasi perlawanannya terhadap penjajahan baik yang dilakukan oleh Belanda maupun Jepang terhadap Rakyat Siak dan Indonesia lainnya. Berbagai bentuk perlawaan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya merupakan bentuk akumulasi sikap perlawanan yang ditunjukkan beliau terhadap Pemerintah Kolonial dan Jepang yang menggantikan peran Belanda. Sikap takut dengan Pemerintah Indonesia yang membumi hanguskan kerajaan yang tidak bersedia bergabung dengan Pemerintah tentu saja jauh dari sikap sultan jika dilihat dari perannya sebelum Indonesia merdeka. Berdiri sendiri dalam sebuah Pemerintahan Republik Indonesia menjadi bagian dari bentuk cintanya kepada Rakyat Siak dan Indonesia secara keseluruhan.

7.6. PERTANGGUNGJAWABAN "MAHKOTA RAJA"

Sumber integritas hak dan kewajiban yang diterima dari Sultan Syarif Hasyim atau Sultan Siak ke sebelas dan dari Rakyat Siak pada saat itu menyebabkan Sultan Syarif Kasim berhak menggunakan mahkota yang dibuat oleh sultan pendahulunya. Mahkota Kerajaan adalah simbol raja yang dipercaya oleh rakyat dan kerajaan untuk memimpin Negeri Siak. Sebagai sebuah simbol, maka mahkota sebagai lambang kedaulatan kerajaan hanya berhak diberikan dan dipakai oleh raja yang mendapat amanah untuk memimpin Kerajaan Siak. Mahkota sebagai sebuah simbol secara fisik dan non fisik juga sangat bernilai tinggi. Nilai secara fisik menunjukkan makna-makna yang dapat diungkapkan dari setiap komponen fisiknya. Sedangkan nilai secara non fisik dimaknai sebagai raja yang berhak dan berkuasa untuk memimpin Negeri Siak. Mahkota Kerajaan yang asli saat ini dapat disaksikan di Museum Nasional Jakarta, sedangkan yang ada di Istana Siak maupun di Museum Daerah Pekanbaru merupakan mahkota replikasi.

Mahkota Kerajaan Siak Sri Inderapura dibena atau dibuat oleh Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (Sultan Kasim I) Ibni Wali Sultan Muhammad (Toha, 2012). Mahkota Kerajaan Siak ini terbuat dari emas murni bertatah atau bertaburkan permata intan, berlian dan permata-permata lainnya seperti batu zamrud dan batu delima. Mahkota emas ini dihiasi tiga bunga teratai mekar bertaburkan batu merah delima dan intan serta dihiasi pula dengan sulur-sulur benang emas. Daun-daun emas kecil dikaitkan dengan cincin menggantung di keempat lengkungan mahkota. Mahkota Siak di samping menjadi lambang kerajaan juga memberikan makna kejayaan dan kebesaran dari Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Pada bagian tengah depan mahkota terdapat sebuah tulisan Arab Melayu singkat yang dapat menambah keindahan mahkota. Makna tulisan Arab Melayu yang tertera di Mahkota Raja Siak berkaitan dengan penyerahan diri terhadap yang maha kuasa. Hal ini terungkap dari sebuah wawancara dengan Hasan Masri yang ikut serta berdialog bersama informan Nizami berikut.

Kalau dilihat "dari sisi kosa kata, maka tulisan tersebut dibaca *Badra tajjalli* yang berarti Tuhan Yang Agung. Namun kalau dibaca dari sisi maknanya maka berarti mintalah segala sesuatunya kepada Allah".

Pendapat Hasan Masri ini persis sekali dengan pendapat *Ustad atau Imam Majid Raya* yang ditemui di halaman makam Sultan Alamuddin Syah". Imam Masjid tersebut mengatakan bahwa secara makna, tulisan tersebut memiliki makna berserah diri kepada Allah SWT dalam segala hal. Mahkota Kerajaan memberikan informasi bahwa Kerajaan Siak meskipun tidak dinyatakan sebagai Kerajaan Islam, namun semangat dan kedaulatan yang dibangunnya sangat Islami. Oleh sebab itu, Penyerahan diri dan hanya meminta sesuatunya kepada Allah SWT memberi makna bahwa Kerajaan Siak sesungguhnya merupakan Kerajaan Islam. Sultan Syarif Kasim telah mempertanggung jawabkan tindakannya sesuai dengan apa yang tertulis di Mahkota Kerajaan yakni hanya meminta sesuatunya dan berserah diri hanya kepada Allah SWT.

Mahkota Kerajaan Siak yang saat ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta memiliki nilai yang sangat tinggi dari dua sisi yakni nilai sejarah dan nilai fisik. Nilai sejarah dari Mahkota tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi karena saksi bisu dari mahkota yang pernah dipakai oleh tiga sultan yakni sultan ke sepuluh, kesebelas dan kedua belas. Umur Mahkota tersebut kalau dihitung dari saat pembuatannya sekitar tahun 1874 M pada masa Sultan Syarif Kasim I sampai dengan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 adalah 72 tahun dan telah berumur 141 tahun pada Tahun 2014. Nilai fisik Mahkota tersebut juga sangat tinggi karena memang terbuat dari bahan emas, intan, berlian dan permata lainnya. Oleh karena Mahkota kerajaan secara fisik sangat bernilai tinggi, Sultan Syarif Kasim II yang merupakan cucu dari Sultan Syarif Kasim I menghibahkan Mahkota kerajaan ini kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu bantuan Kerajaan Siak terhadap perjuangan

kemerdekaan Republik Indonesia (Toha, 2012). Hibah Mahkota ini juga di maksudkan sebagai pengakuan atas kedaulatan Negara Republik Indonesia (Brinkgreve. F, 2010).

7.7. PERTANGGUNGJAWABAN "ISTANA ASSERAYATUL HASYIMIAH"

Tempat kediaman bagi pemangku Raja Siak Sri Inderapura adalah istana kerajaan yang diberi nama Astanah Asserayah Hasyimiah. Istana ini dibangun semasa Sultan Syarif Hasyim (Raja ke sebelas) selama Sembilan tahun yakni dari tahun 1890 M sampai dengan tahun 1899 M (Effendy dan Effendy, 1972). Sampai saat ini, Istana Asserayah Hasyimiah berdiri megah dan kokoh di Ibu Kota Kabupaten Siak Sri Inderapura Riau. Kemegahan Istana Asserayah Hasyimiah mengundang Bangsa Eropa untuk memberinya dengan nama *The Sun Palace From East* (istana matahari timur). Arsiteknya yang pada saat itu disebut dengan kepala tukang adalah Van De Worde, seorang insinyur berkebangsaan Perancis (Jamil, 2010). Disain bangunannya merupakan gabungan dari arsitektur Eropa, India dan Timur Tengah, sehingga secara fisik terlihat sangat megah. Wawancara tentang kapan dimulainya pembagunan Istana Siak terkonfirmasi dalam wawancara dengan. Nizami berikut ini.

> "Istana Asserayah Hasyimiah dibangun setelah Sultan Syarif Hasyim pulang dari lawatan ke Eropa".

Istana itu dapat dibangun kemungkinan karena hubungan baiknya dengan Ratu Hilma ibunda dari Ratu Wihelmina. Bahkan pada saat beliau menghadiri undangan Ratu Hilma pada acara pernikahan anaknya, Sultan Syarif Hasyim bersama beberapa Raja lainnya mendapat kehormatan untuk menaiki kereta kencana dengan pengawalan keamanan berkuda". Interior dan perabotan didatangkan dari Jerman, sedangkan batu bata dibawa dari Singapura. Istana Asseraiyah juga memiliki ornamen yang bermakna dan diletakkan pada bagian pintu gerbang masuk ke istana. Ornamen tersebut terletak di atas puncak dari pintu gerbang istana berupa patung burung elang yang terbuat dari perunggu. Wawancara dengan Nizami berikut, menjelaskan makna patung burung elang yang terbuat dari perunggu.

> "Burung elang menggambarkan sebuah kekuasaan yang dapat mencermati kawasan wilayah kerajaan".

Bentuk kawasan komplek istana yang dulunya disebut dengan koto istana terdiri dari empat bagian yakni bagian utama Istana Asserayah Hasyimiah atau istana besar, bangunan istana peraduan, bangunan istana limas, dan bangunan istana panjang (Toha, 2012). Istana utama dibangun pada masa Sultan Syarif Hasyim, sedangkan bangunan istana limas dibangun pada masa Sultan Syarif Kasim II. Istana peraduan digunakan untuk tempat tinggal Sultan Syarif Kasim II. Istana limas digunakan untuk

tempat tinggal kaum kerabat perempuan dari sultan dan tempat penyimpanan hasil-hasil perkebunan yang dipergunakan sebagai kebutuhan harian sultan dan keluarga. Di samping itu, istana limas juga digunakan sebagai tempat mengaji kaum perempuan. Istana panjang digunakan sebagai tempat tinggal mertua sultan dan keluarga.

Bangunan Istana Siak berbentuk kotak bersusun, simetris bilateral dengan tiang-tiang pada sudut bangunan yang menjulang seperti sebuah menara dan dipuncaknya dihiasi dengan burung elang. Bentuk kotak bersusun dan simetris bilateral ini diperindah lagi dengan bangunan berbentuk kubah dari tembaga rangka baja. Namun, saat ini atap kubahnya sudah dibongkar dan tidak kelihatan lagi menghiasi bangunan istana. Dinding istana terbuat dari batu bata yang sangat tebal. Ketebalan dinding dari batu bata tersebut bervariasi yakni mulai dari 40 cm sampai dengan 60 cm. fasadnya berbentuk balok lengkung pada kusen dan pada *arcade* pintu masuk utama. Istana Asserayah Hasyimiah ini terdiri dari dua lantai dengan luas totalnya 28.030 m^2. Keaslian fisik bangunan istana dikonfirmasi dalam wawancara dengan koordinator istana yakni Zainuddin sebagai salah satu informan sebagai berikut.

> "Bentuk fisik dari istana ini sejak Sultan Syarif Kasim II masih asli. Tidak ada perubahan bangunan secara signifikan, kecuali hanya merubah cat saja dari lama ke cat yang baru. Warna istana dari dulunya memang kuning dan warna kuning adalah warna kebesaran Kerajaan Siak".

Konfirmasi dengan koordinator istana menegaskan bahwa bentuk fisik istana yang ada sekarang tidak ada perbedaan dengan bentuk awalnya. Selama diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, istana ini tidak pernah direnovasi besar yang berakibat mengalami perubahan bentuk. Pemerintah hanya melakukan pemeliharaan berupa perbaikan ringan dan pengecatan yang tidak berkaitan dengan bentuk fisik istana. Gambar istana dari berbagai sisi dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2 akhir bagian tulisan ini. Istana Asserayatul Hasyimiah merupakan bagian dari penggunaan kekuasaan oleh Sultan Syarif Kasim selama menjadi sultan. Masa Sultan Syarif Kasim istana mengalami pengembangan fisik di bagian sisi lain istana utama. Menempati istana sesuai dengan surat wakaf dan pengembangan yang telah dilakukan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas integritas hak dan kewajiban Sultan Syarif Kasim.

7.8. PERTANGGUNGJAWABAN "LEMBAGA PENDIDIKAN"

Saat Sultan Syarif Kasim menerima estafet kerajaan dari ayahandanya Sultan Syarif Hasyim, beliau telah menerima amanah berupa harta kerajaan yang akan digunakan dalam memimpin kerajaan dan membangun kerajaannya, terutama dalam rangka mencerdaskan rakyatnya. Harta kerajaan yang menjadi bagian dari penggunaan dana kerajaan akan menjadi bagian dari tanggung jawab Sultan Syarif Kasim Sani sebagai

penerus kerajaan. Bentuk tanggung jawab sultan atas penggunaan dana kerajaan yang paling menonjol adalah dengan membangun berbagai lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya pada saat itu.

Sultan Syarif Kasim adalah tokoh pembaharu pendidikan Islam yang dimulai sejak tahun 1917 (Depdikbud, 1984). Beliau menyadari bahwa pendidikan yang diusahakan oleh Belanda di Siak saat itu bukanlah untuk rakyatnya, melainkan untuk kepentingan Belanda, dengan membatasi pendidikan hanya untuk pegawai rendahan di kantor seperti juru tulis dari kalangan ningrat atau bangsawan. Perhatian beliau atas pendidikan sangat besar sekali karena beliau menyadari bahwa dengan pendidikanlah rakyatnya dapat berkembang baik dalam berkehidupan, bersosial, dan beragama sehingga pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat itu sendiri. Memang harus diakui bahwa perubahan sangat mudah dilakukan melalui pendidikan. Selama masa Pemerintahan Sultan Syarif Kasim II, pendidikan di Siak ditekankan pada dua aspek yakni pendidikan agama dan pendidikan umum (Aziz, 1991).

Pendidikan agama menjadi prioritas utama sultan dalam membangun umatnya dan beliau menginginkan agama harus menjadi landasan untuk membangun karakter Rakyat Siak. Keinginan beliau dalam menjadikan agama sebagai landasan untuk membangun karakter rakyatnya terlihat dari banyaknya sekolah berbasis agama yang didirikannya dengan menggunakan harta kerajaan, dibandingkan dengan sekolah umum. Namun sekolah umum tetap mendapat tempat dalam pendidikan semasa beliau menjadi sultan. Pembangunan sekolah umum di samping menjadi perhatian beliau, juga menjadi program Pemerintah Belanda untuk menyelenggarakannya meskipun dibangun atas dasar kepentingan Pemerintah Kolonial dengan sangat membatasi anak didik dari kalangan ningrat atau bangsawan saja yang bisa masuk. Kalangan rakyat jelata tidak akan pernah bersentuhan dengan pendidikan Belanda yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan rakyat biasa di Kerajaan Siak saat itu. Ketidakadilan ini yang menjadi keresahan sultan sehingga peran beliau sebagai seorang raja benar-benar terlihat dan sangat ditunggu-tunggu oleh rakyatnya. Kehadiran beliau untuk menjawab ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyatnya, menjadikan beliau sebagai tokoh sekaligus panutan yang sangat dibanggakan oleh rakyatnya. Sikap dan peran yang diberikan sultan kepada rakyatnya membuktikan bahwa beliau adalah seorang pejuang pendidikan sejati bagi memajukan rakyatnya yang berada dalam kungkungan tekanan penguasa Kolonial. Tentu saja sikap ini tidak akan pernah terlupakan bagi rakyatnya termasuk bagi tokoh-tokoh yang saat sekarang masih ada.

Terdapat banyak sekolah berbasis agama yang didirikan oleh sultan di Siak yang diselenggarakan secara gratis. Berikut ini disajikan tabel beberapa sekolah dengan klasifikasi menurut lelaki dan perempuan, sekolah umum dan agama, serta menurut formal, non formal dan informal yang semuanya diselenggarakan oleh Sultan Syarif Kasim sebagai Raja yang memerintah. Tabel sekolah ini dihimpun dari beberapa

sumber seperti Effendy dan Effendy (1972) dan hasil wawancara langsung dengan beliau sebagai informan, Aziz (1991) yang mewawancara H.M. Yatim dan Misbah Thaib dalam hasil penelitiannya. Tabel juga dilengkapi dengan berbagai pandangan sultan yang mendasarinya untuk mengembangkan pendidikan agama di Siak Sri Inderapura.

Tabel 7.1: Sekolah di Lingkungan Kerajaan Siak 1907 – 1945 Era Sultan Syarif Kasim II

Pendidikan Agama	Pandangan² Sultan	Umum
1. Informal Penyelenggaraan di RumahTangga: • Belajar mengaji • Belajar sholat • Akhlak, dll • Tanggung jawab orang tua	"Pendidikan diawali dari rumah tangga. Orang tua bertanggung jawab untuk menyelenggarakannya di rumah tangga masing-masing. Sabda Nabi yang menjadi dasar beliau "tiap-tiap anak dilahirkan bersih atau kosong. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi (riwayat Tabrani)".	**Volk School/sekolah dasar/ sekolah melayu** • lama pendidikan 3 th, berubah menjadi 5 tahun. • diselenggarakan di kota-kota besar seperti Siak, Bengkalis, Selat panjang, Bagan Siapi-Api. • bahasa pengantar: arab/ melayu • materi: menulis, membaca, dan berhitung. • dapat diiukti anak-anak umum.
2. Nonformal Penyelenggaraan di masyarakat: a. Di rumah. • Pengajian: belajar ngaji, tafsir alqur'an, tauhid, fiqih, dll. • Siswa 15 orang Gratis, namun siswa membantu guru/ust di kebun atau bertani. • Ust dan guru diakui ilmunya oleh masyarakat • siswa berprestasi diangkat sebagai guru pembantu. • Orang tua mempercayai anak sepenuhnya kepada guru, asal anak menjadi pandai.	"Peran Surau dan Masjid sangat dipahami oleh sultan, sehingga beliau membangun Masjid dan Surau atas biaya kerajaan sebanyak-banyaknya sebagai tanggung jawab kerajaan". "Beliau sangat sering mengundang Buya Hamka sebagai penceramah umat".	*Vervolk school*/sekolah sambungan • lama pendidikan 6 th. • terbatas untuk anak-anak pegawai pemerintah Hindia Belanda dan bangsawan. HIS (*Holland Inlanse School*) • khusus anak bangsawan dan nigrat, namun kemudian dibuka untuk umum selama sanggup membayar. • didirikan taun 1915 • sekolah lanjutannya MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di pandang, medan, Jakarta. • Tempat: Suak Lanjut.

b. Di Surau. • Belajr mengaju mulai Jus Amma • Belajar marhaban dan barjanji (membaca dengan irama untuk memuji Allah dan rasulnya saat-saat hari besar islam seperti mauled, isra mi'raj, sunat rasul, khatam alqur'an, akad nikah. Sampai saat ini masih dipertahankan. • Murid 10 rang. c. Di Masjid • Belajar mengaji, dakwah, pendidikan akhlak. • Tempat membicarakan dan memutuskan segala prinsip serta semua masalah dalam kehidupan. • Bahasa pengantar arab dan melayu. • Mashab: Syafi'iah.	"Beliau sangat memahami bahwa Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu sesuai sabda rasul; menuntut ilmu adalah fardhu atas setiap muslim"(sayed ahmad hasyim)". "sultan menyadari bahwa apabila perempuannya baik dalam suatu kerajaan, maka baik pulalah kerajaan tersebut dan apabila perempuannya jelek (tidak berpendidikan, maka hancurlah kerajaan tersebut)".	
3. Formal Khusus Siswa Putra 1. Madrasah Taufiqiah El Hasyimiah • Didirikan 1907 oleh sultan. • Lama pendidikan 7 tahun: 5 tahun tingkat Ibtidaiyah 2 tahun tingkat Tsanawiyah • Celana, baju, topi disediakan sultan • Biaya pendidikan gratis. • Murid berprestasi, dikirim ke padang. • Bahasa pengantar: melayu & arab • Tempat: Siak. Persis di samping istana kerajaan (tempat madarasah tsanawiyah sekarang) • Akhirnya ditutup Jepang. • Khusus siswa putri		

2. Madrasah Nisak • Sekolah pertama putri • Lama pendidikan 7 tahun: 5 tahun tingkat Ibtidaiyah 2 tahun tingkat Tsanawiyah • Akhirnya ditutup Jepang. • Tempat: Siak 3. Sekolah Sultanah Latifah (Latifah School) • Pendidikan sore hari • Didirikan tahun 1926 • Lama pendidikan 3 tahun • Penggagas permaisuri kerajaan • Tempat: Siak Sekolah gabungan 4. Sekolah Agama Jamiyatul Ikhsan • Didirikan tahun 1915 dan pada tahun 1924 berubah menjadi perguruan Mandah. • Tempat: Pekanbaru 5. Sekolah Agama Tarbiyah Islamiah Berubah menjadi HIS (*Holland Inlanse School*) setara SD sekarang. • Tamat HIS dapat melanjutkannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) dalam sekolah yang sama. • Tempat: Selat Panjang.		

Sumber: Dikembangkan dari berbagai sumber

Pandangan Sultan terhadap berbagai pendidikan membuktikan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang sangat mencintai ilmu sehingga sebagai seorang raja, beliau adalah guru bagi rakyatnya. Barangkali hal inilah yang dijadikan alasan oleh seorang penulis asing untuk mengatakan bahwa Sultan Syarif Kasim (1915 – 1946) akan dikenang oleh rakyatnya sebagai sultan yang telah mereformasi pendidikan dan sistem administrasi pemerintahan (Reid, 2012). Pendidikan agama Islam yang dikembangkan di Siak Sri Inderapura di dasarkan pada mashab Syafi'iyah (Aziz, 1991).

Mashab Safi'iyah umumnya dipakai oleh sebagian besar Rakyat Indonesia, meskipun tetap mengakui sebagian dari Mashab Hanafi, Hambali, dan Maliki. Sekolah-sekolah yang dibangun semasa Sultan Syarif Kasim merupakan bagian dari penggunaan dana kerajaan yang sangat kelihatan manfaatnya dalam upaya mensejahterakan rakyat

di bawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Inderapura. Hal ini bagian dari pelaksanaan akuntansi harta yang telah dijalani oleh sultan dalam pemerintahannya. Penggunaan harta kerajaan yang umumnya di bidang pendidikan sekaligus sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban sultan kepada Rakyat Siak Sri Inderapura. Sultan Syarif Kasim memutus anatomi sistem menjadi perencanaan dan pelaksanaan saja, tanpa laporan pertanggungjawaban secara tertulis karena pelaksanaan adalah bagian dari laporan pertanggungjawaban yang langsung bisa dirasakan oleh rakyatnya. Sultan Syarif Kasim tanpa disengaja telah menghindari laporan pertanggungjawaban tertulis sebagai bentuk laporan *Simulacrum* di mana realita praktiknya jauh dari isi laporannya yang *hyperreality* (Macintosch *et. al*, 2000), meskipun sebagai sultan, beliau mampu melakukannya.

7.9. PERTANGGUNGJAWABAN "BENDA PENINGGALAN"

Harta peninggalan Kerajaan Siak lainnya merupakan semua harta bergerak yang menjadi isi Istana Kerajaan Siak Sri Inderapura. Harta-harta bergerak tersebut sebagian didatangkan dari Eropa, Timur Tengah dan China. Sebagian besar dari harta tersebut masih tersimpan rapi di Istana Asserayah Hasyimiah dan dapat disaksikan sampai saat sekarang. Meskipun sebagian besar harta tersebut merupakan harta yang diperoleh semasa Sultan Syarif Hasyim, namun semenjak Sultan Syarif Kasim II menjadi sultan, harta tersebut sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengelola berdasarkan surat hibah yang menjadi standar akuntansi pengelolaan harta. Gazalba (1966) mengklasifikasikan harta peninggalan atau warisan Kerajaan Siak menjadi tiga bagian yakni warisan lisan, warisan tulisan dan warisan visual atau berbentuk dan berupa.

Warisan lisan merupakan harta peninggalan berupa percakapan lisan tentang proses budaya yang berlangsung pada waktu tertentu. Percakapan lisan ini sudah banyak dituliskan dalam berbagai bentuk naskah. Hikayat Iskandar Zulkarenain dan Syair Raja Siak yang disusun oleh Noegraha (2002) adalah bagian dari warisan lisan tentang masa lampau yang sudah mendunia. Prosesi upacara tradisional Melayu Siak yang mengungkapkan nilai-nilai dan perubahannya juga merupakan bagian dari harta warisan lisan yang telah dibukukan (Rohana, 2008). Warisan tulisan berupa manuskrip yang dapat dibaca seperti buku catatan gaji pada masa Sultan Syarif Kasim dan catatan tulisan tangan Muhammad Jamil tentang kiprah Sultan Syarif Kasim selama beliau menjadi sekretaris pribadinya. Warisan visual merupakan harta berupa artefak seperti Mahkota Raja Siak dan Istana Asserayah Hasyimiah dengan segala isinya. Semua klasifikasi harta peninggalan tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi dari sisi sejarah karena dapat mengomunikasikan antara masa lalu dan masa sekarang.

Daftar inventaris maupun catatan harta tentang perolehan harta Kerajaan Siak secara fisik tidak ditemukan baik di Istana Siak maupun di Perpustakaan Daerah

Siak dan Pekanbaru. Diduga bahwa Sultan Syarif Kasim maupun pendahulunya Sultan Syarif Hasyim memang tidak melakukan pencatatan khusus atas perolehan harta kerajaan. Harta kerajaan umumnya diperoleh melalui proses perkerabatan dan hubungan pertemanan serta pembuatan sehingga tidak merasa perlu adanya pencatatan disamping karena faktor pragmatis beliau dan tidak adanya dukungan dokumen transaksi pada saat itu. Istana Asserayah Hasyimiah yang dibangun selama 9 tahun tidak memiliki catatan rincian biaya pembangunan, kecuali hanya merupakan taksiran saja.

Bukti transaksi pembelian harta-harta yang menjadi isi dari istana juga tidak ditemukan, sehingga catatan berupa daftar harta Kerajaan Siak serta harga perolehan pada masa Sultan Syarif Kasim tidak ada. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pengukuran yang dianut oleh sultan. Konsep pengukuran harta menurut sultan diukur dari fungsinya untuk kemaslahatan rakyat, bukan dari harga perolehannya. Hal inilah yang menyebabkan adanya upaya Pemerintah Daerah Riau untuk melakukan penginventarisir jenis dan jumlah harta Istana Siak. Dugaan ini dapat dibuktikan dari upaya inventarisasi harta kerajaan untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau setelah kembalinya Sultan Syarif Kasim ke Siak pada tahun 1964. Harta kekayaan Kerajaan Siak Sri Inderapura ditinggalkan Sultan Syarif Kasim II selama beliau berada di Aceh, Jakarta dan Belakang Padang (Batam) selama 18 tahun yakni dari tahun 1946-1964 (Yusuf, 1992).

Pada tanggal 7 dan 9 September 1964, dengan persetujuan Sultan Syarif Kasim II dilakukan inventarisasi harta kerajaan oleh tim inventarisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Riau. Namun pada saat inventarisir untuk pertama kalinya dilakukan semenjak diserahkan kepada Pemerintah RI, terdapat beberapa hambatan karena dua kamar di lantai 2 yang kuncinya telah lama hilang (Yusuf, 1992). Hal ini menyebabkan tidak semua harta peninggalan dapat diinventarisir, khususnya yang ada pada dua kamar tersebut. Hasil inventarisir yang dilakukan di ruangan atas dan ruangan tingkat dasar menyimpulkan bahwa terdapat 600 jenis barang di luar dari barang yang ada di 2 kamar yang terkunci. Setiap jenis barang terdiri dari beberapa buah bahkan ada sampai beberapa puluh buah.

Metode inventarisir, dilakukan menurut struktur ruang atau salon dari Istana Asserayah Hasyimiah. Hasil penginventarisir yang dilakukan pada tahun 1964 ini menyimpulkan bahwa barang-barang istana tetap selamat dan aman (Yusuf, 1992). Kesimpulan ini dapat dijadikan sebagai bentuk dari pencatatan harta kerajaan menurut jenisnya, namun tanpa mencantumkan harga perolehan karena memang tidak ditemukan sebelumnya dan bahkan sampai sekarang. Hal ini senada dengan hasil konfirmasi dengan Nizami sebagai berikut.

"Saya tidak tau persis hal itu, namun saya kira tidak ada catatan tentang pembelian harta semasa Sultan Syarif Kasim II karena memang beliau jarang sekali membeli

barang harta kerajaan. Namun kalaupun ada saya tidak tau di mana letaknya dan kalau mau dicek silahkan saja ke lemari kaca istana".

Harta berbentuk benda orisinil Kerajaan Siak Sri Inderapura yang terdapat di Museum Nasional Jakarta tidak semuanya ada. Benda bersejarah dan berharga Kerajaan Siak Sri Inderapura tidak hanya terdapat di sekitar Istana Asserayah saja, namun juga di luar istana seperti Mahkota Raja, Pedang Emas/Kerajaan dan Medali Emas 12 karat berbentuk lempeng bulat. Ketiga benda tersebut menurut catatan resmi museum (lihat lampiran 4 dan 5) dan pernyataan informan O.K. Nizami serta diungkapkan dalam tulisan Yusup (1992) berada di Museum Nasional Jakarta. Namun hasil penulusuran yang telah dilakukan selama proses penelitian, hanya Mahkota Raja dan Pedang Emas saja yang ada di Museum Gadjah Jakarta, sedangkan medali emas atau bros menurut istilah Nizami, sudah tidak ditemukan lagi di Museum Nasional tersebut. Hal ini berarti sudah tidak semua benda peninggalan Sultan Siak yang bernilai tinggi masih dapat disaksikan dan dipelajari sebagai bahan studi, terutama setelah beliau menyerahkannya kepada Pemerintah Republik Indonesia tahun 1946.

Harta Kerajaan Siak sejak diserahkan kepada Pemerintah RI dan dikelola Pemerintah Daerah Riau mengalami beberapa kali kehilangan dan diperjualbelikan, terutama pada saat akhir hayat Sultan Syarif Kasim dan setelah beliau Wafat. Menurut dokumen yang ada pada OK Nizami bahwa kursi emas singgasana kerajaan yang digunakan Sultan Syarif Kasim (lihat lampiran 7) pernah dicuri pada tanggal 27 Agustus 1967, tepat saat 1 tahun sebelum beliau wafat. Akibat pencurian ini, terdapat beberapa bagian kursi yang sengaja dipatahkan atau dicongkel dan sampai saat ini bagian yang dicongkel tersebut tidak ditemukan. Beberapa bagian dari kursi emas yang tersisa pada akhirnya ditemukan oleh pihak Brimob Bukit Tinggi Sumatera Barat di Pekanbaru pada tanggal 13 September 1972, namun dalam kondisi terpotong pada bagian ukiran emas.

Dokumen proses pengaduan sultan atas kehilangan tersebut dan gambar struktur kursi yang hilang sampai dengan pengembalian kembali kursi tersebut ke Istana Siak dapat dilihat pada buku lampiran terpisah (3-20) . Di samping terjadinya kehilangan barang tersebut, benda-benda yang menjadi milik istana ternyata juga telah diperjualbelikan, meskipun akhirnya berhasil dikembalikan. Hal ini terbukti dari adanya surat Gubernur Riau tertanggal 19 Oktober 1972 yang menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya tindakan penjualan Harta Siak yang merupakan penyimpangan dari surat wakaf Sultan Syarif Hasyim.

Harta yang diperoleh selama Sultan Syarif Hasyim menjadi sultan sebenarnya bukanlah hanya berupa istana dan seisinya termasuk mahkota raja saja, melainkan juga harta yang berada di luar Istana Asserayah Hasyimiah. Namun demikian, jika merujuk pada surat wakaf sebagai standar akuntansi harta, maka harta Kerajaan Siak hanyalah

istana dan seisinya saja. Surat wakaf tersebut apabila dicermati secara seksama, maka sebenarnya dibuat beliau atas nama kerajaan, bukan atas nama pribadi. Hal ini terlihat dari pernyataan beliau yang menggunakan nama gelar raja dan ditandatangani oleh pejabat pemerintah kerajaan saat itu yang diwakili oleh datuk dan kepala suku. Selain itu, surat wakaf tersebut sebenarnya bukanlah menyatakan kepindahan hak milik kepada Sultan Syarif Kasim dan keturunan selanjutnya, melainkan lebih kepada pengaturan penggunaan istana dan seisinya sebagai harta milik kerajaan.

Hal-hal yang diatur dalam surat wakaf tersebut adalah (1) Penjelasan tentang harta kerajaan berupa Istana Asserayah Hasyimiah berserta isinya. (2) Istana sebagai tempat raja dari keturunannya berdiam/tinggal. (3) Penyewaan istana oleh keturunannya dan membagikan hasil sewa kepada keturunannya yang lain (4) Mengupah 4 orang pekerja untuk memelihara istana jika tak satupun dari keluarganya dapat bertindak sebagai raja dan mampu menyewa istana. (5) Istana tidak boleh digadaikan (6) Istana tidak boleh dijual dan yang terakhir (7) Istana harus diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa alias dikembalikan kepada rakyat. Oleh sebab itu, wakaf tersebut sebenarnya menjadi Standar Akuntansi dalam pengelolaan istana dan seisinya, bukan pemindahan hak kepemilikaan.

Harta di luar istana kecuali wilayah kekuasaan, dapat dikatakan sebagai harta pribadi Sultan Syarif Hasyim yang keberadaannya dapat diperjualbelikan untuk membangun istana kerajaan dan memimpin kerajaan. Harta di luar istana ada yang diperoleh dengan transaksi jual beli dan ada yang diperoleh dengan kekuasaan atau politis atau yang sering disebut dengan Harta Lanschap/Swapraja. Hal ini yang kemungkinan besar dijadikan alasan mengapa kedua bentuk harta yang diperoleh semasa Sultan Syarif Hasyim dari transaksi jual beli atau dari kekuasaan politis ini tidak termasuk bagian yang diatur di dalam surat wakaf. Harta Swapraja bersifat *mobile* dalam arti kata bisa lepas seketika karena Pemerintahan Kolonial seperti diatur dalam *Onderafdeeling* (1929) dan surat perjanjian antara Goebernemen Hindia Nederland dengan Pemerintah Kerajaan Siak Sri Inderapura (1938).

Harta pribadi Sultan Syarif Hasyim di luar istana yang dapat diperjualbelikan kemungkinan besar sebagiannya ada yang tidak terdata lagi pada masa Sultan Syarif Kasim II karena dijual bagi pembangunan istana kerajaan yang menelan biaya sangat besar. Harta Sultan Syarif Kasim yang terdata secara fisik hanyalah harta pribadi peninggalan beliau seperti di Singapura dan daerah lainnya. Menurut OK. M Jamil (1983) Biaya pembangunan Istana Asserayah Hasyimiah ditaksir menelan biaya sebesar $ 750.000. Kemungkinan besar salah satu sumber utama dari pembiayaan pembangunan Istana Asserayah saat itu dari pelepasan harta yang diperoleh selama Sultan Hasyim berkuasa.

Terdapat perdebatan tentang penentuan mana harta pribadi Sultan Syarif Hasyim, Sultan Syarif Kasim II dan harta kerajaan, setelah Sultan Syarif Kasim II wafat.

Masyarakat Siak yang dekat dengan istana mengenal istilah harta kerajaan, harta Sultan Syarif Hasyim dan harta Sultan Syarif Kasim, namun sayangnya mereka tidak dapat menunjukkan pengelompokkan tersebut (Yusuf,1992). Pendapat masyarakat yang berkembang juga ada yang mengungkapkan istilah pengelompokkan harta menjadi harta kerajaan dan harta Sultan Syarif Hasyim. Harta kerajaan adalah seluruh daerah yang ada dalam kerajaan, termasuk *landschap*/Swapraja dan adat kerajaan, sedangkan Istana Asserayah Hasyimiah merupakan harta pribadi yang syah dari Sultan Syarif Hasyim. Namun demikian, pendapat ini belum menggambarkan secara jelas berbagai harta di luar dan di dalam kerajaan.

Harta benda yang tidak disebutkan dan tidak tau rimbanya sampai sekarang termasuk sejak masa Sultan Syarif Kasim II seperti kapal tongkang bermesin muatan 75 ton dan 25 ton, mesin cetak berhuruf Arab dan Latin, mobil sedan, pabrik tepung tapioka, beberapa bidang perkebunan, toko-toko di Medan dan Singapura serta lain-lainnya. Tidak ada bukti berupa data dan informasi tentang lepasnya harta yang dihasilkan oleh Sultan Syarif Hasyim tersebut. Namun jika merujuk kepada kiprah Sultan Syarif Hasyim yang memang seorang pebisnis ulung, sulit untuk menyimpulkan bahwa harta tersebut hilang begitu saja kecuali dari transaksi jual beli dan perjanjian dengan pemerintahan Kolonial saat itu.

Wan Ghalib dan Dt. Ahmad (1979) dalam Yusuf (1992) mengelompokkan harta peninggalan Kerajaan Siak menjadi tiga kelompok yakni (1) kekayaan dan harta benda kerajaan seperti semua alat kebesaran, alat-alat upacara, uang kas kerajaan dan semua bangunan yang dibiayai dari kas kerajaan. (2) Istana Asserayah Al Hasyimiah. (3) Harta Benda Pribadi Sultan Syarif Kasim II. Pengelompokkan harta menurut kedua tokoh yang mewakili Datuk-Datuk empat suku sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengelompokan oleh masyarakat dekat istana dan masyarakat Siak lainnya karena memfokuskan pada dua hal yakni Istana Asserayah dan seisinya (gabungan kelompok satu dan dua serta harta pribadi Sultan Syarif Kasim). Namun berbagai pendapat itu juga tidak dapat menunjukkan secara jelas mana saja harta yang dapat dikelompokkan pada masing-masingnya.

Pengelompokkan terakhir dibuat oleh Jaksa Tinggi Riau dalam suratnya tanggal 29 Juni 1974 kepada Jaksa Agung Muda Bidang operasi di Jakarta dengan pengelompokkan sebagai berikut. (1) Harta benda milik Kerajaan Siak Sri Inderapura, (2) Harta benda sebagai hak milik Lanschap/swapraja, (3) harta benda wakaf yang dituangkan dalam surat wakaf, dan (4) harta benda milik pribadi Sultan Syarif Kasim II. Dengan demikian, ada banyak pendapat tentang pengelompokkan harta sebagai akibat tidak adanya landasan yang dijadikan sebagai dasar pengelompokkan.

Terkait dengan harta kerajaan berupa *lanschap*/Swaparaja, sebenarnya bukanlah termasuk harta kerajaan. Salah satu bukti yang dapat dijadikan alasan adalah tidak dimasukkannya harta tersebut dalam surat wakaf yang sesungguhnya mengatur tentang

pengelolaan harta Kerajaan Siak. Bukti lainnya yang sangat layak untuk diketahui adalah bukti sejarah yang diungkapkan dalam nota *omtrent het rijk van Siak* (1885). Nota tersebut menjelaskan sejarah Siak yang juga ditulis oleh sejarawan E. Netscher. Inti dari nota tersebut menjelaskan kepada kalayak dalam memahami kondisi sekarang ini di Siak. Nota tersebut menyebutkan bahwa baik keluarga raja dan para pengikutnya maupun empat suku semuanya adalah bukan penduduk asli sehingga tidak ada hak milik tanah yang diserahkan kepada mereka. Ketika Raja Kecil menguasai Siak sebagai Sultan Johor, tanah dikuasai oleh penduduk pribumi dan dia tetap tunduk. Semua pelanggaran yang terjadi atas hak milik itu dengan demikian bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sejarah Siak mencatat bahwa penduduk pribumi pernah bangkit melakukan perlawanan atas pelanggaran hukum tersebut.

Harta Swapraja merupakan wilayah taklukkan atau kekuasaan yang dimiliki secara politik, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari harta kerajaan ketika harus menyajikan neraca suatu pemerintahan. Harta swapraja bukanlah hasil dari transaksi jual beli, atau hibah, sehingga keberadaannya sangat ditentukan oleh kekuatan politik pada saat suatu kerajaan atau pemerintahan berkuasa. Hal ini dapat dibuktikan dari perubahan wilayah Kerajaan Siak ketika Pemerintah Kolonial menetapkannya sebagai berikut, "Tindakaan Belanda yang mengambil alih pemerintahan adalah dengan mengurangi wilayah kekuasaan sultan dari 10 Provinsi menjadi 5 distrik saja". Tindakan ini di maksudkan untuk mengurangi kekuasaan dan wibawa Sultan Kerajaan Siak di mata rakyatnya serta sekaligus melakukan politik adu dombanya. Keputusan ini ditandatangani oleh sultan dengan suatu paksaan Belanda dan disyahkan oleh Gubernur Belanda yang berkedudukan di Pantai Timur Sumatera. Tujuannya adalah agar seolah-olah surat ini dibuat oleh sultan, sehingga mendapat perlawanan dari rakyatnya".

7.10. PERTANGGUNGJAWABAN "KEPERCAYAAN"

Harta tak berwujud yang paling berharga milik Sultan Syarif Kasim adalah kepercayaan. kepercayaan diartikan sebagai bentuk ungkapan moral yang diberikan oleh rakyatnya kepada beliau karena kewajiban yang dijalankannya sebagai seorang Raja. Kepercayaan rakyat terhadapnya bukanlah karena rasa takut, melainkan karena sangat sungkan, sayang dan hormat kepada beliau (Jamil, 2010). Apa yang beliau berikan dan tunjukkan kepada rakyatnya, akan dibalas oleh rakyatnya dengan rasa sungkan, sayang dan hormat untuk beliau. Apabila dilihat dari keadaan saat sultan memimpin, beliau sendiri juga dalam keadaan tekanan dan kendali Pemerintah Kolonial, sehingga beliau tidak punya kesempatan untuk membangun sebuah kekuatan yang mutlak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa takut rakyatnya karena kekuatan yang mutlak tersebut. Kerajaan Siak merupakan kerajaan tradisional yang sangat lemah dalam hal struktur politik karena kurang didukung oleh kekuatan-kekuatan nyata seperti angkatan perang dan pejabat

(Ham, 2007). Selanjutnya pada saat itu rakyat pun dengan mudah untuk mau menetap atau tidak pada suatu wilayah kerajaan. Sehingga kebebasan orang untuk berpindah dari suatu wilayah kerajaan ke wilayah kerajaan lain pada saat itu sangat mudah. Oleh sebab itu, sebuah kerajaan yang memiliki penduduk yang banyak serta didatangi oleh para saudagar yang ramai mencerminkan adanya kenyamanan dan keamanan pada wilayah tersebut. Kenyaman dan keamanan inilah yang dibalas oleh rakyat sebuah kerajaan dengan rasa sungkan, sayang dan hormat kepada raja yang berkuasa. Wajarlah Reid (2012) mengatakan bahwa dari segi kesukuan, 117.000 penduduk Kerajaan Siak era Sultan Syarif Kasim relatif homogen dengan variasi hanya 30.000 orang Minang Kabau pada saat itu. Catatan ini memberikan indikasi bahwa masa era Sultan Syarif Kasim mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya.

Semasa Sultan Syarif Kasim berkuasa, beliau tidak pernah menggunakan kekuatan fisik untuk menghadapi rakyatnya. Hal ini bukanlah karena struktur kekuatan kerajaannya yang lemah, namun lebih karena karakter beliau yang sangat bersahaja sehingga dihormati oleh rakyatnya. Beliau memang seorang yang agamis dalam kesehariannya, sehingga kapasitas sebagai raja tidak digunakan untuk unjuk kekuatan dalam bentuk perlakuan fisik atas rakyatnya. Beliau berperan sebagai simbol personifikasi nilai-nilai masyarakat dan tradisi sejarah seperti dinyatakan Milner (1977). Foucoult (1980) mengatakan bahwa Gerak tubuh (*King's body*) dalam sebuah masyarakat di abad ke 17, bukanlah sebuah metafor, tetapi merupakan sebuah realitas politik. Kehadiran fisik seorang raja perlu untuk menjalankan fungsinya sebagai penguasa Monarki. Pernyataan ini berlaku juga pada masa beliau menjadi sultan yakni kehadiran sultan pada saat itu bukanlah sebagai sebuah matafor, tetapi merupakan sebuah realitas politik saat itu yang menggambarkan nilai-nilai kebersahajaan yang diperlukan rakyat saat menjalankan fungsinya sebagai Sultan Siak. Penyelesaian atas suatu masalah yang berhubungan dengan masalah sosial pada saat beliau berkuasa, diselesaikan dengan menggunakan putusan hakim untuk menentukan salah tidaknya dalam mengadili rakyat. Kebijakan penyelesaian masalah sosial dengan putusan hakim menunjukkan bahwa beliau telah melakukan reformasi dalam sistem pemerintahannya. Raja meskipun memiliki kekuasaan untuk memutuskan apa pun terhadap rakyatnya, namun beliau menyerahkannya pada keputusan hakim untuk memutuskan masalah tersebut. Beliau telah merintis suatu perubahan dalam tatanan pemerintahannya, yang menunjukkan bahwa beliau bukanlah seorang yang diktator dengan kekuasaannya. Sikap beliau dalam menjalankan pemerintahannya memunculkan rasa kepercayaan dari rakyatnya yang begitu tinggi.

Sultan Syarif Kasim juga pemimpin yang sudah menghilangkan nepotisme dalam sistem pemerintahannya, terutama dalam perekrutan orang-orang yang membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini terkonfirmasikan dalam wawancara dengan informan Tenas Effendy sebagai berikut.

"Sepengetahuan saya, dalam menjalankan pemerintahan, beliau juga merekrut orang-orang luar istana untuk membantunya. Beliau sudah terbiasa dengan menajemen profesional di mana untuk mendapatkan orang terbaik tidak harus dari keluarga istana".

Sikap ini berdampak pada kepercayaan dan cinta yang amat tinggi dari rakyat terhadap beliau. Kerajaan tidak tertutup untuk rakyat biasa, namun terbuka untuk siapa saja yang dapat menunjukkan prestasi dalam memajukan pemerintahannya. Sikap beliau inilah yang menyebabkan beliau dikatakan telah melakukan reformasi dalam sistem pemerintahannya seperti yang dikatakan oleh Reid (2012). Sikap ini diakui atau tidak menyebabkan kepercayaan dan sayang rakyat kepada beliau begitu tinggi sebagai seorang raja. Beliau juga sangat menjalankan amanah yang dijadikan sebagai standar akuntansi dalam pengelolaan harta kerajaan. Surat wakaf tersebut dipublikasikan kepada rakyatnya melalui wicara dan pembicaraan informal oleh datuk-datuk yang ikut menandatangani surat tersebut sebagai bagian dari kontrol rakyat kepada dirinya.

7.11. PERTANGGUNGJAWABAN "KEKUASAAN"

Kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan Syarif Kasim bukanlah digunakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kerajaan, melainkan digunakannya untuk membantu orang lain termasuk saudara-saudaranya dan tentu saja rakyatnya. Hal ini terungkap dalam konfirmasi dengan Tenas Effendy sebagai berikut.

"Sultan Syarif Kasim tidak punya anak sehingga hidupnya hanya memberikan dan membantu orang saja, termasuk mengangkat anak dari saudaranya. Kenyataan bahwa beliau tidak memiliki keturunan menyebabkan kekuasaan yang ada pada beliau hanya digunakan semata-mata untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Sikap beliau ini juga dipengaruhi oleh visi keagamaannya yang sangat tinggi. Bagi beliau, "hidup" adalah pengabdian, yang diwujudkan dalam kegiatan membantu dan memberi orang lain".

Filosofi beliau inilah yang menjadi pegangannya semasa menjadi Sultan, sehingga pengabdian kepada rakyatnya adalah menjadi sesuatu yang seharusnya dilakukan. Inilah filosofi hidup Sultan Syarif Kasim yang telah diperankannya sehingga beliau sangat dikenang oleh masyarakat yang merasakan hidup semasa beliau berkuasa seperti informan kunci dalam penelitian ini yakni Nizami Jamil dan Tenas Effendi.

Kekuasaan sultan bukan hanya dihargai oleh rakyatnya, melainkan juga oleh Pemerintahan Kolonial dan Jepang. Hal ini terkonfirmasi dengan pernyataan Nizami berikut ini.

"Saya kira beliau sangat disegani. Ini terbukti dari kejadian pada saat Jepang baru masuk ke Siak, tentara Jepang yang bringas dan haus dengan wanita sehingga masyarakat Siak maupun pendatang yang saat itu berada di wilayah kekuasaannya

panik untuk menyelamatkan diri. Pada saat itulah, Sultan Siak sebagai raja meminta semua masyarakat khususnya wanita untuk masuk kewilayah pekarangan kerajaan agar selamat dari kebrutalan tentara Jepang. Memang benar bahwa mereka yang masuk ke pekarangan istana kerajaan aman dari berbagai prilaku senonoh dari tentara Jepang.

Cara ini adalah salah satu upaya perlindungan yang sangat simpatik dari Sultan Siak kepada rakyatnya. Kekuasaan yang ada pada sultan saat itu, membuat tentara Jepang tidak berani melakukan berbagai tindakan seenaknya kepada Rakyat Siak, selama berada di wilayah radius istana kerajaan. Kekuasaan sultan ternyata tidak hanya berwibawa di mata rakyatnya, melainkan juga di mata penjajah seperti Jepang. Meskipun berbagai tindakan berupa tekanan dan paksaan oleh Pemerintahan Kolonial dan Jepang terhadap beliau terjadi pada saat itu, namun kewibawaan beliau sebagai seorang raja tidak serta merta sirna sehingga pemerintahan penjajah dapat melakukan tindakan apa pun secara semena-mena. Ini adalah kekuasaan yang menjadi bagian dari harta yang dimiliki oleh Sultan sebagai seorang raja.

7.12. PERTANGGUNGJAWABAN "PENGETAHUAN"

Harta tak berwujud lainnya dari Sultan Syarif Kasim adalah pengetahuan yang dimilikinya sehingga beliau disegani oleh rakyat, serta pihak lainnya. Pengetahuan diartikan sebagai bagian pertanggungjawaban sultan dalam memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan karena ekuitas sebagai putra mahkota. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, beliau memiliki pengetahuan yang sangat mumpuni dalam bidang hukum Islam, ketata negaraan dan agama. Pengetahuan yang dimiliki beliau bahkan disadari oleh Pemerintahan Kolonial, sehingga berupaya untuk menghalang sultan menjadi raja pengganti ayahandanya. Rasa kawatir yang tinggi dari pihak koloni dan gagalnya mereka membendung sultan sebagai Putra Mahkota penerus kerajaan selanjutnya memperlihatkan bahwa nilai dari sebuah pengetahuan tidak bisa dilawan dengan kekuasaan dan kekuatan fisik. Hal ini pulalah yang mendorong beliau berjuang melawan Belanda melalui perjuangan non fisik.

Sultan telah menunjukkan kepada rakyatnya bahwa ternyata melawan berbagai kezaliman dengan pengetahuan tidak kalah bedanya dengan melawan secara fisik. Beliau telah secara nyata membuktikannya dengan membangun pendidikan untuk rakyatnya dalam rangka melawan penjajahan. Perlawanan secara non fisik inilah yang membuat kerajaan tersebut tetap berjaya meskipun dalam tekanan Pemerintahan Kolonial. Siak termasuk kerajaan yang paling sukses di Sumatera karena masa Sultan Siak inilah terdapat pedagang pribumi yang suskses. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 1924, terdapat 109 pedagang pribumi di Siak dengan penghasilan lebih dari *f* 760 per tahun. Penghasilan ini lebih dari dua kali lipat jumlah pedagang

pribumi di seluruh bagian lain di Sumatera Timur. Memajukan pendidikan rakyatnya, menciptakan stabilitas wilayahnya serta mempermudah akses keluar masuk dari dan ke Siak menyebabkan Siak menjadi salah satu bagian kerajaan yang menikmati masa-masa keemasannya. Kemajuan ini merupakan buah dari pemimpin yang memiliki pengetahuan dalam mengelola pemerintahannya. Pengetahuan adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh Sultan dalam menjalankan perannya sebagai Raja Siak.

7.13. PERTANGGUNGJAWABAN "KESAKTIAN"

Akumulasi dari berbagai harta tak berwujud yang dimiliki oleh sultan seperti kepercayaan, kekuasaan dan pengetahuan menyebabkan beliau di mata rakyatnya dianggap sebagai orang yang sakti. Sakti diartikan sebagai ungkapan sikap "sangat menurutnya rakyat" atas kata dan nasehat beliau. Pandangan ini bukanlah karena berbagai hal yang bersifat represif, tetapi muncul karena kearifan yang dimiliki oleh seorang sultan. Bagaimana pandangan sakti ini disikapi oleh Rakyat Siak terungkap dalam wawancara dengan salah satu informan Khaidir sebagai berikut.

> "Saya memang tidak mengalami langsung, namun orang tua saya menceritakan bahwa sakin sungkannya masyarakat dengan beliau, pada saat beliau terjun ke masyarakat, banyak di antara mereka tidak sanggup untuk bertatap mata secara lansung. Umumnya masyarakat menundukkan kepala dan memalingkan mata kepada beliau baik dalam bertutur kata langsung maupun dalam bertemu ketika beliau turun ke lapangan. Perlakuan masyarakat seperti ini bukanlah karena masyarakat takut dengan beliau, melainkan karena wibawa beliau yang sangat tinggi sehingga rakyatnya merasa sangat sungkan untuk bertatap mata secara langsung.

Tingginya derajat yang dipikul oleh sultan ditambah dengan tingginya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, menempatkan sultan pada posisi sangat terhormat dan bahkan lebih dari itu di mata rakyatnya.

Posisi terhormat dan bahkan lebih dari itu di maksudkan sebagai orang yang memiliki kesaktian di mata rakyatnya. Ucapan sang raja menjadi sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan oleh setiap orang pada saat itu. Kata-kata yang keluar dari komunikasi sultan dengan rakyat diyakini akan terbukti, sehingga apa kata sultan selalu diikuti oleh rakyatnya. Pembangkangan atau tidak menurut dengan kata-kata sultan selalu dianggap sebagai sesuatu yang akan mendatangkan bahaya bagi yang melakukannya. Inilah yang di maksudkan dengan kesaktian yang dimiliki oleh sultan. Meskipun sultan dianggap sebagai seorang raja yang memiliki kesaktian, namun tidak pernah sampai kepada pengkultusan beliau oleh rakyatnya. Hal ini disebabkan oleh karena sultan sendiri dalam berkomunikasi selalu berpegang teguh kepada agama di mana segala sesuatunya hanya Tuhanlah yang berkuasa dan hanya kepada Tuhanlah satu-satunya tempat meminta. Hal ini sesuai dengan lafaz yang tertera di Mahkota Kerajaan

yang berbunyi "*Badra tajjalli* yang berarti Tuhan Yang Agung dan dimaknai sebagai mintalah segala sesuatunya hanya kepada Allah". Beliau adalah seorang raja yang taat dan berkomitmen pada apa yang sudah menjadi ketentuan, termasuk dalam hal harta.

7.14. KESIMPULAN

Pandangan sultan Syarif Kasim terhadap harta sangat jauh berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu. Beliau berpandangan bahwa harta hanya sebagai sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Harta yang merupakan titipan Allah SWT hanya digunakan sesuai dengan peruntukkannya yakni kemaslahatan bagi kerajaan dan rakyatnya. Bagi sultan, harta diukur dari sisi fungsinya untuk kemaslahatan rakyatnya, bukan hanya untuk keluarga apalagi pribadi beliau. Pandangan beliau terhadap harta ikut berkontribusi besar dalam keiklasannya untuk menyerahkan harta, rakyat dan Kerajaan Siak bagi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sikap yang tegas, berpendidikan tinggi, tidak bernafsu menumpuk harta dengan kekuasaannya menyebabkan beliau menjadi seorang sultan yang sangat berwibawa di mata rakyatnya. Nilai-nilai Islami yang dianut beliau sangat mendukung semangat dalam pengelolaan harta dari sisi akuntansi.

Surat wasiat ditujukan untuk semua pihak di Negeri Siak Sri Inderapura, maka surat wasiat ini merupakan sebuah surat terbuka yang juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi keturunan raja selanjutnya untuk dipatuhi. Makna terkandung dalam surat wasiat adalah *pertama*, awal dari perlakuan akuntansi harta yang harus dilaksanakan oleh Sultan Syarif Kasim Sani sebagai Putra Mahkota. *Kedua*, Surat wakaf tegas menyebutkan daftar rekapitulasi harta yang dimiliki oleh Kerajaan Siak untuk digunakan sultan yang berkuasa selanjutnya. *Ketiga*, mewakafkan istana dan seisinya kepada Rakyat Negeri Siak melalui pemerintah yang berkuasa apabila turunannya tidak ada yang dapat menjadi sultan dan tidak ada kata mufakat yang paling berhak untuk menempati Istana Asserayah Hasyimiah.

Keempat, akuntansi pertanggungjawaban harus dilaksanakan oleh sultan berikutnya kepada rakyat melalui pemerintah yang berkuasa. *Kelima*, Kecuali sebagai sultan, maka keluarga turunannya di kemudian hari dapat mendiami istana dengan cara menyewa dan hasilnya harus dibagikan kepada keluarga turunan lainnya sesuai dengan Syariah Islam. *Keenam*, istana tidak boleh digadaikan apalagi dijual oleh turunannya di kemudian hari. *Terakhir*, Surat Wakaf bukanlah menyatakan kepindahan hak milik kepada Sultan Syarif Kasim dan keturunan selanjutnya, melainkan lebih kepada pengaturan penggunaan istana dan seisinya sebagai harta milik kerajaan. Ketentuan isi surat wakaf dapat dimaknai sebagai bagian dari standar akuntansi harta pada saat itu yang telah mengatur tentang pembagian pendapatan, sewa menyewa dan pemeliharaan harta.

Kecintaan rakyat terhadap rajanya sangat ditentukan oleh bagaimana raja tersebut dapat menunjukkan cintanya kepada rakyat. Bentuk tanggung jawab sultan atas penggunaan dana kerajaan yang paling menonjol adalah dengan membangun berbagai lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya pada saat itu. Perhatian beliau atas pendidikan sangat besar sekali karena beliau menyadari bahwa dengan pendidikanlah rakyatnya dapat berkembang baik dalam berkehidupan, bersosial, dan beragama sehingga pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat itu sendiri.

Keinginan beliau dalam menjadikan agama sebagai landasan untuk membangun karakter rakyatnya terlihat dari banyaknya sekolah berbasis agama yang didirikannya dengan menggunakan harta kerajaan. Pendidikan agama Islam yang dikembangkan di Siak Sri Inderapura didasarkan pada Mashab Syafi'iyah. Sikap dan peran yang diberikan sultan kepada rakyatnya membuktikan bahwa beliau adalah seorang pejuang pendidikan sejati bagi memajukan rakyatnya yang berada dalam kungkungan tekanan penguasa Kolonial. Tentu saja sikap ini tidak akan pernah terlupakan bagi rakyatnya termasuk bagi tokoh-tokoh yang saat sekarang masih ada.

Sekolah-sekolah yang dibangun semasa Sultan Syarif Kasim merupakan bagian dari penggunaan dana kerajaan yang sangat kelihatan manfaatnya dalam upaya mensejahterakan rakyat di bawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Inderapura. Hal ini bagian dari pelaksanaan akuntansi harta yang telah dijalani oleh sultan dalam pemerintahannya. Penggunaan harta kerajaan yang umumnya di bidang pendidikan sekaligus sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban sultan kepada Rakyat Siak Sri Inderapura.

Diduga bahwa Sultan Syarif Kasim maupun pendahulunya Sultan Syarif Hasyim memang tidak melakukan pencatatan apa pun atas perolehan harta kerajaan. Harta di luar istana kecuali wilayah kekuasaan, dapat dikatakan sebagai harta pribadi Sultan Syarif Hasyim yang keberadaannya dapat diperjualbelikan untuk membangun istana kerajaan dan memimpin kerajaan. Harta di luar istana ada yang diperoleh dengan transaksi jual beli dan ada yang diperoleh dengan kekuasaan atau politis atau yang sering disebut dengan Harta Lanschap/Swapraja. Harta Swapraja bersifat *mobile* dalam arti kata bisa lepas seketika karena Pemerintahan Kolonial. Harta kerajaan berupa lanschap/Swaparaja, bukanlah termasuk harta kerajaan. Salah satu bukti yang dapat dijadikan alasan adalah tidak dimasukkannya harta tersebut dalam surat wakaf yang sesungguhnya mengatur tentang pengelolaan harta Kerajaan Siak.

Kemajuan sebuah kerajaan merupakan buah dari pemimpin yang memiliki pengetahuan dalam mengelola pemerintahannya. Pengetahuan adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh sultan dalam menjalankan perannya sebagai raja Siak. Beliau adalah seorang raja yang taat dan berkomitmen pada apa yang sudah menjadi ketentuan, termasuk dalam hal harta.

BAB 8

MENGUNGKAP EPISTEME AKUNTANSI

8.1. MENAPAK LANGKAH PENDAHULUAN

Episteme akuntansi diartikan sebagai pemikiran yang menghasilkan cara atau praktik-praktik akuntansi yang berlaku pada saat itu sebagai sebuah tindakan untuk mengatasi problem yang muncul terkait dengan akuntansi harta. Inti dari *episteme* akuntansi dapat dilihat dari berbagai sisi seperti struktur pemerintahannya, sistem operasionalnya, pengendalian internal dan berbagai regulasi pengelolaan harta. Kerajaan Siak merupakan bagian yang tak terlepas dari adanya episteme tersebut, karena tuntutan terhadap praktik akuntansi selalu ada. Hal ini semakin tak terhindarkan karena Kerajaan Siak memiliki harta yang berlimpah sehingga bersentuhan dengan salah satu atau beberapa dari *episteme* akuntansi. Pencatatan harta bagaimanapun juga bentuknya mungkin ada, sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat pada saat itu. Perputaran harta baik dari sisi penambahan dan pengurangannya serta pemanfaatannya pasti terjadi dalam proses perjalanan pemerintahan Kerajaan Siak Sri Inderapura. Proses tersebut dapat dimulai dari peralihan tampuk Kerajaan Siak Sri Inderapura yakni dari Sultan Syarif Hasyim ke Sultan Syarif Kasim Sani. Masa peralihan tersebut dapat dijadikan sebagai awal dari proses akuntansi di era Sultan Syarif Kasim Sani.

Pengungkapan atau pengkonstruksian episteme akuntansi di era Sultan Syarif Kasim II, semakin menarik untuk dikonstruksi karena beliau sendiri barangkali tidak menyadari apakah tindakan Sultan sebelumnya atau kebijakan yang telah dikeluarkannya itu merupakan bagian dari episteme akuntansi atau tidak, khususnya terkait dengan akuntansi harta. Di sisi lain, karena pemerintahannya berupa kerajaan,

maka terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang berbagai transaksi yang terkait dengan sumber pendapatan kerajaan dalam hubungannya dengan rakyat dan Belanda yang saat itu masih berkuasa atas kerajaan. Hubungan pengelolaan harta kerajaan akan semakin menarik karena pandangan beliau terhadap harta sangat berbeda dengan pandangan kebanyakan orang lain pada saat itu. Bagaimana pandangan beliau tentang harta dan pengelolaannya, menjadi sebuah pengetahuan yang sangat berharga untuk refleksi akuntansi saat ini. Pandangan beliau tentang harta secara tak langsung berimplikasi pada sistem akuntansi harta secara keseluruhan, dan cara pengelolaan harta secara khusus serta cara mempertanggung jawabkannya bagi kemaslahatan Rakyat Siak yang dipimpinnya.

8.2. SISTEM AKUNTANSI HARTA

Bentuk sistem akuntansi harta di Kerajaan Siak Sri Inderapura era Sultan Syarif Kasim dapat dilihat pada gambar 8.1 berikut ini.

Gambar 8.1: Sistem Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim II

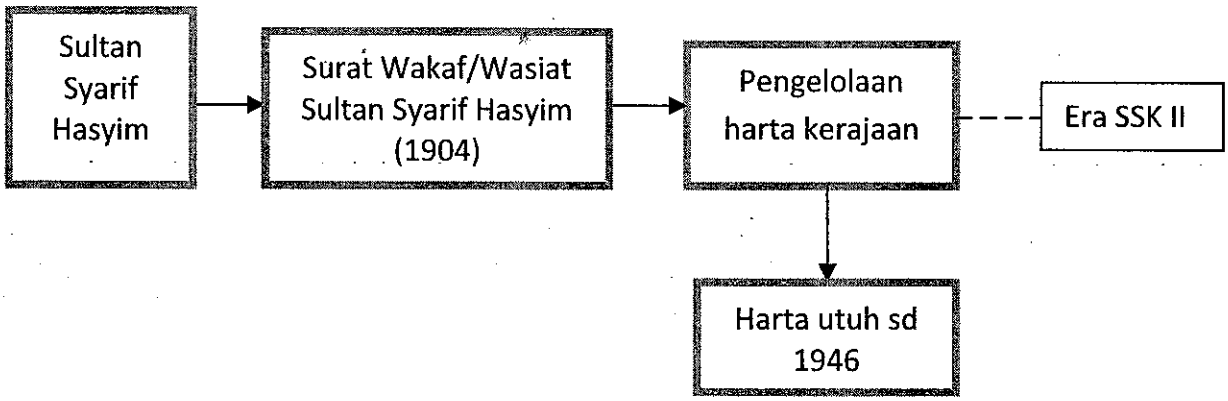

Sumber: Dikembangkan Dari Beberapa Sumber

Gambar 8.1. di atas dimulai dari Sultan Syarif Hasyim, karena beliau yang membuat surat wakaf untuk dilaksanakan oleh keturunannya di kemudian hari. Surat wakaf dibuat pada tahun 1904 atau empat tahun sebelum beliau wafat. Surat wakaf dipublikasikan kepada semua kalayak untuk dapat diketahui sebagai kontrol dalam penerapannya pada masa-masa sultan berikutnya. Surat wakaf digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan harta oleh Sultan Syarif Kasim II. Interpretasi penulis bahwa standar pengelolaan harta yang ada dalam surat wakaf dan komitmen Sultan Syarif Kasim untuk menjalankannya, berkontribusi besar dalam memelihara harta kerajaan sampai dengan tahun 1946.

8.2.1. Sultan Syarif Hasyim Peletak Dasar-Dasar Akuntansi Harta

Meskipun Sultan Syarif Hasyim menurut beberapa informan sebagai seorang sosok yang kontroversial dalam proses penobatannya sebagai raja, beliau sangat berjasa meletakkan dasar-dasar akuntansi pengelolaan harta dalam sistem kerajaan selanjutnya. Pada masa beliau menjadi Raja Siak kesebelas, banyak kemajuan yang diraih oleh kerajaan dan rakyatnya, seperti roda perekonomian rakyatnya sangat meningkat, semua rakyat yang ingin bekerja di bidang apa pun ditampung dan disiapkan lapangan pekerjaan untuk mereka. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pengangguran pada masa beliau (Effendy dan Effendy, 1972).

Kemajuan yang sangat monumental pada masa beliau adalah dengan dibangunnya Istana Siak yang diberi nama Asserayatul Hasyimiah. Pada masa beliau, semua perlengkapan kerajaan diisi dengan barang-barang yang berasal dari Belanda dan Jerman. Transaksi harta pada masa beliau sangat banyak, namun tak satupun bukti fisik transaksi yang dapat disaksikan sampai saat ini, terutama bukti yang mencantumkan nilai dari setiap harta yang dibangun atau dibeli. Tidak ada informasi mengenai siapa asisten pribadi beliau sehingga tidak diperoleh tanda-tanda aktivitas pencatatan pada masa Sultan Syarif Hasyim.

Bidang lainnya yang beliau upayakan dalam rangka memperkuat ekonomi kerajaan dan rakyatnya adalah membuat atau membuka perkebunan, membuat kapal-kapal laut, mendirikan usaha percetakan sendiri untuk mencetak buku-buku kerajaan termasuk BAB Al QAWA'ID. Hasil hutan ditampung dan dijual ke Singapura, sehingga semakin memajukan perdagangan yang berdampak pada kemajuan ekonomi kerajaan dan rakyat.

8.2.2. Muatan Akuntansi Dari Proses Peralihan Sultan Syarif Hasyim Ke Sultan Syarif Kasim II

Sultan Syarif Hasyim adalah tokoh sentral dalam penataan Kerajaan Siak Sri Inderapura dari sisi akuntansi harta. Beliau telah meletakkan dan mengantarkan dasar-dasar dari sisi akuntansi harta. Tanpa di sadari, sebenarnya beliaulah yang telah meletakkan status harta kerajaan sebagai harta bukan milik pribadi yang dapat digunakan seenaknya bagi kepentingan raja yang berkuasa pada masa yang akan datang. Harta kerajaan telah menjadi simbol kerajaan yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyat kerajaan pada masa yang akan datang. Harta Kerajaan Siak Sri Inderapura yang telah mengalami perkembangan yang sangat fantastis pada masa beliau, ditandai dengan dibangunnya istana kerajaan yang saat ini masih kokoh berdiri di ibu kota Kabupaten Siak Sri Inderapura. Sultan Syarif Hasyim yang membangun Istana Asserayah begitu mewah pada masa beliau, berbuah emas pada masa sekarang. Istana Asserayah telah menjadi

simbol Kerajaan Melayu dan menjadi saksi kejayaan salah satu Kerajaan Melayu yang pernah ada di Indonesia.

Pada masa beliaulah Kerajaan Siak Sri Inderapura mengalami masa keemasaannya karena beliau memang seorang *entrepreneur*. Sifat beliau sebagai seorang pebisnis terkonfirmasi dari wawancara dengan Nizami sebagai berikut.

> "Sultan Syarif Hasyim memang seorang pengusaha yang kaya raya, pada masa beliaulah penambahan harta kerajaan mengalami perkembangan yang sangat dahsyat, melalui berbagai usaha yang didirikannya".

Pernyataan informan Nizami Jamil, seiring dengan pernyataan tokoh Tenas Effendy dalam buku yang ditulisnya pada tahun 1972. Effendy dan Effendy (1972) menyatakan bahwa Sultan Syarif Hasyim telah membuat atau membuka perkebunan, membuat kapal-kapal laut, serta mendirikan usaha percetakan sendiri untuk mencetak buku-buku kerajaan termasuk BAB Al QAWA'ID. Upaya pembangunan kerajaan yang telah dilakukan oleh Sultan Syarif Hasyim pada masa akhir kekuasaannya, dilengkapi dengan sebuah dokumen berupa surat hibah yang mengikat keberadaan harta seisi istana menjadi milik kerajaan, untuk digunakan bagi kemaslahatan kerajaan dan rakyatnya.

Muatan akuntansi sangat kental terdapat dari masa peralihan Sultan Syarif Hasyim ke Sultan Syarif Kasim II. Muatan tersebut diawali dengan adanya dokumen hibah yang dibuat oleh Sultan Syarif Hasyim kepada siapa pun generasi berikutnya yang akan memimpin Kerajaan Siak Sri Inderapura. Dokumen ini sesungguhnya menjadi tonggak sejarah akuntansi harta di Kerajaan Siak Sri Inderapura, karena telah menjadikan harta kerajaan sebagai harta bukan milik pribadi atau keluarga kerajaan, melainkan harta milik bersama Pemerintahan Kerajaan Siak dalam memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada rakyatnya. Surat wasiat ditujukan kepada semua pihak, baik dari keluarga istana kerajaan maupun kepada Rakyat Negeri Siak Sri Inderapura di kemudian hari. Publikasi surat wakaf untuk diketahui semua pihak kerajaan dan Rakyat Negeri Siak ketika Sultan Syarif Kasim II berkuasa, merupakan ukuran keterbukaan dalam sistem akuntansi harta Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Selain adanya surat hibah atau wasiat yang dibuat semasa akhir pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, juga dibuat dan dicetak sebuah regulasi yang pada saat itu dapat disebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Inderapura. Undang-undang tersebut disebut dengan Babul Al-qawa'id yang berarti pintu segala pegangan (Jamil, 2002). Naskah asli Babul Al-qawa'id ditulis dalam tulisan Arab Melayu dan telah banyak dicetak ulang dalam Bahasa Indonesia seperti yang diterbitkan oleh Jamil (2002). Kedua manuskrib ini merupakan sumber telaah dalam konstruksi sistem akuntansi harta di Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Analisis terhadap kedua manuskrib yakni surat hibah dan Babul Al-qawa'id dapat mengungkapkan nilai-nilai akuntansi khususnya dalam pengelolaan harta pada masa Sultan Syarif Kasim. Berikut explorasi kajian dokumen Surat Hibah serta analisis isinya yang dikutip dari dokumen asli hibah Sultan Syarif Hasyim kepada generasi pemimpin Kerajaan Siak selanjutnya. Dokumen ini merupakan awal dari berjalannya sistem akuntansi harta pada era berikutnya yang dipimpin oleh Sultan Syarif Kasim II sebagai Sultan Kerajaan Siak Sri Inderapura.

8.2.3. Surat Wasiat Sultan Syarif Hasyim "Kemudian Hendaklah Mengetahui"

Judul dokumen hibah *kemudian hendaklah mengetahui* ditujukan kepada siapa pun yang mengetahui surat ini untuk memaklumatkan sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh Sultan Syarif Hasyim pada saat itu. Meskipun surat ini isinya ditujukan kepada keturunan keluarga kerajaan, namun esensi dari isi surat harus diketahui oleh semua orang termasuk di luar keluarga kerajaan. Sultan Syarif Hasyim merasa perlu untuk menyampaikan sebuah ketentuan yang harus diketahui oleh semua kalayak tentang isi yang dimaksud dan tersirat dalam dokumen tersebut. Surat ini dibuat pada tahun 1904 M yakni 4 tahun sebelum beliau wafat pada tahun 1908 M.

Judul surat wakaf "Kemudian Hendaklah Mengetahui" memberikan makna nilai keterbukaan mengenai status pegelolaan dan penggunaan harta Kerajaan Siak di kemudian hari. Mengapa surat ini dibuat?, sesungguhnya menjadi suatu ketentuan bahwa harta kerajaan harus digunakan secara bertanggung jawab oleh keturunan raja berikutnya agar tidak terjadi sebuah kegaduhan dalam hal pengelolaan harta.

Surat Wakaf juga memberikan suatu pesan bahwa jenis dan bentuk harta kerajaan sangat banyak dan sangat beranekan ragam serta bernilai tinggi di kemudian hari. Harta kerajaan harus digunakan sesuai ketentuan dalam isi surat ini, bagi kepentingan Rakyat Siak Sri Inderapura umumnya. Analisis ini akan semakin jelas apabila dilihat dari kandungan surat hibah yang menjadi inti pesan yang disampaikan. Oleh karena surat ini ditujukan untuk semua orang, maka terkandung sebuah keinginan Sultan Hasyim agar semua pihak di luar dari kerajaan dapat memberikan kontrol tentang bagaimana seharusnya harta kerajaan dikelola pada masa-masa berikutnya. Surat wakaf merupakan bagian dari politik pengelolaan harta kerajaan yang harus dilaksanakan oleh Sultan berikutnya. Sama halnya dengan penyusunan standar akuntansi keuangan di USA, yang tidak steril dari pengaruh politik. Sebuah pemahaman baru tentang dimensi politik memerlukan sensitifitas intelektual terhadap kekuasaan, retorika, dan ideology (Fogarty *et, al.* 1994)

Esensi dari surat ini ditujukan untuk semua orang terlihat dari kalimat awal surat hibah yang berbunyi "segala orang-orang yang melihat atas surat wakaf ini...", kalimat ini mengartikan bahwa surat hibah ini memang ditujukan kepada semua kalayak, meskipun isinya ditujukan terbatas pada keluarga. Makna pengertian agar adanya

kontrol oleh kalayak juga tersirat pada kalimat pertama dari surat hibah ini. Inilah model dari sebuah standar pengendalian yang dilakukan dengan sistem keterbukaan yang ada pada saat itu. Standar pengendalian yang dibuat dengan memberitahukan kesemua orang, menggambarkan adanya suatu keinginan dalam pengelolaah harta secara terbuka yang dimulai dari era Sultan Syarif Kasim. Tentu saja karena ini merupakan surat wakaf atau surat wasiat, maka pelaksanaannya mulai diberlakukan setelah Sultan Syarif Hasyim Wafat.

Sultan Syarif Hasyim adalah Sultan yang berjasa dalam mempersiapkan dokumen aturan tertulis pertama tentang pengelolaan harta, selama Kerajaan Siak Sri Inderapura berdiri. Beliau juga berjasa sebagai Sultan yang membangun istana kerajaan seperti yang dapat disaksikan sekarang. Hal ini ditegaskan beliau dalam surat wakaf dengan kalimat "bahwasanya MAULANA SULTAN ASSYAIDIS SYARIF HASYIM ABDULJALIL SYAIFUDDIN menjadikan ia akan Astanah Asserayah Hasyimiah dan sekalian barang yang meliputi atasnya". Pernyataan ini juga menginformasikan bahwa segala isi istana disiapkan oleh beliau untuk kerajaan berikutnya.

Harta berupa barang bergerak yang terdapat dalam istana, dirinci berdasarkan jenisnya. Hal ini menggambarkan bahwa telah ada kegiatan penginventarisiran harta pada masa Sultan Syarif Hasyim, meskipun bersifat umum. Perincian harta secara umum yang disebutkan dalam surat wakaf telah memberikan gambaran bahwa aktivitas penghitungan harta telah dilakukan untuk diketahui oleh semua orang. Meskipun dalam surat wakaf tidak dinyatakan nilai dari setiap harta, namun informasi ini sudah cukup memberikan sinyal bahwa telah ada praktik akuntansi harta meskipun sifatnya masih sangat sederhana. Praktik akuntansi yang masih sederhana ini diharapkan dapat dikembangkan oleh Sultan kerajaan penerus selanjutnya. Harapan tersirat ini sesuai dengan harapan pengembangan sebuah standar akuntansi oleh sebuah organisasi profesi, sehingga perlu pengungkapan awal tentang harta itu sendiri. Standar akuntansi diharapkan dapat berfungsi sebagai cermin bagi pengelolaan harta di kemudian hari. Hal ini merupakan sebuah *hyper* praktik akuntansi pada masa itu dan awal era pemerintahan Sultan Syarif Kasim di tahun 1908 M.

Amanah yang menarik lainnya dari surat wakaf tersebut adalah menyangkut dengan jenjang tindakan pengelolaan istana yang harus diambil sesuai dengan kondisi kerajaan di masa yang akan datang. Jenjang tindakan di maksud diawali dari pernyataan bahwa Istana Siak adalah tempat kediaman siapa pun dari keturunannya yang memerintah sebagai raja di masa yang akan datang. Jenjang kedua adalah mengharuskan melakukan mufakat antar keluarga turunan untuk menentukan siapa yang paling berhak menempati istana, jika tak satupun dari anak, cucu, cicit seterusnya dapat memerintah sebagai raja di masa yang akan datang. Tindakan ketiga adalah jika mufakat juga tidak dapat dilakukan, maka kebijakan atas keberadaan istana harus

diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa di Siak pada masa yang akan datang dan semua turunan keluarga kerajaan tidak boleh mencampurinya. Amanah berupa jenjang tindakan ini memiliki substansi yang mirip dengan substansi standar akuntansi keuangan yang umumnya menerangkan praktik-praktik sebuah transaksi.

Istana Asserayah Hasyimiah boleh disewakan kepada pihak yang mampu menyewa apabila tak satupun dari keturunan yang bersedia menempati istana, meskipun bukan memerintah sebagai raja. Penyewaan harus disepakati oleh turunan keluarga kerajaan kepada siapa pun yang ahli mendiaminya. Pernyataan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan istana dan seisinya. Menjadikan istana sebagai tempat kediaman raja yang memerintah tidak menjadi sesuatu harga mati, jika keadaan dari turunannya tidak memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa Sultan Syarif Hasyim telah memprediksi kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang, termasuk kemungkinan terputusnya silsilah kerajaan seperti yang terjadi pada tahun 1946 sampai sekarang. Unsur-unsur prediksi telah ada pada saat itu, sehingga tindakan prediksi sangat dibolehkan bagi kerajaan selanjutnya dalam pengelolaan harta.

Konsep Islam dijadikan dasar oleh kerajaan dalam pembagian pendapatan sewa menyewa dalam pengelolaan harta kerajaan. Pendapatan sewa juga harus didistribusikan kepada semua turunan yang berhak mendapatkannya, termasuk istri-istri raja. Dasar pembagiannya adalah "*Lizzakari Misla Hassil Hunsayeini*" yang berarti bahagian seorang laki-laki seumpama bahagian dua orang perempuan. Metode pembagian ini berasal dari konsep Islam dalam hal pembagian warisan kepada keluarga ahli waris. Sultan menggunakan konsep ini bukanlah untuk membagikan warisan, melainkan membagi pendapatan hasil penyewaan istana dan seisinya yang harus dirujuk oleh keturunan selanjutnya. Konten surat wakaf yang dibuat Sultan Syarif Hasyim menggunakan konsep berkelanjutan dalam hal harta, meskipun keterputusan silsilah kerajaan tidak masuk dalam prediksinya. Ini artinya bahwa beliau tidak bersedia menempatkan prediksi bangunan istana kerajaan dan seisinya akan hilang di kemudian hari. Barangkali hal inilah yang membuat bangunan istana Kerajaan Siak tetap eksis sampai sekarang, meskipun sistem kerajaan sudah tidak ada. Hal ini berbeda dengan peninggalan kerajaan lainnya yang ada di Riau maupun Riau Kepulauan.

Kandungan makna lainnya dari surat wakaf yang sekaligus juga sebagai surat wasiat adalah tidak dibenarkannya bangunan Istana Siak dan seisinya digadaikan apalagi dijual. Pesan ini tentu ditujukan bagi keturunan keluarga kerajaan di masa yang akan datang, sehingga sebagai sebuah peninggalan kerajaan, Istana Asserayah Hasyimiah sampai saat ini masih tetap dapat disaksikan. Keberadaan fisik bangunan Istana Asserayah yang ada saat sekarang, ikut memengaruhi pola kehidupan Rakyat Siak Sri Inderapura sampai dengaan saat ini. Pola kehidupan masyarakat yang agamis serta jauh dari hiruk pikuk keduniawian sangat terasa sampai saat sekarang di Siak Sri Inderapura. Hiburan dengan nuansa modern seperti di beberapa kota di daerah

Pekanbaru yang dulunya menjadi bagian wilayah Kerajaan Siak Sri Inderapura tidak akan dijumpai di Kabupaten Siak Sri Inderapura. Barangkali hal inilah yang ikut menjadi salah satu penyebab mengapa Kabupaten Siak sangat sepi dari lalu lalang mobilitas penduduk, termasuk pada jam-jam sibuk.

Bagian lain yang diatur dalam surat wakaf adalah menyangkut dengan pemeliharaan istana, apabila ternyata istana tidak bisa disewakan karena berbagai hal. Surat wakaf tersebut mengatur secara tegas berapa jumlah personil yang dibutuhkan untuk memelihara istana yang begitu luas dan seisinya. Jumlah tenaga pemelihara istana disebutkan berjumlah empat orang. Apabila jumlah empat orang ini dibandingkan dengan luasnya wilayah istana kerajaan, maka tercermin makna efisiensi dalam pemeliharaan. Secara fisik jika dilihat kondisi sekarang, maka jumlah empat orang tersebut sangatlah kurang. Namun apabila jumlah ini sengaja disebutkan, maka Sultan Syarif Hasyim tentu telah menentukannya berdasarkan kewajaran. Dalam batas kewajaran menurut beliau itulah tersirat makna efisiensi dalam pengeluaran beban pemeliharaan. Pemikiran ini tentu saja sangat sarat dan bahkan *hyper* dalam konsep beban pengelolaan harta pada saat itu.

Formalitas hukum surat wakaf atau wasiat ini sangat tinggi sebagai sebuah dokumen peninggalan, karena ditandatangani dan disaksikan oleh pihak-pihak yang berkompeten pada saat surat ini dibuat. Pihak-pihak berkompeten yang ikut menandatangani surat ini di antaranya adalah Sultan Syarif Hasyim sebagai pihak yang memberikan wasiat, Khadi Siak Sri Inderapura sebagai lembaga yang mengakomudir, Datuk Empat Kepala Suku dan Datuk Warga Dalam yang mewakili Rakyat Siak, serta Pembesar Siak yang diwakili Tengku Besar, serta saksi lainnya. Formalitas surat ini menggambarkan keseriusan surat wakaf ini dibuat sebagai sebuah regulasi yang dapat disamakan dengan standar akuntansi pengelolaan harta Kerajaan Siak pada era selanjutnya.

Standar akuntansi adalah pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam suatu lingkungan sebuah negara. Standar akuntansi memainkan peran utama dalam proses pendistribusian kekayaan dalam pasar ekonomi (Jorissen *et, al.* 2006). Surat wakaf dapat disamakan dengan standar akuntansi harta karena *pertama*, menjadi pedoman umum tentang pengelolaan harta. *Kedua*, dinyatakan oleh sultan yang berkuasa secara resmi saat itu dan *ketiga*, berlaku dalam lingkungan Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Inderapura. Surat wakaf yang dapat dikatakan sebagai standar akuntansi pengelolaan harta pada saat itu menyajikan pedoman yang singkat, sederhana dan jelas serta tegas isinya sebagai pedoman pengelolaan harta. Hal ini sangat berbeda dengan standar akuntansi di berbagai

Negara yang sangat detail dan komplex, seperti yang diungkapkan oleh hasil penelitian FEI Research Foundation (2002). Sultan Syarif Hasyim berjasa mengantarkan sebuah kerajaan selanjutnya dengan suatu aturan yang harus dipedomani.

8.2.4. Babul Al-qawa'id: Substansi Undang-Undang Bermuatan Akuntansi

Babul al-qawa'id merupakan undang-undang pertama kali yang dibuat secara sistematis dan dicetak tertulis sehingga menjadi sebuah produk undang-undang formal pertama kali sejak Kerajaan Siak berdiri. Undang-undang kerajaan ini dibuat oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1898 bersama dengan Kerapatan Dewan Kerajaan Siak serta Residen Pesisir Timur Pulau Perca mewakili Asisten Residen Di *Afdeling* Bengkalis yang sekaligus sebagai wakil dari Gubernemen Hindia Nederland yang mewakili Gubernur Jendral Hindia Nederland. Oleh karena Bab al-qawa'id dibuat bersama, maka undang-undang ini juga diberlakukan secara bersama kepada seluruh Rakyat Siak, turunan Belanda dan yang bekerja dengannya serta bangsa apa pun yang berada di Wilayah Kerajaan Siak dan taklukannya. Wilayah Kerajaan Siak pada saat itu terdiri dari 10 Provinsi, meskipun telah diciutkan Pemerintah Kolonial menjadi 5 Distrik pada saat Sultan Syarif Kasim berkuasa.

Perkara-perkara yang diatur dalam Babul Al-qawa'id adalah perkara perniagaan, perkara kehidupan lain-lain, perkara perusahaan, dan perkara utang-piutang. Sebagai sebuah undang-undang, Bab Al-qawa'id lebih banyak mengatur dari sisi hukumnya. Namun, perkara-perkara yang berkaitan dengan perniagaan, perusahaan dan utang piutang masih memiliki kaitan dengan akuntansi, meskipun dasarnya mengatur tentang hukum pelaksanaan. Struktur Bab Al-qawa'id terdiri dari 22 bab dan 154 pasal. Muatan Bab Al-Qawaid yang terkait dengan akuntansi hanya apabila kita membandingkan pembagian penyelesaian perkara oleh majelis kerapatan tinggi dan hakim polisi jajahan Negeri Siak. Perbedaan tersebut didasari pada level kewenangan hakim yang menyelesaikan perkara. Perkara yang dapat diselesaikan hakim polisi hanya menyangkut dengan perkara utang piutang paling tinggi 150 Ringgit Burung. Sedangkan perkara yang dapat ditangani oleh hakim majelis kerapatan tinggi di atas 300 Ringgit Burung. Pembagian ini mengandung makna adanya sebuah konsep materialitas, meskipun penerapannya jauh berkaitan dengan akuntansi. Namun, perbedaan berdasarkan nilai uang sebenarnya memberikan informasi bahwa telah ada penggunaan konsep materialitas ukuran uang pada masa itu.

Bagian lain dari Bab Al-Qawa'id yang masih ada hubungannya dengan praktik akuntansi harta terdapat pada bab 19 pasal 2 yang menyatakan bahwa Rakyat Siak yang memiliki hasil perkebunan tidak boleh menjual atau menggadaikan seluruh hasilnya kepada orang lain, kecuali kepada Anak Negeri Siak. Apabila penjualan tak berhingga dilakukan kepada selain Anak Negeri Siak, maka transaksi tersebut dinyatakan batal. Bab ini merupakan proteksi yang dilakukan oleh kerajaan terhadap rakyatnya. Proteksi

ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan transaksi Anak Negeri Siak, yang pada akhirnya akan memajukan dan mensejahterakan perekonomian Rakyat Siak. Perputaran harta di dalam Negeri Siak lebih diutamakan oleh kerajaan demi menjaga kelancaran lalu lintas barang dari dan ke Anak Negeri Siak.

Kedua manuskrib Surat Wakaf dan Bab Al-Qawa'id merupakan pedoman akuntansi harta yang digunakan oleh Sultan Syarif Kasim dalam pemerintahannya. Meskipun kedua dokumen tersebut dibuat pada masa Sultan Syarif Hasyim, namun efektifitas penerapannya terjadi pada masa Sultan Syarif Kasim II. Sultan Syarif Hasyim lebih berperan sebagai *feeder* yang menghasilkan dokumen monumental, karena beliau memang menyiapkannya untuk generasi kerajaan selanjutnya. Dengan demikian, kedua dokumen tersebut sebenarnya lebih berposisi sebagai wasiat bagi Sultan kerajaan selanjutnya. Sebagai sebuah wasiat, maka Sultan Syarif Kasim menjadikannya sebagai Standar Akuntansi pengelolaan harta yang harus ditaati dalam menjalankan pengelolaan kekayaan kerajaan.

8.3. SULTAN SYARIF KASIM II

Surat wasiat atau surat wakaf yang dibuat oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1904 sebagai Sultan ke sebelas dan sekaligus ayahanda dari Sultan Syarif Kasim menjadi bagian dari ekuitas yang dapat melegalkan tindakan Sultan Syarif Kasim dalam memimpin kerajaan bagi mensejahterakan rakyatnya. Surat ini juga memberikan semacam penyertaan modal Sultan Syarif Kasim untuk mengelola istana bagi rakyatnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa awal dari perlakuan akuntansi harta di Kerajaan Siak Sri Inderapura adalah dari surat wasiat atau surat wakaf ini. Surat wasiat ini juga merupakan bagian dari ekuitas dalam hak dan kewajiban Sultan Syarif Kasim sebagai raja yang berkuasa. Tindakan-tindakan Sultan yang didasari pada sebuah aturan yang telah ada sangat menentukan keberhasilan Sultan dalam memimpin secara memuaskan dan sangat terarah.

Secara akuntansi, Sultan Syarif Kasim adalah raja yang menjalankan sistem akuntansi harta berdasarkan standar akuntansi yang telah disiapkan oleh pendahulunya. Tanggung jawab beliau adalah menerapkan apa yang sudah diamanahkan dalam surat wasiat sebagai sebuah standar perlakuan akuntansi dalam pengelolaan harta. Secara proses akuntansi, ekuitas harta Sultan Syarif Kasim II berawal dari adanya surat wasiat harta yang dibuat oleh ayahandanya untuk dipermaklumkan bagi seluruh keluarga kerajaan dan turunannya serta bagi Rakyat Negeri Siak Sri Inderapura. Surat wasiat tersebut berjudul **"Kemudian Hendaklah Mengetahui"** dan sampai saat ini diletakan pada bagian ruang depan Istana Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Konstruksi akuntansi harta era Sultan Syarif Kasim dimulai dari surat wasiat ini karena peralihan kekuasaan sesungguhnya diawali pula dengan adanya amanah

dari Sultan Syarif Hasyim Sultan ke XI kepada penerus tahta kerajaan untuk dapat melaksanakannya. Konsistensi pelaksanaan surat wasiat atau dalam akuntansi dapat disetarakan sebagai sebuah standar akuntansi ini sangat ditentukan oleh konsistensi Sultan Syarif Kasim untuk melaksanakannya. Konsistensi pelaksanaan sebuah standar juga sangat ditentukan oleh bagaimana pandangan Sultan terhadap harta. Konsistensi dan pandangan sultan inilah kunci dari pelaksanaan akuntansi harta di Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Seperti telah dinyatakan pada bab sebelumnya bahwa pandangan beliau terhadap harta sangat jauh berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu. Kepribadian yang sangat mencintai ilmu dan pribadi yang sangat agamis memengaruhi pandangan Sultan terhadap harta. Beliau berpandangan bahwa harta hanya sebagai sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, beliau bukanlah seorang raja yang suka menumpuk harta dalam masa kejayaannya. Hal ini dibuktikan beliau dengan tidak terlalu tertarik untuk mengurusi harta sebagai milik pribadi. Tenas Effendy dari wawancara yang dilakukan mengutip pernyataan beliau yang mengatakan bahwa **"saya tidak mau memegang harta karena itu najis"**. Pernyataan ini merupakan pandangan beliau terhadap keberadaan harta kerajaan yang sangat berlimpah dan sangat memengaruhi pandangan beliau dalam pengelolaan harta.

Harta yang merupakan titipan Tuhan hanya digunakan sesuai dengan peruntukkannya yakni kemaslahatan bagi kerajaan dan rakyatnya. Sikap Sultan seperti ini sangat menentukan berhasilnya beliau dalam pengelolaaan harta sesuai dengan yang diamanahkan. Sikap Sultan ini dalam kenyataannya dijadikan contoh dan rujukan oleh semua orang yang bekerja dengannya dalam pengelolaan harta kerajaan. Tidak ada satu informasi miring yang ditemukan dalam pengelolaah harta selama Sultan Syarif Kasim menjadi raja yang berkuasa di Kerajaan Siak Sri Inderapura. Secara tidak disadari, Sultan telah menciptakan suatu pengendalian internal harta yang terkonsentrasi pada pribadi beliau.

8.3.1. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan masa Sultan Syarif Kasim awalnya berbentuk sistem yang lebih mengakomudir keterlibatan keluarga dalam kerajaan. Beberapa pos dalam struktur pemerintahannya harus ditempati oleh keluarga kerajaan dan orang-orang besar serta turunannya sesuai dengan ketentuan yang telah berjalan selama ini. Struktur pemerintahannya juga dimaksudkan untuk dapat mengakomudir keluarga istana agar dapat berpartisipasi dalam sistem pemerintahan. Namun dalam perkembangannya, sistem yang mengakumudir keluarga berubah sedikit demi sedikit dengan memasukan orang-orang non keturunan kerajaan atau bangsawan atau orang-orang besar menjadi bagian dalam sistem pemerintahannya.

Kebijakan memasukkan orang-orang luar kerajaan kedalam struktur pemerintahan menunjukkan bahwa Sultan telah merombak tradisi mainstream selama ini menjadi non mainstream. Kebijakan ini dilakukan Sultan karena pandangannya terhadap beberapa keluarga yang mengisi jabatan tidak memiliki kapasitas dalam membantu pemerintahannya. Sikap Sultan Syarif Kasim terungkap secara tegas pada saat peneliti menanyakan soal keberadaan catatan akuntansi dengan informan Syafe'I sebagai berikut ini.

> "Sultan Siak administrasinya bagus. Tak mungkin dia tak punya catatan. Catatan keuangan SSQ pasti ada di lemari Istana Siak. Sultan membangun administrasi dengan baik. Beliau sudah mengambil orang luar untuk membantunya. Jadi dia adalah seorang manajer yang memiliki profesional. Jadi catatan akuntansi itu pasti ada, karena beliau sangat tertib dalam administrasi. Namun apakah catatan tersebut secara fisik masih ada atau tidak, saya tidak tahu".

Gambar 8.2: Struktur Pemerintahan Sultan

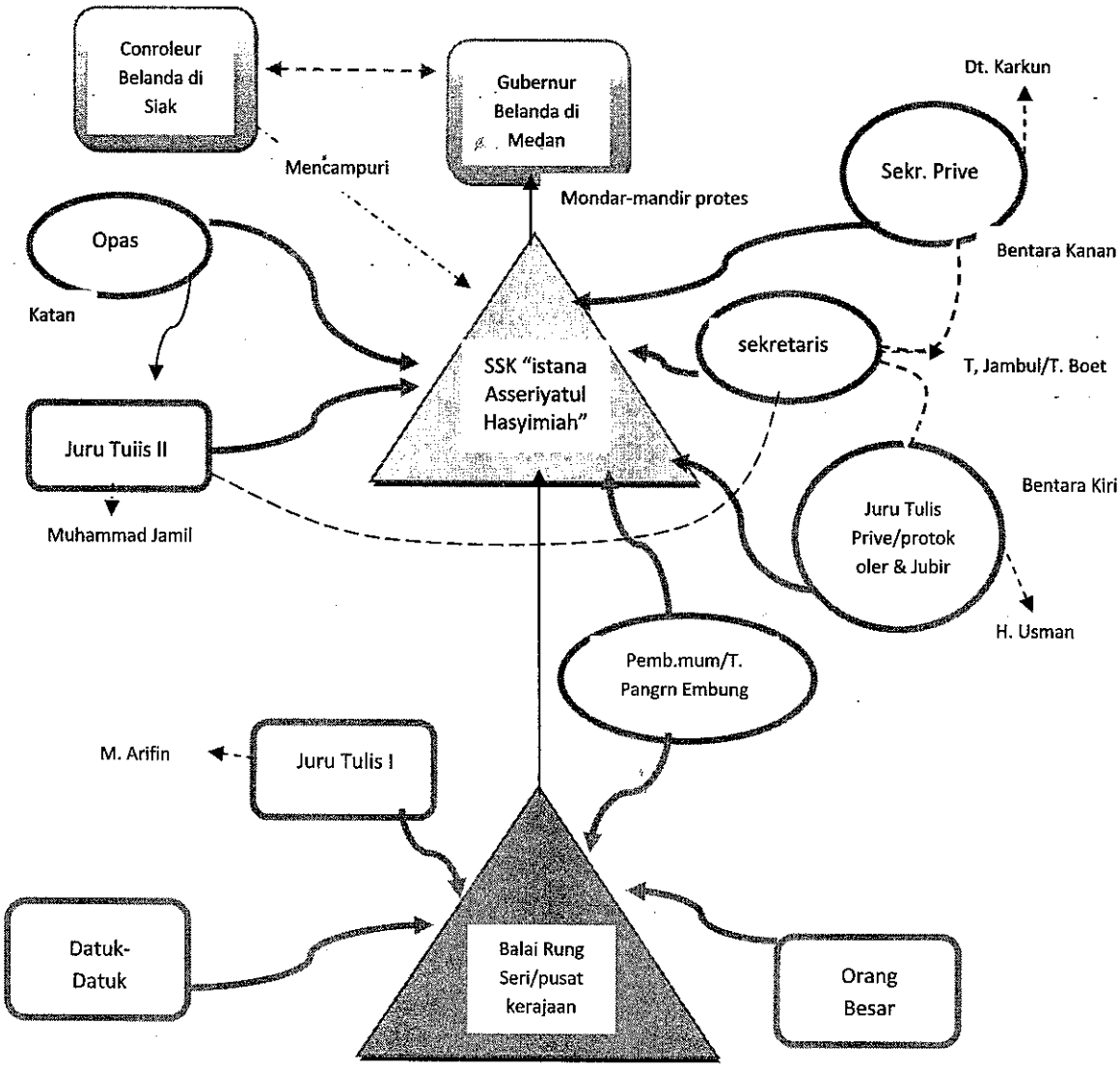

Sumber: Disimpulkan dari catatan Muhamad Jamil

Berdasarkan catatan Muhammad Jamil sebagai sekretaris pribadi Sultan, yang ada pada Nizami, dapat digambarkan struktur pemerintahan awal Sultan Syarif Kasim seperti disajikan pada Gambar 8.2 di atas. Sistem pertanggungjawaban semuanya diambil alih oleh beliau. Apa pun yang terjadi merupakan tanggung jawab beliau. Elemen-elemen sistem hanya betul-betul membantu beliau tanpa ambil tanggung jawab dan ide-ide ada pada beliau. Belanda mencampuri setiap elemen sistem yang bertujuan untuk merusak agar tidak efektif.

8.3.2. Sistem Operasional Kerajaan

Sultan Syarif Kasim dalam menjalankan pemerintahannya telah memiliki struktur organisasi pemerintahan. Namun sistem pemerintahan ini mengalami perubahan sebagai akibat dari campur tangan Pemerintah Kolonial yang setiap saat berusaha untuk mengacaukan struktur pemerintahan tersebut. Banyak beberapa unit dan personal yang telah dipecat oleh Pemerintah Kolonial, tidak mendapatkan penggantian personal, sehingga dibiarkan kosong. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, sultan tidak terlalu menghiraukan sistem tersebut. Secara pemerintahan, struktur tersebut merupakan struktur yang tetap berlaku dalam kerajaan. Namun secara operasional, sistem yang dijalankan sultan digambarkan pada gambar 8.3.

Surat wakaf dalam praktiknya tetap dijadikan dasar dalam sistem operasional kerajaan secara keseluruhan. Gambar 8.3. yang disajikan di bawah ini, menjelaskan bagaimana struktur sistem operasional kerajaan yang berlangsung selama era Sultan Syarif Kasim. Gambar ini merupakan hasil konstruksi yang dieksplorasi dari para informan yang memiliki kompetensi dalam memberikan informasi tentang Kerajaan Siak di era Sultan Syarif Kasim II. Proses eksplorasi telah disajikan pada bab-bab sebelumnya yang berisi tentang berbagai analisis terhadap sumber-sumber data serta mengkonfirmasikannya kepada para informan sebagai bagian dari proses konstruksi.

Meskipun sebagian besar orang tua yang langsung mengalami dan memahami situasi pada masa Sultan Syarif Kasim telah tiada, namun generasi pertama dari beberapa orang tokoh Siak masih ada, dan dapat berkomunikasi dengan baik.

Gambar. 8.3: Sistem Oprerasional Kerajaan Era Sultan Syarif Kasim II

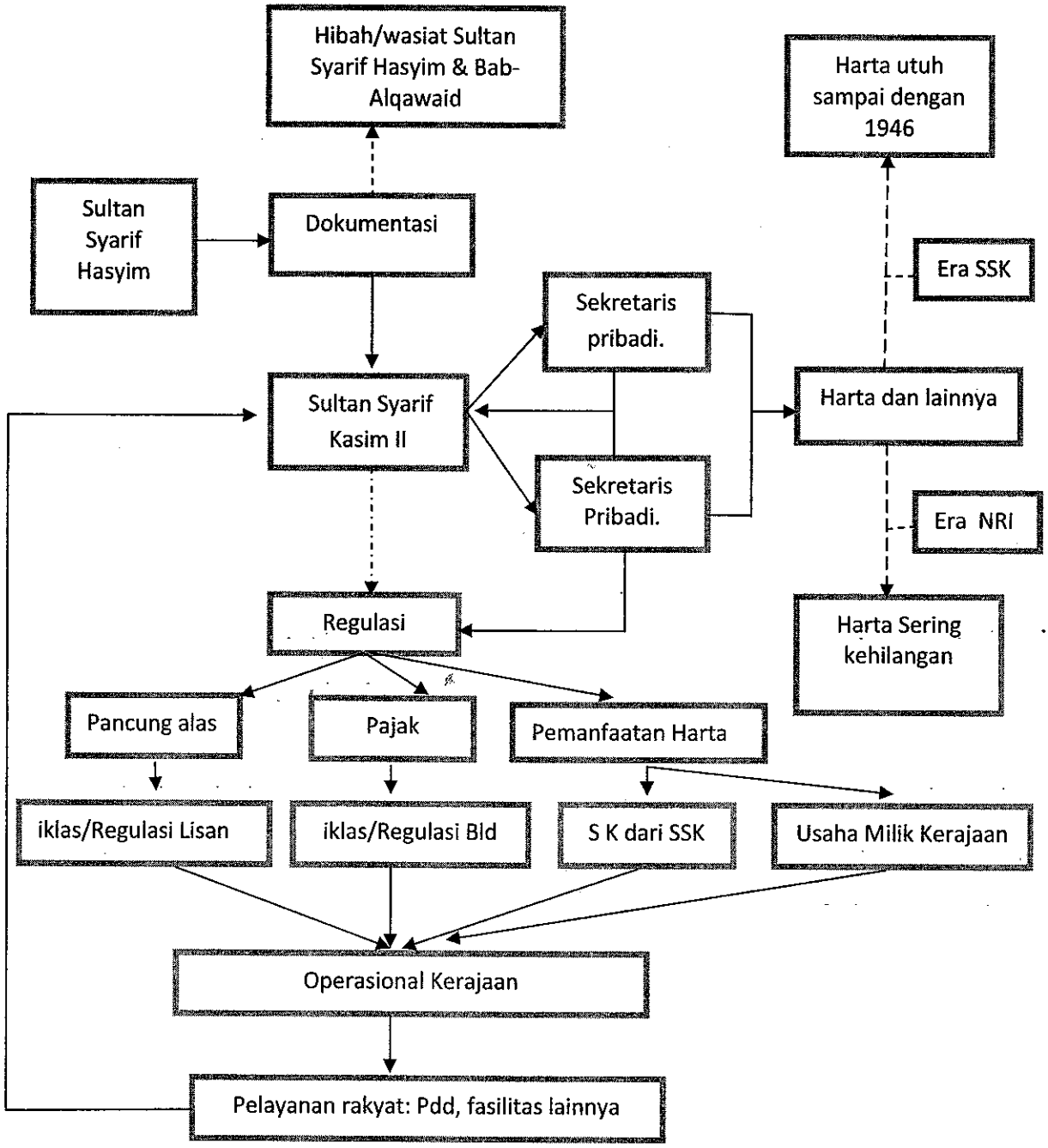

Sumber: Dikembangkan Dari Beberapa Sumber

Keterangan Singkatan:

Bld = Belanda, SK = Surat Keterangan, SSK = Sultan Syarif Kasim, NRI = Negara Republik Indonesia,

Saat terjun kelapangan periode 2012-2013 di Siak, memang masih ada beberapa tokoh tua yang langsung mengalami dan memahami masa Pemerintahan Sultan Syarif Kasim, namun mereka setelah dihubungi tidak dapat lagi berkomunikasi, tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar pembicaraan orang lain. Melalui putra dari

beberapa tokoh yang selama ini konsen dan memiliki dokumen, maka dikonstruksilah bagaimana struktur sistem operasional yang diterapkan pada saat itu. Beberapa dokumen penting hasil penelusuran yang dimiliki oleh beberapa tokoh generasi dua juga telah dapat diperoleh.

Konstruksi sistem operasional ini merupakan bagian dari episteme akuntansi yang digabung dari dua era yakni era Sultan Syarif Hasyim dan era Sultan Syarif Kasim. Era Sultan Syarif Hasyim menjelaskan tentang dua hal penting yakni Surat Wakaf dan Bab Al-qawa'id yang merupakan produk masa beliau menjadi Sultan Siak ke sebelas. Sedangkan era Sultan Syarif Kasim yang menjadi fokus penelitian ini mengungkap tentang pengawasan yang tercipta, regulasi yang dikeluarkan, dan pertanggungjawaban harta Sultan. Penjelasan dan uraian tentang masing-masing elemen menjadi tema besar yang akan dijelaskan pada bab Sembilan dan sekaligus sebagai pembuktian dari episteme akuntansi pada masa Sultan Syarif Kasim.

Pernyataan Chua (1986) yang mengatakan bahwa Pengetahuan akuntansi dihasilkan oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan tentang masyarakat serta untuk kepentingan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya adalah pendapat yang tidak terbantahkan. Kebenaran pendapat ini juga didukung oleh pernyataan yang mengatakan bahwa Akuntansi merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat (Grojer and Stark, 1977). Filosofi Foucault yang menyatakan bahwa setiap masa (*epoch*) sejarah mempunyai "sistem pemikiran yang menentukan bagaimana pengetahuan dapat dipraktikan pada masa tersebut" belum terfalsifikasi oleh penolakan terhadap pemikirannya. Konstruksi sistem operasional kerajaan selengkapnya telah disajikan pada gambar 8.3 di atas.

Konstruksi sistem operasional seperti telah ditegaskan sebelumnya, tetap diawali dari manuskrip berupa Surat Wakaf atau Wasiat dan Bab Al-qawa'id yang dibuat oleh Sultan Syarif Hasyim pada masa beliau menjadi Sultan ke XI. Kedua naskah ini merupakan dokumen yang sangat monumental bagi Sultan Syarif Hasyim untuk dijalankan oleh raja yang berkuasa pada pemerintahan selanjutnya. Sesuai dengan amanah, maka dokumen Surat Wasiat dan Bab Al-qawa'id digunakan oleh Sultan Syarif Kasim Sani sebagai dasar dan peraturan yang harus diikuti dalam sistem Kerajaan Siak Sri Inderapura. Kedua naskah inilah yang berperan sebagai regulasi yang mengatur berbagai kebijakan terkait dengan akuntansi harta. Sultan Syarif Kasim pada masa berkuasa, konsisten menjalankan isi dari dokumen ini, sebagai sebuah undang-undang dan standar perlakuan akuntansi harta pada era beliau menjadi sultan. Komitmen untuk menjalankan isi Surat Wakaf dan Bab Alqawaid cerminan dari kejujuran dan berpegang teguh pada amanah yang dijalankan oleh Sultan Syarif Kasim.

Konsistensi Sultan Syarif Kasim II dalam menjalankan undang-undang dan Surat Wakaf/Hibah sudah menjadi komitmen beliau. Beliau dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh sekretaris pribadi yang dipercayakannya untuk

mengelola harta kekayaan dan keuangannya. Namun, tanggung jawab pelaksanaan dan kebijakan yang dikeluarkan, langsung dilakukan oleh Sultan. Sekretaris pribadi hanya berfungsi sebagai pelaksana, termasuk dalam memberikan input kepada sultan dalam hal harta dan keuangan kerajaan. Oleh sebab itu, sekretaris pribadi menerima tugas dan bertanggung jawab langsung kepada sultan.

Sekretaris yang telah berjasa dalam membantu sultan dengan baik dan profesional, akan mendapat gelar kehormatan yang diberikan oleh Sultan Syarif Kasim seperti yang diterima oleh Muhammad Jamil. Sekretaris pribadi menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dengan loyalitas yang sangat tinggi. Hal ini dapat dipahami karena untuk menjadi sekretaris Sultan bukanlah hal mudah, apalagi Sultan mengangkatnya dari kalangan orang biasa, bukan keluarga. Di samping sebagai sebuah kehormatan, juga menjadi kebanggaan bagi rakyat biasa untuk dapat mendampingi Sultan yang pada saat itu merupakan impian semua orang khususnya orang dari luar istana.

8.3.3. Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang dibuat Sultan tidak lepas dari hasil karakter Sultan yang sangat agamis, yang mendorong sikap beliau untuk tidak tertarik dalam menambah harta kekayaan kecuali memelihara peninggalan ayahandanya. Hal ini seiring dengan pernyataan OK Nizami bahwa Sultan sangat jarang melakukan transaksi pembelian harta, kecuali hanya untuk kebutuhan operasional yang dipercayakannya pada ayah dari OK Nizami yakni Muhammad Jamil sebagai sekretaris pribadi. Hasil ekspor perkebunan dan perikanan Siak Sri Inderapura misalnya, hanya diprioritaskan Sultan untuk membangun daerahnya dan memakmurkan rakyatnya. Pengabdian untuk memakmurkan rakyatnya adalah bagian kepuasan yang tak ternilai bagi sultan itu sendiri.

Pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Sultan ditekankan pada tanggung jawab pribadi beliau. Elemen sistem yang dibangun beliau sangat sederhana, yakni hanya membutuhkan seorang sekretaris pribadi untuk membantu kegiatannya sehari-hari. Elemen lainnya sebagai bagian dari system seperti para datuk dan kepala suku tetap difungsikannya sebagai wakil dari rakyat suku masing-masing. Namun dalam berkomunikasi, tetap dibantu oleh sekretaris pribadi beliau. Mata rantai system akuntansi beliau sangat pendek sehingga semua keputusan dapat segera diambil. Semua aliran pemasukan kerajaan dari pancung alas, pajak, dan pemanfaatan harta lainnya dijalankan melalui sekretaris pribadi.

Penyalahgunaan harta seperti pencurian, penggelapan harta, ataupun bentuk manipulasi harta kerajaan lainnya selama beliau menjadi sultan belum pernah ditemukan. Padahal kalau dilihat dari sistem yang sangat sederhana, luasnya transaksi yang terkait dengan harta dan penghasilan rakyat lainnya, sangat terbuka peluang untuk melakukannya bagi setiap orang khususnya oleh orang dalam sendiri. Potensi

manipulasi lainnya adalah terkait dengan pengelolaan sumber pendapatan kerajaan yang berasal dari pancung alas dan pajak karena berada di luar area istana, namun belum ada informasi terkait dengan itu. Inilah esensi kualitas internal yang dibangun berdasarkan figur Sultan yang sangat disegani dan disayangi oleh rakyatnya.

Praktik pengendalian yang terjadi masa Sulan Syarif Kasim memberikan inspirasi bahwa kualitas pengendalian internal dari sebuah sistem akuntansi bukan hanya terletak pada kelengkapan elemen pengendalian yang dibuat, namun juga ditentukan oleh wibawa siapa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem tersebut. Bangunan sistem yang sangat sederhana seperti terjadi pada masa Sultan Siak, tidak serta merta mudah menimbulkan berbagai tindakan kecurangan oleh karena wibawa Sang Raja. Kesimpulan ini paling tidak terbukti ketika Kerajaan Siak sudah tidak aktif dan Mahkota Kerajaan sebagai simbol kedaulatan kerajaan telah diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Setelah sultan tidak lagi menjadi raja dan masyarakat semua mengetahui bahwa sultan juga tidak berada di Riau, berbagai kejahatan seperti pencurian dan penyalahgunaan harta kerajaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah malah banyak terjadi. Tindakan pencurian dan penjualan harta sering terjadi baik dilakukan oleh orang luar keluarga kerajaan maupun oleh orang dalam kerajaan sendiri. Ini sebagai akibat sudah tidak ada lagi yang dipandang dan disegani sehingga potensi manipulasi sangat sering terjadi, meskipun standar akuntansi berupa wasiat diketahui oleh semua orang.

8.3.4. Sekretaris Pribadi

Ujung tombak dalam pelaksanaan operasional Kerajaan Siak semasa Sultan Syarif Kasim adalah sekretaris pribadi. Beliau menggunakan sekretaris pribadi yang direkrut berdasarkan kemampuan seseorang dan kepercayaan beliau terhadap seseorang tersebut, tanpa melihat asal usul turunannya. Sekretaris pribadi sultan pada hakekatnya merupakan jabatan yang harus disandang oleh pihak keluarga kerajaan atau turunan pembesar kerajaan. Sekretaris pribadi Sultan selama beliau menjadi raja, hanya dipercayakan pada satu orang saja untuk membantu beliau dalam mengelola harta dan keuangan kerajaan. Pada sekretaris pribadi inilah, semua persoalan yang harus diselesaikan oleh sultan dipusatkan. Dengan demikian, sekretaris pribadi merupakan ujung tombak dan sentral pengendalian operasional kerajaan pada masa Sultan Syarif Kasim.

Meskipun Sultan hanya membutuhkan satu orang sekretaris pribadi dalam pengelolaan harta dan lainnya, semua persoalan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tokoh sentral yang menjabat sekretaris pribadi sultan sampai dengan Kemerdekaan Republik Indonesia adalah O.K. Muhammad Jamil yang merupakan ayah kandung dari informan Nizami Jamil. Integritas seorang sekretaris pribadi pada saat itu sangat

menentukan lancar tidaknya semua persoalan yang menjadi tugas sultan, terutama dalam hal terjadinya penyimpangan. Selama Sultan Syarif Kasim mempercayakan semua persoalan operasional dan keuangannya serta pengelolaan harta kerajaan kepada satu orang sekretaris, belum terdapat informasi tentang penyalahgunaan harta kerajaan.

Sekretaris yang telah berjasa membantu sultan dengan baik dan profesional, diberi gelar kehormatan oleh Sultan Syarif Kasim. Gelar tersebut merupakan gelar yang bersifat individual yang hanya melekat pada seseorang yang memperolehnya, seperti yang diterima oleh Muhammad Jamil dengan gelar Orang Kaya. Orang Kaya merupakan gelar untuk seseorang yang dinyatakan cakap dalam membantu tugas-tugas kesultanan. Sekretaris pribadi menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dengan loyalitas yang sangat tinggi. Hal ini dapat dipahami karena untuk menjadi sekretaris Sultan bukanlah hal mudah, apalagi Sultan mengangkatnya dari kalangan orang biasa, bukan keluarga. Di samping sebagai sebuah kehormatan, juga menjadi kebanggaan bagi rakyat biasa untuk dapat mendampingi Sultan yang pada saat itu merupakan impian semua orang khsususnya orang dari luar istana.

Sekeretaris pribadi berfungsi untuk menjembatani antara rakyat, lembaga Balai Rung Sari, kepala suku dan pembesar kerajaan lainnya yang ingin berinteraksi dengan sultan. Peran sekretaris pribadi sangat besar, karena kenyataannya hampir semua kegiatan sultan dikerjakan oleh sekretaris pribadinya. Hal ini terlihat sekali dari peran Muhammad Jamil selama beliau menjadi sekretaris sultan. Sekretaris pribadi sultan, ikut menjadi bagian penentu dari elemen yang membangun pengendalian internal dalam sistem operasional kerajaan. Sekretaris pribadi yang mendapat kepercayaan sultan dan rasa hormat rakyat terhadap sultan, merupakan elemen pengendalian internal yang ikut berperan dalam memelihara harta kerajaan, sehingga keberadaan harta dapat utuh sampai dengan penyerahan semua harta milik kerajaan ke Negara Republik Indonesia tahun 1946.

Kondisi ini berbanding terbalik pada saat bergabung dengan Negara Republik Indonesia yakni istana kerajaan telah diserahkan kepada Pemerintah. Istana kerajaan bukan lagi menjadi milik kerajaan dan keluarga, tidak adanya panutan dalam pengelolaan harta kerajaan serta tidak adanya ikatan emosional dalam memiliki kerajaan, menyebabkan berbagai tindakan pencurian dan manipulasi harta terjadi dengan lincahnya. Mulai dari pencurian kursi yang terjadi pada akhir –akhir masa kehidupan Sultan Syarif Kasim maupun setelah beliau wafat.

7.2.5. Regulasi

Bab Al-Qawa'id dan Surat Wasiat yang merupakan manuskrip peninggalan Sultan Syarif Hasyim dapat dijadikan bukti tentang adanya pelaksanaan akuntansi harta pada masa Sultan Syarif Kasim. Hubungan estafet antara Sultan ke sebelas dan

Sultan keduabelas adalah dalam bentuk, Sultan kesebelas sebagai pembuat kedua manuskrib tersebut dan Sultan ke duabelas yang melaksanakannya. Berdasarkan kedua manusrib itu pula dapat diperoleh informasi mengenai aktivitas akuntansi harta yang diberlakukan meskipun barangkali pelaku sendiri tidak menyadarinya sama sekali. Naskah yang merupakan bagian dari manuskrib dihasilkan karena telah adanya tradisi tulis pada saat Sultan Syarif Hasyim yang dapat mengatur secara luas berbagai aspek sosial, hukum dan keuangan dalam wilayah kekuasaan kerajaan.

Karya tulis tangan ataupun telah tercetak pada masa Sultan Syarif Hasyim ke Sultan Syarif Kasim merupakan ungkapan pikiran, perasaan, dan gagasan yang dapat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, kebahasaan, kesasteraan, kesejarahan, filsafat, standar moral, peraturan atau hukum dan lain-lainnya. Oleh sebab itu naskah sangat memadai untuk dijadikan sebagai sumber utama dalam menelusuri sejarah kebudayaan Kerajaan Siak Sri Inderapura khususnya di bidang akuntansi. Selain regulasi yang menjadi warisan dari Sultan kesebelas, di masa Sultan Syarif kasim juga telah mengeluarkan regulasi-regulasi yang lebih bersifat pada pengaturan teknis operasional di wilayah kerajaan. Pengaturan teknis tersebut umumnya terkait dengan pengaturan sumber pendapatan kerajaan.

Terdapat tiga sumber utama pendapatan kerajaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya yakni Pancung alas, pajak dan pemanfaatan harta di sekitar wilayah istana yakni Siak Sri Inderapura maupun di semua wilayah taklukannya. Ketiga sumber pendapatan dilaksanakan dengan sebuah regulasi yang ditetapkan oleh Sultan Syarif Kasim baik lisan maupun tulisan. Berikut dijelaskan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan terkait dengan sumber-sumber pendapatan tersebut.

8.3.6. Pancung Alas

Pancung alas adalah sumbangan rakyat kepada kerajaan berupa hasil pertanian atau perkebunan atau pemanfaatan hutan serta hasil laut yang dikelola rakyat atas himbauan atau seijin Sultan. Sumber pendapatan yang berasal dari pancung alas, dilaksanakan dan diatur sultan dengan menggunakan *regulasi lisan* berupa himbauan kepada semua Rakyat Siak untuk memanfaatkan semua lahan-lahan kosong yang berada diseluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Siak. Himbauan Sultan yang merupakan bagian dari ijin yang diberikan secara lisan, sebenarnya juga telah diatur secara tertulis di mana rakyat yang ingin menggarap tanah harus mendapatkan surat pemakaian (grand) dari Sultan, namun hal ini hanya berlaku pada wilayah yang berada di wilayah Siak Sri Inderapura.

Wilayah kekuasaan Kerajaan Siak begitu luasnya dan masih memiliki banyak lahan yang belum dimanfaatkan oleh Rakyat Siak. Oleh sebab itu, himbauan yang merupakan regulasi lisan disampaikan oleh Sultan pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan rakyatnya ataupun melalui Datuk Kepala Suku yang menguasai wilayahnya masing-

masing. Hal yang menarik dari pancung alas ini adalah tidak adanya ketentuan tertulis mengenai berapa besar bagian yang disetorkan rakyat sebagai penggarap kepada kerajaan, kecuali rakyat memahami bagi dua. Namun, seandainya tidak ada besaran yang harus diserahkan dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkan, rakyat secara suka rela tetap memberikannya kepada istana untuk bekal kebutuhan sehari-hari keluarga kerajaan. Sultan juga tidak pernah mempersoalkan berapa besarnya dan apakah menyerahkan atau tidak, meski telah ada kesepahaman rakyat tentang bagi dua. Komunikasi usaha yang dilakukan Sultan seperti ini secara sadar atau tidak didasari oleh karena rasa cinta Sultan kepada rakyatnya dan cinta rakyat kepada rajanya. Tidak ada bukti dan informasi yang didapati terkait dengan permasalahan dengan pancung alas ini.

Dasar penyerahan atau sumbangan pancung alas oleh rakyat kepada istana adalah keiklasan dan hal ini berlangsung secara terus-menerus selama Sultan Syarif Kasim berkuasa. Sultan Syarif Kasim sangat mengerti atas usaha rakyatnya sehingga tidak ada paksaan untuk harus menyerahkan. Rakyat hanya menyerahkan hasil apabila memang ada yang akan diserahkan. Kebijakan yang sangat manusiawi inilah yang berdampak pada keiklasan rakyat pula untuk tetap berusaha memberikan kepada rajanya berupa hasil pertanian, perkebunan maupun perairan laut dan sungai.

Pancung alas merupakan bagian kontribusi hasil pruduksi pertanian rakyat yang diserahkan kepada kerajaan karena menggunakan tanah garapan di wilayah kerajaan. Besarnya pancung alas yang harus diberikan kepada kerajaan oleh rakyat semasa sultan adalah seiklasnya, meskipun sultan telah membuat aturan bagi dua. Hasil garapan dapat diberikan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang burung (mata uang yang berlaku saat itu). Besarnya pembagian pancung alas terkonfirmasi melalui informan Nizami sebagai berikut.

> "Pancung alas, membagi 2 hasil dari tanah garapan yang dikelola rakyat dengan Kerajaan Sultan Syarif Kasim atas dasar kepercayaan. Kerajaan tak punya hak ulayat seperti di Sumatera Barat".

Pancung alas yang dilaksanakan atas dasar kepercayaan, merupakan pola hubungan yang baik dan saling percaya antara Sultan Siak dengan rakyatnya. Pola kepercayaan ini tentu saja berawal dari kepercayaan sultan kepada rakyatnya dan rakyat menyambut kepercayaan tersebut dengan bertanggung jawab. Pola ini memberikan suatu pembelajaran kejujuran kepada Rakyat Siak, sehingga secara mental memberikan suatu kebanggaan rakyat untuk dapat dipercaya oleh rajanya. Kepercayaan yang telah diberikan oleh raja kepada rakyatnya dikontrol dengan adanya sangsi yang tegas apabila kepercayaan tersebut dilanggar. Sultan Syarif Kasim terkenal dengan ketegasannya untuk memberikan sangsi atas pelanggaran yang telah diberikannya. Ketegasan Sultan Syarif Kasim terkonfirmasi dari pernyataan Nizami sebagai berikut.

"Sultan Syarif Kasim sangat tegas dengan penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang sudah dipercayainya. Ada yang salah urus, kenak, berhenti. Kenak berhenti adalah sangsi yang diberikan secara langsung apabila terjadi penyimpangan. Dio sangat tegas dalam pengawasan".

Ketentuan pembagian pancung alas meskipun sudah ditentukan secara lisan dan telah dimaklumi oleh Rakyat Siak, dalam penerapannya tidak harus seperti yang telah ditentukan dan dipaksakan. Pada kenyataannya keiklasan adalah inti dari pembagian tersebut. Sultan Syarif Kasim sangat memahami kondisi rakyatnya, selama tidak dilakukan dalam konteks untuk menghindari pancung alas. Pada hakekatnya hasil pertanian atau garapan dapat memberikan hasil yang maksimum, cukup dan bahkan apa adanya. Konteks kondisi hasil yang diperoleh rakyat inilah, sultan tidak mau memaksakannya apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan rakyatnya. Hal ini terungkap dalam konfirmasi dengan informan Tenas Effendy sebagai berikut.

"Sultan Syarif Kasim selalu menerima pancung alas dari rakyatnya dengan ramah dan senyum dan berapa pun yang disetorkan rakyatnya kepada kerajaan. Kadangkala rakyatnya selalu memberikan dalam bantuk hasil perkebunan secara langsung dan beliau menerima saja. Tuduhan-tuduhan oleh Belanda bahwa beliau korupsi, Itu tak benar, namanya rakyat sering saja memberi hasil garapan secara langsung dan berapa pun. Mungkin Belanda tidak suka sikap seperti ini".

Sebagai kompensasi keiklasan Sultan menerima berapa pun dan dalam bentuk apa pun, justru menyebabkan rakyatnya tidak ada yang keberatan untuk membagi hasilnya dengan kerajaan. Sultan pada intinya tidak pernah merasa kesal dan memaksakan rakyatnya harus memberikan sejumlah tertentu dan harus dalam bentuk uang karena beliau sangat mengerti dengan keadaan rakyatnya. Keiklasan sultan inilah yang menyebabkan Belanda menganggap Sultan tidak konsisten dengan aturan dan mengatakan Sultan korup dalam kebijakan pancung alas. Barangkali Sultan sangat memahami bagaimana prilaku Belanda yang selalu melampaui batas atau pemerasan dari pembesar-pembesar pribumi yang bekerja untuk Belanda sejak mengambil alih VOC yang bangkrut tahun 1800 (Kartodirdjo, 1990). Prilaku pemaksaan Belanda dan pemerasan oleh orang-orang yang bekerja untuk Belanda yang mungkin masih terjadi pada masa beliau sangat ditantangnya.

Kebijakan pancung alas yang dilakukan Sultan kepada rakyatnya mendapat kritikan dan kecaman dari pihak Pemerintah Kolonial yang menginginkan ketidakharmonisan antara Sultan dan rakyat. Adanya kebijakan pancung alas yang dilaksanakan pada aturan lisan memunculkan suatu simpulan bahwa praktik akuntansi pada saat itu dapat berjalan secara tulus dan iklas sehingga berbagai manipulasi ataupun kecurangan rakyat kepada kerajaan dan paksaan kerajaan kepada rakyat tidak terjadi. Kebijakan

pancung alas justru menimbulkan kebanggaan rakyatnya apabila dapat memberikan sumbangan hasil garapannya kepada raja.

8.3.7. Pajak

Pendapatan yang berasal dari pajak tidak terlalu menjadi perhatian Sultan karena Belanda sangat mengatur untuk pendapatan seperti ini. Sultan hanya diberikan bagian dari penerimaan pajak oleh Belanda melalui kebijakan yang ditetapkannya. Bentuk dari kebijakan Belanda dalam hal pembagian distribusi pendapatan ini dapat dilihat pada lampiran 3. Intervensi Pemerintah Kolonial dalam hal pajak sangat kental dan sumber ini merupakan bagian penerimaan terbesar yang masuk kepada Pemerintah Belanda. Tidak ada informasi yang menarik terkait dengan pengelolaan harta dari sisi penerimaan pajak yang bisa diungkapkan pada bagian ini.

Regulasi pajak diterapkan sultan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kerajaan oleh para saudagar yang melewati atau berlabuh di pelabuhan wilayah Kerajaan Siak. Pajak dilakukan oleh aparat Syahbandar sebagai personil kerajaan dan berada di setiap pintu masuk dari dan ke kerajaan. Semasa Sultan berkuasa, penerapan pajak yang dikenakan pada setiap lalu lintas dari dan ke Wilayah Kerajaan Siak tidak terlalu menjadi perhatian karena Belanda selalu mengintervensinya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal perekonomian seperti lalu lintas perdagangan, Belanda mengaturnya dan tidak melepaskan begitu saja kepada kerajaan. Tidak terdapat informasi mengenai berapa besarnya pajak yang ditetapkan dan berapa besar pula kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan kerajaan dalam membiayai kegiatan operasional kerajaan.

Pada awal Sultan Syarif Kasim berkuasa, Belanda menerapkan kebijakan sistem penggajian kepada sultan untuk membiayai kegiatan kerajaan, sehingga secara keseluruhan Pemerintah Kolonial yang menjalankannya. Namun demikian, Pemerintah Kolonial tetap menjadikan kerajaan sebagai sentral pemikat bagi munculnya transaksi perdagangan dalam sebuah wilayah kerajaan. Peran Sultan Syarif Kasim menjadikan Kerajaan Siak sebagai pusat perdagangan dianggap sangat berhasil sehingga muncul para saudagar pribumi kaya di Negeri Siak.

8.3.8. Pemanfaatan Harta

Regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan harta terbagi kedalam dua bagian yakni pemanfaatan harta oleh rakyat yang berada di sekitar wilayah kerajaan dan pemanfaat harta oleh kerajaan di semua wilayah taklukannya. Pemanfaatan lahan yang berada di wilayah Kerajaan Siak harus mendapat ijin dari Sultan Siak sebagai bagian dari akuntansi harta pada saat itu. Ijin diberikan sebagai bagian dari legalitas yang diterima rakyat atas pengelolaan harta kerajaan, dan ijin yang diberikan kerajaan merupakan bagian dari catatan akuntansi untuk pengelolaan harta kerajaan. Sedangkan ijin pengelolaan tanah di luar area kerajaan yang menjadi wilayah kekuasaannya dibuat

dan disampaikan secara lisan. Bentuk ijin yang dikeluarkan kerajaan atas pengelolaan harta dapat dilihat pada lampiran 16. Surat ijin tidak dikeluarkan apabila kerajaan langsung memanfaatkannya melalui berbagai kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan kerajaan memiliki banyak bentuk dan semua hasilnya menjadi bagian dari pundi-pundi keuangan kerajaaan dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Kegiatan kerajaan yang mengelola lahan usaha tersebar pada beberapa wilayah di luar Siak Sri Inderapura.

Regulasi tentang pemanfaatan harta kerajaan dikeluarkan oleh Sultan untuk rakyat yang ingin memanfaatkan harta berupa wilayah pertanian atau perkebunan. Rakyat memang dianjurkan Sultan untuk bertani dan berkebun dengan memanfaatkan tanah kosong yang ada. Setiap pemanfaatan tanah kosong oleh rakyat, sultan akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tanah tersebut secara syah bisa digunakan untuk orang yang dituju dalam surat tersebut. Surat yang dikeluarkan Sultan ini merupakan bagian dari dokumentasi akuntansi pengelolaan harta kerajaan. Pelaksanaan penggunaan harta berupa perkebunan dan pertanian wilayah kerajaan diserahkan kepada para pembesar kerajaan yakni para kepala suku. Kekayaan harta berupa tanah wilayah kekuasaan kerajaan merupakan bagian dari harta Swapraja, yang keberadaannya sangat ditentukan oleh Pemerintah Kolonial pada saat itu. Oleh sebab itu, harta kerajaan berupa Swapraja bukanlah merupakan harta milik kerajaan karena keberadaannya sangat ditentukan oleh kekuasaan yang diatur oleh Pemerintah Kolonial.

Perkebunan karet terdapat di wilayah Balai Kayang yang dikelola dengan nama Balai Kayang Estate. Selanjunya di Okura yang dikelola dengan nama Okura Estate dan di Lubuk Ampoi yang dikelola dengan nama Ampoi Estate (Aziz, 1991). Semua wilayah tersebut berada di Daerah Siak Sri Inderapura. Perkebunan sagu terdapat di Daerah Selat Panjang tepatnya di Wilayah Merbau. Perkebunan kelapa terdapat di Wilayah Tanjung Layang daerah Sungai Apit. Terakhir perkebunan durian terdapat di Daerah Pebeda dekat Dusun Pusaka dan Menayah. Kegiatan perkebunan ini tetap dilaksanakan oleh sultan meskipun berada pada situasi tekanan Belanda. Kegiatan perkebunan ini merupakan salah satu bagian dari harta kerajaan yang dikuasai oleh Sultan Syarif Kasim. Hasil perkebunan ini dijadikan sebagai sumber pendapatan kerajaan untuk membiayai berbagai kebutuhan kerajaan.

Potensi hutan Wilayah Kerajaan Siak yang ditanami banyak pohon besar umumnya menghasilkan berbagai macam bentuk produk. Pohon Sialang dijadikan sebagai tempat lebah berkumpul yang akan menghasilkan madu lebah. Pohon Seminai dapat menghasilkan minyak goreng untuk masak memasak. Kayu kapur dapat menghasilkan kapur barus yang sangat bermanfaat pada waktu itu. Kayu kruing dapat menghasilkan minyak kruing dan kayu balam dapat menghasilkan buah balam sebagai bahan mentah untuk menghasilkan minyak. Semua pohon-pohon besar yang tumbuh

di hutan Siak Sri Inderapura dilindungi oleh kerajaan dan tidak boleh ditebang sebagai harta milik bersama. Komitmen kerajaan masa Sultan Syarif Kasim inilah sebagai bukti bahwa harta kerajaan dilindungi dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat negeri. Kenyataan ini dibenarkan oleh OK Nizami yang mengatakan bahwa "harta Kerajaan Siak oleh Sultan Syarif Kasim digunakan sebanyak-bayaknya untuk kemaslahatan rakyatnya".

Aktivitas ekonomi lainnya yang dijalankan oleh kerajaan adalah di bidang perikanan. Potensi hasil bidang perikanan sangat tinggi disebabkan oleh karena sebagian besar wilayah Kerajaan Siak berada di pinggir Sungai Siak, dan daerah taklukannya berada di pinggir lautan seperti Bagan Siapi-Api. Potensi geografis seperti inilah yang menyebabkan sebagian sumber aktivitas perekonomian kerajaan dan rakyatnya berasal dari kegiatan nelayan. Hasil nelayan untuk Kerajaan Siak terutama berasal dari Bengkalis dan Bagan Siapi-Api yang sampai dengan tahun 70an masih terkenal sebagai penghasil ikan terbesar di dunia. Pernyataan bahwa Bagan Siapi-Api penghasil ikan terbesar diungkapkan oleh informan Syafe'i yang merupakan putra asli daerah tersebut seperti pernyataan berikut.

> "Saya masih ingat betul dan tentu saja kamu yang memang pernah besar di sana. Bagan Siapi-Api penghasil ikan terbesar di dunia pada saat itu dan sampai dengan tahun 70an masih menghasilkan ikan terbesar. Namun saat ini tidak ada lagi karena berbagai perubahan struktur alam seperti sungai yang bernama sungai Garam yang dulunya lebar dan dalam sehingga dapat dimasuki oleh kapal, saat ini sudah menjadi daratan. Laut yang dulunya lebar dan dalam saat ini sudah menjadi daratan".

Hubungan timbal balik dari ekspor perkebunan dan perikanan Sultan ke Singapura berupa impor bahan kebutuhan Rakyat Kerajaan Siak. Kebutuhan tersebut berupa bahan textile seperti pakaian, bahan tenunan, dan beras (Aziz, 1984). Distribusi penjualan hasil bumi dilaksanakan oleh China yang umumnya menguasai jalur pendistribusian. Transportasi yang digunakan Sultan untuk memperlancar proses perdagangan ini menggunakan kapal sendiri yang saat itu bernama kapal Tongkang. Hal ini membuat proses perdagangan yang dijalankan oleh Sultan sangat lancar untuk berhubungan dengan luar negeri terutama antara Kerajaan Siak dengan Singapura.

8.3.9. Pendidikan, Konsep Keuangan, dan Akuntansi

Penerimaan kerajaan dari berbagai sumber yang ada digunakan untuk membiayai operasional kerajaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Sultan kepada Belanda adalah dengan mencerdaskan rakyatnya. Melalui pendidikan, Sultan sangat berharap rakyatnya dapat mensejahterakan dirinya melalui

kemampuan intelektual yang dimiliki. Melalui rencana pembangunan pendidikan ini pula muncul adanya kegiatan yang berkaitan dengan rencana keuangan. Proses pengembangan pendidikan dilakukan oleh kerajaan dengan sebuah rencana tahunan. Rencana tahunan untuk pengembangan pendidikan dilakukan melalui proses rapat tahunan kerajaan. Muatan rapat tahunan di samping merencanakan di bidang pemerintahan khususnya pendidikan, juga membuat rencana tentang keuangan. Kegiatan inilah yang menjadi muara adanya rapat keuangan yang berimplikasi kepada aktivitas akuntansi pada saat itu. Aktivitas keuangan sudah menjadi bagian dari cara penyelesaian dalam menjalankan berbagai program kerajaan tahunan.

Bentuk tanggung jawab Sultan atas penggunaan dana kerajaan yang paling menonjol adalah dengan membangun berbagai lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya pada saat itu. Beliau menyadari bahwa pendidikan yang diusahakan oleh Belanda di Siak saat itu bukanlah untuk rakyatnya, melainkan untuk kepentingan Belanda, dengan membatasi pendidikan hanya untuk pegawai rendahan di kantor seperti juru tulis dari kalangan ningrat atau bangsawan. Perhatian beliau atas pendidikan sangat besar sekali karena beliau menyadari bahwa dengan pendidikanlah rakyatnya dapat berkembang, baik dalam berkehidupan, bersosial, dan beragama sehingga pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat itu sendiri. Memang harus diakui bahwa perubahan sangat mudah dilakukan melalui pendidikan.

Selama masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II karena pelayanan yang paling menonjol adalah di bidang pendidikan, maka sangat pantas kalau dikatakan beliau adalah tokoh pejuang pendidikan di seantero Tanah Melayu. Investasi harta yang paling bernilai semasa Sultan Syarif Kasim adalah investasi di bidang pendidikan. Jenis dan bentuk pendidikan yang didirikan semasa Sultan Syarif Kasim telah disajikan pada bab sebelumnya. Beliau juga melakukan investasi atau setidaknya memelihara investasi berupa harta isi istana kerajaan yang ternyata sampai saat ini masih dapat disaksikan.

Daftar inventaris maupun catatan harta tentang perolehan harta Kerajaan Siak tidak ditemukan baik di Istana Siak maupun di Perpustakaan Daerah Siak dan Pekanbaru. Kemungkinan besar bahwa Sultan Syarif Kasim maupun pendahulunya Sultan Syarif Hasyim memang tidak melakukan pencatatan apa pun atas perolehan harta kerajaan. Hal ini disebabkan karena harta kerajaan umumnya diperoleh melalui proses perkerabatan dan hubungan pertemanan serta pembuatan sehingga tidak merasa perlu adanya pencatatan di samping karena faktor pragmatis beliau dan tidak adanya dukungan dokumen transaksi pada saat itu. Istana Asserayah Hasyimiah yang dibangun selama 9 tahun tidak memiliki catatan rincian biaya pembangunan, kecuali hanya merupakan taksiran saja.

Bukti transaksi pembelian harta-harta yang menjadi isi dari istana juga tidak ditemukan, sehingga catatan berupa daftar harta Kerajaan Siak serta harga perolehan pada masa Sultan Syarif Kasim tidak ada. Hal inilah yang menyebabkan adanya upaya

Pemerintah Daerah Riau untuk melakukan penginventarisir harta Istana Siak. Dugaan ini dapat dibuktikan dari upaya inventarisasi harta kerajaan untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau setelah kembalinya Sultan Syarif Kasim ke Siak pada tahun 1964. Harta kekayaan Kerajaan Siak Sri Inderapura ditinggalkan Sultan Syarif Kasim II selama beliau berada di Aceh, Jakarta dan Belakang Padang (Batam) selama 18 tahun yakni dari tahun 1946-1964 (Yusuf, 1992).

Akhir dari proses akuntansi masa Sultan Syarif Kasim ditandai dengan penyerahan Mahkota Raja Kerajaan Siak kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan mahkota tersebut memiliki makna berakhirnya masa era Kerajaan Siak dan bergabung menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia tanpa ingin menguasai harta benda yang menjadi milik Kerajaan. Inilah sebuah keputusan monumental dan sangat emosional di tengah sebuah kerajaan yang secara fisik masih terjaga sampai saat ini. Tingkat emosional yang dilandasi oleh kecintaannya pada Rakyat Indonesia, khususnya Rakyat Siak Sri Inderapura. Semua tanggung jawab pelayanan kerajaan kepada rakyatnya pada akhirnya kembali kepada Sultan yang menjadi awal dan akhir dari sebuah proses pertanggungjawabannya. Meskipun Sultan Siak berada dalam kekangan Belanda maupun Jepang, namun beliau tetap dapat mengelola dan memanfaatkan potensi hutan dan perikanan yang ada di wilayah kerajaan untuk rakyatnya. Aktivitas perekonomian ini merupakan bagian dari keunggulan Sultan dalam menjalankan roda perekonomian di tengah-tengah kekangan dari pihak Kolonial Belanda maupun Jepang bagi kemakmuran rakyatnya.

Makna yang dapat ditangkap dari konstruksi sistem operasional yang dilakukan sultan adalah pelayanan dan mensejahterakan rakyat merupakan suatu hak yang harus diterima rakyat dan kerajaan mempunyai kewajiban untuk memberikan, mengatur dan menyalurkannya. Sultan meskipun bertanggung jawab langsung atas semua kebijakan dan peraturan yang diterapkannya, namun bukan untuk digunakan dalam rangka memperkaya pribadi atau kerajaan dalam konteks keluarga, melainkan harus digunakan semata-mata untuk kesejahteraan penduduknya. Oleh sebab itu, pengendalian internal yang diterapkan oleh Sultan adalah dengan tidak bersedia memegang harta, karena itu najis. Najis dimaknai sebagai dapat membuat kotor Sultan dan dipengaruhi oleh hawa nafsu untuk menguasainya. Jika hal ini terjadi, maka hancurlah Sultan sebagai pribadi yang dipercaya untuk memegang amanah bagi rakyatnya. Sikap Sultan seperti inilah yang menyebabkan beliau menjadi figur yang sangat fenomenal di mata rakyatnya.

8. 4. KESIMPULAN

Episteme akuntansi diartikan sebagai pemikiran yang menghasilkan cara atau praktik-praktik akuntansi yang berlaku pada saat itu sebagai sebuah tindakan untuk mengatasi problem yang muncul terkait dengan akuntansi harta. Inti dari *episteme* akuntansi dapat

dilihat dari berbagai sisi seperti struktur pemerintahannya, sistem operasionalnya, pengendalian internal dan berbagai regulasi pengelolaan harta. Konstruksi sistem operasional diawali dari manuskrip berupa Surat Wakaf atau Wasiat dan Bab Al-qawa'id yang dibuat oleh Sultan Syarif Hasyim pada masa beliau menjadi Sultan ke XI. Konsistensi Sultan Syarif Kasim II dalam menjalankan undang-undang dan surat hibah sudah menjadi komitmen beliau. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan harta sangat ditentukan oleh wibawa dari siapa yang paling bertanggung jawab atas harta tersebut. Bangunan sistem yang sangat sederhana seperti terjadi pada masa Sultan Siak, tidak serta merta mudah menimbulkan berbagai tindakan kecurangan oleh karena wibawa Sang Raja.

Pancung alas merupakan bagian kontribusi hasil produksi pertanian rakyat yang diserahkan kepada kerajaan karena menggunakan tanah garapan kerajaan. Regulasi pajak diterapkan Sultan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kerajaan oleh para saudagar yang melewati atau berlabuh di pelabuhan wilayah Kerajaan Siak. Regulasi tentang pemanfaatan harta kerajaan dikeluarkan oleh Sultan untuk rakyat yang ingin memanfaatkan harta berupa wilayah pertanian atau perkebunan. Makna yang dapat ditangkap dari konstruksi sistem akuntansi harta yang dilakukan Sultan adalah pelayanan dan mensejahterakan rakyat merupakan suatu hak yang harus diterima rakyat dan kerajaan mempunyai kewajiban untuk memberikan, mengatur dan menyalurkannya.

Sultan Syarif Hasyim adalah tokoh sentral dalam penataan Kerajaan Siak Sri Inderapura dari sisi akuntansi harta. Pada masa beliaulah Kerajaan Siak Sri Inderapura mengalami masa keemasannya karena beliau memang seorang *entrepreneur*. Muatan akuntansi sangat kental terdapat dari masa peralihan Sultan Syarif Hasyim ke Sultan Syarif Kasim II. Dokumen ini sesungguhnya menjadi tonggak sejarah akuntansi harta di Kerajaan Siak Sri Inderapura, karena telah menjadikan harta kerajaan sebagai harta bukan milik pribadi, melainkan harta milik bersama Pemerintahan Kerajaan Siak dalam memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada rakyatnya. Selain adanya surat hibah atau wasiat yang dibuat semasa akhir pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, juga dibuat dan dicetak sebuah regulasi yang pada saat itu dapat disebut sebagai undang-undang Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Inderapura. Dokumen ini merupakan awal dari berjalannya sistem akuntansi harta pada era berikutnya yang dipimpin oleh Sultan Syarif Kasim II sebagai Raja Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Sultan Syarif Hasyim adalah Sultan yang berjasa dalam mempersiapkan dokumen aturan tertulis pertama tentang pengelolaan harta, selama Kerajaan Siak Sri Inderapura berdiri. Harta berupa barang bergerak yang terdapat dalam istana, dirinci berdasarkan jenisnya. Hal ini menggambarkan bahwa telah ada kegiatan penginventarisiran harta secara umum pada masa Sultan Syarif Hasyim, meskipun bersifat umum. Amanah yang menarik lainnya dari Surat Wakaf tersebut adalah menyangkut dengan jenjang

tindakan pengelolaan istana yang harus diambil sesuai dengan kondisi kerajaan di masa yang datang. Istana Asserayah Hasyimiah boleh disewakan kepada pihak yang mampu menyewa apabila tak satupun dari keturunan yang bersedia menempati istana, meskipun bukan memerintah sebagai raja. Konsep Islam dijadikan dasar oleh kerajaan dalam pembagian pendapatan sewa menyewa dalam pengelolaan harta kerajaan.

Kandungan makna lainnya dari Surat Wakaf yang sekaligus juga sebagai surat wasiat adalah tidak dibenarkannya bangunan Istana Siak dan seisinya digadaikan apalagi dijual. Keberadaan fisik bangunan Istana Asseraiyah yang ada saat sekarang, ikut memengaruhi pola kehidupan Rakyat Siak Sri Inderapura sampai dengan saat ini. Bagian lain yang diatur dalam surat wakaf adalah menyangkut dengan pemeliharaan istana, apabila ternyata istana tidak bisa disewakan karena berbagai hal. Apabila jumlah empat orang ini dibandingkan dengan luasnya wilayah istana kerajaan, maka tercermin makna efisiensi dalam pemeliharaan.

Sultan Syarif Hasyim berjasa mengantarkan sebuah kerajaan selanjutnya dengan suatu aturan yang harus dipedomani. Perkara-perkara yang diatur dalam Babul Al-qawa'id adalah perkara perniagaan, perkara kehidupan lain-lain, perkara perusahaan, dan perkara hutang-piutang. Pembagian ini mengandung makna adanya sebuah konsep materialitas, meskipun penerapannya jauh berkaitan dengan akuntansi.

BAB 9

NILAI-NILAI AKUNTANSI ERA SULTAN SYARIF KASIM

9.1. PENYEDERHANAAN ELEMEN SISTEM PEMERINTAHAN SULTAN

Struktur pemerintahan masa Sultan Syarif Kasim awalnya berbentuk sistem yang lebih mengakomodir keterlibatan keluarga dalam sistem kerajaan. Beberapa pos penting seperti sekretaris kerajaan, bentara kiri dan bentara kanan serta pembantunya umumnya adalah jabatan yang diisi dari keluarga kerajaan. Namun dalam perkembangannya sistem yang mengakumudir keluarga berubah sedikit demi sedikit dengan memasukan orang-orang non keturunan kerajaan atau bangsawan atau turunan orang-orang besar menjadi bagian dalam sistem pemerintahannya. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Sultan melakukan reformasi struktur orang-orang yang membantunya dalam menjalankan tugas sebagai Sultan. Faktor-faktor tersebut di antaranya disebabkan oleh campur tangan Pemerintah Kolonial dalam sistem pemerintahannya. Faktor lainnya adalah karena kebijakan Sultan sendiri yang didasari pada pandangannya bahwa orang yang menempati suatu jabatan tertentu haruslah orang yang cakap sesuai dengan kemampuannya tanpa harus melihat dari mana asal usulnya.

Campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap sistem pemerintahan kerajaan sudah menjadi bagian konflik yang tak terhindarkan pada masa beliau berkuasa. Di samping karena faktor Pemerintah Kolonial yang berkedudukan di Siak, Pemerintah Kolonial yang berkedudukan di Batavia dan Medan berkepentingan mengendalikan seluruh pusat kekuatan kerajaan dan sudah menjadi bagian dari strategi umum

Pemerintah Kolonial sehingga hal ini umumnya terjadi di semua wilayah kerajaan di Indonesa. Akibat campur tangan inilah beberapa pos jabatan kerajaan seperti sekretaris kerajaan yang harus diisi oleh keluarga kerajaan dikosongkan oleh Sultan setelah dua sekretaris kerajaan sebelumnya diberhentikan Pemerintah Kolonial. Pembantu umum kerajaan juga mengalami pemberhentian oleh Pemerintah Kolonial saat itu. Meskipun tujuan Belanda adalah untuk merusak sistem pemerintahannya, ternyata Reaksi Sultan atas campur tangan Belanda dijawab dengan mengemas situasi untuk merampingkan struktur pemerintahannya.

Kebijakan untuk mengemas situasi ini sebenarnya bukanlah untuk menyingkirkan orang-orang keturunan raja, melainkan bagian dari manajemen pengendalian emosional Sultan atas perlakuan pihak kolonial terhadap pemerintahannya. Pemaksaan untuk segera mengisi kekosongan jabatan kerajaan bukanlah hal mudah saat itu, karena akan memaksa Sultan untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Kolonial. Sikap berkompromi dengan Pemerintah Kolonial untuk mengisi suatu jabatan penting saat itu tidak akan dilakukan Sultan. Cara yang dipilih Sultan adalah tidak menanggapinya secara emosional, dan menyikapi keadaan dengan merampingkan struktur pemerintahannya. Sikap inilah yang menjadi nilai-nilai yang dianut Sultan yakni "mengemas ancaman menjadi sesuatu yang bermanfaat". Manfaat yang diperolehnya adalah menyederhanakan elemen sistem pemerintahan yang berujung pada penghematan pengeluaran. Penyederhanaan elemen sistem dalam pemerintahan Sultan sudah dilakukan pada saat berkuasa.

Kebijakan Sultan yang didasari pada pandangan bahwa orang yang menempati suatu jabatan tertentu haruslah orang yang cakap sesuai dengan kemampuannya tanpa harus melihat dari mana asal usulnya menjadi pandangan yang *hyper view* pada saat itu. Pandangan Sultan ini dijalankan dengan tetap menjaga keseimbangan dalam struktur pemerintahannya. Hal ini berarti bahwa keluarga dan keturunannya tetap diakumudir, namun menempatkan orang pada tempat yang tepat juga harus dilakukan. Sultan berpandangan bahwa kemampuan seseorang atau kecakapan seseorang harus bisa menembus kebiasaan tradisional yang menghambat mereka untuk turut berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pandangan inilah yang merupakan bagian dari kematangan kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kearifan untuk membuka pintu istana bagi setiap rakyatnya yang mampu dalam berkiprah. Nilai-nilai kearifan telah mulai membongkar sedikit demi sedikit lemak-lemak nepotisme yang sangat kental pada saat itu dengan mengharuskan syarat anggota keluarga kerajaan atau orang-orang besar dan keturunannya dalam mengisi posisi struktur kerajaan. Nilai-nilai kearifan dapat menembus dinding-dinding nepotisme yang tumbuh dalam suatu lingkungan tertentu termasuk sistem kerajaan".

Sistem kerajaan yang dibangun dengan nilai-nilai kearifan untuk membuka diri kepada rakyatnya dalam berpartisipasi, turut berkontribusi dalam menciptakan

pengendalian internal dalam sistem pemerintahan Sultan Syarif Kasim. Keberadaan orang biasa dalam struktur pemerintahan Sultan, selalu diikuti oleh sebuah kebanggaan yang tidak akan disia-siakannya. Sebaliknya, tindakan Sultan dalam merekrut orang biasa untuk membantunnya menjalankan tugas, merupakan bagian dari bangunan sistem informasi dalam pengertian disain sistem. Davis (1987) menyatakan bahwa sistem informasi didefinisikan sebagai fungsi-fungsi yang melakukan disain, konstruksi, dan pemeliharaan sumber daya. Fungsi-fungsi ini secara sadar atau tidak sebenarnya sudah dilakukan oleh Sultan Syarif Kasim.

9.2. PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

Pengendalian internal dalam sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan ditekankan pada tanggung jawab pribadi beliau, meskipun dalam pelaksanaannya beliau dibantu oleh pejabat-pejabat yang terdapat dalam struktur Pemerintahannya. Hal ini berarti bahwa semua kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh elemen-elemen dan perangkat kerjanya merupakan kesalahan beliau untuk mempertanggung jawabakannya. Pengambilalihan tanggung jawab ini mungkin tidak lazim dalam suatu pemerintahan kerajaan karena seorang raja selalu memposisikan diri sebagai penguasa seperti pada sultan-sultan sebelumnya. Oleh sebab itu, tanggung jawab yang tersentral pada Sultan merupakan bangunan sistem pengendalian internal yang sangat inspiratif pada saat itu. Bangunan sistem informasi yang dilaksanakan Sultan pada saat itu, sangat dipengaruhi oleh tiga hal yakni lingkungan, organisasi, dan gaya pengambilan keputusan. Ketiga variabel ini telah pernah dikemukakan oleh Gordon and Miller (1976) dengan format gambar sebagai berikut.

Gambar: 9.1: Variabel Pembentuk Sistem Informasi Akuntansi

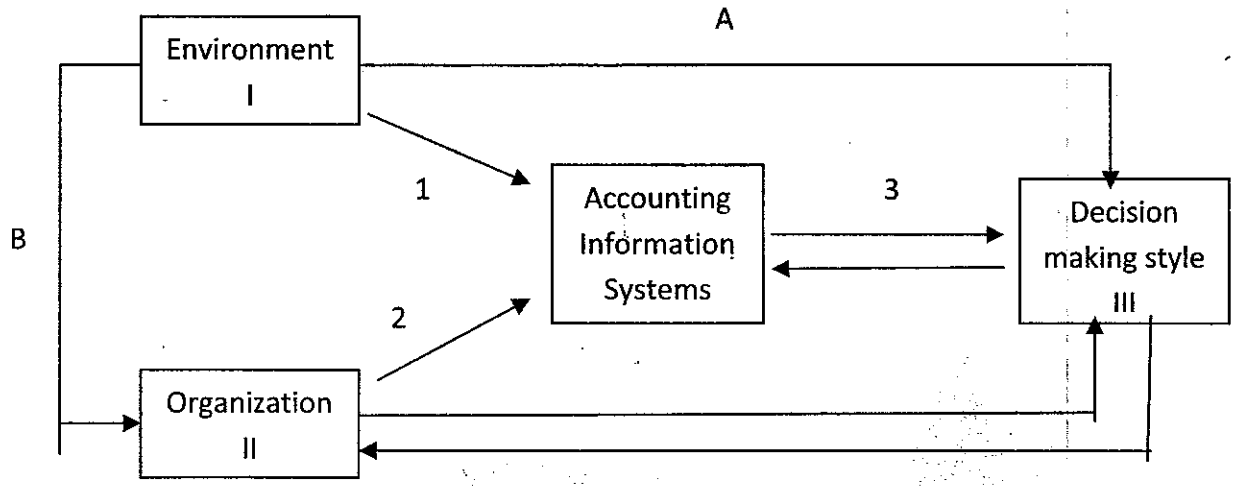

Sumber: Gordon dan Miller, 1976

Ketiga variabel pembentuk sistem informasi di atas, ternyata telah memengaruhi sistem informasi yang menghasilkan pengendalian internal pada masa Sultan Syarif Kasim. Memperhitungkan variabel lingkungan dan organisasi pada masa Sultan Syarif Kasim menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam membangun sistemnya pada saat itu karena campur tangan Pemerintah Kolonial sangat kuat, sehingga memengaruhi gaya Sultan dalam pengambilan keputusan. Mengambil alih semua tanggung jawab dalam sistem adalah bagian dari gaya kepemimpin Sultan pada saat itu.

Praktik pengendalian yang terjadi masa Sulan Syarif Kasim memberikan inspirasi bahwa kualitas pengendalian internal dari sebuah sistem akuntansi bukan hanya terletak pada kelengkapan elemen-elemen pengendalian yang dibangun, namun juga ditentukan oleh wibawa siapa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem tersebut. Ketokohan seseorang yang menjadi panutan oleh rakyat dan lingkungannya menjadi magnet yang dapat memperkuat pengendalian internal dari sebuah sistem. Sesederhana apa pun sebuah sistem dapat saja memiliki pengendalian internal yang kuat, apabila dibarengi dengan Ketokohan seseorang yang menjadi panutan. Inilah esensi kualitas internal yang dibangun berdasarkan figur Sultan yang sangat disegani dan disayangi oleh rakyatnya. Daya wibawa seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah sistem, dapat saja mengalahkan sebuah sistem yang dirancang dengan perangkat secanggih apa pun dalam hal pengendalian internal. Sistem yang dibangun dengan perangkat yang canggih tetap saja dapat ditembus dan menjadi incaran pada setiap kesempatan apabila memungkinkan. Magnet kewibawaan seseorang dapat menghasilkan sebuah pengendalian internal yang kuat dalam sebuah sistem sederhana sekalipun.

9.3. REGULASI ATAS AKUNTANSI PENGELOLAAN TANAH KERAJAAN SIAK

Harta kerajaan pada hakekatnya terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Harta bergerak kerajaan umumnya terpusat di lingkungan istana kerajaan dan jenis-jenisnya secara umum telah disebutkan dalam Surat Wakaf Sultan Syarif Hasyim yang terkenal dengan judul "kemudian hendaklah mengetahui". Harta tidak bergerak umumnya berupa tanah wilayah kerajaan. Harta tidak bergerak berupa wilayah tanah kerajaan terdiri dari tanah yang dikuasai kerajaan dan tanah bagian wilayah kekuasaan kerajaan. Tanah yang dikuasai kerajaan umumnya berada di wilayah sekitar Istana Siak dan diperoleh melalui proses "pembelian" oleh kerajaan pada saat itu. Sedangkan tanah kekuasaan wilayah kerajaan adalah tanah kekuasaan yang diperoleh secara politis dan kesepakatan dengan para penduduk asli melalui kepala suku dan datuk. Penjelasan harta kerajaan berupa wilayah kekuasaan kerajaan ini merupakan penjabaran dari makna bahwa sesungguhnya Sultan-Sultan Kerajaan Siak Sri Inderapura tidak

memiliki tanah ulayat di Siak Sri Inderapura. Raja Kecil sebagai pendiri Kerajaan Siak Sri Inderapura merupakan pendatang di wilayah tersebut dan hasil kesepakatan yang dilakukan dengan para pemuka adat dan tokoh masyarakat pada saat itu menyebabkan beliau diangkat sebagai Raja Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Harta yang diperoleh dengan kekuasaan atau politis atau yang sering disebut dengan Harta Lanschap/Swapraja tidak dapat diperhitungkan dan dicantumkan sebagai harta kerajaan dalam pengertian neraca dalam akuntansi. Harta Lanschap/ Swapraja keberadaannya juga sangat bergantung kepada kontrak atau rekayasa politik yang dapat terjadi kapanpun. Penciutan wilayah kekuasaan Sultan oleh Pemerintah Kolonial dan direkayasa seolah-olah dibuat oleh sultan merupakan bukti bahwa harta tersebut keberadaannya sangat labil, tergantung pada kondisi politik pada saat tertentu. Hal inilah yang kemungkinan besar dijadikan alasan mengapa bentuk harta yang diperoleh semasa Sultan Syarif Hasyim, bukan dari transaksi jual beli atau diperoleh dari kekuasaan politis ini tidak termasuk bagian yang diatur di dalam surat wakaf. Harta Sultan Syarif Hasyim yang berasal dari transaksi jual beli merupakan harta pribadi beliau sehingga tidak dimasukkannya kedalam surat wakaf. Sedangkan tanah wilayah kekuasaan merupakan harta swapraja juga tidak dicantumkannya dalam surat wakaf menunjukkan bahwa harta tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta kerajaan. Sultan Syarif Hasyim dan dilanjutkan Sultan Syarif Kasim telah menjadikan harta Swapraja sebagai bukan harta miliki kerajaan.

Akibat dari rekayasa politik Belanda terhadap Kerajaan Siak, sangat berdampak pada hilangnya hak-hak rakyat Kerajaan Siak. Hak hutan dan ulayat kepunyaan kepala suku dan batin hilang. Hutan dan tanah ulayat yang selama ini digunakan secara bebas sebagai sumber penghasilan rakyat juga hilang. Satu-satunya hak yang masih bisa dimiliki oleh rakyat hanyalah hak pancung alas (hak garap). Rakyat yang ingin menggarap tanah harus mendapatkan surat pemakaian (grand) dari Sultan. Inilah bentuk regulasi yang dikeluarkan Sultan sehubungan dengan pengelolaan tanah oleh Rakyat Siak. Regulasi yang dikeluarkan ini tidak lepas dari pengaruh dan kendali Pemerintah Kolonial terhadap Sultan Syarif Kasim.

Regulasi yang dikeluarkan Sultan atas penggunaan atau pemanfaatan tanah bagian wilayah kekuasaan kerajaan ada yang dikeluarkan melalui penyampaian lisan dan ada yang dikeluarkan melalui surat pemakaian (*Grand*). Regulasi yang dikeluarkan melalui penyampaian lisan biasanya dilakukan ketika beliau berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya. Rakyat dihimbau untuk memanfaatkan tanah-tanah wilayah kekuasaan kerajaan yang sangat luas, berupa hutan belentara yang masih sangat sedikit dioptimalkan. Sedangkan regulasi tertulis untuk memanfaatkan tanah wilayah kekuasaan umumnya dilakukan pada tanah-tanah yang berada dekat dengan pusat kekuasaan Kerajaan Siak yakni Istana Asserayah. Meskipun pada saat Sultan Syarif Kasim berkuasa regulasi yang dikeluarkan masih ada dalam bentuk lisan sesuai dengan

kondisi wilayah Siak yang begitu luas, namun pada masa beliau telah terdapat regulasi yang dikeluarkan secara tertulis untuk memanfaatkan tanah wilayah kekuasaan kerajaan oleh rakyatnya. Adanya regulasi tertulis sebagai izin pemanfaatan pengelolaan tanah sudah merupakan kemajuan yang diciptakan oleh Sultan pada masa itu. Sultan sudah melakukan tertib administrasi seperti yang diakui oleh informan Nizami dan Syafe'I yang mengatakan Sultan telah membangun administrasi dengan baik. Hubungan antara Sultan, Datuk dan Kepala Suku serta Rakyat Siak dalam konteks tanah ulayat sebagai berikut.

Gambar 9.2: Hubungan Antara Sultan, Datuk Dan Kepala Suku Serta Rakyat Siak Dalam Konteks Tanah Ulayat

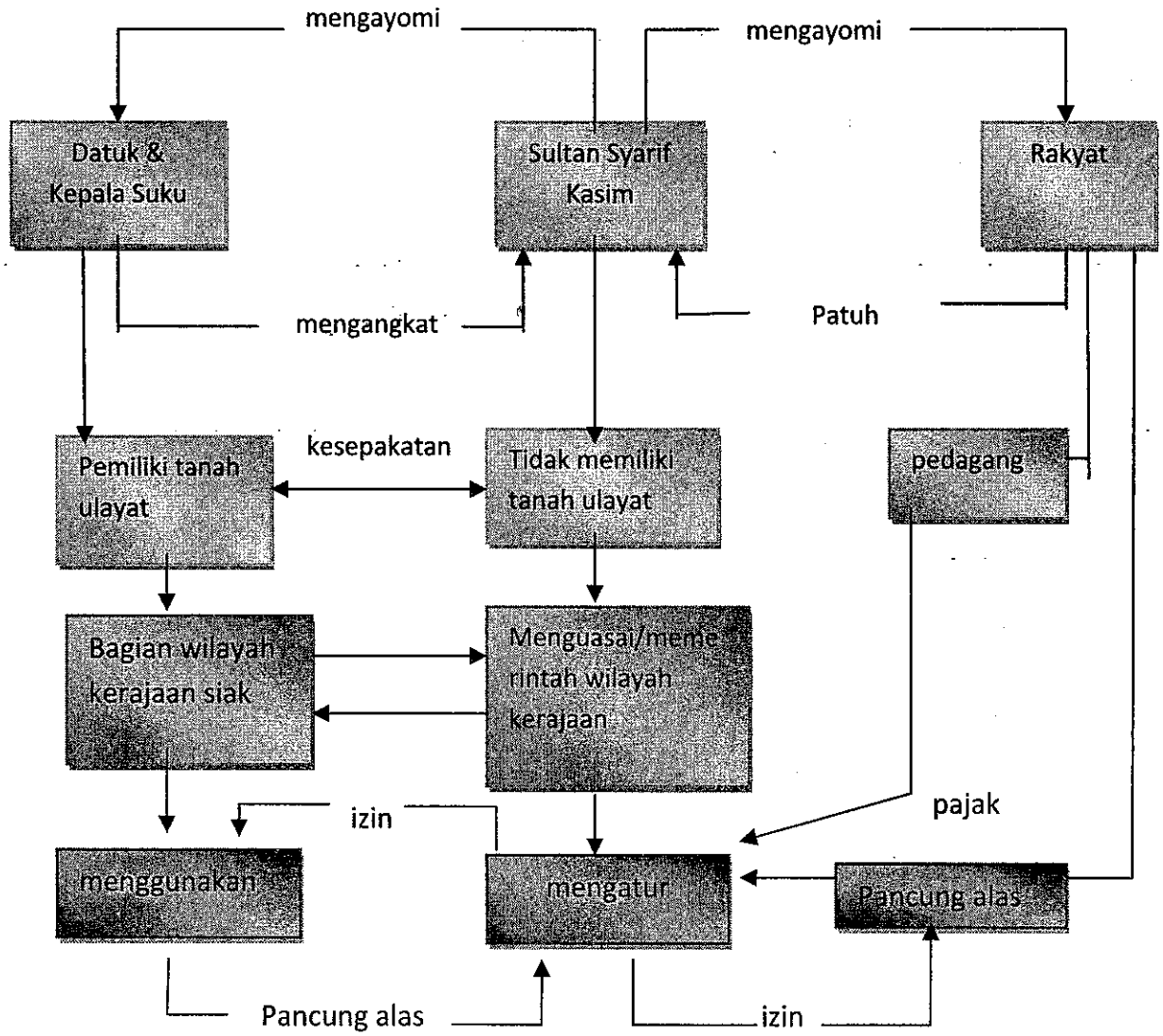

Sumber: Diolah Dari Beberapa Sumber dan Konfirmasi Informan.

Gambar 9.2 menunjukkan hubungan antara Sultan, Datuk dan Kepala Suku serta Rakyat Siak dalam konteks tanah ulayat. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pancung alas bersumber dari pemanfaatan tanah hutan oleh rakyat untuk ditanami

berbagai tanaman yang produktif. Sebagian hasilnya diberikan kepada pihak kerajaan. Sedangkan pajak berasal dari jalur masuk dan keluarnya para pedagang dari dan ke Siak Sri Inderapura. Dalam praktiknya hasil-hasil sumber penerimaan dari pancung alas dan pajak ini dikuasai oleh Belanda di mana Sultan hanya diberikan berupa imbalan atau hibah oleh pihak Kolonial. Regulasi yang dikeluarkan oleh Sultan dalam pengelolaan harta berupa tanah di wilayah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Inderapura tidak steril dari campur tangan Belanda untuk mengendalikannya.

9.4. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN SULTAN

Bentuk tanggung jawab Sultan atas penggunaan dana kerajaan yang paling menonjol adalah dengan membangun berbagai lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya pada saat itu. Beliau menyadari bahwa pendidikan yang diusahakan oleh Belanda di Siak saat itu bukanlah untuk rakyatnya, melainkan untuk kepentingan Belanda, dengan membatasi pendidikan hanya untuk pegawai rendahan di kantor seperti juru tulis dari kalangan ningrat atau bangsawan. Hal inilah yang mendorong beliau untuk sangat memperhatikan pendidikan bagi rakyatnya yang nota bene sangat sulit mendapat pendidikan kalau tidak menjadi tanggung jawab dan perhatian beliau. Perhatian beliau atas pendidikan sangat besar sekali karena beliau menyadari bahwa dengan pendidikanlah rakyatnya dapat berkembang baik dalam berkehidupan, bersosial, dan beragama sehingga pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat itu sendiri. Memang harus diakui bahwa perubahan sangat mudah dilakukan melalui pendidikan.

Selama masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II, tidak diragukan lagi bahwa pelayanan kepada rakyatnya yang paling menonjol adalah di bidang pendidikan sehingga sangat pantas kalau dikatakan beliau adalah tokoh pejuang pendidikan di seantero Tanah Melayu. Investasi harta yang paling bernilai semasa Sultan Syarif Kasim adalah investasi di bidang pendidikan. Jenis dan bentuk pendidikan yang didirikan semasa Sulta Syarif Kasim telah disajikan pada bab sebelumnya. Selain itu, beliau juga melakukan investasi atau setidaknya memelihara investasi berupa harta yang berada di istana kerajaan yang ternyata sampai saat ini masih dapat disaksikan. Menyediakan sarana pendidikan dan tetap memelihara harta kerajaan merupakan bagian dari pertanggungjawaban harta yang dipersembahkan oleh Sultan Syarif Kasim kepada Rakyat Melayu Riau.

Bentuk pertanggungjawaban penggunaan harta kekayaan masa Sultan Syarif Kasim bukanlah dalam bentuk tertulis seperti yang disampaikan dalam suatu laporan keuangan. Pertanggungjawaban pengelolaan harta, beliau sampaikan dalam bentuk tindakan nyata yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyatnya pada saat itu. Beliau menggunakan media lain dalam mempertanggungjawabkan harta

kekayaan kerajaan yakni melalui tindakan langsung yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Pertanggungjawaban pengelolaan harta yang dilakukan Sultan seharusnya dapat menjadi inspirasi akuntansi saat ini meskipun bentuknya sudah jauh berkembang. Zeghal and Ahmed (1990) dalam sebuah tesisnya mengatakan bahwa salah jika evaluasi ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* semata-mata hanya berdasarkan laporan tahunan saja. Perusahaan atau setiap institusi dapat menggunakan media lainnya untuk memberikan informasi ke publik dan Sebaliknya publik juga bisa mendapatkan informasi pertanggungjawaban suatu perusahaan atau suatu institusi dari media lainnya yang digunakan. Media lainnya yang digunakan oleh Sultan Syarif Kasim pada saat itu adalah tindakan nyata yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyatnya.

Sekolah-sekolah yang dibangun semasa Sultan Syarif Kasim merupakan bagian dari penggunaan dana kerajaan yang sangat kelihatan manfaatnya dalam upaya mensejahterakan rakyat di bawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Inderapura. Hal ini bagian dari pelaksanaan akuntansi harta yang telah dijalani oleh Sultan dalam pemerintahannya. Penggunaan harta kerajaan yang umumnya di bidang pendidikan dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan Rakyat Siak, sekaligus sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Sultan kepada Rakyat Siak Sri Inderapura. Beliau tidak membuat laporan pertanggungjawaban seperti laporan keuangan pada umumnya, karena pada saat itu memang belum ada dan beliau adalah penguasa tunggal ditengah-tengah masyarakatnya yang sangat *Sultana Centries*. Apa pun perkembangan masalah yang timbul dalam masyarakat, selalu mengacu pada "Apa Kata Sultan". "Apa Kata Sultan" selalu menjadi rujukan masyarakat dalam bertindak, atau dengan kata lain tidak ada tindakan apa pun yang dilakukan rakyatnya, kecuali mengikuti "Apa Kata Sultan". Dengan demikian, pada masa Sultan Syarif Kasim, Penggunaan harta kerajaan berupa apa pun untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh Rakyat siak, sekaligus sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban sultan kepada Rakyat Siak Sri Inderapura.

Basis pengelolaan sumber penerimaan kerajaan dan pertanggungjawaban pada masa Sultan Syarif lebih banyak menggunakan konsep Baitul Maal. Beliau memahami betul apa substansi Baitul Mal sebagaimana yang pernah dilaksanakan pemerintahan Islam klasik, untuk selanjutnya sedapat mungkin dapat beliau terapkan di era kekuasaannya. Salam (2013) menjelaskan bahwa Baitul Mal merupakan sebuah lembaga negara yang bertugas mengelola segala pemasukan dan pengeluaran untuk kepentingan negara. Pada saat sekarang umumnya masyarakat mengartikan Baitul Mal sebagai Kas Negara yang sumber pendapatannya data berasal dari pajak, masyarakat secara langsung, dari pengelolaan harta yang dilakukan oleh negara dan sumber-sumber lainnya. Apabila pengertian ini dikaitkan dengan konsep pengelolaan harta Kerajaan Siak, maka harta yang dimiliki kerajaan merupakan kas kerajaan yang sumber pendapatannya berasal dari pancung alas, pajak, hasil pengelolaan harta oleh kerajaan

dan lainnya. Menurut konsep pengelolaan harta kerajaan, sultan menjadikan kerajaan sebagai lembaga kas bagi rakyatnya. Sebagai lembaga kas bagi rakyatnya, beliau berkewajiban menyalurkannya kembali kerakyatnya. Bentuk penyaluran pendapatan kerajaan yang menjadi perhatiannya adalah pendidikan.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab" *bait*" yang berarti rumah, dan *"al-mal"* yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Dahlan, 1999). Dengan demikian, Secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga negara yang mempunyai tugas menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai Hukum Syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum (Zallum 1983). Konsep Baitul Maal sudah menjadi dasar kesepakatan saat pendirian Kerajaan Siak oleh Raja Kecil dengan para kepala suku. Sampai akhir dari Kerajaan Siak pada masa Sultan Syarif Kasim, komitmen ini tetap dipegang oleh beliau. Sikap ini merupakan bagian dari kejujuran Sultan Syarif Kasim saat berkuasa, di tengah-tengah banyaknya kesempatan yang memungkinkannya untuk keluar dari perjanjian leluhur.

9.5. AKUNTANSI PEROLEHAN HARTA

Keyakinan adanya pencatatan perolehan harta pada masa Sultan Syarif Kasim berasal dari dugaan bahwa Sultan Syarif Kasim adalah tokoh yang sangat tertib dalam administrasi. Dugaan ini berasal dari beberapa literatur yang mengatakan bahwa Sultan Syarif Kasim telah mereformasi sistem pemerintahannya dan memimpin secara profesional sesuai dengan pengetahuan pada saat itu. Dugaan ini juga diperkuat oleh keyakinan yang disampaikan oleh informan dalam penelitian ini. Namun dalam penelusuran data selama penelitian di Istana Siak, tidak terdapat dokumen ataupun manuskrip yang mampu menjelaskan hal tersebut oleh karena faktor fisik. Dokumen-dokumen masa Sultan Syarif Kasim kondisinya sudah sangat mengkawatirkan secara fisik, sehingga sulit untuk disentuh apalagi untuk di foto copy. Beberapa dokumen yang berhasil di *scan* dapat terlihat pada lampiran 3. Bukti-bukti dokumen perolehan harta pada saat itu mungkin saja ada, namun bentuknya tidak harus seperti apa yang umumnya ada sekarang. Bentuk dokumen perolehan harta yang paling mungkin adalah dalam bentuk surat-surat pembelian dan penawaran yang dikeluarkan oleh kerajaan pada saat itu. Tidak ditemukan sebuah catatan akuntansi yang mencatat setiap transaksi pembelian harta atau penjualan harta, kecuali dalam bentuk surat-menyurat.

Berdasarkan daftar pertelaan arsip yang disusun oleh Herayulwita *et. al* (2012) terdapat informasi berupa surat-surat pribadi Sultan yang terkait dengan penawaran barang. Surat tersebut berada di urutan 61, 71 pada bagian *protokoler* dan dibuat selama rentang waktu tahun 1921 – 1938, masing-masing berjumlah 1 *omslag* (bundel). Surat menyurat yang tergolong cukup banyak, terkait dengan hutang piutang terdapat dalam daftar pertelaan arsip. Namun surat-surat tersebut merupakan bagian dari proses verbal hasil peradilan yang lebih berurusan dengan proses hukum verbal, perdata dan bukan transaksi jual beli harta.

Proses akuntansi perolehan harta masa Sultan Syarif Kasim dijalankan berdasarkan surat menyurat yang dikeluarkannya dan bukan berbentuk pencatatan dalam sebuah buku catatan perolehan harta seperti yang dipahami selama ini. Meskipun dokumen-dokumen perolehan harta sulit ditemukan, namun jejak-jejak catatan akuntansi sebenarnya sudah ada yakni dalam bentuk surat menyurat. Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah catatan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat pada masa itu. Proses akuntansi ternyata dapat dilakukan dengan surat menyurat yang memiliki umur panjang karena dilakukan secara formal sebagai arsip kerajaan, bukan arsip transaksi yang dapat dimusnahkan pada kurun waktu tertentu. Semua daftar arsip tersebut terinventarisir dengan rapi dalam daftar pertelaan arsip, meskipun dokumen masing-masing surat secara fisik telah punah dimakan waktu, namun jejak-jejaknya masih tetap ada.

9.6. SURAT WAKAF SEBAGAI STANDAR PERLAKUAN AKUNTANSI HARTA

Standar akuntansi harta dapat dikatakan sebagai sebuah pedoman dalam praktik pengelolaan harta. Sebagai sebuah pedoman, standar akuntansi harta harus menjelaskan bagaimana kondisi praktik pengelolaan harta yang harus dilakukan, sehingga dapat dijadikan sebagai cermin dari praktik yang telah dilakukan. Inti dari sebuah standar akuntansi adalah pernyataan-pernyataan sebagai pedoman yang mengatur bagaimana pengelolaan harta harus dilakukan. Ekuitas dan kewajiban sesungguhnya merupakan harta yang berasal dari pemilik dan harta yang berasal dari pinjaman pihak lain. Dengan demikian, suatu pedoman praktik yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan harta harus dilakukan, dapat dikatakan sebagai sebuah standar akuntansi. Kalau sebuah standar pengelolaan harta difokuskan pada bagaimana harta harus dikelola, maka standar pengelolaan harta tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah standar akuntansi harta. Surat wakaf yang mengatur bagaimana mengelola harta berupa istana dan isinya, juga dapat dikatakan sebagai standar akuntansi pengelolaan harta.

Surat wakaf yang dibuat oleh Sultan Syarif Hasyim dapat dikatakan sebagai sebuah standar akuntansi pengelolaan harta, karena bertujuan untuk mengatur bagaimana

memperlakukan harta Kerajaan Siak berupa istana dan seisinya di masa yang akan datang. Hal-hal yang diatur dalam surat wakaf tersebut adalah (1) Pernyataan tentang jenis harta kerajaan berupa Istana Asserayah Hasyimiah berserta isinya. (2) pernyataan bahwa istana sebagai tempat raja dari keturunannya berdiam/tinggal. (3) pernyataan bahwa istana boleh disewa oleh keturunannya dan membagikan hasil sewa kepada keturunannya yang lain (4) pernyataan tentang jumlah orang yang ditugasi untuk memelihara istana yakni empat orang jika tak satupun dari keluarganya dapat bertindak sebagai raja dan mampu menyewa istana. (5) pernyataan bahwa istana tidak boleh digadaikan (6) pernyataan bahwa istana tidak boleh dijual dan yang terakhir (7) pernyataan bahwa istana harus diserahkan kepada Pemerintah yang berkuasa alias dikembalikan kepada rakyat.

Ketujuh pernyataan unsur yang mengatur pengelolaan harta kerajaan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah *episteme* standar akuntansi pengelolaan harta yang berlaku pada saat itu. Kerajaan Siak pada masa Sultan Syarif Hasyim telah menghasilkan sebuah standar akuntansi pengelolaan harta dan Kerajaan Siak pada masa Sultan Syarif Kasim telah memiliki sebuah standar akuntansi harta yang harus dijalankannya. Surat wakaf sebagai sebuah standar akuntansi harta merupakan sebuah kekayaan ilmu pengetahuan yang berasal dari kearifan lokal Indonesia. Tanpa disadari bahwa sebuah Kerajaan Melayu Riau Siak Sri Inderapura telah mampu menghasilkan sebuah standar akuntansi harta yang sesuai untuk saat itu, dengan nama Surat Wakaf dan ternyata mumpuni dalam mempertahankan harta sehingga dapat disaksikan sampai saat ini.

Hal yang menarik dari surat wakaf sebagai sebuah standar akuntansi adalah surat tersebut tidak mengatur tentang pemindahan hak milik bagi generasi berikutnya yang dapat menyebabkan istana dan seisinya dapat habis pada masa yang akan datang. Surat wakaf tersebut tidak menyatakan kepindahan hak milik kepada Sultan Syarif Kasim dan keturunan selanjutnya, melainkan lebih kepada pengaturan penggunaan istana dan seisinya sebagai harta milik kerajaan. Hal inilah yang menyebabkan istana tersebut masih eksis sebagai milik Rakyat Melayu Riau khususnya dan rakyat Indonesia umumnya sampai saat ini. Istana Asserayah Hasyimiah saat ini bukanlah milik keluarga apalagi orang perorangan, melainkan milik Rakyat Indonesia khususnya Rakyat Melayu Riau.

9.7. KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang mendorong sultan melakukan reformasi struktur orang-orang yang membantunya dalam menjalankan tugas sebagai Sultan. Faktor-faktor tersebut adalah adanya campur tangan Pemerintah Kolonial dalam sistem pemerintahannya dan kebijakan sultan sendiri yang didasari pada pandangannya bahwa orang yang menempati suatu jabatan tertentu haruslah orang yang cakap sesuai dengan kemampuannya tanpa harus melihat dari mana asal usulnya.

Praktik pengendalian yang terjadi masa Sultan Syarif Kasim memberikan inspirasi bahwa kualitas pengendalian internal dari sebuah sistem akuntansi bukan hanya terletak pada kelengkapan elemen-elemen pengendalian yang dibangun, namun juga ditentukan oleh wibawa siapa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem tersebut. Ketokohan seseorang yang menjadi panutan oleh rakyat dan lingkungannya menjadi magnet yang dapat memperkuat pengendalian internal dari sebuah sistem.

Regulasi yang dikeluarkan Sultan atas penggunaan atau pemanfaatan tanah bagian wilayah kekuasaan kerajaan ada yang dikeluarkan melalui penyampaian lisan dan ada yang dikeluarkan melalui surat pemakaian (Grand). Regulasi yang dikeluarkan melalui penyampaian lisan dilakukan ketika beliau berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya dan terkait dengan pengelolaan lahan di wilayah kekuasaannya. Regulasi tertulis dikeluarkan terkait dengan penggunaan lahan yang berada di sekitar Istana Siak. Adanya regulasi tertulis sebagai izin pemanfaatan pengelolaan tanah sudah merupakan kemajuan yang diciptakan oleh Sultan pada masa itu dan sebagai bukti bahwa sultan sudah melakukan tertib administrasi.

Penggunaan harta kerajaan berupa apa pun untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh Rakyat Siak, adalah bagian dari pertanggungjawaban Sultan kepada Rakyat Siak Sri Inderapura. Pertanggungjawaban Sultan disampaikan dalam suatu tindakan nyata, bukan pertanggungjawaban tertulis seperti yang lazim dilakukan.

Proses akuntansi pembelian harta, dilakukan Sultan Syarif Kasim dengan surat menyurat, yang memiliki umur panjang karena dilakukan secara formal sebagai arsip kerajaan, bukan arsip transaksi yang dapat dimusnahkan pada kurun waktu tertentu. Namun bentuk surat menyurat secara fisik sudah tidak dimungkinkan untuk diperoleh karena sangat rusak, kecuali tertera pada daftar pertelaan yang diterbitkan secara resmi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta.

Tanpa disadari bahwa sebuah Kerajaan Melayu Riau Siak Sri Inderapura telah mampu menghasilkan sebuah standar akuntansi harta yang sesuai untuk saat itu, dengan nama Surat Wakaf dan ternyata mumpuni dalam mempertahankan harta sehingga dapat disaksikan sampai saat ini.

BAB 10

PENUTUP

10.1. KESIMPULAN

Konfigurasi akuntansi harta era Sultan Syarif Kasim bermuara dari pandangan beliau terhadap harta. Pandangan beliau terhadap harta inilah yang membentuk sistem akuntansi pengelolaan harta yang terlihat dari konsep pengukuran harta yang dianutnya, kebijakan penggunaan harta yang dibuatnya, model pertanggungjawaban yang dilaksanakannya, pengendalian internal dalam sistem pemerintahannya dan standar pengelolaan harta yang dirujuknya. Penjabaran dari masing-masing konfigurasi akuntansi harta era Sultan Syarif Kasim dijelaskan sebagai berikut.

10.1.1. Pandangan Sultan Syarif Kasim Terhadap Harta

Pandangan beliau terhadap harta sangat jauh berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu. Kepribadian yang sangat mencintai ilmu dan agamis memengaruhi pandangan Sultan terhadap harta baik dalam sikap maupun perbuatan. Beliau berpandangan bahwa harta hanya sebagai sebuah titipan dari yang maha kuasa. Hal inilah yang menyebabkan beliau sebagai seorang raja tidak tertarik untuk menumpuk dan menguasai harta dalam masa kejayaannya. Hal ini dibuktikan beliau dengan menghindari pengurusan harta milik kerajaan maupun milik pribadi secara langsung. Pernyataan beliau sebagai bentuk ungkapan sikapnya terhadap harta adalah "saya tidak mau memegang harta karena itu najis".

10.1.2. Konsep Pengukuran Harta

Bagi Sultan, harta diukur dari sisi fungsinya untuk kemaslahatan rakyat, bukan hanya untuk keluarga apalagi pribadi beliau. Pandangan beliau terhadap harta ikut berkontribusi besar dalam keiklasannya untuk menyerahkan harta, rakyat dan Kerajaan Siak bagi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pandangan Sultan Syarif Kasim terhadap harta ikut membentuk mentalnya yang sangat diperlukan dalam sistem akuntansi harta kerajaan. Mentalitas meminta seseorang untuk memvisikan keterlibatan akuntansi dalam mencegah terjadinya penyimpangan (Everett, 2007).

10.1.3. Kebijakan Penggunaan Harta

Bentuk tanggungjawab Sultan atas penggunaan dana kerajaan yang paling menonjol adalah dengan membangun berbagai lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya pada saat itu. Melalui pendidikan gratis, Sultan sangat berharap rakyatnya dapat mensejahterakan dirinya melalui kemampuan intelektual yang dimiliki. Beliau juga berharap dengan pendidikanlah rakyatnya dapat berkembang baik dalam berkehidupan, bersosial, dan beragama sehingga pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat itu sendiri. Pendidikan bagi rakyatnya adalah bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Sultan. Pertanggungjawabannya dilakukan dengan tindakan nyata, bukan dalam bentuk laporan tertulis yang selama ini digunakan.

Rencana tahunan untuk pengembangan pendidikan dilakukan melalui proses rapat tahunan kerajaan. Muatan rapat tahunan di samping merencanakan bidang pemerintahan khususnya pendidikan, juga membuat rencana tentang keuangan. Kegiatan inilah yang menjadi muara adanya rapat keuangan yang berimplikasi kepada berbagai pemikiran dan aktivitas akuntansi pada saat itu.

10.1.4. Model Pertanggungjawaban

Model pertanggungjawaban dalam sistem akuntansi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan Syarif Kasim ditekankan pada tanggung jawab pribadi beliau, meskipun dalam pelaksanaannya beliau dibantu oleh pejabat-pejabat dalam struktur pemerintahannya. Hal ini berarti bahwa semua kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh elemen-elemen dan perangkat kerjanya, merupakan tanggung jawab beliau. Pengambilalihan tanggung jawab ini mungkin tidak lazim dalam suatu pemerintahan kerajaan karena seorang raja selalu memposisikan diri sebagai penguasa seperti pada Sultan-Sultan sebelumnya. Oleh sebab itu, tanggung jawab yang tersentral pada sultan merupakan bangunan sistem pertanggungjawaban yang sangat inspiratif pada saat itu.

10.1.5. Pengendalian Internal

Sistem akuntansi pemerintahan era Sultan Syarif Kasim dibangun secara sederhana dalam menjalankan roda pemerintahannya. Bangunan sistem yang sangat sederhana dan terbentuk secara alami, tidak serta merta mudah menimbulkan berbagai tindakan kecurangan atau penyimpangan oleh karena wibawa Sang Raja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan harta sangat ditentukan oleh wibawa dari siapa yang paling bertanggung jawab atas harta tersebut.

Pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Sultan ditekankan pada tanggung jawab pribadi beliau, meskipun dalam pelaksanaannya beliau menggunakan sekretaris pribadi yang direkrut berdasarkan kemampuan dan kepercayaan beliau terhadap seseorang tanpa melihat asal usul turunannya. Inilah esensi kualitas internal yang dibangun berdasarkan figur Sultan yang sangat disegani dan disayangi oleh rakyatnya. Praktik pengendalian yang terjadi masa Sultan Syarif Kasim memberikan inspirasi bahwa kualitas pengendalian internal dari sebuah sistem akuntansi bukan hanya terletak pada elemen pengendalian yang mendukungnya, tetapi ditentukan oleh wibawa siapa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem tersebut.

10.1.6. Standar Pengelolaan Harta

Kebijakan pengelolaan harta diawali dari manuskrip berupa Surat Wakaf atau Wasiat dan Bab Al-qawa'id yang dibuat oleh Sultan Syarif Hasyim pada masa beliau menjadi Sultan ke XI. Dokumen surat wakaf sesungguhnya menjadi tonggak sejarah standar pengelolaan harta di Kerajaan Siak Sri Inderapura, karena telah menjadikan harta kerajaan sebagai harta bukan milik pribadi, melainkan harta milik bersama Pemerintahan Kerajaan Siak dalam memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada rakyatnya. Surat wasiat ditujukan kepada semua pihak, baik dari keluarga istana kerajaan maupun kepada Rakyat Negeri Siak Sri Inderapura di kemudian hari. Oleh karena surat ini ditujukan untuk semua orang, maka terkandung sebuah keinginan Sultan Hasyim agar semua pihak di luar dari kerajaan dapat memberikan kontrol tentang bagaimana seharusnya harta kerajaan dikelola pada masa-masa berikutnya.

Surat wakaf atau surat wasiat ini dapat dikatakan sebagai standar akuntansi pengelolaan harta saat itu karena memuat beberapa pernyataan yang harus dipedomani. Pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam surat wakaf, *Pertama*, pernyataan penjelasan tentang rincian harta berdasarkan jenisnya. *Kedua*, pernyataan bahwa Istana Siak adalah tempat kediaman siapa pun dari keturunannya yang memerintah sebagai raja di masa yang akan datang. *Ketiga*, pernyataan yang mengharuskan melakukan mufakat antar keluarga turunan untuk menentukan siapa yang paling berhak menempati istana, jika tak satupun dari anak, cucu, cicit seterusnya dapat memerintah sebagai raja di masa yang akan datang. *Keempat*, pernyataan bahwa istana harus diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa di Siak pada masa yang akan

datang, jika kata mufakat tidak dapat dilakukan dan semua turunan keluarga kerajaan tidak boleh mencampurinya. *Kelima*, pernyataan bahwa istana boleh disewa oleh keturunannya dan membagikan hasil sewa kepada keturunannya yang lain. *Keenam*, pernyataan tentang jumlah orang yang ditugasi untuk memelihara istana yakni empat orang jika tak satupun dari keluarganya dapat bertindak sebagai raja dan mampu menyewa istana. *Ketujuh*, pernyataan bahwa istana tidak boleh digadaikan. *Kedelapan*, pernyataan bahwa istana tidak boleh dijual.

Amanah berupa pernyataan ini memiliki substansi yang mirip dengan substansi standar perlakuan akuntansi keuangan yang umumnya menerangkan praktik-praktik sebuah transaksi. Dasar kebijakan akuntansi harta era Sultan Syarif Kasim II adalah surat wakaf. Tanggung jawab beliau, menerapkan apa yang sudah diamanahkan dalam surat wasiat sebagai sebuah standar perlakuan akuntansi dalam pengelolaan harta.

Konfigurasi pengetahuan lainnya yang dapat disimpulkan dari masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim adalah menyangkut dengan Struktur Pemerintahan, Regulasi Pengelolaan Harta, serta integritas terhadap hak dan kewajiban dalam mempertanggungjawabkannya. Penjelasan dari kesimpulan tersebut disajikan sebagai berikut.

10.1.7. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan masa Sultan Syarif Kasim awalnya berbentuk sistem yang lebih mengakomudir keterlibatan keluarga dalam kerajaan. Namun dalam perkembangannya sistem yang mengakumudir keluarga berubah sedikit demi sedikit dengan memasukan orang-orang non keturunan kerajaan atau bangsawan atau orang-orang besar menjadi bagian dalam sistem pemerintahannya.

10.1.8. Regulasi Pengelolaan Harta

Pancung Alas

Kebijakan pancung alas, berupa pemanfaatan harta kerajaan oleh rakyat adalah bagian dari regulasi yang dikeluarkan oleh Sultan Syarif Kasim. Pancung alas merupakan bagian kontribusi hasil pruduksi pertanian rakyat yang diserahkan kepada kerajaan karena menggunakan tanah garapan di wilayah kerajaan. Besarnya pancung alas yang harus diberikan kepada kerajaan oleh rakyat semasa sultan adalah seiklasnya, meskipun sultan telah membuat aturan bagi dua.

Regulasi Pajak

Regulasi pajak diterapkan sultan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kerajaan oleh para saudagar yang melewati atau berlabuh di pelabuhan wilayah Kerajaan Siak. Pajak dilakukan oleh aparat Syahbandar sebagai personil kerajaan dan berada di setiap pintu masuk dari dan ke kerajaan. Semasa Sultan berkuasa, penerapan

pajak yang dikenakan pada setiap lalu lintas dari dan ke wilayah Kerajaan Siak tidak terlalu menjadi perhatian karena Belanda selalu mengintervensinya. Tidak terdapat informasi mengenai berapa besarnya pajak yang ditetapkan dan berapa besar pula kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan kerajaan dalam membiayai kegiatan operasional kerajaan.

Regulasi Pemanfaatan Harta

Regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan harta terbagi kedalam dua bagian yakni pemanfaatan harta oleh rakyat yang berada di sekitar wilayah kerajaan dan pemanfaat harta oleh kerajaan di semua wilayah taklukannya. Pemanfaatan lahan yang berada di Wilayah Kerajaan Siak harus mendapat ijin dari Sultan Siak sebagai bagian dari akuntansi pengelolaan harta pada saat itu. ijin yang diberikan kerajaan merupakan bagian dari catatan akuntansi untuk pengelolaan harta kerajaan. Sedangkan ijin pengelolaan tanah diluar area kerajaan yang menjadi wilayah kekuasaannya dibuat dan disampaikan secara lisan.

Surat ijin tidak dikeluarkan apabila kerajaan langsung memanfaatkannya melalui berbagai kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan kerajaan memiliki banyak bentuk dan semua hasilnya menjadi bagian dari pundi-pundi keuangan kerajaaan dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Kegiatan kerajaan yang mengelola lahan usaha tersebar pada beberapa wilayah di luar Siak Sri Inderapura.

10.1.9. Integritas Hak Dan Kewajiban serta pertanggungjawabannya

Integritas hak dari Sultan Syarif Kasim adalah hak milik yang melekat pada individu beliau baik berupa harta, kekuasaan dan integritas. Figur Sultan Syarif Kasim II terkenal sangat bersahaja, penyayang kepada rakyatnya dan agamis dalam bertindak. Semasa Sultan Syarif Kasim II, tanggung jawab untuk memajukan Negeri Siak telah direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan tanggung jawabnya untuk memajukan Negeri Siak telah diakui oleh seorang penulis yang mengatakan "Hanya di daerah inilah terdapat kelas pedagang pribumi yang kuat dan mereka melakukan perdagangan karet dan kopra yang tumbuh di dalam wilayah kesultanan". Tanggung jawab Sultan Syarif Kasim kepada rakyat ternyata tidak sebatas kepada Rakyat Negeri Siak saja, lebih dari itu beliau menunjukkan tanggung jawabnya kepada Rakyat Indonesia. Tanggung jawab ini dibuktikannya dengan menyerahkan hartanya dan Mahkota Kerajaan sebagai tanda berakhirnya Kerajaan Siak dan bergabung dengan Negara Republik Republik Indonesia.

Penggunaan Mahkota Kerajaan sesuai dengan simbol yang termaknai, menempati istana kerajaan sebagaimana harusnya, penggunaan dana kerajaan untuk mencerdaskan rakyatnya pada saat itu, merupakan bagian dari pertanggungjawaban hak dan kewajiban

Sultan Syarif Kasim kepada Rakyat Siak dengan sebaik-baiknya. Pertanggungjawaban inilah yang memunculkan kepercayaan rakyatnya kepada beliau. Kepercayaan rakyat semakin tinggi karena Kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan Syarif Kasim II, bukan digunakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kerajaan, melainkan digunakannya untuk membantu saudara-saudaranya dan tentu saja rakyatnya. Sultan Syarif Kasim memimpin dengan pengetahuan yang sangat mumpuni dalam bidang hukum Islam, ketata negaraan dan agama.

Akumulasi dari pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh sultan seperti kepercayaan, kekuasaan dan pengetahuan menyebabkan beliau di mata rakyatnya dianggap sebagai orang yang sakti. Pandangan ini bukanlah karena berbagai hal yang bersifat represif, tetapi muncul karena kearifan yang dimiliki oleh seorang sultan. Sultan Syarif Kasim telah memimpin Kerajaan Siak dengan kondisi yang sangat berbeda sekali dengan sultan-sultan sebelumnya secara diskursif.

Aksiden-aksiden yang muncul secara diskursif pada masa sultan-sultan sebelumnya adalah terkait dengan awal munculnya konsep istana dan cara perburuan harta sebelum Kerajaan Siak Sri Inderapura.

10.1.10. Awal Munculnya Konsep Istana

Masa Pemerintahan Tengku Ibrahim sebagai sultan kedelapan merupakan titik awal dari adanya harta benda milik kerajaan karena konsep istana yang dicetuskannya. Pemerintahan kerajaan sebelumnya tidak mencatat adanya harta miliki kerajaan, kecuali hanya tempat tinggal Sultan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Konsep tempat tinggal Sultan tidak berimplikasi kepada harta miliki kerajaan, kecuali hanya sebagai milik pribadi Sultan saja.

10.1.11. Cara Perburuan Harta Sebelum Sultan Syarif Kasim

Apabila sebuah kerajaan mengalami suatu kejayaan, maka di samping sebagai daerah tujuan, sekaligus juga bisa menjadi daerah incaran bagi penguasaan oleh kerajaan lainnya. Informasi yang mendominasi tentang kejayaan kerajaan asal-muasal Siak Sri Inderapura hanya berkisar pada pertumbuhan daerah, perkembangan perdagangan dan serang menyerang untuk menguasai sebuah kerajaan dalam rangka untuk menguasai atau memperluas wilayah kekuasaan. Motif dari kuasa-menguasai kerajaan adalah harta yang direbut dengan kekuatan tahta serta keinginan untuk meluaskan wilayah kekuasaan. Semangat memburu harta telah terjadi sejak lama, namun tidak diperoleh informasi tentang bagaimana harta tersebut dikelola.

10.2. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

10.2.1. Implikasi Teoritik

Ajaran yang mengatakan "Harta hanya sebagai sebuah titipan dari yang maha kuasa", tidak hanya diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang cukup diketahui saja (kognitif), melainkan jauh dari itu, pengetahuan itu haruslah dijabarkan dalam sebuah tindakan nyata, sehingga sebuah pengetahuan dapat berkembang membentuk sebuah pengetahuan baru yang dapat menjadi refleksi bagi manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Episteme yang muncul sebagai aksiden-aksiden pada era Sultan Syarif Kasim menghasilkan beberapa konfigurasi pengetahuan tentang konsep pengukuran harta, konsep penggunaan harta, konsep model pertanggungjawaban, konsep pengendalian internal, dan standar pengelolaan harta yang sesuai pada saat itu.

Konsep-konsep yang muncul pada era Sultan Syarif Kasim memberikan suatu makna yang sangat dalam untuk diketahui. Sebagai implikasi dari ilmu pengetahuan yang dipahaminya, harta tidak akan memberikan kenikmatan apa pun kecuali bermanfaat bagi rakyatnya. Pandangan yang dimiliki Sultan Syarif Kasim merupakan wujud dari keiklasan penghambaan diri kepada Tuhan Yang Maha Agung, sehingga substansi tertinggi nilai sebuah harta yang dimiliki adalah bermanfaat bagi orang lain.

10.2.2. Implikasi Praktis

Akuntansi harta tidak sebatas pada pencatatan dan penyajiannya kedalam sebuah laporan pertanggungjawaban, tetapi sesungguhnya pemikiran-pemikiran tentang bagaimana harta itu digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Harta yang dimiliki oleh kerajaan atau suatu pemerintahan lainnya harus diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan bagi kesejahteraan rakyatnya. Proses bagaimana harta tersebut digunakan oleh rakyatnya, merupakan substansi dari akuntansi pengelolaan harta.

Sistem akuntansi harta tidak cukup hanya sampai pada level pencatatan dan penyajian saja dalam sebuah pertanggungjawaban. Jauh dari hal itu, akuntansi harta menghendaki penggunaan harta bagi kemaslahatan umat yang dipertanggung jawabkan melalui pemanfaatan langsung oleh umat. Penggunaan harta bagi kemaslahatan rakyat dan dirasakan langsung oleh rakyat menghasilkan sebuah kewibawaan figur penanggungjawab utama sistem itu sendiri, sehingga berimplikasi kepada terciptanya pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem itu sendiri. Penyimpangan dari nilai-nilai yang dianut oleh Sultan Syarif Kasim tentang harta, merupakan bagian dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur Masyarakat Melayu.

10.3. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian yang memakan waktu panjang dengan sebuah konsep metodologi yang telah disiapkan tidak steril dari adanya keterbatasn dalam pelaksanaannya. Keterbatasan penelitian terkait dengan dokumen, informan, dan literatur yang dapat mengurangi kesempurnaan penelitian ini. Keterbatasan terkait dokumen karena dokumen pendukung yang terkait dengan pencatatan nilai harta kerajaan sulit dijumpai dan bahkan tidak ditemukan. Dokumen pendukung yang masih ada kondisinya sudah sangat rapuh sehingga sulit untuk disentuh apalagi digandakan seperti pada lampiran 3.

Keterbatasan terkait dengan informan dari masyarakat biasa yang terbilang muda saat Sultan Syarif Kasim berkuasa masih ada di Siak Sri Inderapura, namun mereka sudah tidak bisa memberikan kontribusi karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Padahal Informasi dari mereka yang mengalami saat Sultan Syarif Kasim berkuasa sangat penting artinya bagi pendalaman penelitian. keterbatasan kontribusi dari masyarakat biasa menyebabkan keterbatasan dalam melakukan konfirmasi, sehingga mengurangi kesempurnaan penelitiaan ini.

Keterbatasan terkait dengan literature terutama menyangkut dengan pengelolaan harta era Sultan Syarif Kasim, literatur yang ada sangat terbatas adanya dan jikapun ada, hanya terkait dengan masalah seperti Adat Istiadat, Budaya Melayu, Adat Perkawinan, Peperangan. Semoga keterbatasan ini dapat sedikit berkurang oleh secarik tulisan yang diungkapkan dalam buku ini, Aamien.

DAFTAR PUSTAKA

Accounting Terminolgy Bulletin No. 1. 1953. Review And Resume, Paragraf 9, *American Institute of Certified Public accountants*, New York

Accounting Principle Board, 1970, Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises, *APB Statements No. 4*, AICPA, New York.

Admin. 2012. *Pemerintah Dituding Rampas Hak Hibah Ahli Waris Kesultanan Siak*, http//www.google.com, Maret 2013.

Ahrens, T and Chapman, C. S. 2006. Doing Qualitative Weld Research in Management Accounting: Positioning Data To Contribute To Theory, *Accounting, Organizations and Society*, 31 (2006) 819–841, Elsevier Ltd.

Alasuutari, P. 2004. *Sosial Theory and Human Reality*, Sage Publications, London.

Alawattage, C. and Danture, W. 2008. Appearance Of Accounting In A Political Hegemony, *Elsevier*, Critical Perspectives on Accounting, 19, (1): 293–339.

Alexander, J, R. 2002. History of Accounting, *Association of Chartered Accountants in the United States 341 Lafayette St*, Ste, (212), 334-2078.

Ambary. H, M. 2007. Islam Dan Kesultanan Melayu, *Masyarakat Melayu Dan Budaya Melayu Dalam Perubahan*, Koentjara Ningrat dkk, Balai Kajian Dan Pengembangan Budaya Melayu Bekerja Sama Dengan Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.

American Accounting Association -1966. 1987. Concepts And Standards Research

Study Committee, The Realization Concept, *Accounting Theory; Text And Readings*, Third Edition, Schroeder, Mccullers, Clark Jhon Wiley And Sons, New York.

American Accounting Association-1966. 1977. A Statement of Basic Accounting Theory, *American Accounting Association Committee To Prepare A Statement Of Basic Accounting Theory*, United State Of American.

Aminuddin. 1955. *Acara Timbang Terima Pemerintah Kewedanaan Siak Sri Inderapura, Dokumen*, Siak Sri Inderapura.

Amstrong, Martin A. 2014. The Origins of Money, http://armstrongeconomics.com, Februari, 2014.

Anrooij, H. A. Hijmans Van. 1885. Nota Omtrent Het Rijk Van Siak, TBG, XXX.

Anthony, R.N. and Reece, J.S. 1989. *Accounting Text And Cases*, 8th Ed, Richard D Irwin, Inc, Illinois.

Antonio, M, Syafii dan Tim Tazkia. 2010. *Bisnis Dan Kewirausahaan: Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager*, Tazkia Publishing, Jakarta.

Ansari, I. A. 1997. *Concept Of Man In Comperative Perspective*, Synergy Book International, Kuala lumpur, Malaysia.

Appelrouth, S. and Laura D, A. 2007. *Sociological Theory In The Contemporary Era: Text And Readings*, Pine Forge Press, California.

Ardalan, Kavous. 2000. The Academic Field of Finance and Paradifm Diversity, *Southern Business Review*, New York.

Askary, S. and Beverley, J. 2004. A Theoretical Framework of Analisys of Accounting Propensity in Defferent Religions, *The fourth Asia Pasific Interdiciplinary Research In Accounting Conference*, Singapore.

Arkarath, *et. al*, 2012, Memahami IFRS: Standar Pelaporan Keuangan Internasional, Priyo Darmawan (Penerjemah), Indeks, Jakarta.

Aziz, Abdul S R. 2005. Menyusun Rancangan Penelitian Kualitatif, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Bungin. B, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Aziz, Maleha. 1991. *Usaha Sultan Syarif Qasyim II Dalam Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat Kerajaan Siak Sri Inderapura Tahun 1908-1945*, Pusat Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.

Aziz, Maleha. 1984. *Latar Belakang Pembangunan Istana Kerajaan Siak Sri Inderapura di Siak Sri Inderapura*, Puslit UNRI, Pekanbaru.

Baker, C. R. 2004. Accounting in The Bosom of Abraham: A Genealogical Investigation

of Wealth, *The Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research In Accounting Conference*, 4 To 6 July, Singapore.

Belkaoui, A. 1978. Linguistic Relativity in Accounting, *Accounting, Organizations And Society*, Vol. 3, No. 2. pp. 97-104.

Berg, B. L. 2001. *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*, Allyn & Bacon A, Boston.

Bierman, H. JR. 1987. Measurement And Accounting, *Accounting Theory; Text And Readings*, Third Edition, Schroeder, Mccullers, Clark, Jhon Wiley And Sons, New York.

Bimberg, Jacob G and Natwar M. Gandhi,. 1976. Toward defining the accountant's role in the evaluation of social programs, *Accounting, Organization And Society*, Vol. 1, issue 1.

Bishop, M. and Rebecca, B. 2008. Disabling Accounting, *Elsevier*, Critical Perspectives on Accounting, 19 1–16.

Boyns, Trevor. et al. 1997. The Development of Industrial Accounting in Britain And France Before 1880: A Comparative Study of Accounting Literature And Practice, *European Accounting review*, 6(3): 393-437.

Brinkgreve, F. et al. 2010. *Kemegahan Emas Di Museum Nasional Indonesia*, Duta Tiga Raksa, Jakarta.

Brinkgreve, F. and Retno, S. 2009. *Sumatra; Crossroads of Cultures*, KITLV Press, Leiden Nederlands.

Brown, C. G, 2005, *Postmodernism For Historians*, Pearson Education Limited, Great Britain.

Brown, C. D. and P, Burnaby. 1988. The Evolution of The Single Audit: A 20-Year Process, *Accounting horizon*, June, No. 1.

Burchell, S. et al. 1980. The Roles of Accounting In Organizations And Society, *Accounting, Organizations And Society.* Vol. 5, No. 1, pp. *5-21.*

Burrel, G. and G, Morgan. 1994. *Sociological Paradigms And Organizational Analysis; Elements Of The Sociological Of Corporate Life*, Arena, USA.

Caldwell, Bruce J. 1994. *Beyond Positivism Economic Methodology in The Twentieth Century,* Revised Edition, Routledge, London and New York.

Carmona, Salvador. 2005. The History of Management Accounting in France, Italy, Portugal, and Spain, *IE Working Paper*, WP05-30.

Carnegie, Garry. D. and C. J. Napier. Critical And Interpretive Histories: Insights Into Accounting's Present And Future Through Its Past, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(3): 7-39.

Chua, W. F. 1986. Radical Development in Accounting Thougt, *The Accounting Review*,

Vol. 61, No. 4, 601-632.

Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design*, Second Edition, Sage Publication. Inc, California.

Coolin, M. and R, Bloom. 1991. The Role of Oral History in Accounting,*Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 4, No. 4.

Cooper, D. J and A. M. Tinker. 1994. Accounting and praxis: Marx after Foucault, *Critical Perspectives on Accounting*, 5 (1), 1-3.

Cottingham, J. 2005. *The Spiritual Dimension: Religion, philosophy and Human Value*, Cambridge University Press, Cambridge.

Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta.

Davis, Gordon. B. 1987. Commentary on Information Systems, *Accounting Horizons*, March, No. 1

Deegen, C. 2004. *Financial Accounting Theory*, McGraw-Hill, Australia.

Denzin, Norman K. and Y, S. Lincoln (Editors). 2005. The Sage Handbook of Qualitative Research, Third Edition, Sage Publications, London.

Dewi, Norma. et al. 2000. Selintas Sejarah Kerajaan Siak Sri Inderapura Dan Peninggalannya, *Proyek Pembinaan Permuseuman Riau*, Pekanbaru.

Dewi, Norma. 1999. Kerajinan Batik Riau, *Proyek Pembinaan Permuseuman Riau*, Pekanbaru.

Dey, C. 2004. Social Accounting at Tradecraft PLC: An Etnographics Study of A Struggle for The Meaning of Fair Trade, *The fourth Asia Pasific Interdiciplinary Research In Accounting Conference*, Singapore.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Catatan Tengku Bagus*, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau, Pekanbaru.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1984. *Sejarah Pendidikan Daerah Riau*, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau, Pekanbaru.

Dewhirst, J. F. 1987. Accounting for Business Combinations-The Purchase VS Pooling of Interests Issue, *Accounting Theory; Text And Readings*, Schroeder, Mccullers, and Clark, Third Edition. Jhon Wiley And Sons. New York.

Djamhuri Ali. 2011. Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Berbagai Paradigma Dalam Kajian Akuntansi, *Makalah disampaikan pada sesi Knowledge Recharging*, Malang.

Dubnick, Melvin. 1998. Clarifying Accountability: An Ethical Theory Framework. *Public Sector Ethics: Finding And Implementing Values*. Charles Sampford, Noel Preston. and C. A. Bois.The Federation Press/Routledge, Leichhardt, NSW, Australia.

Dykstra, Clarence A. 1939. The Quest for Responsibility, *American Political Science*

Review, 33 (1): 1-25.

Effendy, Tenas dan Nahar Effendy. 1972. *Lintasan Sejarah Kerajaan Siak Sri Inderapura*, Badan Pembina Kesenian Daerah Riau, Pekanbaru

Emory, C, W. and Donald, R, C. 1995. *Business Research Methods*, Fifth Ed, Irwin, Chicago.

Everett. Jeff et al. 2007, Accounting and The Global Fight Against Corruption, Accounting Organization and Society, 32, 513-542.

Ezzamel, Mahmoud. 1997. Accounting Control and Accountability: Preliminary Evidence from Ancient Egypt, *Critical Perspectives on Accounting*,**8** (6): 563-601.

Flamholtz, E. G. 1980. The Mission of The Ucla Conference on The Role of Accounting in Organizations And Society, *Accounting, Organization And Society*, Vol. 5, No. 1.

Flamholtz, E. G and E. Cook, 1978. Connotative Meaning And Its Role in Accounting Change: A Field Study, *Accounting, Organization And Society*, Vol. 3, No. 2, pp.115-139.

Ferguson, Niall. 2001. The Cash Nexus; Money And Power In The Modern World, I700-2000, *Basic Books*, United States of America.

FEI Research Foundation, 2002, Accounting Standards: Are We Ready For Principles Based Guidelines?. The Research Foundation, Issue Alert, March.

Fleischman, Richard. K. and Thomas, N. Tyson. 1997. Archival Researchers: Endangered Species?, *Accounting History Journal*, 24(2): 91-109.

Fogarty. et al. 1994, political aspects of financial accounting standard setting in the USA, Accounting, Auditing, and accountability Journal, Vol. 7 No. 4. pp. 24-46.

Foucault, M. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews And Other Writings 1972-1077 By Michel Foucoult*, Edited By Colin Gordon, The Harvester Wheatsheaf, New York,

Foucault, M. 2012. *Arkeologi Ilmu Pengetahuan*, Muzir I, R, (Penerjemah). Ircisod, Yogyakarta

Funnel, Warwick. 2005. Pathological Response to Accounting Controls: The British Commissariat in The Crimea 1854-1856, Edited By Warwick Funnell And Robert Williams, *Critical And Historical Studies In Accounting*, Pearson Education Australia, Australia, 52.

Gaffikin, Michael. 2005. Legacy Of The Golden Age: Recent Development in The Methodology of Accounting, Edited By Warwick Funnell And Robert Williams, *Critical And Historical Studies In Accounting*, Pearson Education Australia, Australia, 52.

Gazalba, Sidi. 1966. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Bhratara, Jakarta.

Georgios, G. and Ian, T. 2004. Organic Salmon Farming: Risk Perceptions, Decision Heuristics And The absence of environmental Accounting, *Fourth Asia Pasific Interdiciplinary Research in Accounting Conference*, Singapore.

Ghalib, Wan. et al, 1991, *Adat Istiadat Melayu Riau; Di Bekas Kerajaan Siak Sri Inderapura*, Lembaga Adat Daerah Riau, Pekanbaru Riau.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gordon, L. A. and D, Miller. 1976. A Contingency Frame Work for The Design of Accounting Information Systems, *Accounting organizations and society*, Vol. 1. No. 1, pp. 59-69.

Gray, R. and J, Bebington. 1997. Accounting And The Soul of Sustainability: Hyperreality, Transnational Corporations And The United Nations, *APIRA*, Apri,L 1998.

Grady, Paul, 1965, Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises, American Institute Of Certified Public Accountants, Inc, New York

Grojer, J,E. and Stark, A. 1977. Social Accounting: A Swedish Attempt, *Accounting, Organizations and Society*, Vol. *2*, No. 4, pp. *349-386*.

Hahn, W. 2007. Accounting Research: An Analysis Of Theories Explored In Doctoral Dissertations And Their Applicability To Systems Theory. *Elsevier*, Accounting Forum, 31, 305–322.

Hamka. 1994. *Dari Perbendaharaan Lama*, Pustaka Panji Mas, Jakarta

Hamka, 1961, *Sedjarah Umat Islam*, Jilid IV, Nusantara, Bukit Tinggi.

Ham, Ong Hok. 2007. Pemikiran Tentang Sejarah Riau, *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu Dalam Perubahan*, Koentjaraningrat, dkk, Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta.

Hasbullah, M. dan Dedi, S. 2012. *Filsafat Sejarah*, Pustaka Setia, Bandung.

Herayulwita, *et. al.* 2012. *Daftar Pertelaan Arsip Kerajaan Siak 1900-1940 Dan Daftar Arsip Istana Siak Yang Di Destorasi/Perbaikan Tahun 2011-2012 Oleh Tim Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)*, Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Siak Tahun 2012, Siak Sri Inderapura.

Henderiksen, E. S. 1977. *Accounting Theory*, 3th Edition, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, Illinois

Hollins, M. 1995. *Philosophy of Social Science: Blackwell Componion To Philosophy*, Blackwell, Cambridge, Mass: 358:387.

Hooper, K. and K, Kearins. 2008. The Walrus, Carpenter And Oysters: Liberal Reform, Hypocrisy And Expertocracy in Maori Land Loss in New Zealand, *Elsevier*, Critical Perspectives on Accounting 19, 1239–1262.

Hopwood, A. G. 1980. Editorial, *Accounting, organizations, and society*, Vol. 5, No. 1, p. 1.

Hopwood, A. G. 1978. Editorial, *Accounting, organizations, and society*, Vol. 3, No. 3/4, pp. 189-190.

Hopwood, A. G. 1987. The Archaeology Of Accounting Systems, *Accounting, organizations, and society*, Vol. 12, No. 5, pp. 207-234.

Hoskin, Keith. W. 1994. Boxing Clever: for Against and Beyond Foucault in The Battle For Accounting Theory, *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 5, 57-85.

Irvine, Helen. 2005. The Legitimizing Power of Financial Statements in The Salvation Army in England 1865–1892, Edited By Warwick Funnell And Robert Williams, *Critical And Historical Studies in Accounting*, Pearson Education Australia, Australia, 52.

James, K. 2008. A Critical Theory Perspective on The Pressures, Contradictions And Dilemmas Faced By Entry-Level Accounting Academics, *Elsevier*, Critical Perspectives on Accounting 19, 1263–1295.

Jamil, Nizami. dkk. 2002. *Bab Al-Qawa'id: Transliterasi Dan Analisis*, BAPPEDA Kabupaten Siak Dan Masyarakat Peduli Lingkungan Wisata Siak Sri Inderapura, Siak Sri Inderapura.

Jamil, Nizami. dkk. 2005. *Pakaian Tradisional Melayu Riau*, LPNU Press Bekerjasama Dengan Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru.

Jamil, Nizami. Dkk. 2008. *Adat Perkawinan Melayu Riau*, CV. Suka Bina, Pekanbaru.

Jamil, Nizami. 2010. *Sejarah Kerajaan Siak*, Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau, Pekanbaru.

Jorissen et, al. 2006, "Lobbying Toward a Global Standard Setter – Do National Characteristics Matter?, An Analysis of The Comment Letters Written To The

IASB, Gregoriou Dan M. Gaber, International Accounting: Standards, Regulations, and Finance Reporting, Elsevier Ltd, USA.

Karim, Rifaat, A. A. 1990. The Independence of Religious And External Auditors: The Case of Islamic Banks, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 3, No. 3.

Kartodirdjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kartodirdjo, S. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kartodirdjo, S. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, Jilid 2, PT. Gramedia, Jakarta.

Kartodirdjo, S. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900:* Dari Emporium sampai imperium, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kasim, Kamarul B, A. 2003, *Koleksi Pilihan Dunia Melayu: Distinctive Malay World Collections*, Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur.

Kuhn, Thomas S. 1983, Commensurability, Comparability, Communicability, *The Philosophy Of Science Association*, Vol.2.pp. 669-668.

Lehman, Gleen. 2004. Accounting, Accountability And Religion: Charles Taylor's Catholic Modernity And The Malaise of A Desenchanted World, *The fourth Asia Pasific Interdiciplinary Research In Accounting Conference*, Singapore.

Ludigdo, Unti. 2005. Pemahaman Strukturisasi Atas Praktik Etika Disebuah Kantor Akuntan Publik, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.

Lutfi, Amir. 1983. *Unsur Islam Dalam Sistem Peradilan Kesultanan Siak Sri Inderapura 1915-1945*, LPP IAIN Susqa, Pekanbaru.

Lutfi, Amir. 1991. *Hukum Dan Perubahan Struktur Kekuasaan; Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, Susqa Press, Pekanbaru.

Mack, N. et al. 2005. *Qualitative Research Methods:A Data Collector's Field Guide*, Family Health International, USA.

Macintosh, et al. 2000. Accounting As Simulacrum And Hyperreality: Perspectives On Income And Capital, *Accounting, Organization And Society*, 25, 13-50.

Mahyudin, S. 1986. Perang Guntung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maksum, Ali. 2011. *Pengantar Filsafat; Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*, Ar-Ruzz Media, Jakarta.

Malik, Haji Abdul. 2012. *Sejarah Kejuangan Dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761-1812)*, Pemerintah Kabupaten Lingga, Daik Lingga.

Marsden, William. 2008. *Sejarah Sumatra*, Tim Komunitas Bambu, Depok.

Mangos, N. C. and Neil, R. Lewis. 1995. A Socio-Ekonomic Paradigm For Analysing Managers' Accounting Choice Behavior, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 8, No. 1.

Maunders, Keith. T. 1991. Accounting and Ecological Crisis, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 4, No. 3.

Mautner, T. 1997. *Hermeneutics In Mautner, The Penguin Dictionary of Philosophy*, Penguin Books, London 248-249.

Merriam, S. B. and Association. 2002. *Qualitative Research In Practice; Examples For Discussion And Analysis, Jossey-Bass*, Jhon Willey & Sons, Inc, San Fransisco.

Miles, Matthew. B. and Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru,* Tjetjep Rohendi Rohidi (penerjemah), Universitas Indonesia, Jakarta.

Millner, A. C. 1977. The Malay Raja: A Study of Malay Polictical Culture in East Sumatera And The Malay Peninsula in The Early 19th Century. *Thesis.*

Miller, P. and Christopher, N. 1993. Geneologies of Calculation, *Accounting, Organizations and Society,* V.18: 18/17, 631-647.

Miller P, Trevor H. and Richard, L. 1991. The New Accounting History; An Introduction, *Accounting History*, Volume I, Fleischman R (Ed), Sage Publikations, London.

Mills, Patti, A. 1989. Words And The Study of Accounting History, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 2.1.

Moore, Janet. and Gaffikin. 2005. The Early Growth of Corporations Leading to The Empowerment of The Accounting Profession, 1600-1855, Edited By Warwick Funnell And Robert Williams, *Critical And Historical Studies In Accounting,* Pearson Education Australia, Australia.

Moore, Janet. and K, Cooper. 2005. The Consolidation of A Profession: 1880 – 1906, Edited By Warwick Funnell And Robert Williams, *Critical And Historical Studies In Accounting*, Pearson Education Australia, Australia.

Most, Kenneth S. 1977. *Accounting Theory*, Grid, Inc, United State.

Mulgan and Richard. 2000. Accountability: An Ever-Expanding Concept?. *Public Administration*, 78 (3): 555-573.

Napier, C. J. 1989. Research Directions In Accounting History, *Accounting History,* Volume I, Fleischman R (Ed), Sage Publications, London.

Nasr, Vali. 2009, *The Rise of Islamic Capitalism*, Free Press, New York.

Netscher. E, 2002, *Belanda Di Johor Dan Siak 1602-1865; Lukisan Sejarah*, Wan Ghalib (Penerjemah), Pemda, Pekanbaru.

Noegraha, Nindya. et all. 2002. *Hikayat Iskandar Zulkarenain & Syair Raja Siak; Dari Naskah W113 Dan W273*, Perpusatakaan nasional RI, Jakarta.

Nugraha, Nindya (Editor). 1996. *Sejarah Leluhur (Dalam Naskah Kuno); Koleksi Perpustakaan Nasional RI*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

Nurhabsyah. 2005. Kerajaan Siak Sri Inderapura Menurut Pendekatan Pendidikan Sejarah, *Makalah*, Universitas Sumatera Utara, 1-9.

Nurhamidahwati. 1998. *Kerajinan Pandai Besi Daerah Riau*, Proyek Pembinaan Permuseuman Riau, Pekanbaru.

Nurhamidahwati. 1994. *Kerajinan Tekat Daerah Riau*, Proyek Pembinaan Permuseuman Riau, Pekanbaru.

Opini, 2012. *Sultan Syarif Kasim II, Sultan Kerajaan Siak*, http//www//google.com, Maret 2013

Otley, D.T and A.J. Berry. 1980. Control, Organisation And Accounting, *Accounting, Organizations And Society.* Vol. 5, No. 2, Pp. 23 1-244.

Omar, S.M, Syed. 1995. *Mitos dan kelas penguasa melayu*, Diah, M (penerjemah), Pusat pengajian bahasa dan kebudayaan melayu (P2BKM) Universitas Riau bekerjasama dengan penerbit Unri Press. Pekanbaru.

Parchiano, N. 2007. Sejarah Pengetahuan Michel Foucault, *Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri*, Listiyono Santoso. et al, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

Parker, L. D. 2009. Photo-Elicitation: An Ethno-Historical Accounting And Management Research Prospect. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(7), 1111-1129.

Perret, Daniel. 2010. *Kolonialisme dan Etnisitas*, Saraswati, W. (Penerjemah), Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Perpustakaan Nasional RI, 1996, *Sejarah Leluhur (Dalam Naskah Kuno)*, Proyek Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Plescia, Joseph. 2001. Judicial Accountability And Immunity in Roman Law. *American Journal Of Legal History*, 45 (1): 51-70.

Potter, J É L Garry (Editors). 2001. After Postmodernism: An Introduction to Critical Realism, The Athlone Press, New York.

Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Depdikbud. 1977. *Sejarah Daerah Riau*, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan, Jakarta.

Reid, A. 2012. *Sumatera; Revolusi Dan Elite Tradisional*, Tom, Anwar (Penerjemah), Komunitas Bambu, Jakarta.

Reid, A. 2005. *An Indonesian Frontier; Acehnese and Other Histories Of Sumatra*, Singapore University Press, Singapore.

Reinout, Vos. 1993, *Gentle Janus, Merchant Prince; The VOC And The Tightrope Of Diplomacy In The Malay World, 1740-1800*, Kitlv Press, (Translated) By Beverly Jackson, Leiden-Netherlands.

Richardson, A. J. 2008. Strategies in the Development of Accounting History as an Academic Discipline, *SAGE Publications*, Vol 13(3): 247–280

Roberts, Jennnifer T, 1982, *Accountability in Athenian Government.* Madison, WI: University of Wisconsin Press.

Robson, Keith. 1991. On The Arenas of Accounting Change: The Process of Translation, *Accounting Organizations And Society*, Vol. 16. No. 5/6, pp. 547-570.

Robson, Keith. 1992. Accounting Numbers As Inscription: Action At A Distance And The Development Of Accounting, *Accounting Organizations and Society*, Vol. 17. No. 7, pp. 685-708.

Rohana, Sita. 2008. *Upacara Tradisional Melayu Siak: Nilai-nilai Dan Perubahannya*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Tanjung Pinang.

Ruben D, 1998. The Philosophy of The Social Sciences, *Philosophy 2: Further Through The Subject*, Oxford University Press: 420-469.

Salam, Abd. 2013. *Baitul Mal Kajian Historis Dan Konsep Idealnya Di Negara Nasional*, http://www.e-maik.my/public_new, Download Minggu, 9 Maret 2014.

Schedler, A. 1999. Conceptualizing Accountability. *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Andreas. S, Larry. D, and Marc, F. Plattner, Lynne Rienner Publishers, London.

Seidman, Gary. I. 2005. The Origins of Accountability: Everything I Know About the Sovereign's Immunity, I Learned from King Henry III, *St. Louis University Law Journal*, (2): 393-480.

Sinar, Tengku, L. 2007. *Sejarah Kesultanan Melayu Di Sumatera Timur*, Heddy Shri Ahimsa Putra (Editor), Balai Kajian Dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta.

Sinclair, Amanda, 1995, The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses. *Accounting, Organizations and Society*,(2/3): 219-237.

Soedjono. R.F dan Leirissa. K.Z (Editor). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia; Zaman Pertumbuhan Dan Perkembangan Kerajaan Isam Di Indonesia*, Edisi Pemutahiran., Balai Pustaka, Jakarta.

Soerat Perdjandjian antara Goebernemen Hindia Nederland dengan Pemerintah Kerajaan Siak Sri Indrapoera, Siak Sri Indrapoera, 16 Juni 1938.

Somantri, G. R. 2005. Memahami Metode Kualitatif, Makara, *Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 57-65.

Spradley, J. P. 1997. *The Ethnographic Interview*, Misbah Zulfa Elisabeth (Penerjemah), Metode Etnografi, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Steel, Miranda. (Editor). 2000. *Oxford Wordpower; Dictionary For Learners Of English*, Oxford University Press, New York.

Sukoharsono, E. G. dan N, Qudsi, Q. 2008. Accounting in The Golden Age Of Singosari Kingdom: A Foucouldian: Perspective, *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak.

Sukoharsono, E. G. 2010. Metamorfosis Akuntansi Sosial Dan Lingkungan: Mengkonstruksi Akuntansi Sustainabilitas Berdimensi Spiritualitas, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Akuntansi Sosial dan Lingkungan*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.

Sukoharsono, E. G. and M. J. Gaffikin. 1993. Power and Knowledge in Accounting: Some Analysis and Thoughts on Sosial, Political, and Ekonomic Forces in Accounting and Profession in Indonesia (1800-1950s), *Faculty of Commerce*, Accounting and finance Working Papers, Series No.4.

Sukoharsono, E. G and M. J. Gaffikin. 2005. The Genesis of Accounting in Indonesia: The Dutch Colonialism in The Early 17Th Century", Edited by Warwick Funnell and Robert Williams, *Critical and Historical Studies In Accounting*, Pearson Education Australia, Australia.

Suojanen, W. W. 1954. Accounting Theory And The Large Corporation, *The Accounting review*, volume 29, issue 3, 391-398.

Suwandi, B. 1978. *Adat Istiadat Daerah Riau*, Depdikbud Provinsi Riau, Pekanbaru

Suwardi. 2007. *Sejarah Kesultanan Melayu Di Sumatera Timur*, Heddy Shri Ahimsa Putra (Editor), Balai Kajian Dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta.

Suwardi, et al. 2006. *Dari Kebatinan Senapelan Ke Bandaraya Pekanbaru; Menelisik Jejak Sejarah Kota Pekanbaru 1784-2005*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi; Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, edisi ketiga, BPFE, Yogyakarta.

Steel, Miranda, 2003, Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University Press, China.

Sterling, R. R. 1987. Accounting Research, Education, And Practice, *Accounting Theory; Text And Readings*, Third Edition, Schroeder, McCullers, and Clark, Jhon wiley and sons, New York, 1987.

Schroder, et al. 1987. *Accounting Theory; Text And Readings*, Third Edition, Jhon Wiley And Sons, New York, 1987.

Sterling, Robert. R. 1990. Positive Accounting: An Assessment, *ABACUS*, Vol.26, No.2.

Stewart, Ross E. 2007. Pluralizing Our Past: Foucault in Accounting History, *Accounting History*, Volume III, Fleischman R (Ed), Sage Publications, London.

Tan. Heidi, 2010, *Sumatra Isle of Gold*, Stallion Press, Singapore.

Tarigan, SDS. et al. 1997. *Pembinaan Nilai Budaya Melalui Permainan Rakyat Daerah Riau*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Tanjung Pinang.

Thohiran. 2012. *Enick H. Moh. Zein Bin E.H. Moh. Nuh (Penghulu Pusako-Kerajaan Siak Sri Inderapura Periode: 1924-1944)*, http://datukmeiko.wordpress.com. Oktober, 2012.

Thomas, R. Murray. 2003. Blending Qualitative & Quantitative Reseach Methods in Theses and Dissertations, Corwin Press, Inc, United State of America.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tinker. and M. Neimark. 1988. The Struggle Over Meaning In Accounting And Corporate Research; A Comparative Evaluation Of Conservative And Critical Historiography, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 1.1.

Tinker, Tony. 2004. The Enlightenment and its Discontents: Antinomies of Christianity, Islam and the calculative sciences, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 17 No. 3, pp. 442-475.

Toha, T. Mohammad. 2012.*Warisan Sejarah Kesultanan Siak Sri Inderapura; Dalam Untaian Kisah Mahkota di Sungai Jantan*, Kekerabatan Resam Keluarga Kerajaan Siak Sri Inderapura, Siak.

Tyson, Thomas.1993. Keeping The Record Straight: Foucauldian Revisionsm And Nineteenth Century US Cost Accounting History, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 6 No. 2, pp. 4-16.

Ujas, A.A. et al. 1992. *Gugusan Candi Muara Takus*, Proyek Pembinaan Permuseuman Riau, Pekanbaru.

Urch, Edwin. J. 1929. The Law Code of Hammurabi. *American Bar Association Journal*, **15** (7): 437-441.

Utomo, Bambang. B. 1994. *Buku Panduan Pameran; Aspek Budaya Klasik Indonesia Se-Sumatera*, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Medan.

Walker, Stephen. P. 2004. The Search for Clues in Accounting History, *The Real Life Guide To Accounting Research: A Behind-The-Scenes View Of Using Qualitative Research Methods*, Humphrey And Lee (Ed), Elsevier, Amsterdam.

Watt, R. L. and J. L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*, Prentice-Hall International, Inc, Englewood Cliffs, NJ, USA.

Watts, R. L. and J. L. Zimmerman. 1990. Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65 (1): 131-156.

Watts, R. L and J. L. Zimmerman. 1979. The Demand For And Supply Off Accounting Theories: The Market For Excuses, *The Accountng Review*, Vol. LIV, No. 2, April.

Wikipedia, 2014, *Accountability*, Wikipedia.org, download, 2 Agustus 2014

Yamey, B. S. 1964. Accounting And The Rise Of Capitalism: Further Notes On A Theme By Sombart,,*Accounting History*, Volume II, Fleischman R (Ed), Sage Publications, London.

Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 & Perum Peruri. 1991. *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1990*, Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 & Perum Peruri, Jakarta.

Yusuf, Ahmad. et al, 1992. *Sultan Syarif Kasyim II Raja Terakhir Kerajaan Siak Sri Inderapura; Pemerintahan, Perjuangan, Warisan*. Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau, Pekanbaru.

Yusuf, Ahmad. et al. 1993. *Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau Ke Kesultanan Melayu Lingga-Riau*, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru.

Yunus,Hamzah. 2003. *Peninggalan-Peninggalan Sejarah Di Pulau Penyengat*, UNRI Press, Pekanbaru.

Young, Joni. J and T. Mouck, 1996, Objectivity and The Role of History in the Development and Review of Accounting Standards, Accounting Auditing & Accountability Journal, 9 (3), 127-147.

Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*, Cetakan I. Darul Ilmi Lil Malayin. Beirut.

Zeff, S. A. 1987. The Rise Of Economic Consequences, *Accounting Theory; Text And Readings*, Third Edition, Schroeder, Mccullers, Clark Jhon Wiley And Sons, New York.

Zeghal, D. and S.A. Ahmed. 1990. Comparison of Social Responsibility Information Disclosure Media Used By Canadian Firms, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol.3. No. 1.

Zimmerman, J. L. 1979. The Cost and Benefit of Cost Allocations, *The Accounting Review*, July,504-521.

DAFTAR ISTILAH

Akuntansi harta. Pemikiran-pemikiran yang menghasilkan berbagai kebijakan, tindakan atau kegiatan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan pengelolaan harta serta pertanggungjawabannya. Pemikiran yang menghasilkan kebijakan tersebut terjadi dalam kerangka aktivitas atau kegiatan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan lainnya yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Bathin, pemimpin masyaraka setempat pada saat itu

Bab Al-wa'id. Merupakan undang-undang yang dibuat semasa Sultan Syarif Hasyim, untuk menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan kerajaan Siak Sri Inderapura pada saat itu dan masa kesultanan berikutnya.

Harta, seluruh kekayaan berupa barang bergerak dan tidak bergerak milik kerajaan Siak Sri Inderapura yang ada dalam istana dan sekitarnya. Penguasaan harta istana dan sekitarnya bersifat turun-temurun

Harta Swapraja. Harta Swapraja merupakan wilayah taklukkan atau kekuasaan yang dimiliki secara politik, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari harta kerajaan Harta berupa kekuasaan atas suatu wilayah yang keberadaannya sangat ditentukan oleh Pemerintah Kolonial pada saat itu. Swapraja bukanlah merupakan harta milik kerajaan karena keberadaannya sangat ditentukan oleh kekuasaan yang diatur oleh pemerintah kolonial.

Kerajaan Siak Sri Inderapura. Bekas kerajaan melayu yang terletak di Kabupaten Siak Sri Inderapura, Riau saat ini.

Konstruksi. Bagian dari pengungkapan *episteme* yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber, mendeskripsikannya, mengkonfirmasikannya dan menginterpretasikannya dalam rangka menyusun model dari lapangan.

Modal. Dalam kontek ini diartikan sebagai hak milik yang melekat pada individu baik berupa harta, kekuasaan dan integritas seseorang

Najis. Kata yang digunakan oleh Sultan Syarif Kasim untuk mengungkapkan bahwa harta dapat membuat kotor Sultan karena dipengaruhi oleh hawa nafsu untuk menguasainya.

Pajak. Cukai yang harus dibayar oleh kapal-kapal atau pedagang yang berlabuh dari dan ke pelabuhan Siak Sri Inderapura.

Pancung Alas. Pembagian hasil pertanian, perladangan yang memanfaatkan tanah garapan wilayah kesultanan antara Rakyat dengan kerajaan. Besarnya adalah dibagi dua.

Penelurusuran. Merupakan bagian dari aktivitas mencari sumber informasi dalam rangka melakukan konstruksi.

Sultan Syarif Kasim II. Sultan kerajaan Siak ke 12 atau yang terakhir berkuasa (1908-1946) dalam sejarah Kerajaan Siak Sri Inderapura

Surat Wakaf. Surat wasiat yang dibuat oleh Sultan Syarif Hasyim kepada generasi Sultan berikutnya yang berisi tentang pengaturan pengelolaan harta kerajaan Siak Sri Inderapura.

Surat wakaf. Surat wasiat yang dibuat oleh Sultan Syarif Hasyim di penghujung hayatnya kepada keturunannya yang menjabat sebagai sultan tentang ketentuan pengelolaan harta kerajaan Siak Sri Inderapura.

Titah. Perintah raja kepada semua anak-anaknya, pembantunya dan rakyatnya.

Uncang. Harta atau bekal (pengganti uang pada saat itu) dalam bentuk emas.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Gambar Istana Sisi Depan Jalan Masuk

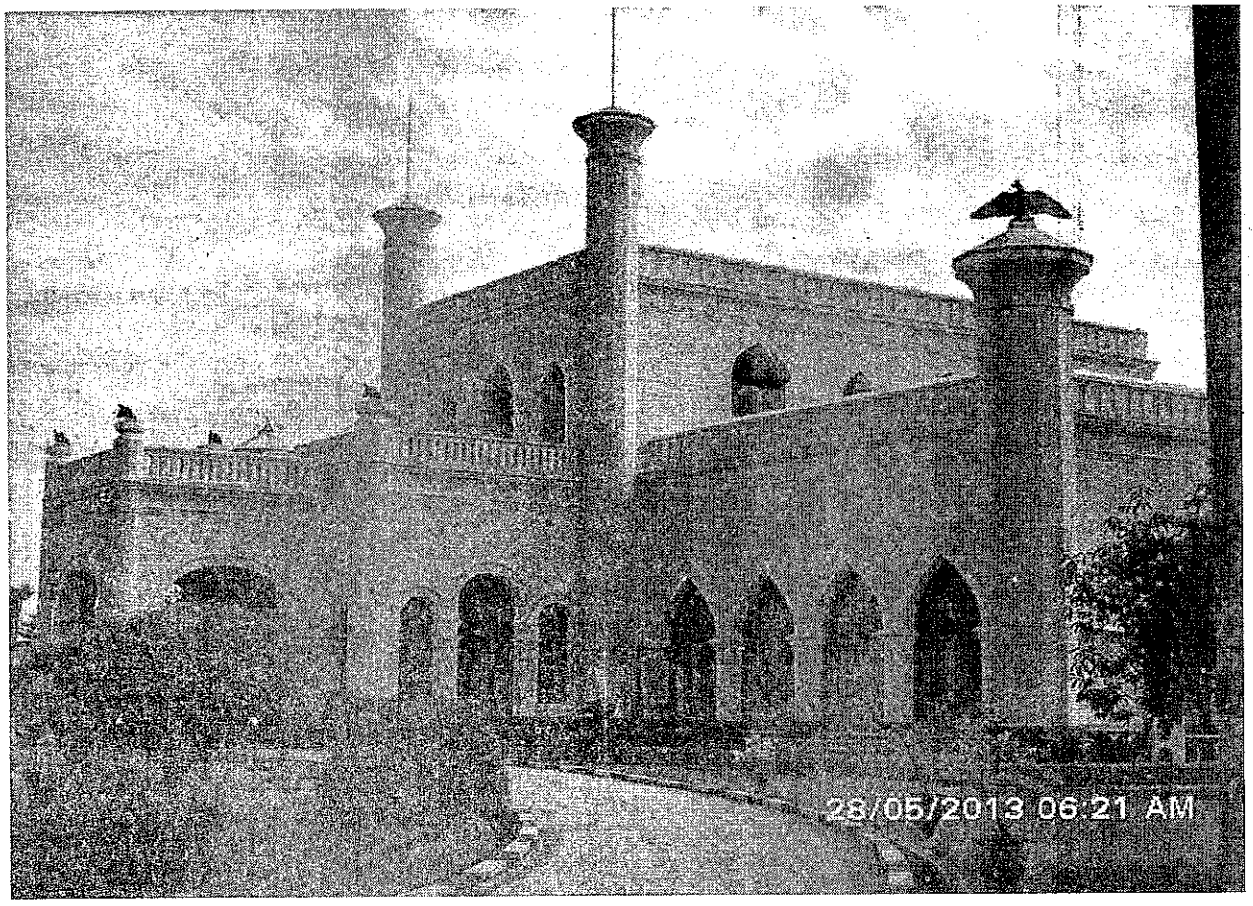

Istana Asserayah Hasyimiah adalah tempat kediaman pemangku Raja Siak Sri Inderapura. Istana ini dibangun pada masa Sultan Syarif Hasyim (Raja ke 11) selama 9 tahun dari tahun 1890 M sampai dengan tahun 1899 M. Istana Asserayah Hasymiah oleh Bangsa Eropa diberi nama *The Sun Palace From East* (Istana matahari timur). Istana ini diarsiteki oleh Van De Worde seorang insinyur berkebangsaan Prancis. Disain bangunannya merupakan gabungan dari arsitektur Eropa, India dan Timur Tengah. Istana ini masih berbentuk asli seperti pertama kali dibangun dan tidak ada perubahan bangunan secara fisik sampai saat ini.

Lampiran 10
Mata Uang *Dai Nippon Teikoku Seihu*

Gambar Mata Uang Pemerintah *Dai Nippon Teikoku Seihu* dengan satuan Rupiah dan menggunakan Bahasa Jepang emisi 1943.

Lampiran 11
Mata Uang Pemerintah *DAI NIPPON*

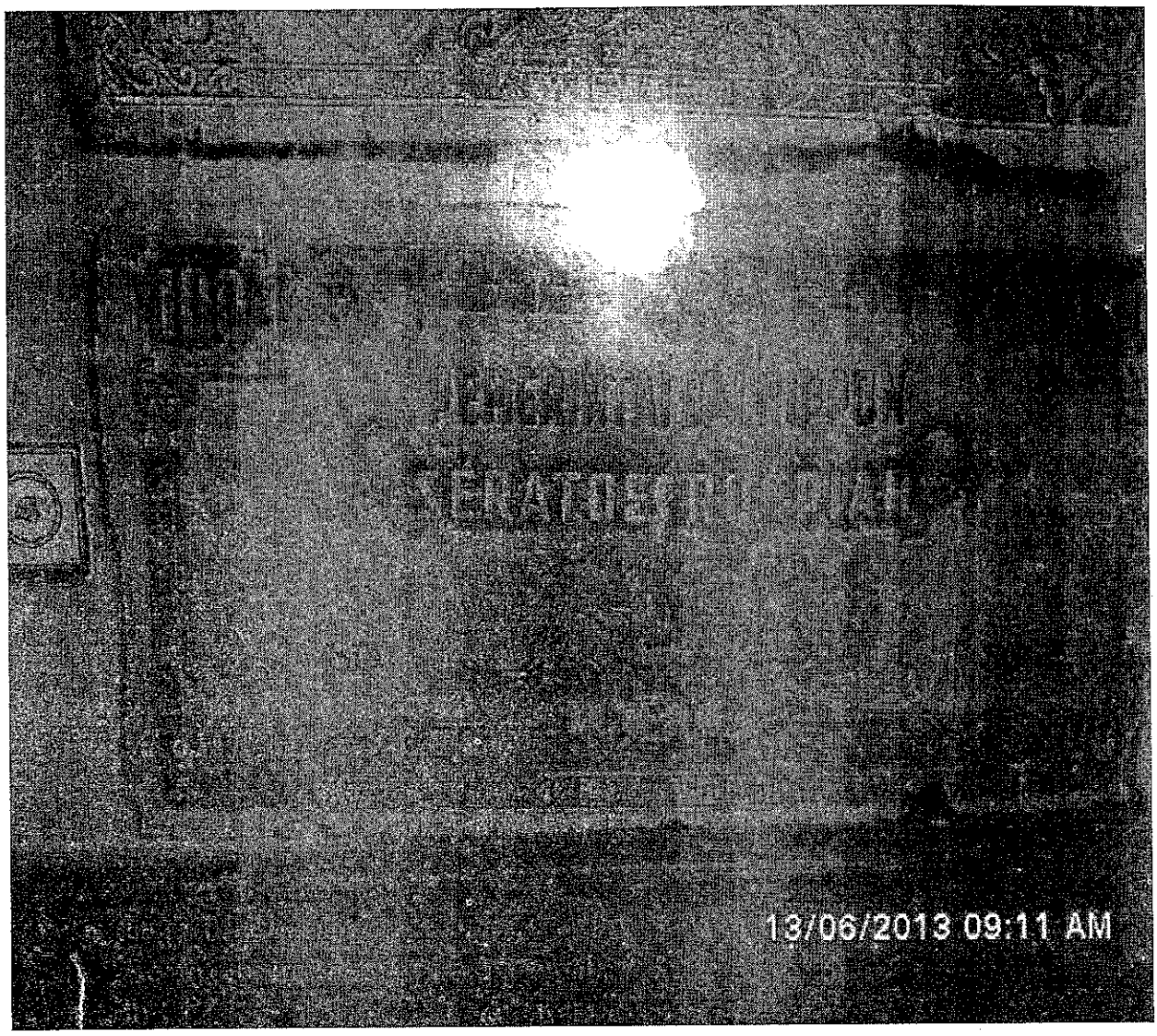

Gambar Mata Uang Pemerintah *Dai Nippon* dengan satuan Rupiah dan menggunakan Bahasa Indonesia emisi 1943.

Lampiran 2
Gambar Istana Sisi Kiri

Bangunan Istana Asserayah Hasyimiah tampak kiri. Bangunan ini bernuansakan Islami, terutama dilihat dari arsitektur jendela. *View* pandangan keluar dari dalam istana adalah halaman kiri istana yang terlihat sangat asri oleh berbagai tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga yang khas tumbuh di halaman istana.

Lampiran 3
Catatan Pembagian Keuangan Daerah

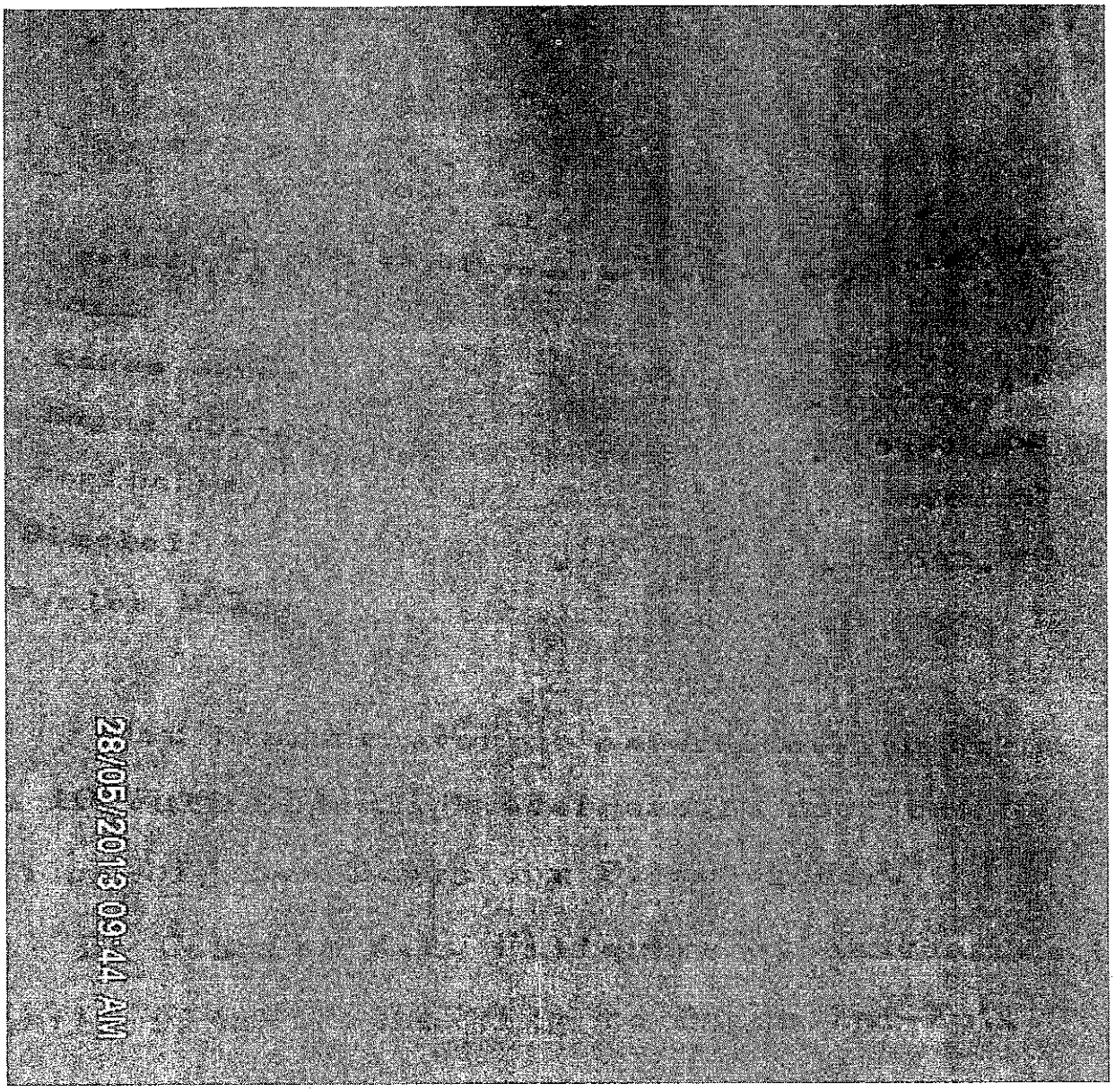

Gambar naskah berupa catatan pembagian keuangan dari Pemerintah Kolonial untuk masing-masing daerah yang tertera dalam naskah tersebut. Naskah ini telah berumur lebih kurang 100 tahun yang secara fisik sudah tidak bisa digandakan karena sudah sangat tidak memungkinkan. Naskah ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kolonial yang mengambil alih seluruh aktivitas perekonomian dan menjanjikan bantuan kepada Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Lampiran 4
Mahkota Kerajaan Siak

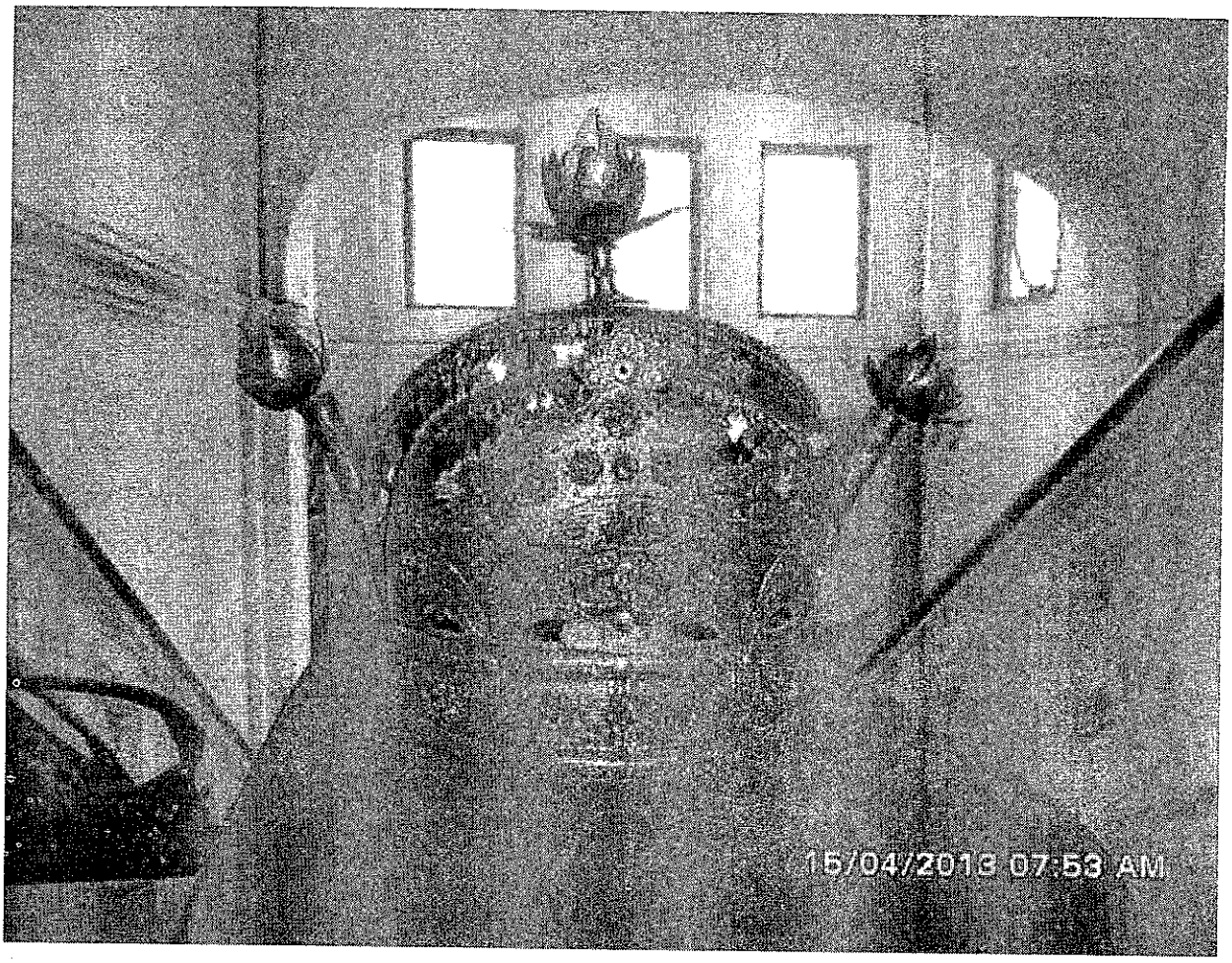

Mahkota Kerajaan Siak dibuat oleh Sultan Syarif Kasim I ketika beliau menjadi Sultan Siak ke 10. Mahkota Kerajaan Siak terbuat dari emas murni bertaburkan permata, intan, berlian dan permata-permata lainnya seperti batu zamrud dan batu delima. Mahkota emas ini dihiasi tiga bunga teratai mekar bertaburkan batu merah delima dan intan serta dihiasi pula dengan sulur-sulur benang emas. Daun-daun emas kecil dikaitkan dengan cincin menggantung di keempat lengkungan Mahkota. Mahkota Siak di samping menjadi lambang kerajaan juga memberikan makna kejayaan dan kebesaran dari Kerajaan Siak Sri Inderapura. Tulisan Arab di tengah dibaca *Badra Tajjalli* yang berarti Tuhan Yang Agung. Tidak diketahui persis tahun berapa Mahkota dibuat. Namun umur Mahkota sudah mencapai 124 tahun jika dihitung sejak wafatnya beliau tahun 1889 sd 2013. Saat ini Mahkota Raja Siak berada di lemari kaca Gedung A, Ruang Emas Etnograpi Museum Nasional Jakarta. Gelar wafat beliau sesuai dengan Mahkota yang dibuatnya yakni Marhum Mahkota.

Lampiran 5
Bros Sultan Syarif Kasim

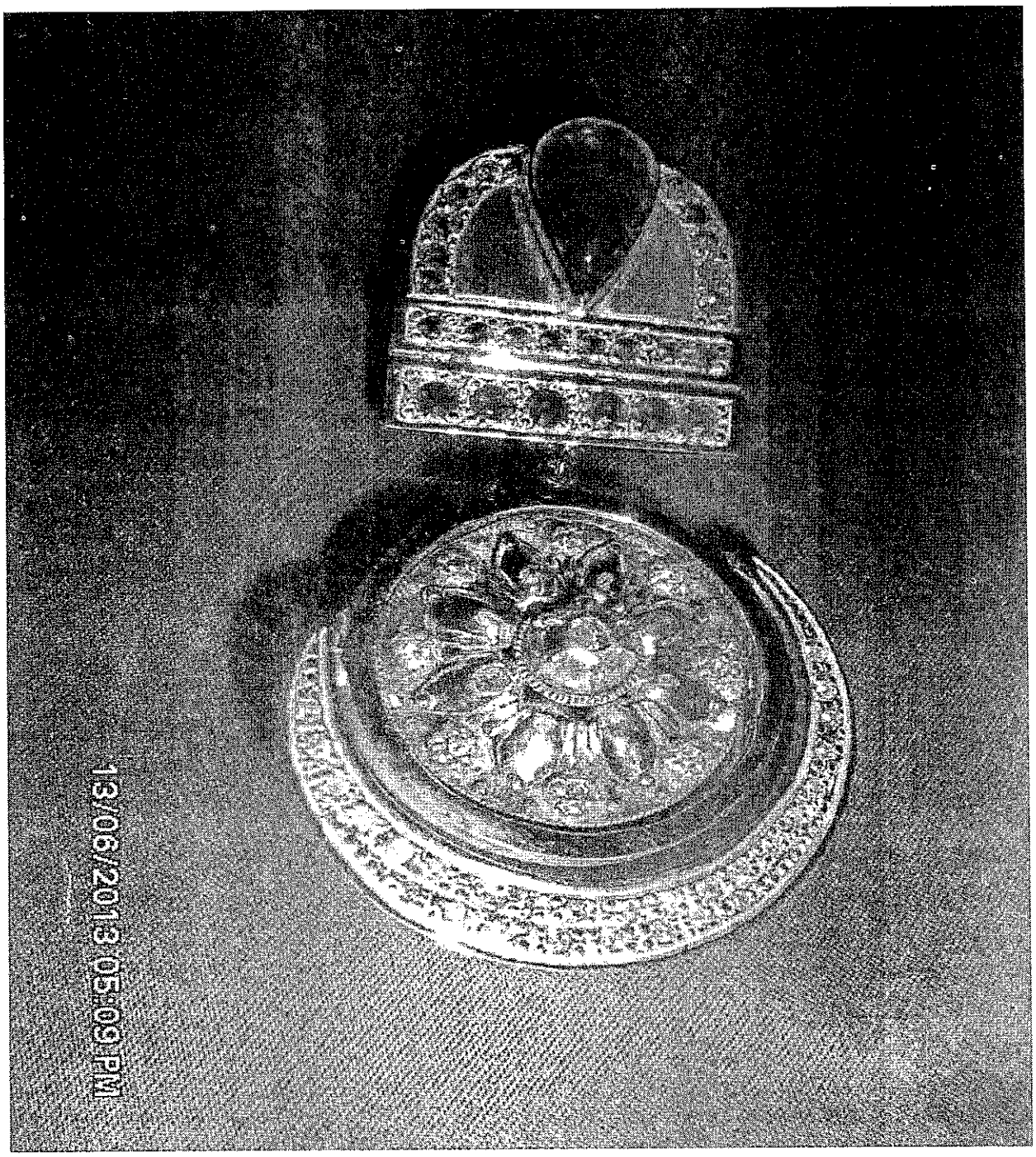

Gambar Bros yang selalu digunakan oleh Sultan pada saat menggunakan baju kebesaran. Bros terbuat dari hiasan berupa berlian Delima dan Intan dipadu dengan lapisan emas.

Lampiran 6
Mata Uang Burung

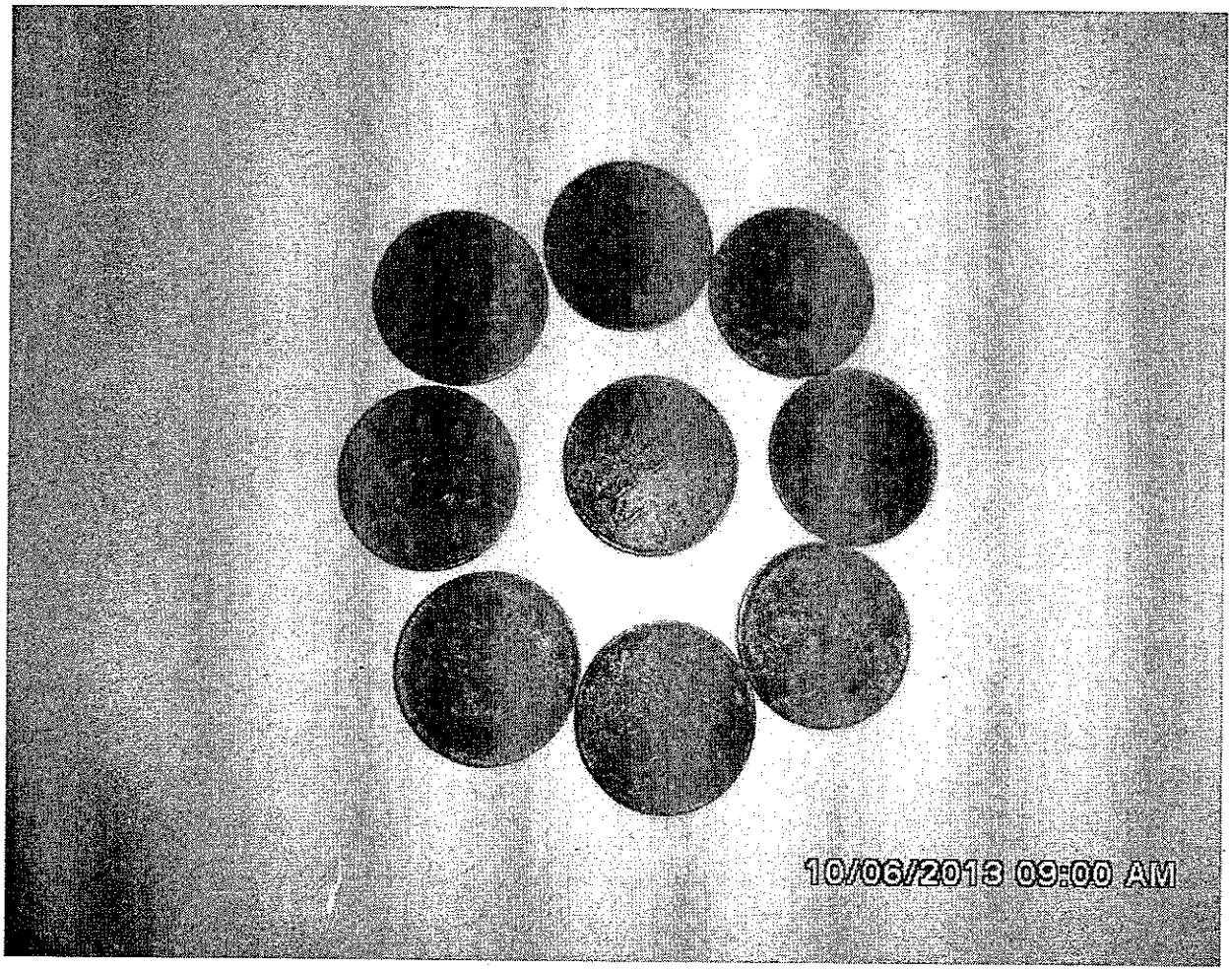

Gambar Mata Uang Burung merupakan salah satu mata uang yang berlaku pada masa Sultan Syarif Kasim II di samping tiga mata uang lainnya.

Lampiran 7
Kursi Singgasana Sultan Siak

Gambar Kursi Singgasana Raja Kerajaan Siak Sri Inderapura. Kursi ini merupakan replikasi dari kursi aslinya yang telah mengalami perbaikan sebagai akibat dari pencurian sekitar tahun 1970an. Kursi Singgasana ini digunakan oleh Sultan Syarif Kasim II pada saat menerima tamu kerajaan. Kursi terbuat dari lapisan emas di sebagian sisi dan kadar lapis emas terbanyak pada bagian atas sandaran kursi. Bagian sandaran kursi inilah yang merupakan replikasi dari aslinya yang telah hilang.

Lampiran 8
Kapal Sakato

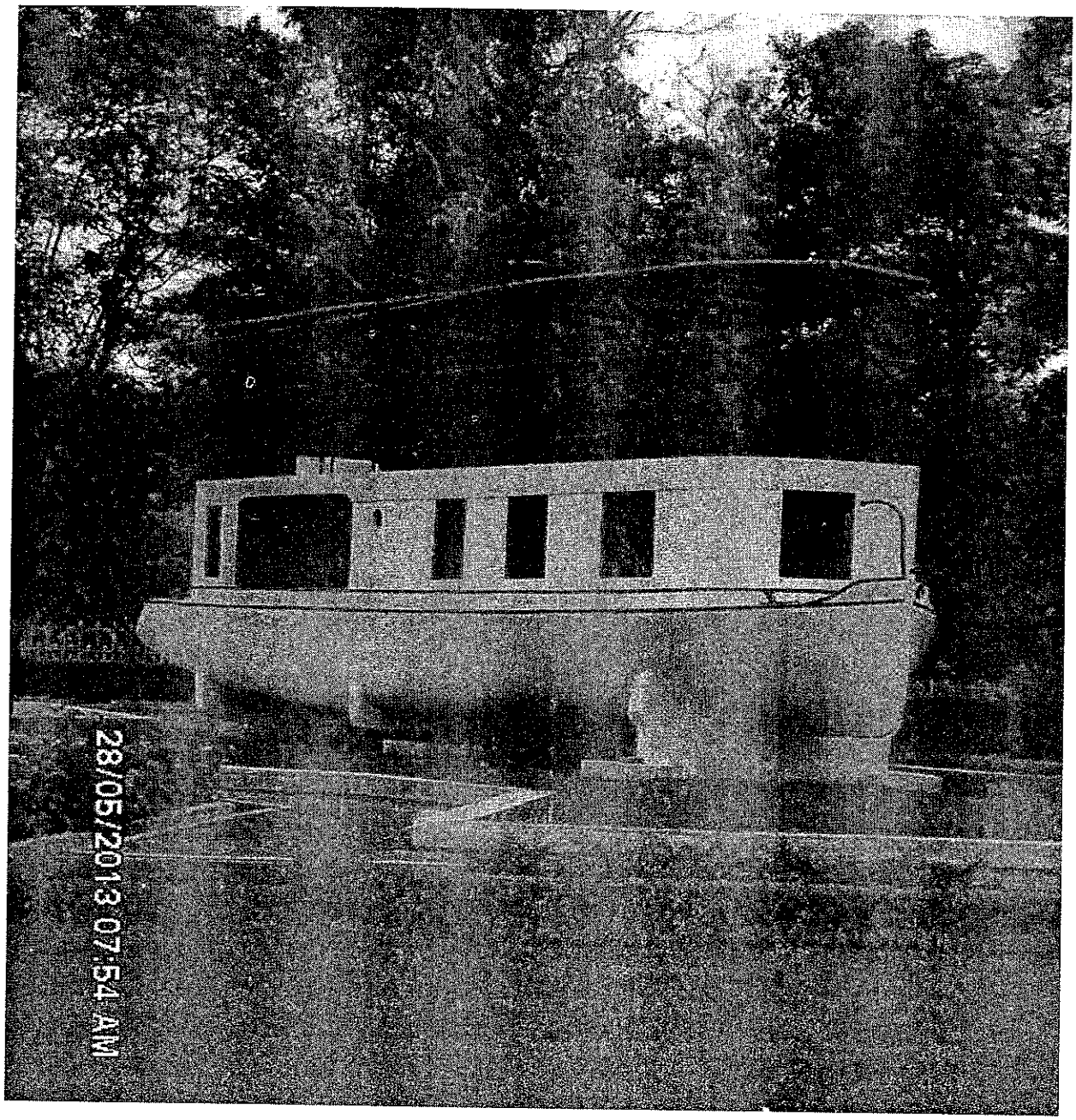

Gambar Kapal Sakato yang sering digunakan oleh Sultan Syarif kasim II untuk mengunjungi wilayah kerajaan dalam menjalankan tugasnya. Kapal ini merupakan peninggalan Belanda yang ditemukan secara tidak sengaja di perairan Wilayah Siak Sri Inderapura.

Lampiran 9
Mata Uang *De Japansche Regeering Betaalt Aan Toongder Vijf Gulden*

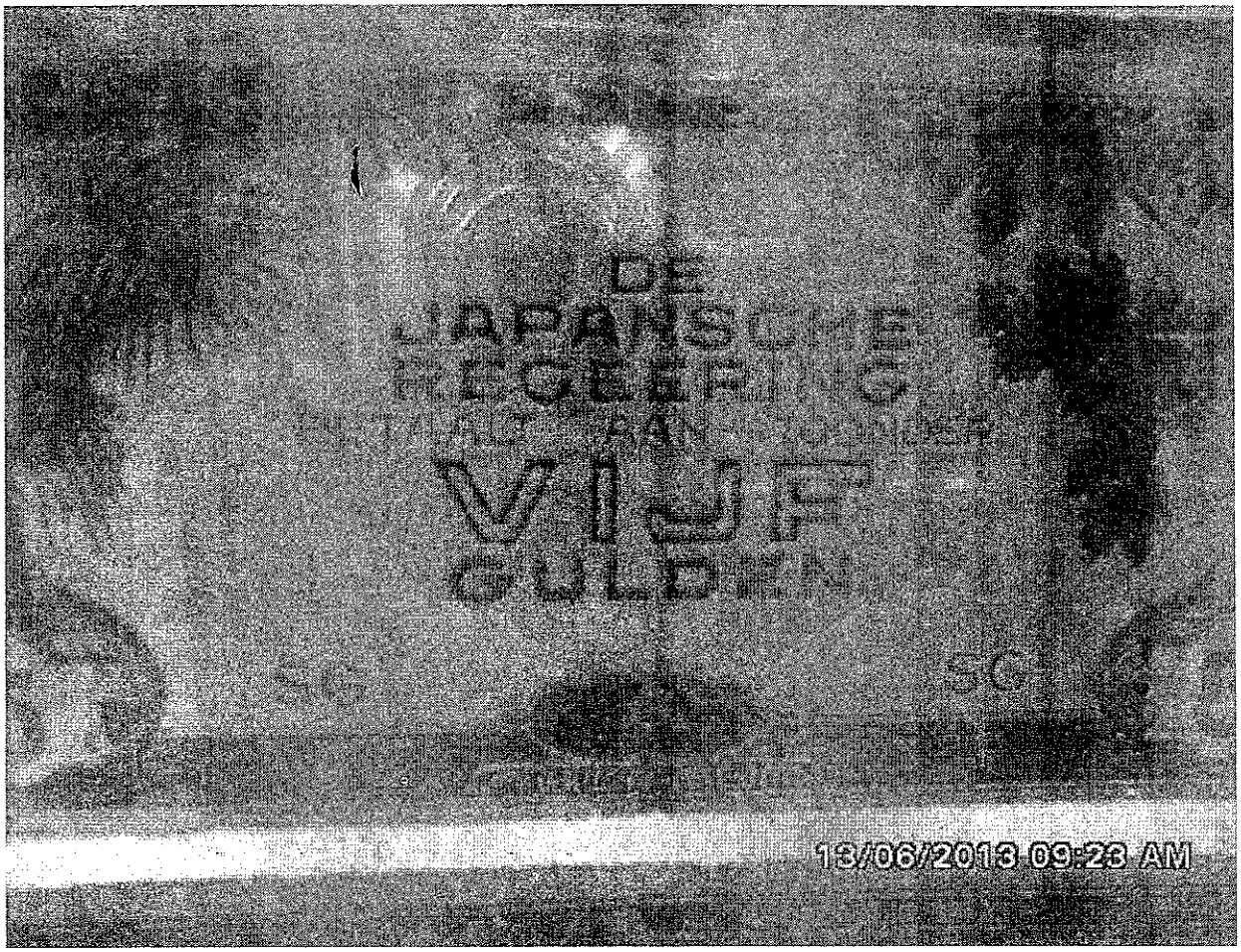

Gambar mata uang *De Japansche Regeering Betaalt Aan Toongder Vijf Gulden* dengan satuan Gulden dan menggunakan bahasa Belanda emisi 1942.

Lampiran 10
Mata Uang *Dai Nippon Teikoku Seihu*

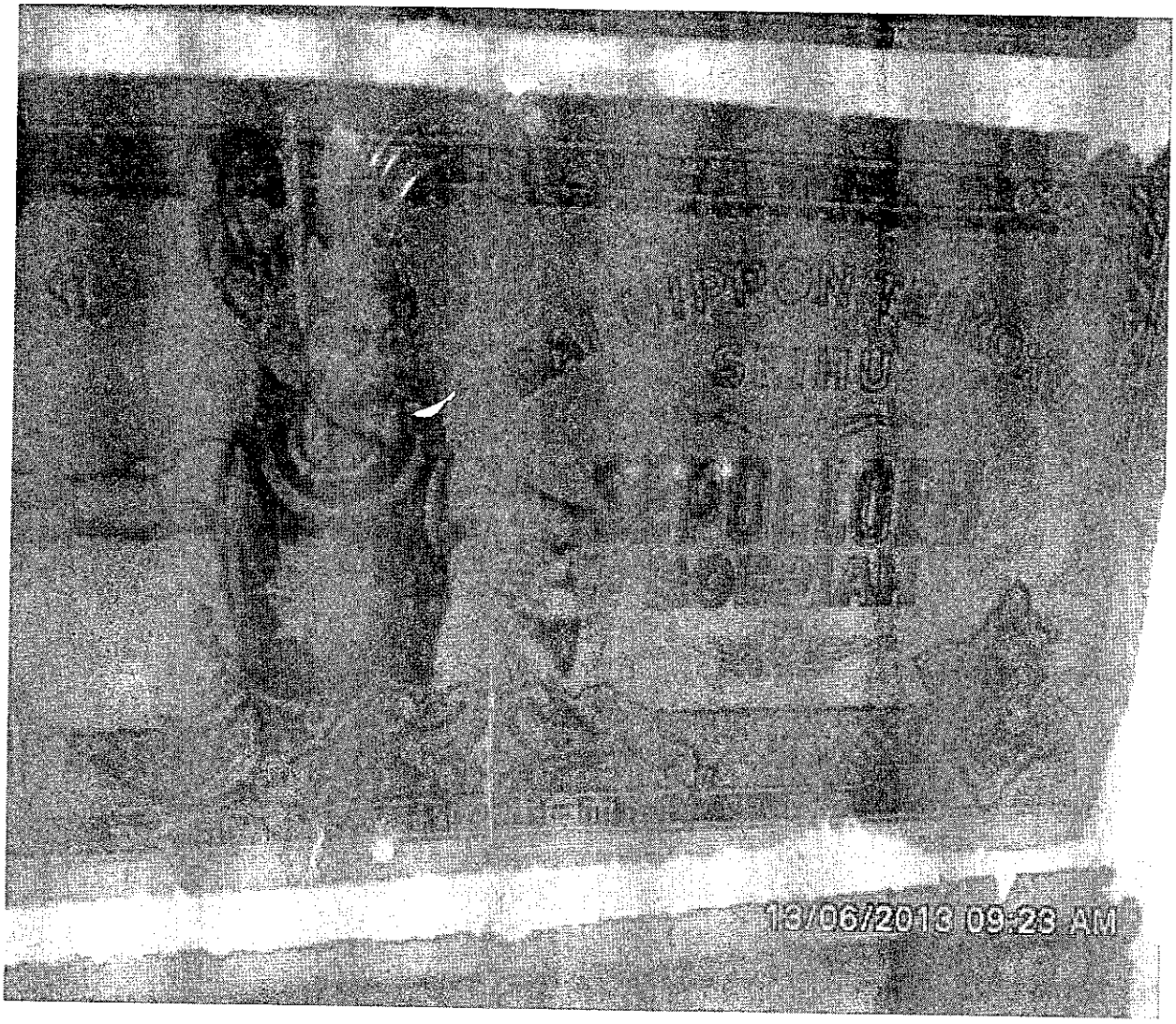

Gambar Mata Uang Pemerintah *Dai Nippon Teikoku Seihu* dengan satuan Rupiah dan menggunakan Bahasa Jepang emisi 1943.

Lampiran 11
Mata Uang Pemerintah *DAI NIPPON*

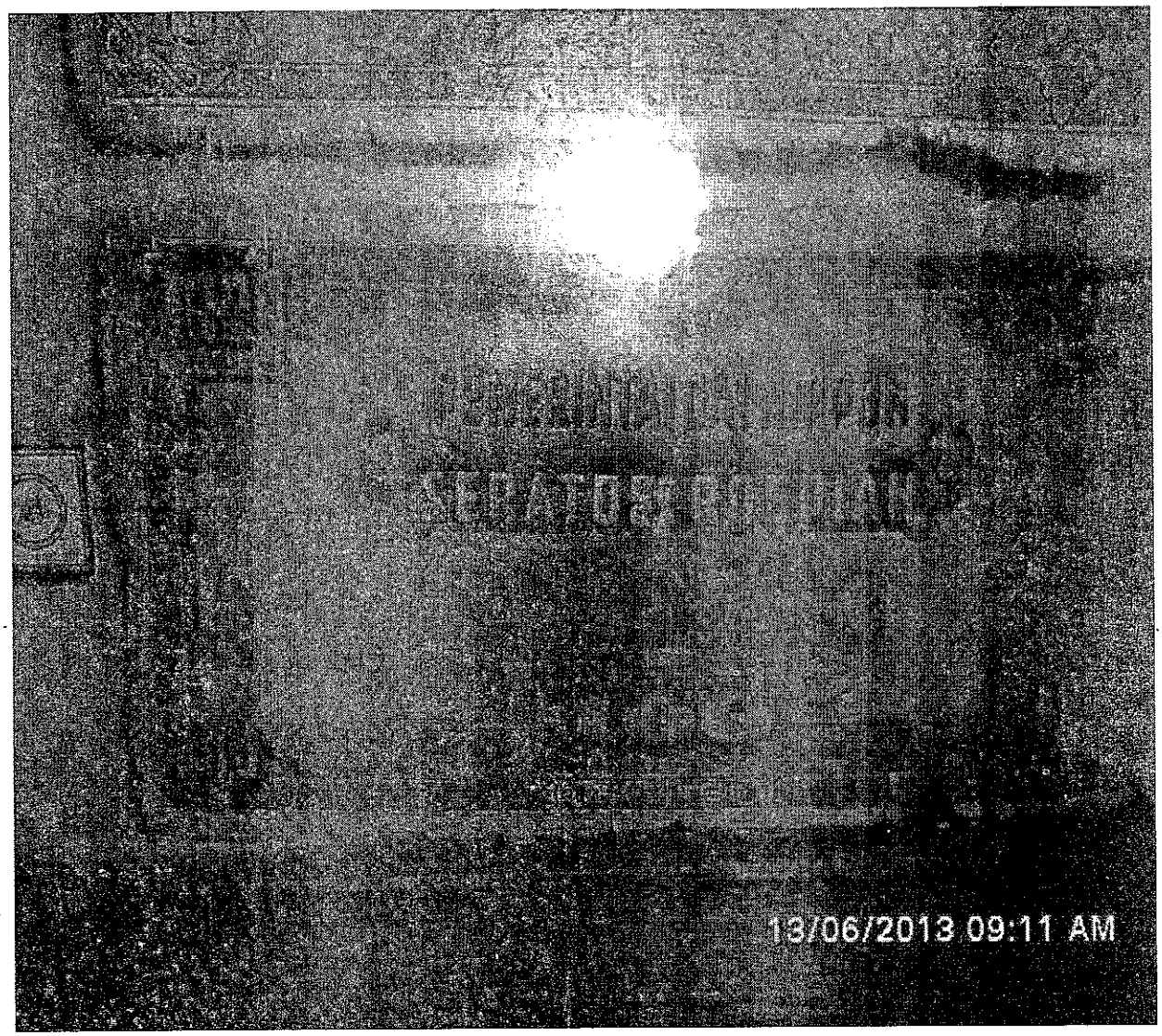

Gambar Mata Uang Pemerintah *Dai Nippon* dengan satuan Rupiah dan menggunakan Bahasa Indonesia emisi 1943.

TENTANG PENULIS

Hadri Mulya, dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 1965, adalah anak ke delapan dari pasangan Dahliar Dahlan dan Maharni. Jenjang pendidikan dimulai dari memperoleh Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi pada fakultas ekonomi universitas Islam Riau, Pekanbaru Tahun 1985-1990. Kemudian melanjutkan studi strata dua pada program Magister Sains jurusan ilmu akuntansi pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1991–1994. Terakhir mengikuti program Doktor Ilmu akuntansi pada Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang 2011-2014. Selama menempuh program sarjana strata satu, beliau mendapat beasiswa supersemar untuk penyelesaian studinya. Kemudian mendapat pembiayaan penuh untuk program magister akuntansi dari *word bank* melalui program PPAK Universitas Gadjah Mada. Penyelesaian studi program Doktor, dibiayai secara penuh oleh lembaga ditempat beliau mengabdi sampai saat ini yakni Universitas Mercu Buana Jakarta.

Pengalaman Kerja di bidang pendidikan, dimulai dari tempat almamaternya sebagai Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dari tahun 1991 s/d 1995. Selama mengabdi di almamaternya, beliau pernah aktif sebagai peneliti pada fakultas ekonomi Universitas Islam Riau. Beliau juga ikut mengembangkan unit koperasi mahasiswa sebagai pembina Koperasi mahasiswa Universitas Islam Riau tahun 1994 s/d 1995. Beliau juga pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III fakultas

ekonomi Universitas Islam Riau dari tahun 1994 s/d 1995. Sejak tahun 1996, beliau eksodus ke Jakarta sebagai Dosen tetap fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta tahun 1996 s/d sekarang. Pengalaman jabatan struktural di universitas Mercu Buana Jakarta di mulai sebagai Ketua jurusan akuntansi pada tahun 1997 s/d 2002. Kemudian menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta dari tahun 2002 s/d 2008 dan dilanjutkan sebagai Direktur Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana, pada tahun 2009 -2010. Terakhir beliau menjabat sebagai Wakil Direktur bidang akademik, inovasi dan kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta, tahun 2014 – sekarang.

Pengalaman kerja di bidang non pendidikan juga dijalankan beliau disamping menjadi dosen sebagai kegiatan utamanya. Pengalaman di bidang non pendidikan dijakankannya sebagai auditor pada kantor akuntan publik Drs. S. Sinuraya cabang Pekanbaru dari tahun 1990 s/d 1991. Kemudian beliau juga pernah sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Syahelmi perwakilan Pekanbaru 1995-1996. Beliau juga pernah sebagai Internal auditor pada PT. Sawunggaling Madya Mandiri, Pekanbaru 1994 s/d 1996. Disamping memiliki pengalaman di bidang non pendidikan, beliau juga aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti Mengikuti pelatihan ISO 9001:2000 yang diselenggarakan oleh POLMAN Bandung. Mengikuti pelatihan Assessor BAN-PT yang diselenggarakan oleh BAN-PT, APTISI, & EMBRIO. Beliau juga pernah Mengikuti pelatihan sustanaibility reporting dan pemegang sertifikat *Certified sustanaibility reporting Spesialist* (CSRS).

Eko Ganis Sukoharsono, adalah salah satu pakar akuntansi di Indonesia yang banyak memberikan perhatian pada riset-riset akuntansi sejarah untuk menggali khasanah nilai-nilai akuntansi yang sangat kaya di Indonesia. Beliau meyakini bahwa banyak nilai-nilai dan praktek ilmu pengetahuan yang dapat di eksplor di Indonesia termasuk ilmu akuntansi. Dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 03 Desember 1964 dan berkomitmen untuk memilih karir Dosen sebagai profesi utamanya. Pendidikan Doktor diraihnya pada University of Wollongong, Australia, pada tahun 1995 dengan judul disertasi "*A Power and Knowledge Analysis of Accounting Thought*". Sebelumnya beliau meraih gelar Honours Master of Commerce in Accountancy, MCom (Hons) pada tahun 1992 pada universitas yang sama dengan judul tesis "*A Study of the Relationships between Individual Psychological Differences of Indonesian Accountants, Professional Job Behaviour and Financial Reporting Alternatives: An Empirical Investigation*". Beliau juga meraih gelar Master of Commerce in Accountancy – Mcom dari universitas yang sama pada tahun 1991 dengan thesis *The Contribution of Psychological and Behavioural Literature to the Design of Management Information System.* Terakhir karir beliau sebagai dosen disempurnakan dengan meraih jenjang kepangkatan tertinggi guru besar pada fakultas ekonomi universitas brawijaya, malang.

Pengalaman jabatan beliau yang berkaitan dengan pemeliharaan mutu, dipegangnya mulai menjadi Ketua Gugus Jaminan Mutu (*Quality Assurance*), pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. Beliau juga berprofesi sebagai Asesor Internasional ABEST 21, yang berkedudukan di Tokyo, Japan. Di Indonesia, beliau adalah salah satu Assessor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Jakarta. Sedangkan jabatan yang dipegangnya berkaitan dengan publikasi ilmiah diantaranya menjadi Reviewer, Monevin Implementasi PHK, Universitas Brawijaya. Beliau juga sebagai Editor in Chief, The International Journal of Accounting and Business Society. Beliau juga menjabat sebagai *Director, Research Centre for Business, Social, and Environmental Sustainability*, Universitas Brawijaya. Dalam keseharian, beliau sangat intens berkomunikasi dengan berbagai pihak terutama yang menyangkut dengan keilmuan dan beliau memberikan ruang untuk berkomunikasi melalui alamat e-mail: ekoganis@yahoo.com Atau di alamat eg.sukoharsono@ub.ac.id

Ali Djamhuri adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Kualifikasi pendidikan yang diraihnya mulai dari program strata satu pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan studi untuk mendapatkan gelar *Master of Commerce* (MCom) *in Accounting*, dari Department of Accountancy, Wollongong University, New South Wales, Australia. Terakhir gelar *Philosophi Doctor* (Ph.D) in Accounting diraihnya dari School of Management, Universiti Sains Malaysia. Jabatan beliau saat ini yang masih berjalan adalah ketua program studi magister ilmu akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang. Beliau secara terbuka untuk bersedia berkomunikasi dan berinteraksi dalam bidang keilmuan melalui alamat Email: alidjam@gmail.com atau alidjam@ub.ac.id

Karya ilmiah yang telah dihasilkannya di bidang penelitian ilmu akuntansi diantaranya adalah pada tahun 2015: The Role of Management Accounting in Organizational Change: The Case of Hospitals in the Era of the National Health Insurance System, a Research and Community Service, yang didanai oleh Fakultas Economi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dengan anggota Mirna Amirya. Sebelumnya pada tahun 2014 menulis karya ilmiah yang berjudul: *Case Study on Preparation of the Standard of Expenditure Analysis for Regency/City Government and the Accompanying Analysis of Behavioral Problems, a Research and Community Service* yang juga didanai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Members bersama anggota Rosidi, KomarudinAchmad, dan MirnaAmirya. Pada tahun sebelumnya yakni tahun 2010 juga menulis tentang *A Case of Indonesian Local Government Accounting Reform at Local Authority level New Institutionalist Pcrspective* (Doctoral Thesis) – School of Management, Universiti Sains Malaysia. Masih banyak karya ilmiah yang telah dihasilkannya baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal internasional lainnya.

Zaki Baridwan, adalah Dosen Akuntansi yang mengajar di berbagai strata pendidikan mulai dari strata 1, Strata 2 dan Strata 3 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Beliau lahir di Banyuwangi pada tahun 1966, menyelesaikan Pendidikan S1 dari almamaternya Universitas Brawijaya untuk bidang akuntansi pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan studi S2 ilmu akuntansi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001 dan terakhir meraih gelar Doktor akuntansi dari tempatnya mengabdi yakni Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2012. Pengalaman pendidikan lainnya beliau peroleh dengan mengikuti Pendidikan Akuntansi di Cleveland State University USA dan Skills for University Teaching Program di Flinders University, Adelaide, Australia.

Beberapa buku dan hasil penelitian dalam bidang akuntansi yang dilakukan telah diterbitkan di beberapa penerbit, jurnal nasional maupun internasional. Pengalaman jabatan yang dipegangnya adalah sebagai Ketua Pojok Bursa Efek Indonesia, Ketua laboratorium akuntansi dan Ketua SPI FEB UB. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Beberapa pengalaman praktisi yang dilakukannya sebagai akuntan adalah auditor di salah satu Kantor Akuntan Publik. Beliau juga sebagai manajer keuangan pada salah satu perusahaan dan juga sebagai general manager di salah satu perusahaan. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai dewan pengawas BUMD di suatu daerah, dan sebagai konsultan akuntansi Pemerintahan Daerah, serta sebagai partner konsultan sistem informasi. Komunikasi dengan beliau dapat dilakukan dengan berinteraksi melalui alamat email: zakibarid1@yahoo.com